DR. ALI ANWAR, M. AG.

PEMBARUAN PENDIDIKAN DI PESANTREN LIRBOYO KEDIRI

IAIT PRESS

PUSTAKA PELAJAR

PEMBARUAN PENDIDIKAN DI PESANTREN

LIRBOYO

KEDIRI

DR. ALI ANWAR, M. AG.

PEMBARUAN PENDIDIKAN DI PESANTREN LIRBOYO KEDIRI

PUSTAKA PELAJAR

KATA PENGANTAR

Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah edisi kedua dari buku saya yang semula merupakan disertasi saya yang saya pertahankan pada tanggal 03 Mei 2008 di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada pembaca yang telah berkenan memanfaatkan buku saya edisi pertama yang memungkinkan buku ini dicetak untuk edisi yang kedua.

Sebagaimana pada edisi pertama, pada penerbitan edisi kedua ini saya juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Prof. Dr. Abuddin Nata, MA. dan Prof. Dr. Suwito, MA., Guru Besar Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah berkenan membaca dan mengoreksi draft awal dari buku ini, bahkan berkenan menjadi partner diskusi sehingga fokus penelitian menjadi semakin tajam dan pemetaan data pada tema-tema menjadi lebih tertata. Penghargaan yang sama juga saya sampaikan kepada Prof. Fauzan Saleh, MA., Ph. D., Guru Besar STAIN Kediri dan Prof. Ratno Lukito, MA., Ph. D., Guru Besar Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta yang berkenan membaca dan memberikan kritikan dari draft awal buku ini sehingga mempermudah saya untuk memvalidasi data.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada KH. Imam Yahya Mahrus, Pengasuh Pesantren Lirboyo Kediri dan Rektor IAIT Kediri yang sering menunjukkan jalan keluar terhadap berbagai kesulitan yang saya hadapi. Kyai Imam juga telah banyak memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengekplorasi berbagai potensi yang penulis miliki.

Penghargaan yang sama juga penulis sampaikan kepada mahasiswa Program Pascasarjana Insitut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri dan mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAIN Kediri yang selama ini telah menjadi partner diskusi dalam mata kuliah Sejarah Sosial Pendidikan

Islam sehingga penulis dapat senantiasa memperdalam kajian-kajian tentang berbagai lembaga pendidikan Islam termasuk di dalamnya pesantren.

Tanpa pengertian istri tercinta, Aini Maskurun, dan ketiga anak-anak tersayang, Muhammad Medina Almas Ali, Nayl al-Falāhi, dan Muhammad Fā'iq Ashfa, buku ini hampir tidak mungkin terselesaikan. Oleh karena itu, buku ini kupersembahkan buah segenap keluarga penulis, semoga hal ini menjadikan Allah memudahkan penulis sekeluarga untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat. Tidak hanya itu, semoga kehadliran buku ini merupakan bukti syukur penulis sekeluarga kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan.

Dengan senang hati penulis akan menerima saran untuk perbaikan dan kritik jika ada kesalahan. Semoga buku ini bermanfa`at dan kepada semua pihak yang memungkinkan buku ini terselesaikan diberikan pahala oleh Allah yang berlipat ganda dan hidup dan kehidupannya ke depan menjadi lebih barokah dan manfaat, amīn.

Kediri, 01 Desember 2010.

Ali Anwar

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR PETA, DENAH, DAN BAGAN

DAFTAR LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke Latin yang digunakan dalam buku ini mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1986 dan Nomor: 0543 b/u/1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab-Latin tertanggal 10 September 1987.

A. *Konsonan*

ARAB		LATIN	ARAB		LATIN
ا	=	Tidak dilambangkan	ط	=	ṭ
ب	=	b	ظ	=	ẓ
ت	=	t	ع	=	`
ث	=	ṡ	غ	=	g
ج	=	j	ف	=	f
ح	=	ḥ	ق	=	q
خ	=	kh	ك	=	k
د	=	d	ل	=	l
ذ	=	ż	م	=	m
ر	=	r	ن	=	n
ز	=	z	و	=	w
س	=	s	ه	=	h
ش	=	sy	ء	=	‘
ص	=	ṣ	ي	=	y
ض	=	ḍ			

B. *Vokal*

1. Vokal tunggal (*monoftong*)

َ	a
ِ	i
ُ	u

2. Vokal rangkap (*diftong*)

ئَيْ	ai
ئَوْ	au

3. Vokal panjang (*madd*)

ئَا	ā
ئِيْ	ī
ئُوْ	ū

C. *Tā' Marbūṭah*

1. Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat ḥarkat fatḥah, kasrah, ḍammah, transliterasinya adalah "t".
2. Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarkat sukun, transliterasinya adalah "h".

D. *Syaddah*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda "ّ" dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. *Kata Sandang* ال

Transliterasi kata sandang الْ dibedakan antara yang diikuti huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Transliterasi kata sandang ال yang diikuti oleh huruf syamsiah adalah sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "لْ" diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Transliterasi kata sandang ال yang diikuti oleh huruf qamariah adalah sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf "لْ" diganti dengan huruf "l".

BAB I
PENDAHULUAN

Dewasa ini, setidaknya dikenal tiga lembaga pendidikan yang cukup eksis di Indonesia yaitu sekolah, madrasah, dan pesantren. Padahal, sebelum diadakan pembaruan sistem pendidikan, baik yang diperkenalkan oleh kolonial Belanda maupun kaum modernis, dikenal beberapa lembaga pendidikan tradisional Islam di berbagai daerah di Nusantara ini seperti pesantren[1] di Jawa, surau di Minangkabau, dan dayah di Aceh. Di antara beberapa lembaga pendidikan tradisional itu, hanya pesantrenlah yang paling mampu bertahan sampai sekarang.

Seperti digambarkan Steenbrink, ketika diperkenalkan lembaga pendidikan yang lebih teratur dan modern, lembaga pendidikan tradisional, surau misalnya, ternyata tidak begitu laku dan banyak ditinggalkan siswanya.[2] Bahkan surau sekarang hampir punah, dan ketika

---

[1]Dunia pesantren, menurut Azyumardi Azra, adalah dunia tradisional Islam, yakni dunia yang mewarisi dan memelihara kontinuitas tradisi Islam yang dikembangkan ulama dari masa ke masa, tidak terbatas pada periode tertentu dalam sejarah Islam. Pengertian ini berbeda dengan pengertian salaf dalam konteks kaum Salafi, di mana definisi kaum salafi adalah mereka yang memegang paham tentang Islam pada masa awal, yaitu periode sahabat dan tadi`in besar, yang belum dipengaruhi bid'ah dan khurafat. Karena itulah kaum Salafi di Indonesia sering menjadikan pesantren dan dunia Islam tradisional lainnya sebagai sasaran kritik keras mereka; setidaknya karena keterkaitan lingkungan pesantren atau kyai dengan tasawuf atau tarekat. Baca Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru,* Jakarta: Logos, 2002, 107.

[2] Dalam sebuah rapat yang diadakan pada tanggal 5 Mei 1928, ulama tradisional salah satunya mengambil kesepakatan untuk mengambil beberapa unsur pendidikan klasikal untuk memperbaiki sistem surau yang mulai ditinggalkan siswa untuk pindah ke pendidikan gubernemen, Madrasah Diniyah atau Sumatera Thawalib. Untuk elaborasi baca Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen,* Jakarta: LP3ES,

didirikan lembaga pendidikan tradisional Islam di sana, kebanyakan tidak lagi menggunakan nama surau tetapi menamakannya pesantren.[3]

Terpinggirkannya lembaga pendidikan tradisional Islam ketika berhadapan dengan lembaga pendidikan modern yang lebih teratur ternyata tidak hanya terjadi di Nusantara. Menurut Azra, kepunahan atau minimal terpinggirkannya berbagai lembaga pendidikan tradisional Islam juga terjadi di berbagai wilayah.

Medrese sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam di Turki ternyata terkorbankan ketika pemerintah melaksanakan pembaruan pendidikan. Dalam rangka memenuhi kepentingan reformasi militer dan birokrasi, pemerintah Turki Utsmani membentuk sekolah-sekolah baru sesuai dengan sistem pendidikan Eropa. Sejarah tragis *medrese* terjadi tahun 1924 ketika Mustafa Kemal Ataturk menghapuskan sistem *medrese* dengan menggantinya menjadi sekolah umum.[4]

Keadaan yang tidak jauh berbeda terjadi di Mesir. Modernisasi sistem dan kelembagaan pendidikan di Mesir dimulai oleh Muḥammad Ali Pasha. Pada tahun 1833 ia membentuk sekolah umum yang berdampingan dengan madrasah. Pada tahun 1868, Khedive Ismail mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan umum. Akhirnya, pemerintah Gamal Abdel Nasser menghapuskan sistem madrasah.[5]

1986, 63.

[3]Adopsi kelembagaan pesantren di Minangkabau mulai terjadi sejak 1970-an ketika modernisasi pesantren mendapatkan momentumnya, sementara surau sebagai lembaga pendidikan semakin terpinggirkan.Lihat Azyumardi Azra, *Surau Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi,* Jakarta: Logos, 2003, 149.

[4]Mustafa Kemal memproklamirkan Turki menjadi negara sekuler, sehingga berbagai simbol keagamaan ditiadakan termasuk madrasah. Berbagai lembaga pendidikan keagamaan itu mulai muncul kembali pada masa transisi kepada sistem politik multi partai pada tahun 1949 dan menemukan momentumnya pada akhir tahun 1970-an. Untuk elaborasi lebih jauh baca hasil penelitian Bahattin Aksit, "Islamic Education in Turkey: Medrese Reform in Late Ottoman Times and Imam-Hatip Schools in the Republic," dalam Richard Tapper, *Islam in Modern Turkey: Religion, Politics, and Literature in a Secular State,* London-New York: I. B. Tauris & Co. Ltd. Publisher, 1991, 146-147.

[5] Azyumardi Azra, "Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan, dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997, ix-xi.

Berdasarkan berbagai fakta di atas, Azra berkesimpulan bahwa sejak dilancarkan perubahan atau modernisasi pendidikan Islam di berbagai kawasan Dunia Muslim, tidak banyak lembaga pendidikan tradisional Islam yang mampu bertahan. Kebanyakannya lenyap setelah tergusur oleh ekspansi sistem pendidikan umum.[6]

Bertahannya institusi pesantren ketika berhadapan dengan lembaga pendidikan yang lebih teratur dan modern telah menarik beberapa pengamat untuk mengkaji. Azyumardi Azra menilai ketahanan pesantren disebabkan oleh kultur Jawa yang involutif dan menekankan harmoni, sehingga mampu menyerap kebudayaan luar tanpa kehilangan identitasnya.[7] Hasan Langgulung menduga bahwa ketahanan pesantren sebagai akibat dari pribadi kyai yang menonjol dengan ilmu dan visinya.[8] Sumartono dkk. menganggap karena melembaganya pesantren di dalam masyarakat.[9] Bagi Ma`shum, ketahanannya adalah akibat dampak positif dari kemampuannya melahirkan berbagai daya guna bagi masyarakat.[10] Aya Sofia dkk. menduga ketahanannya lantaran jiwa dan semangat kewiraswastaan.[11] Sementara Abdurrahman Wahid menyebut ketahanan pesantren disebabkan pola kehidupannya yang unik sebagai sub kultur.[12]

Geertz dalam hal ini berpendapat bahwa bertahannya pesantren ditentukan oleh kemampuannya mempertahankan identitasnya sebagai sistem pendidikan yang didominasi oleh kyai dan pada saat yang sama memperjelas perannya sebagai bentuk komplementer pendidikan nasional.[13] Kesimpulan Geertz ini disepakati oleh peneliti berikutnya

---

[6] Azra, "Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan, ix.

[7]Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*, 147.

[8]Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke-21,* Jakarta: Pustaka al-Husna, 1988, 75.

[9]Sumarsono Mestoko dkk., *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman,* Jakarta: Balai Pustaka, 1986, 232.

[10]Ma`shum, *Ajakan Suci,* Yogjakarta: LTN-NU-DIY, 1995, 108.

[11]Aya Sofia, *Pedoman Penyelenggaraan Pusat Informasi Pesantren,* Jakarta: Depag., 1986, 41.

[12]Dalam kajian sosiologi, sebuah sub kultur minimal harus memiliki keunikannya sendiri dalam aspek-aspek berikut: cara hidup yang dilakukan, pandangan hidup dan tata nilai yang diikuti, dan hirarki kekuasaan intern tersendiri yang ditaati sepenuhnya. Baca Abdurrahman Wahid, "Pesantren sebagai Subkultur," dalam M. Dawam Rahardjo (Ed.), *Pesantren dan Pembaruan,* Jakarta: LP3ES, 1995, 43.

[13]Clifford Geertz, "The Javanese Kijaji: the Changing Role of Cultural

seperti Taufik Abdullah[14] dan Ronald A. Lukens-Bull. [15] Senada dengan penyebab kelangsungan pesantren, Geertz juga berkesimpulan bahwa peran kyai akan tetap eksis sepanjang ia mendirikan madrasah yang memuaskan secara religius bagi penduduk desa dan sekolah yang berfungsi membantu pertumbuhan Indonesia Baru. Karena gagal melakukan hal itu, menurut Geertz, hari-hari di mana kyai yang merupakan kekuatan dominan di kalangan masyarakat desa Jawa telah mendekati akhir.[16] Kesimpulan tentang berakhirnya peran kyai dalam studi Geertz ternyata tidak terbukti sampai kini.

Diagnosis Geertz yang disepakati oleh Taufik Abdullah dan Ronald A. Lukens-Bull menimbulkan pertanyaan, pertama, kalau kedua sistem pendidikan, yaitu madrasah dan sekolah, dikembangkan secara bersama-sama, mana di antara keduanya yang lebih berkembang, dan kedua, bagaimana relasi kedua sistem pendidikan yang perlu dikembangkan sehingga menjadikan pesantren bertahan. Pertanyaan kedua ini perlu diajukan mengingat adanya fakta seperti jumlah santri Pesantren Tebuireng sebagai pioner pembaruan dan sudah memperkenalkan sistem madrasi pada tahun 1916 mengalami penurunan, sementara trend grafik santri Pesantren Lirboyo yang baru membuka madrasah sebagai bentuk komplementer pendidikan nasional pada tahun 1986 mengalami peningkatan dan kestabilan. Sebagai perbandingan, ketika tahun 1920-an sampai 1930-an, pesantren Tebuireng mempunyai santri sekitar 6.000 orang,[17] pada tahun 1995 hanya memiliki santri kurang dari 2.522 orang,[18] sementara Pesantren Lirboyo ketika tahun 1920-an sampai dengan 1930-an mempunyai santri sekitar 200, pada tahun 1996 memiliki sekitar 7.900 santri.

Broker", *Comparative Studies in Society and History,* 2 (2), 1960, 228-249.

[14]Taufik Abdullah, "The Pesantren in Historical Perspective," dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (Ed.), *Islam and Society in Southeast Asia*, Singapura: Instiute of Southeast Asian Studies, 1987, 102.

[15]Ronald A. Lukens-Bull, "Pengajaran Moral: Pendidikan Islam Masyarakat Jawa di Era Globalisasi," Makalah, 9.

[16]Clifford Geertz, "The Javanese Kijaji: the Changing Role of Cultural Broker", 228-249.

[17] J. Benda, *the Cresent and the Rising Sun,* the Hague-Bandung, 1958, 245.

[18]M. Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di tengah Arus Perubahan,* Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2005, 355.

Di samping itu, pembaruan pendidikan di Pesantren Lirboyo ini juga dapat mempertahankan lembaga-lembaga pendidikan tradisional Islam seperti madrasah diniyah ketika didirikan MTs dan MA HM Tribakti[19] pada tahun 1986 dan SD, SMP, dan SMA pada tahun 1995 di pondok tersebut. Bahkan, santri yang hanya mendalami kitab kuning di madrasah diniyah tersebut ternyata paling banyak bila dibandingkan dengan siswa pada lembaga-lembaga pendidikan lainnya.

Dari 9.163 santri Lirboyo saat ini, 5.720 (62,42%) di antaranya hanya mendalami kitab kuning di Madrasah Hidayatul Mubtadi'in (MHM). 876 (9,5%) menjadi siswa Madrasah HM Tribakti al-Mahrusiyah, dan 312 (3,4%) menjadi siswa SD, SMP, dan SMA ar-Risalah, sementara sisanya, 2.255 (24,6%) santri menjadi santri di pesantren-pesantren unit lainnya yang hanya menyelenggaran madrasah diniyah sebagaimana pondok induk.[20] Padahal ijasah MHM, setidaknya sampai dengan tahun 2006,[21] tidak mendapatkan pengakuan dari Departemen Agama, apalagi Departemen Pendidikan Nasional, sehingga alumninya tidak memiliki akses untuk melanjutkan pendidikan dan lapangan kerja dengan ijasah itu. Sementara Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah HM Tribakti al-Mahrusiyah dan SD, SMP, dan SMA Ar-Risalah mempunyai akses untuk meneruskan studi dan lapangan kerja.

Berangkat dari penjelasan di atas diketahui bahwa pembaruan pendidikan di Pesantren Lirboyo tidak hanya menjadikan pesantren ini survive dan berkembang tetapi juga dapat mempertahankan lembaga-lembaga pendidikan tradisionalnya. Fenomena ini berbeda dengan beberapa lembaga pendidikan Islam lainnya yang banyak mengorbankan lembaga-lembaga tradisionalnya ketika mengadakan pembaruan. Oleh karena itu, penelitian tentang pembaruan pendidikan di Pesantren Lirboyo ini menjadi penting karena ia dapat mengadakan pembaruan dengan tanpa mengorbankan lembaga pendidikan tradisionalnya, sehingga fungsi

---

[19]Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990 Pasal 4 ayat 3 tentang Pendidikan Dasar, dan menurut Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum (SMU) pada Bab I, pasal 1, ayat 6, diketahui bahwa MTs dan MA HM Tribakti termasuk sekolah umum yang berciri khas Islam.

[20]MHM, *Hasil Sidang Presedium Kwarta MHM Lirboyo Kediri Tahun Pelajaran 1427-1428 H/2006-2007 M*, Kediri: MHM, 2007, 2-6, dan diadaptasi dari Arsip Pesantren induk Lirboyo Kediri tahun 2007.

[21]Pada tahun 2006, Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadi-ien mendapatkan mu`ādalah, di mana ijasahnya dapat digunakan untuk meneruskan ke perguruan tinggi. Keputusan itu itu ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jahja Umar, Ph. D., dengan suratnya nomor: Dj.II/46A/06.

utama pesantren yaitu transmissi dan tranfer ilmu agama Islam, pemeliharaan tradisi Islam, dan penciptaan kader-kader ulama dapat dipertahankan.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka beberapa masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Steenbrink mengajukan temuan bahwa lembaga pendidikan tradisional akan punah atau minimal terpinggirkan ketika dihadapkan kepada lembaga pendidikan yang lebih teratur dan modern. Temuan ini ternyata berlawanan dengan fakta bahwa pesantren, sebagai lembaga pendidikan tradisional tetap eksis sampai kini. Fenomena ketahanan dan berkembangnya pesantren ternyata tidak hanya yang mengadopsi lembaga pendidikan modern tetapi juga yang hanya menyelenggarakan pendidikan tradisional. Ini berbeda dengan teorinya Geertz yang mengatakan bahwa pesantren akan senantiasa eksis selama menyelenggarakan pendidikan keagamaan dan sekolah sekaligus. Dari keterangan ini timbul pertanyaan, pertama, mengapa fenomena pesantren berbeda dengan berbagai lembaga pendidikan temuan penelitian dan teori di atas; dan kedua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan lembaga pendidikan.
2. Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pesantren, banyak teori yang telah dihasilkan yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal yang diyakini menjadikan ketahanan pesantren adalah pribadi kyai yang menonjol dengan ilmu dan visinya, melembaganya pesantren di dalam masyarakat, kemampuannya melahirkan berbagai daya guna bagi masyarakat, jiwa dan semangat kewiraswastaan, dan pola kehidupannya yang unik. Sementara faktor ekternal adalah kultur Jawa yang involutif, sehingga mampu menyerap kebudayaan luar tanpa kehilangan identitasnya. Dari berbagai pendapat di atas timbul pertanyaan, pertama, faktor mana yang paling mempunyai pengaruh; kedua, apakah lembaga pendidikan yang mempunyai faktor di atas dipastikan survive; ketiga, mengapa surau, yang memiliki hampir seluruh faktor kecuali faktor eksternal, yaitu kultur involutif, harus mengalami kemunduran.

Mengingat luasnya masalah yang memungkinkan dikaji dalam penelitian ini, maka penulis membatasi penelitian ini dengan menggunakan lokasi sebagai dasarnya, yaitu Pesantren Lirboyo Kediri. Oleh karena itu, masalah penelitian ini adalah ketika didirikan MTs dan MA HM Tribakti sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam dan SD, SMP, dan SMA ar-Risalah, dimana keduanya dapat dianggap sebagai

lembaga pendidikan yang lebih teratur dan modern, mengapa Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadi'in sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam masih tetap bertahan dan berkembang.

Dalam rangka menjawab masalah pokok tersebut, maka peneliti mengajukan sub masalah penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana proses terjadinya pembaruan pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri, baik terkait dengan pembaruan institusi, tujuan, materi pembelajaran, metode, pendidik, peserta didik, sarana dan prasarana, dan evaluasi? Dan sebagai proses akhir dari pembaruan komponen pendidikan di atas, bagaimana corak pembaruan pendidikan di Pesantren Lirboyo?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembaruan pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri?
3. Apa saja implikasi pembaruan pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri?

Tujuan penelitian ini adalah memahami mengapa lembaga pendidikan Islam tradisional di Pesantren Lirboyo survive ketika berhadapan dengan lembaga yang lebih teratur dan modern, padahal di beberapa tempat yang lain seperti temuan Steenbrink bahwa lembaga pendidikan tradisional akan punah atau minimal terpinggirkan ketika dihadapkan kepada lembaga pendidikan yang lebih teratur dan modern, sedangkan teorinya Geertz yang didukung oleh Bull dan Abdullah menyebutkan pesantren akan eksis sepanjang ia mendirikan madrasah yang memuaskan secara religius bagi penduduk desa dan sekolah yang berfungsi membantu pertumbuhan Indonesia Baru. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan mengembangkan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pesantren. Untuk mempermudah pengembangan teori tersebut, peneliti lakukan dengan menjelaskan proses terjadinya pembaruan pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri, baik terkait dengan pembaruan institusi, tujuan, materi pembelajaran, metode, pendidik, peserta didik, sarana dan prasarana, dan evaluasi, faktor-faktor yang mempengaruhi pembaruan pendidikan, dan implikasi pembaruan pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri.

Dewasa ini, kajian tentang pesantren sudah banyak dilakukan, misalnya kajian Geertz, Zamakhsari Dhofier, Steenbrink, Khoirul Wahidin, dan Muljono Damopolii. Tulisan-tulisan tersebut, yang kebanyakan merupakan hasil penelitian untuk mengakhiri studi pada program doktor tersebut, tentu saja banyak memberikan kontribusi bagi kajian ini, khususnya dalam hal kepeloporan mengeksplorasi sumber-sumber sekunder. Meskipun demikian, tulisan ini jelas berbeda dari

berbagai penelitian tersebut. Sebab, tulisan ini mempunyai fokus tersendiri yang menjadikannya berbeda dari studi tentang pesantren yang dilakukan oleh para sarjana tersebut.

Pada studinya yang diberi judul "The Javanese Kijaji: the Changing Role of Cultural Broker", Geertz mengkonsentrasikan kajiannya pada perubahan peran kyai. Studi ini berkesimpulan bahwa peran kyai akan senantiasa eksis sepanjang pesantrennya mendirikan madrasah yang memuaskan secara religius bagi penduduk desa dan sekolah yang berfungsi membantu pertumbuhan Indonesia Baru. Karena kyai dianggap gagal melakukan hal itu, maka hari-hari di mana kyai yang merupakan kekuatan dominan di kalangan masyarakat desa Jawa telah mendekati akhir.[22] Kesimpulan tentang berakhirnya peran kyai dalam penelitian ini ternyata tidak terbukti sampai kini. Hanya saja, diagnosisnya tentang bertahannya pesantren ditentukan oleh kemampuannya mempertahankan identitasnya sebagai sistem pendidikan yang didominasi oleh kyai dan pada saat yang sama memperjelas perannya sebagai bentuk komplementer pendidikan nasional disepakati oleh peneliti berikutnya seperti Taufik Abdullah[23] dan Ronald A. Lukens-Bull.[24] Hasil penelitian Geertz menyisakan pertanyaan pertama, apakah ketahanan pesantren hanya disebabkan terjadinya sinergitas dua sistem pendidikan tersebut, dan kedua, kalau kedua sistem pendidikan dikembangkan secara bersama-sama, mana di antara keduanya yang dapat berkembang.

Studi Zamakhsari Dhofier dalam rangka memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar Doktor dari Australian National University, Canberra, Australia tentang *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai,* memfokuskan diri pada peranan kyai dalam memelihara dan mengembangkan faham Islam tradisional di Jawa. Di dalam penelitian ini, Dhofier menjelaskan tentang tradisi pesantren, seperti metode pembelajaran di pesantren, kitab-kitab yang dianggap *mu`tabar* di pesantren, hubungan pesantren dan tarekat serta genealogi kyai dan jaringan intelektualnya. Penelitian yang menggunakan pendekatan antropologi ini berkesimpulan bahwa para kyai mengambil sikap yang lapang dalam menyelenggarakan modernisasi lembaga-lembaga

---

[22]Clifford Geertz, "The Javanese Kijaji: the Changing Role of Cultural Broker", *Comparative Studies in Society and History*, 2 (2), 1960, 228-249.

[23]Taufik Abdullah, "The Pesantren in Historical Perspective," dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (Ed.), *Islam and Society in Southeast Asia*, Singapura: ISEAS, 1987, 102.

[24]Ronald A. Lukens-Bull, "Pengajaran Moral: Pendidikan Islam Masyarakat Jawa di Era Globalisasi," Makalah, 9.

pesantren di tengah-tengah perubahan masyarakat, tanpa meninggalkan aspek-aspek positif dari sistem pendidikan tradisional Islam. Atau lebih jelasnya, bahwa kyai sebagai *top leader* lembaga pesantren sedang mengalami perubahan-perubahan yang fundamental dan turut pula memainkan peranan proses transformasi kehidupan modern Indonesia.[25] Penelitian ini tidak menjelaskan tentang proses dan aspek-aspek pembaruan pesantren, faktor-faktor yang mempengaruhi pembaruan, dan implikasinya.

Studi Steenbrink dalam rangka memperoleh gelar doktor dari Universitas Katolik Nijmegen dengan judul asli *Recente Ontwikkelingen in Indonesisch Islamonderricht* yang kemudian diterjemahkan menjadi *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern,* yang kesimpulannya diperbandingkan dengan perkembangan dalam agama Kristen, ini mengkonsentrasikan pada perubahan evolutif unilinier[26] yang terjadi dalam Islam di Indonesia, utamanya lembaga pendidikan. Penelitian ini juga tidak mengkaji secara mendalam bagaimana pesantren dapat bertahan.

Sementara Khoirul Wahidin dengan Judul *Pembaruan Pondok Pesantren Masa Orde Baru: studi Komparatif Mengenai Perubahan Orientasi Pendidikan dan Implikasinya antara Pesantren Bobos dengan Pesantren Buntet di Kabupaten Cirebon,* menjelaskan bagaimana kyai di kedua pesantren yang diteliti mengadakan berbagai perubahan agar kedua pesantren itu tetap eksis.[27] Studi ini tidak memberikan penjelasan tentang bertahannya lembaga pendidikan tradisional Islam di tengah modernisasi yang dilakukan lembaga tersebut.

---

[25]Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai,* Jakarta: LP3ES, 1983.

[26]Paradigma ini, oleh Steenbrink, digunakan untuk menafsir data sehingga ia dapat menguatkan atau mendukung pernyataan-penyataan evolusi, yaitu proses perkembangan lamban dari sebuah sistem, dalam waktu yang relatif lama, menuju kepada sistem yang lebih komplek, tetapi tetap tunggal. Penelitian Steenbrink melihat perubahan secara lambat dari pesantren menjadi madrasah dan akhirnya berkembang menjadi sekolah, sementara tenaga pengajarnya ditemukan ada perubahan dari KH. Menjadi Drs. Elaborasi tentang paradigma ini baca Heddy Shri Ahimsa Putra, "Paradigma, Epistemologi, dan Metode Ilmu Sosial Budaya: Sebuah Pemetaan," 27.

[27]Khoirul Wahidin, *Pembaruan pendidikan Masa Orde Baru: studi Komparatif Mengenai Perubahan Orientasi Pendidikan dan Implikasinya antara Pesantren Bobos dengan Pesantren Buntet di Kabupaten Cirebon,* Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001.

Penelitian Muljono Damopolii tentang *Pembaruan Pendidikan Islam di Makassar: Studi Kasus Pesantren Modern Pendidikan al-Qur'an IMMIM Tamalanrea Makassar* berusaha mengungkap background dan dampak pembaruan pendidikan Islam yang dilakukan pesantren Modern Pendidikan al-Qur'an IMMIM Makassar, di mana pesantren ini salah satunya menggunakan Pesantren Lirboyo sebagai acuan dalam mengembangan ilmu Naḥw dan Ṣarf yang biasa disebut ilmu-ilmu alat.[28] Objek dari studi Damopolii ini adalah pesantren yang sudah memproklamirkan diri sebagai pesantren modern semenjak berdirinya.

Keseluruhan penelitian di atas jelas tidak mengkonsentrasikan pada bagaimana pesantren salaf, seperti Pesantren Lirboyo mengadakan pembaruan dan akhirnya menjadi survive, bahkan sangat berkembang, dan mempertahankan lembaga pendidikan tradisional di tengah modernisasi yang dilakukan. Dengan demikian, posisi kajian ini di antara karya-karya yang telah mengkaji pesantren tersebut jelas berbeda. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya pembaruan pendidikan di Pesantren Lirboyo ini, bagaimana proses terjadinya pembaruan pendidikan, baik terkait dengan institusi, tujuan, materi pembelajaran, metode, pendidik, peserta didik, sarana dan prasarana, dan evaluasi, dan implikasi pembaruan itu bagi santri, pesantren, dan masyarakat.

Pesantren Lirboyo tempat penelitian ini dilakukan semestinya terdiri dari dari 10 pesantren, yaitu Pesantren Hidayatul Mubtadi'in, untuk selanjutnya disebut pesantren induk, dan 9 unit pesantren lainnya yaitu Pesantren HM Putra-putri al-Mahrusiyyah, Pesantren HM, Pesantren HY, Pesantren Putri Hidayatul Mubtadi`aat, Pesantren HMQ, Pesantren Ar-Risalah, Pesantren HM Antara, Pesantren Taḥfīẓ al-Qur'ān, dan Pesantren Dār as-Salām.[29]

Dari sepuluh pesantren tersebut, tiga di antaranya dijadikan sumber data, yaitu:

a. Pesantren induk Lirboyo Kediri, yang hanya memiliki lembaga pendidikan diniyah, MHM.
b. Pesantren HM Putra-putri al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri yang memiliki lembaga pendidikan diniyah dan Lembaga yang berkurikulum Departemen Agama, yaitu MTs dan MA HM Tribakti al-Mahrusiyah..

---

[28]Muljono Damopolii, *Pembaruan Pendidikan Islam di Makassar*, 195.

[29]Beberapa nama pesantren diambilkan dari singkatan nama pendirinya, seperti HM adalah singkatan dari Haji Mahrus dan HY dari Haji Ya`qub.

c. Pesantren Salafiy Terpadu ar-Risalah Lirboyo Kediri yang memiliki lembaga pendidikan diniyah dan Lembaga yang berkurikulum Departemen Pendidikan Nasional, mulai SD sampai dengan SMA.

Tidak dijadikannya sumber data untuk pesantren unit lainnya dikarenakan sebagian pesantren-pesantren itu tidak menyelenggarakan klasikal, sehingga santrinya mengikuti pendidikan formal di MHM, seperti Pesantren HM, Pesantren HM Antara, dan Pesantren Dār as-Salām. Sedangkan empat pesantren lainnya, yaitu Pesantren HY, Pesantren Putri Hidayatul Mubtadi`aat, Pesantren HMQ, dan Pesantren Taḥfīẓ al-Qur'ān menyelenggarakan madrasah diniyah yang gurunya dari alumni MHM. Oleh karena itu, tujuh pesantren yang disebutkan terakhir mempunyai kesamaan karakter dengan pesantren induk.

Karena penelitian ini hanya menggunakan 3 lembaga pendidikan di atas sebagai kasus, maka jenis penelitian ini dapat disebut studi kasus.[30] Objek dari studi kasus, menurut Stake, adalah spesifik, unik, dan sistem dengan lingkup terbatas.[31] Di samping itu, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why,* bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata.[32] Pemilihan studi kasus ini didasarkan pada fokus utama penelitian ini yaitu bagaimana pembaruan pendidikan di Pesantren Lirboyo dilakukan dan mengapa pesantren ini dapat bertahan dan berkembang hinggi kini.

Hasil akhir dari penelitian studi kasus menurut Barney G Glaser dan Anselm L Strauss, sebagaimana dikutip oleh Noeng Muhadjir, dibedakan menjadi teori substantif dengan teori formal. Teori substantif memiliki jangkauan generalisasi pada suatu daerah substantif penelitian, sedangkan teori formal memiliki jangkauan generalisasi pada dimensi tertentu pada sejumlah daerah substantif. Teori formal yang dianjurkan adalah yang

---

[30]Penjelasan tentang studi kasus dapat dibaca pada Robert E. Stake, "Case Studies," dalam Norman K. Denzin dan Yvovva S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research,* London: Sage Publication Ltd., 2000, 435-454.

[31] Robert E. Stake, "Case Studies," 436.

[32] Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode,* Terjemahan M. Djauzi Mudzakir dari *Case Study Research: Design and Methods,* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997, 1.

multiarea.[33] Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan teori substantif tentang pembaruan pendidikan di Pesantren Lirboyo.

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu data kepustakaan dan data lapangan. Teknik pengumpulan data kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka yang terkait dengan fokus penelitian ini. Telaah pustaka ini di samping dimaksudkan untuk memposisikan penelitian ini di antara berbagai penelitian terdahulu, juga digunakan untuk memberikan kajian teoteris tentang konsep kata-kata kunci yang tertera dalam judul, tipologi pesantren, kerangka teori, dan posisi pesantren dan madrasah dalam politik pendidikan di Indonesia.

Adapun teknik penelitian lapangan adalah wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data tentang hal-hal yang terkait dengan pembaruan pendidikan sekarang dan pengalaman masa lalu.[34] Untuk mempermudah pembuatan catatan wawancara, maka sejak awal digunakan alat perekam digital MP4.

Yang diwawancarai adalah mereka yang terlibat langsung dengan berbagai pembaruan dan pelaksanaannya, di antaranya KH. Imam Yahya Mahrus, pendiri Pesantren HM al-Mahrusiyah dan berbagai lembaga pendidikan di dalamnya; Hj. Aina Ainaul Mardliyyah dan KH. Ma`ruf Zainuddin, pendiri Pesantren Salafiy Terpadu ar-Risalah dan berbagai lembaga di dalamnya; KH. Ilham Nadzir, pimpinan sidang ketika terjadi pembaruan kurikulum dan pembukaan MA di MHM Lirboyo, KH. Imam Basyari, yang mengusulkan dibukanya perguruan tinggi, dan beberapa santri.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Dalam batas minimum peneliti mengerjakan apa yang dikerjakan oleh informan, dan tidak sampai memainkan partisipasi lengkap yang mengerjakan apa yang dikerjakan oleh informan secara penuh. Hal ini menurut Spradley, sebagaimana dikutip Ahmad Sonhadji,

---

[33]Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogjakarta: Rake Sarasin, 1996, 91.

[34]Dua hal itu, oleh Sonhaji diberi istilah konstruksi dan rekonstruksi, yaitu konstruksi yang terjadi sekarang tentang hal-hal yang terkait dengan pembaruan pendidikan dan rekonstruksi keadaan tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu. Untuk elaborasi baca Ahmad Sonhadji, "Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian Kualitatif," dalam Imron Arifin (Ed.), *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, Malang: Kalimasahada Press, 69-70.

akan mempersulit peneliti untuk menempatkan diri sebagai peneliti.[35] Untuk mempermudah penggalian data, peneliti menjadi konsultan di Pesantren Salafiy Terpadu ar-Risalah, nara sumber berbagai kajian yang diadakan oleh beberapa jam'iyah di Pesantren Induk, dan tenaga pengajar di salah satu lembaga yang dikelola oleh KH. Imam Yahya Mahrus, pengasuh Pesantren HM al-Mahrusiyah. Dalam tipologi yang diberikan oleh Gold, peneliti menjadi peneliti yang menjadi partisipan dan partisipan yang meneliti.[36]

Kehadliran peneliti di lokasi penelitian diketahui oleh informan dan memperoleh izin dari kyai sebagai *gatekeeper*. Dalam hal ini peneliti memperoleh izin dari KH. Idris Marzuki, pengasuh Pesantren Lirboyo, utamanya pondok induk; KH. Imam Yahya Mahrus, pengasuh Pesantren HM. al-Mahrusiyah, dan Umi Aina Ainaul Mardliyyah dan KH. Ma`ruf Zaenuddin, pengasuh Pesantren Salafiy Terpadu ar-Risalah.

Teknik ketiga yaitu dokumentasi. Peneliti mendapatkan beberapa tulisan yang membahas tiga pesantren itu, yang kebanyakan ditulis oleh santri yang mengakhiri studi di Aliyah MHM Lirboyo. Ini dijadikan satu informasi awal untuk meneliti dinamika pembaruan pendidikan di ketiga pesantren tersebut. Dikarenakan ia ditulis oleh seorang santri yang menulis pesantrennya, maka dalam rangka menghindari bias, maka peneliti mengecek ulang dengan metode dan sumber lain.

Data lapangan yang dikumpulkan dengan tiga teknik di atas dilakukan pemeriksaan dalam rangka mendapatkan keabsahan. Pemeriksaan keabsahan data ini didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan, kebergantungan, dan kepastian. Kriteria derajat kepercayaan, pemeriksaan datanya dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekukan pengamatan, triangulasi, pengecekan atau diskusi sejawat, dan kajian kasus negatif. Sementara kebergantungan dan kepastian, pemeriksaan datanya menggunakan teknik auditing oleh pembimbing.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dua tahap, yaitu ketika peneliti masih di lapangan dan setelah menyelesaikan tugas pendataan.

---

[35] Ahmad Sonhadji, "Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian Kualitatif", 76.

[36] Gold membagi observasi ke dalam empat tipologi, yaitu partisipan penuh, partisipan yang meneliti, peneliti yang menjadi partisipan, dan menjadi peneliti penuh. Untuk elaborasi baca Patricia A. Adler dan Peter Edler, "Observational Techniques," dalam Norman K. Denzin dan Yvovva S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, 379.

Analisis data yang dilakukan peneliti ketika masih berada di lapangan sebagai berikut.

a. Mempertajam masalah penelitian.
b. Mengembangkan masalah penelitian menjadi pertanyaan-pertanyaan analitik dan menentukan indikator-indikator, teknik pengumpulan data, dan sumber datanya.
c. Menggali data lebih lanjut setelah mereview catatan data lapangan.
d. Membuat komentar tertulis atas ide, tema, dan kategori yang muncul.
e. Membuat ikhtisar secara akurat.
f. Menvalidasi ide dan tema pada informan.
g. Mengekplorasi literatur kembali.
h. menghubungkan tema dan kategori yang dihasilkan dengan berbagai hasil penelitian lain.[37]

Sementara analisis data setelah peneliti mengadakan pendataan dilakukan dengan cara berikut.

a. Mendiskripsikan proses dan aspek pembaruan serta faktor dan implikasi pembaruan tiga pesantren di Lirboyo;
b. Membuat kategori dengan cara mencari persamaan dan perbedaan pembaruan tiga pesantren di atas;
c. Menyusun hipotesis kerja dengan cara mencari hubungan antar kategori; dan
d. Menetapkan teori dengan cara mencari hubungan antar hipotesis.[38]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah historis sosiologis. Pendekatan historis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori historis kausal. Kerangka teori ini bertujuan untuk merumuskan hubungan sebab akibat antara ketahanan lembaga pendidikan tradisional Islam, seperti pesantren dan madrasah, dengan berbagai faktor yang mempengaruhi.

---

[37]Langkah-langkah ini merupakan ringkasan pendapat Bogdan dan Biklen. Untuk elaborasi baca Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif,* Bandung: Pustaka Setia, 2002, 210-215.

[38]Langkah-langkah ini merupakan ringkasan Mastuhu terhadap pendapat Schlegel. Untuk elaborasi baca Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren,* Jakarta: INIS, 1994, 46-47.

BAB II
PEMBARUAN PENDIDIKAN DI PESANTREN: KERANGKA TEORI

Pada bab ini dikemukakan konsep sejumlah kata kunci yang tertera dalam judul. Ada tiga kata kunci yang akan dibahas konsepnya, yaitu pembaruan, pendidikan, dan pesantren. Pendefinisian kata kunci ini, menurut Irwan Abdullah, penting dilakukan karena dapat memberikan makna terhadap kata kunci sehingga membuatnya dapat digunakan untuk memahami, menafsirkan, menganalisis, dan menjelaskan peristiwa atau gejala yang sedang diteliti.[1] Pendefinisian kata kunci juga mempunyai fungsi menghindarkan terjadinya perbedaan pengertian terhadap kata kunci antara peneliti dan pembaca.[2]

Bab ini juga menjelaskan tentang kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Di samping digunakan untuk menganalisis data dan temuan penelitian, kerangka teori tersebut juga digunakan sebagai acuan dalam menjabarkan masalah penelitian menjadi berbagai unsur yang perlu digali datanya. Selanjutnya dipaparkan tentang tipologi pesantren dan posisi pesantren dan madrasah dalam politik pendidikan di Indonesia. Kajian terakhir ini digunakan untuk memposisikan dan kontektualisasi pembaruan pendidikan di Pesantren Lirboyo.

---

[1]Irwan Abdullah, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif,* Yogjakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2007, 2-3.

[2]Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian,* Jakarta: Rineka Cipta, 2003, 15.

A. *Pengertian Pembaruan Pendidikan di Pesantren*

1. Pengertian Pembaruan

Pembaruan secara etimologis berarti “proses, perbuatan, cara membarui.”[3] Fazlur Rahman, sebagaimana dikutip oleh John O. Voll, berpendapat bahwa kosa kata Arab tentang pembaruan adalah *tajdīd.* Di samping itu, Rahman juga mengajukan kosa kata *iṣlāḥ* untuk perubahan.[4] Kedua istilah ini, menurut Voll, mencerminkan suatu tradisi yang berlanjut. Pada hakikatnya, tradisi untuk membarui dan mengubah itu menggambarkan usaha perseorangan maupun bersama untuk mewujudkan pranata sosial sesuai tujuan yang dicita-citakan.[5] Dasar yang digunakan umat Islam untuk melakukan pembaruan dan perubahan, menurut Voll, adalah ayat 170 QS. Al-A`rāf dan ayat 117 QS. Hūd sebagaimana tersebut di bawah ini.

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (الأعراف\٧: ١٧٠)

Terjemahnya, "Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan al-Kitāb (Taurāt) serta mendirikan ṣalāt, (akan diberi pahala) karena sesungguhnya Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan."[6]

---

[3]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1995, 95.

[4]John O. Voll, “Pembaharuan dan Perubahan dalam Sejarah Islam: Tajdid dan Islah,” dalam John L. Esposito (Ed.), *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses, dan Tantangan,* Terjemahan Bakri Siregar dari *Voices of Resurgent Islam,* Jakarta: Rajawali, 1987, 21-22. Untuk elaborasi definisi dan sejarah *tajdīd* dan *iṣlāḥ* lihat Fazlur Rahman, “Revival and Reform in Islam,” dalam P.M. Holt dkk. (Ed.), *The Cambridge History of Islam,* Cambridge University Press, 1970, Jilid II, 632-642.

[5]John O. Voll, “Pembaharuan dan Perubahan dalam Sejarah Islam: Tajdid dan Islah,” 21-22.

[6]*Al-Qur’an dan Terjemahnya,* Surabaya: Mahkota, 1989, 250. Ayat ini menjelaskan bahwa berpegang teghuh pada kitab suci dan mendirikan shalat adalah kebaikan. Bumi dan masyarakat tidak mengalami kerusakan kecuali akibat kerusakan fitrah yang ditetapkan Allah atas manusia. Manusia fitrah manusia adalah ketundukan kepada satu sumber Yang Gaib yang menciptakan dan menganugerahkan kepadanya kelangsungan hidup, membahagiakan serta menyesuaikan persoalan-persoalan kehidupannya dengan hukum-hukum yang

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ (هود\١١: ١١٧)

Terjemahnya, "Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara ẓālim, sedang penduduknya orang-orang yang mengadakan perbaikan."[7]

Kedua ayat tersebut, menurut Voll, memperlihatkan bahwa mereka yang mengerjakan *iṣlāḥ* dipuji dalam al-Qur'ān.[8] Dengan adanya kedua ayat ini pulalah, pengarang *Ensiklopedi Islam* berpendapat bahwa sejak permulaan sejarahnya, Islam telah mempunyai tradisi pembaruan.[9]

Di samping dua ayat di atas, pembaruan, menurut Voll, juga mendapatkan pembenaran melalui sebuah ḥadīs Nabi yang diriwayatkan Abū Dāwud dan Ḥākim dari Abī Hurairah berikut ini:

---

mengendalikan sistem alam raya ini. Untuk elaborasi baca M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an,* Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. V, 299-300.

[7]*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1989, 345. Ayat tersebut, menurut al-Baiḍāwiy dan al-Qurṭubiy, mengandung pengertian bahwa Allah tidak akan membinasakan kaum karena kemusyirkan penduduknya dan kekufurannya, sepanjang mereka saling memperbaiki di antara sesamanya. Baca al-Baiḍāwiy, *Tafsīr al-Baiḍāwiy,* Beirūt: Dār al-Fikr, 1996, Juz III, 269 dan Abū Abdillah Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr ibn Farḥ al-Qurṭubiy, *al-Jāmi` li Aḥkām al-Qur'ān*, Kairo: Dār al-Sy`b, 1372 H., Juz IX, 114. Di samping interpretasi tersebut, ayat tersebut juga dipahami bahwa Allah tidak akan membinasakan kaum dengan cara kezaliman, karena kezaliman. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Vol. VI, 361. Kata *Muṣliḥūn,* menurut Quraish Shihab, mempunyai pengertian seseorang yang memelihara nilai-nilai sesuatu sehingga kondisi sesuatu itu tetap bertahan sebagaimana adanya. Dalam rangka menciptakan kemaslahan umat, menurut al-Marāghi, ada empat faktor yang harus tercipta: 1. pemimpinnya adalah ulama yang pemikir dan para pemerintah yang adil; 2. memiliki tentara yang berdisiplin dan dapat melindungi kawasannya dari serangan musuh; 3. warganya bekerja sesuai dengan ukuran dan saling melengkapi; 4. kelompok-kelompok pekerja tersebut mengorganiusasikan diri sehingga tidak tergantung dengan kelompok di luar mereka. Beginilah penafsiran al-Maraghi terhadap ayat 105 QS. Al-Anbiyā'. Baca Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghi, *Terjemah Tafsīr al-Marāghi,* Semarang: Toha Putra, 1989, Vol. 17, 125-126.

[8]John O. Voll, "Pembaharuan dan Perubahan dalam Sejarah Islam: Tajdid dan Islah," 23.

[9]Azyumardi Azra dkk., *Ensiklopedi Islam,* Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1997, Jilid 5, 42.

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا[١٠] رواه أبو داود وحاكم

Artinya, “Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini (umat Islam) pada permulaan setiap abad orang yang akan memperbaharui (memperbaiki) urusan agamanya.”[11]

Substansi dari pengertian ḥadīṡ ini, menurut Voll, adalah ketika masyarakat muslim secara bertahap dianggap telah meninggalkan jalan yang ditetapkan al-Qur’ān dan as-Sunnah, maka para *mujaddid* diperlukan untuk mengembalikan semangat Islam yang asasi.[12]

Penjelasan Voll di atas dapat disimpulkan bahwa pembaruan berarti koreksi terhadap berbagai penyelewengan dan mengembalikan kepada tatanan yang sesuai tuntunan dalam rangka mencapai keadaan yang lebih baik. Oleh karena itu, orientasi pembaruan tidak hanya menuju kepada keadaan yang lebih baik ke depan, tetapi juga berorientasi kepada sesuatu yang diidealkan pada masa lalu. Orientasi seperti ini biasa disebut purifikasi atau pemurnian.

Secara etimologis, J. Milten Cowan menjelaskan bahwa sebagian makna *tajdīd* adalah *modernization.*[13] Koentjaraningrat mendefinisikan modernisasi sebagai “proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan masa kini.”[14] Menurut Edward A. Tiryakian (1929-), modernisasi berarti "proses menuju keunggulan inovasi atau terobosan kesadaran, moral, etika,

---

[10]Sulaimān ibn al-Asy`ath Abū Dāwud as-Sijistāni al-Azdi, *Sunan Abī Dāwud,* Dār al-Fikr, Jilid IV, 109 dan Muḥammad ibn `Abdillāh Abū Abdillāh al-Ḥākim al-Naisāburi, *al-Mustadrak `Alā aṣ-Ṣaḥiḥain,* Beirūt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1990, Jilid IV, 567-568. Ḥadīṡ tersebut berdasarkan penelitian penulis berkwalitas Ḥasan, dikarenakan sanadnya bersambung, tidak diketemukan Syaż dan `illat dan martabat terendah dari seluruh perowi adalah peringkat ke-4, yaitu Syarāḥīl ibn Yazīd al-Mughāfiriy yang menurut Ibn Ḥajar al-`Asqalaniy berpredikat Ṣadūq.

[11]Azra dkk., *Ensiklopedi Islam,* 42.

[12]John O. Voll, “Pembaharuan dan Perubahan dalam Sejarah Islam: Tajdid dan Islah,” 23.

[13]J. Milten Cowan (Ed.), *Hans Wehr, a Dictionary of Modern Written Arabic,* New York: t.p., 114.

[14]Koentjaraningrat dkk., *Kamus Istilah Antrologi,* Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1984, 119.

teknologi, dan tatanan sosial yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan manusia."[15] Sementara Chodak berpendapat bahwa, "modernisasi adalah contoh khusus dan penting dari kemajuan masyarakat, contoh usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai standar kehidupan yang lebih baik."[16]

Menurut perspektif ini, modernisasi berarti upaya yang bertujuan untuk mencapai standar yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Ciri-ciri kepribadian masyarakat modern, menurut Inkeles, adalah:

1. Bebas dari kekuasaan tradisional dan antidogmatis dalam berfikir;
2. Memperhatikan masalah publik;
3. Terbuka terhadap pengalaman baru;
4. Yakin terhadap sains dan nalar;
5. Berencana, tanggap, berorientasi ke masa depan, mampu menunda kepuasan, dan
6. Aspirasi tinggi, berpendidikan, berbudaya, dan professional.[17]

Senada dengan ciri-ciri di atas, Azra mengajukan rasionalitas, demokratis dan toleran terhadap perbedaan, berorientasi ke depan (*future oriented*) dan tidak melihat ke belakang (*backward looking*) sebagai syarat dan ciri modernitas. Model keislaman seperti inilah yang seharusnya dikembangkan melalui lembaga-lembaga pendidikan Islam.[18]

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan pembaruan dalam studi ini lebih menekankan pada proses menuju keadaan lebih baik bila dibandingkan sebelumnya, bukan hasil dari proses itu. Kata semakna yang dimaksud dengan pembaruan yang tertera dalam judul adalah modernisasi, tidak modernitas. Dengan kata lain yang dimaksud dengan pembaruan adalah proses menuju modernitas yang ciri-cirinya dijelaskan di atas.

---

[15]Piötr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial,* Terjemahan Alimandan dari *the Sociology of Social Change,* Jakarta: Prenada, 2005, 153.

[16]Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial,* 153.

[17]Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial,* 154.

[18] Wawancara Ulil Abshar-Abdalla dari Kajian Islam Utan Kayu (KIUK) dengan Azyumardi Azra yang disiarkan jaringan Radio 68 H pada Kamis, 25 Juli 2002, *Pendidikan Agama Harus Rasional dan Toleran,* http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id= 226, diakses pada tanggal 24 Januari 2007.

2. Pengertian Pendidikan

Pendidikan, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.[19] Pendidikan secara etimologis juga berarti proses, perbuatan, cara mendidik.[20]

Dalam khazanah Islam, terdapat sejumlah istilah yang merujuk kepada pengertian pendidikan seperti *tarbiyah, ta'dīb, ta`līm, tadrīs,* dan *tabyīn.* Telah banyak dilakukan diskusi tentang istilah mana yang paling tepat untuk pendidikan. Dalam hal ini penulis mencukupkan analisis yang diberikan Maksum dan Abuddin Nata. Maksum dalam bukunya *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya* berkesimpulan bahwa istilah *tarbiyah* dianggap lebih tepat karena konotasi ketuhanan di dalamnya sangat kuat. Dia melanjutkan argumennya, walaupun kegiatan pendidikan merupakan kegiatan manusia, tetapi pendidikan tidak bisa lepas dari peranan Tuhan. Selain itu, dia mengajukan argumen lain, bahwa *ta`līm, tadrīs, ta'dīb,* dan *tabyīn* sudah terkandung dalam pengertian *tarbiyah*.[21] Abuddin Nata bahkan berpendapat bahwa term *tarbiyah* dapat mencakup pengertian seluruh istilah yang sering disepadanankan dengan kata pendidikan seperti *taḥżīb, ta'dīb, ta'līm, siyāsah, mawā`iẓ*, dan *tadrīb.*[22]

Sedangkan secara terminologis, pendidikan, menurut penelitian Azra, telah didefinisikan secara berbeda-beda oleh berbagai kalangan, yang banyak dipengaruhi perspektif masing-masing. Namun, semua pandangan yang berbeda itu bertemu dalam semacam kesimpulan bahwa pendidikan merupakan proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien.[23] Sudut pandang dalam mendefinisikan pendidikan dapat dilihat berikut ini.

---

[19]Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 232.

[20]Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* 232.

[21]Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya,* Jakarta: Logos, 1999, 11-25.

[22]Abuddin Nata, "Konsep Pendidikan Ibn Sina, *Disertasi,* Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 24.

[23]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos, 2002, 3.

Pendidikan, menurut Ahmad D. Marimba, adalah "bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama."[24] Definisi ini relatif lengkap mengingat definisi tersebut mencakup proses, subyek, obyek, dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Bila pendidikan itu diberi sifat Islam, maka kepribadian utama yang menjadi tujuan pendidikan itu, menurut Marimba, haruslah menurut ukuran-ukuran Islam.[25]

Sebagai seorang tokoh al-Ikhwān al-Muslimūn, Yusuf al-Qardhawy berpendapat bahwa pendidikan Islam tidak mengkhususkan perhatiannya pada aspek rohani dan akhlak, tidak membatasi usahanya pada pembinaan akal dan pikiran, tidak menjadikan cita-cita utamanya pada latihan kemiliteran, dan tidak pula terbatas pada pendidikan kemasyarakatan.[26] Secara tegas al-Qardhawy menjelaskan bahwa pendidikan Islam adalah, "pendidikan manusia seutuhnya: akal dan hatinya, rokhani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup, baik dalam keadaan senang atau susah dan menyiapkan peserta didik untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya."[27]

Sudut pandang pendidikan seperti di atas, didasarkan kepada idealitas manusia yang dicita-citakan oleh al-Ikhwān al-Muslimūn, di mana al-Qardlawy menjadi salah seorang tokohnya. Definisi ini ternyata lebih memperhatikan tujuan pendidikan dan tidak menjelaskan aktor pelakunya. Definisi ini juga dianggap lebih fleksibel terhadap kenyataan bahwa lingkungan sosial dan budaya sangat mempengaruhi seseorang. Apabila pendidik dalam definisi Marimba mestilah manusia, maka definisi al-Qardhawy tidak menjelaskan secara eksplisit tentang itu.

---

[24]Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam,* Bandung: al-Ma`arif, 1989, 19.

[25]Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat,* 23.

[26]Yusuf al-Qardhawy, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna*, Terjemahan Bustami A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad dari *al-Tarbiyah al-Islāmiyah wa Madrasah Ḥasan al-Bannā,* Jakarta: Bulan Bintang, 39.

[27]Yusuf al-Qardhawy, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna*, 39.

Menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dari definisi di atas, dapat diambil pengertian bahwa unsur-unsur yang ada dalam pendidikan adalah proses, pemberi pengaruh, peserta didik, dan tujuan pendidikan. Bila dikaitkan dengan kesatuan konsep pembaruan pendidikan, maka pendidikan di sini lebih ditekankan kepada proses penyiapan peserta didik untuk menuju kepada tujuan yang tercantum dalam ciri-ciri positif dari modernitas.

Dalam ensiklopedi Wikipedia dijelaskan bahwa pembaruan pendidikan adalah perencanaan dan pergerakan yang berusaha menciptakan perubahan teori dan praktik pendidikan secara sistematik dalam kehidupan kemasyarakatan.[28] Definisi ini sejalan dengan hasil analisis di atas bahwa pembaruan pendidikan adalah proses menuju keadaan pendidikan yang lebih baik bila dibandingkan dengan sebelumnya sehingga ciri-ciri positif modernitas dapat tercapai.

3. Pengertian Pesantren

Pesantren menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti, "asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji…."[29] Akar kata pesantren berasal dari kata "santri", yaitu istilah yang pada awalnya digunakan bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama di lembaga pendidikan tradisional Islam di Jawa dan Madura. Kata "santri" mendapat awalan "pe" dan akhiran "an", yang berarti tempat para santri menuntut ilmu. Dalam pemakaian bahasa modern, santri memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam pengertian sempit, santri adalah seorang pelajar sekolah agama, sedangkan pengertian yang lebih luas dan umum, santri mengacu pada seorang anggota bagian penduduk Jawa yang menganut Islam

---

[28]"Education Reform," dalam *http://en.wikipedia.org/wiki/Education_reform*, dikases tanggal 11 Mei 2008.

[29]Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 878.

dengan sungguh-sungguh, rajin shalat, pergi ke masjid pada hari Jum`at dan sebagainya.[30]

Setidaknya ditemukan empat teori tentang asal kata santri, yaitu adaptasi dari Bahasa Sanskerta, Jawa, Tamil, dan India. Abu Hamid menganggap bahwa perkataan pesantren berasal dari Bahasa Sanskerta[31] yang memperoleh wujud dan pengertian tersendiri dalam Bahasa Indonesia. Ia berasal dari kata *sant* yang berarti orang baik dan disambung dengan kata *tra* yang berarti menolong. Jadi *santra* berarti orang baik yang suka menolong. Sedangkan pesantren berarti tempat untuk membina manusia menjadi orang baik.[32]

Nurcholish Madjid mengajukan dua pendapat yang dapat dipakai sebagai acuan untuk melihat asal-usul perkataan santri. Pendapat pertama mengatakan bahwa santri berasal dari kata *sastri* dari Bahasa Sanskerta, yang artinya melek huruf. Pendapat kedua menyatakan bahwa kata santri berasal dari bahasa Jawa cantrik, artinya seseorang yang mengabdi kepada seorang guru. Misalnya, seseorang yang ingin menguasai keahlian atau kepandaian dalam pewayangan, menjadi dalang atau menabuh gamelan, ia akan mengikuti seseorang yang sudah ahli di bidang pewayangan tersebut. Pola hubungan guru-cantrik kemudian diteruskan. Pada proses evolusi selanjutnya, istilah guru-cantrik berubah menjadi guru-santri. Karena guru dipakai secara luas, untuk guru yang terkemuka kemudian digunakan kata kyai, yang mengandung arti tua atau sakral, keramat, dan sakti. Pada perkembangan selanjutnya, dikenal istilah kyai-santri.[33]

Sedangkan menurut Johns, sebagaimana dikutip Dhofier, bahwa pesantren berasal dari Bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Sedangkan C. C. Berg, juga dikutip oleh Dhofier, mengatakan pesantren

---

[30]Clifford Geertz, *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Terjemahan Aswab Mahasin dari *The Religion of Java*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1983, 268.

[31]Sanskerta berarti bahasa kesusastraan Hindu Kuno, Baca Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 878.

[32]Abu Hamid, "Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan", dalam Taufik Abdullah (Ed.), *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1983, 328.

[33]Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997, 19-20.

berasal dari bahasa India *shastra* yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama, dan buku-buku pengetahuan.[34] Robson, sebagaimana dikutip Asrohah, berpendapat bahwa kata santri berasal dari bahasa Tamil *sattiri* yang diartikan orang yang tinggal di sebuah rumah miskin atau bangunan secara umum.[35]

Dalam rangka melihat tipologi Pesantren Lirboyo, tempat penelitian ini dilakukan, maka berikut ini akan disajikan tentang tipologi pesantren.

B. Tipologi Pesantren

Dalam perkembangannya hingga kini, pesantren sebagai tempat para santri menuntut ilmu setidaknya telah dibuat tipologinya menjadi dua kelompok. Pertama, tipologi pesantren dibuat berdasarkan elemen yang dimiliki. Kedua, tipologi pesantren didasarkan pada lembaga pendidikan yang diselenggarakannya.

Dengan mendasarkan kepada elemen yang dimiliki, Ziemek berkesimpulan bahwa pesantren pada akhir abad ke 20 M dapat dibedakan menjadi lima tipologi.[36] Tipologi yang diajukan oleh Ziemek

---

[34]Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai,* Jakarta: LP3ES, 1983, 18., untuk elaborasi baca C.C. Berg., "Indonesia", dalam H. A. R. Gibb (Ed.), *Wither Islam? A Survey of Modern Movement in the Moslem World,* London: 1932, 330. Bandingkan dengan M. Chaturperdi dan Tiwari B. N., *A Practical Hindi-English Dictionary,* Delhi: Rashtraprinters, 1970, 627.

[35]Hanun Asrohah, *Pelembagaan Pesantren: Asal-usul dan Perkembangan Pesantren di Jawa,* Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Informasi Penelitian dan Diklat Keagamaan, 2004, 30. Untuk elaborasi baca S.O Robson, "Java at the Cossroad: Aspects of Javanese Cultural History in the 14 and 15 Centuries" dalam BKI, Gravenhaage: martinus Nijhoff, 1981, 275.

[36]Pola pertama, terdiri dari masjid dan rumah kyai. Pondok pesantren seperti ini masih bersifat sederhana, di mana kyai mempergunakan masjid atau rumahnya sendiri untuk tempat mengajar. Dalam pondok pesantren tipe ini santri hanya datang dari daerah sekitar pesantren itu sendiri. Pesantren jenis ini khas untuk kaum sufi (pesantren tarekat) yang memberikan pengajaran bagi anggota tarekat. Pesantren jenis ini tidak memiliki pondokan sebagai asrama sehingga para santri tinggal bersama di rumah kyai. Pesantren ini merupakan pesantren paling sederhana yang hanya mengajarkan kitab dan sekaligus merupakan tingkat awal mendirikan pesantren. Pola kedua, terdiri dari masjid, rumah kyai, dan pondok menginap para santri yang datang dari daerah-daerah yang jauh. Pesantren jenis kedua ini sudah dilengkapi dengan pondokan dari kayu atau

itu diikuti oleh Endang Soetari AD[37] dan Ridlwan Nasir.[38] Dengan mendasarkan pada lembaga pendidikan yang diselenggarakan, kini pesantren dibedakan menjadi tiga atau dua tipologi. Abd. Muin dkk, misalnya, membagi pesantren ke dalam tiga tipologi, salafiyah, khalafiyah, kombinasi.[39] Sedangkan Husni Rahim, Abd. Rahman

---

bambu yang terpisah dari rumah kyai. Pesantren ini memiliki semua komponen yang dimiliki pesantren "klasik", seperti masjid dan tempat belajar yang terpisah dari pondokan. Pola ketiga, terdiri dari masjid rumah kyai dan pondok dengan pembelajaran sistem wetonan dan sorogan, pondok pesantren tipe ketiga ini telah menyelenggarakan pendidikan fomal seperti madrasah yang memberikan pelajaran umum dan berorientasi pada sekolah-sekolah pemerintah. Pola keempat, Pondok pesantren tipe keempat ini selain memiliki komponen-komponen pisik seperti pola ketiga, memiliki lahan pertanian, kebun, empang, dan peternakan dan juga menyelenggarakan kursus-kursus teknik pertanian dan lainnya, seperti menjahit, elektro yang sederhana, perbengkelan dan pertukangan kayu. Pesantren tipe ini juga memiliki pula tempat untuk pendidikan ketrampilan seperti kerajinan, perbengkelan, toko koperasi, sawah, ladang, dan sebagainya. Pola kelima, pondok pesantren yang telah berkembang dan bisa disebut pondok pesantren modern. Di samping masjid, rumah kyai/ustāż, pondok, madrasah dan atau sekolah umum, terdapat pula bangunan-bangunan fisik lain seperti: (1) perpustakaan, (2) dapur umum, (3) ruang makan, (4) kantor administrasi, (5) toko. (6) rumah penginapan tamu (orang tua santri atau tamu umum, (7) ruang operation dan sebagainya. Jenis pesantren kelima adalah pesantren yang memiliki komponen pesantren klasik yang dilengkapi dengan sekolah formal mulai tingkat SD sampai Universitas. Seperti pesantren keempat, jenis ini memiliki program keterampilan dan usaha-usaha pertanian dan kerajinan termasuk di dalamnya memiliki fungsi mengelola pendapatan, seperti koperasi. Program-program pendidikan yang berorientasi pada lingkungan mendapat prioritas, di mana pesantren mengambil prakarsa dan mengarahkan kelompok-kelompok swadaya di lingkungannya. Pesantren juga menggalang komunikasi secara intensif dengan pesantren-pesantren kecil, yang didirikan dan dipimpin oleh alumninya. Baca Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial,* terjemahan Butche B. Soendojo dari *Pesantren Islamische Bildung in Sozialen Wandel,* Jakarta: P3M, 1983, 104-107.

[37]Endang Soetari AD, "Sistem Kepemimpinan Pondok Pesantren," Bandung: Balai Penelitian IAIN Bandung, 1987, 41-42.

[38]Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan,* Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2005, 97-88.

[39]Abdul Muin dkk, "Survey Tipologi Pondok Pesantren Dalam Pemenuhan Pelayanan Pendidikan Keagamaan Bagi Masyarakat" dalam *http://www.depag.web.id/research/pendidikan/403,* diakses tanggal 12 Maret 2008.

Assegaf, dan Wardi Bakhriar membagi pesantren ke dalam dua tipologi, salafiyah dan khalafiyah.[40]

Pesantren Salafiyah, menurut Husni Rahim, adalah pesantren yang menyelenggarakan sistem pendidikan Islam non-klasikal dengan metade bandongan dan sorogan dalam mengkaji kitab-kitab klasik (kuning) yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama pada abad pertengahan. Sedangkan pesantren khalafiyah adalah pesantren yang telah mengadopsi sistem pendidikan klasikal dengan kurikulum tertata, mengintegrasikan pengetahuan umum.[41]

Assegaf berpendapat bahwa ciri pesantren salafiyah adalah non-klasikal, tradisional dan mengajarkan murni agama Islam, sedangkan pesantren yang berpola khalafiyah mempunyai lembaga pendidikan klasikal, modern, dan memasukkan mata pelajaran umum dalam madrasah yang dikembangkannya. Aktivitas pesantren tradisional difokuskan pada *tafaqquh fī ad-dīn*, yakni pendalaman pengalaman, perluasan, dan penguasaan khazanah ajaran Islam. Sedangkan pesantren yang telah memasukkan pelajaran umum di madrasah yang dikembangkannya atau membuka sekolah umum, dan tidak hanya mengajarkan kitab Islam klasik, disebut dengan pesantren khalafiyah atau modern.[42]

Berbeda dengan pendapat di atas, Wardi Bakhtiar memasukkan madrasah diniyah sebagai lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren salafiyah. Menurutnya, pesantren salafiyah, yaitu pesantren yang mengajarkan kitab-kitab Islam klasik. Sistem madrasah diterapkan untuk mempermudah teknik pengajaran sebagai pengganti metode sorogan. Pada pesantren ini tidak diajarkan pengetahuan umum. Sedangkan pesantren khalafiyah, selain memberikan pengajaran kitab

---

[40]Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005, 76; Abd. Rahman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Proklamasi ke Reformasi*, Yogjakarta: Kurnia Kalam, 2005, 185-186; dan Wardi Bakhtiar dkk., “Perkembangan Pesantren di Jawa Barat,” Bandung: Balai Penelitian IAIN Bandung, 1990, 22.

[41]Rahim, *Madrasah dalam Politik*, 76.

[42]Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional*, 185-186.

Islam klasik juga membuka sistem sekolah umum di lingkungan dan di bawah tanggung jawab pesantren.[43]

Di dalam penelitian ini, digunakan tiga tipologi pesantren sebagaimana diajukan oleh Abd. Mu'in di atas, yaitu salafiyah, khalafiyah, dan kombinasi. Pesantren salafiyah di sini dicirikan sebagai pesantren yang memfokuskan pada *tafaqquh fī ad-dīn,* pengkajian kitab-kitab klasik, dengan metode bandongan, sorogan, maupun klasikal. Pengkajian kitab-kitab klasik dengan metode klasikal yang sering disebut lembaganya dengan madrasah diniyah ini dimasukkan menjadi bagian dari ciri pesantren salafiyah karena lembaga itu menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 30 ayat (4) dimasukkan sebagai bagian dari pendidikan keagamaan, tidak dikelompokkan ke dalam sekolah umum yang beriri khas Islam. Pesantren khalafiyah adalah pesantren yang telah mengadopsi sistem pendidikan klasikal dengan kurikulum yang tertata dan mengintegrasikan pengetahuan umum, baik dalam bentuk madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam maupun sekolah umum itu sendiri. Salah satu ciri pesantren, yaitu mengajarkan kitab-kitab klasik dengan metode bandongan, sorogan, maupun klasikal, ditiadakan dari kotegori pesantren khalafiyah ini. Perpaduan ciri-ciri pesantren salafiyah dan khalafiyah di dalam penelitian ini disebut dengan pesantren kombinasi.

Tipologi yang peneliti gunakan di atas sedikit berbeda dengan tipologi yang digunakan oleh Departemen Agama. Ketika memberikan keterangan terhadap tabel pondok pesantren, Departemen Agama membagi pesantren ke dalam tiga tipologi, yaitu salafiyah, khalafiyah atau aṣriyah, dan kombinasi. Pesantren salafiyah diberi batasan dengan pesantren yang hanya menyelenggarakan atau mengutamakan pengajian kitab dan tidak menyelenggarakan pendidikan formal. Pesantren khalafiyah atau aṣriyah adalah pesantren yang hanya menyelenggarakan atau mengutamakan pendidikan formal. Sedangkan pesantren kombinasi adalah pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dan pengajian kitab.[44] Sayangnya, Departemen Agama ternyata hanya membagi tipologi santri ke dalam dua macam, yaitu santri yang hanya

[43]Wardi Bakhtiar dkk., "Perkembangan Pesantren di Jawa Barat," 22.

[44]Dirjen Pendis, *Statistik Pendidikan Agama dan Keagmaan Tahun Pelajaran 2006-2007,* Jakarta: Dirjen Pendis Depag RI, 2007, 146.

mengaji dan santri yang di samping mengaji juga sekolah.[45] Apabila tipologi santri dibagi dua seperti itu, maka tipologi pesantren sebagaimana yang diajukan oleh Husni Rahim dan Assegaf seperti telah dijelaskan di atas tampaknya lebih tepat.

C. Pembaruan Pendidikan Islam: Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis data tentang pembaruan pendidikan di pesantren adalah teori sistem yang diadaptasi oleh Azyumardi Azra dari Don Adams.[46] Ada tiga masalah penelitian yang dianalisis dengan teori ini, yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembaruan pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri, bagaimana proses terjadinya pembaruan pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri, baik terkait dengan pembaruan institusi, tujuan, materi pembelajaran, metode, pendidik, peserta didik, sarana dan prasarana, dan evaluasi, dan apa saja implikasi pembaruan pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri.

Teori ini berangkat dari asumsi bahwa pembaruan di masyarakat merupakan varibel yang menentukan pembaruan pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan dianggap sebagai obyek modernisasi. Dalam konteks ini, pendidikan di negara-negara yang tengah menjalankan program modernisasi pada umumnya dipandang masih terbelakang dalam berbagai hal, dan karena itu sulit diharapkan bisa memenuhi dan mendukung program modernisasi. Karena itulah pendidikan harus diperbaharui, sehingga dapat memenuhi harapan dan fungsi yang dipikulkan kepadanya. Setelah itu, pendidikan dipandang sebagai suatu variabel yang mempengaruhi pembaruan di masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap merupakan prasyarat dan kondisi yang mutlak bagi masyarakat untuk menjalankan program dan mencapai tujuan-tujuan pembaruan. Tanpa pendidikan yang memadai, akan sulit bagi masyarakat manapun untuk mencapai kemajuan.[47] Oleh karena itu, Harbison dan

---

[45]Dirjen Pendis, *Statistik Pendidikan Agama dan Keagmaan,* 133.

[46]Don Adams menggunakan pendekatan ini dalam bukunya *Education and Modernization,* Reading, Mass,: Addison-Wesley Publishing Co. & Pittsburg University, 1970. Lihat Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*, 32.

[47]Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*, 31-32.

Myers sebagaimana dikutip Azra, berpandangan bahwa "pendidikan merupakan kunci yang membuka pintu ke arah modernisasi".[48]

Ketika mengkaji pendidikan dan modernisasi, Don Adams menemukan lima variabel yang mempengaruhi pembaruan pendidikan. Kelima variabel ini, menurut Azra, dapat pula diterapkan dalam agenda pembaruan pendidikan Islam dalam konteks Indonesia secara keseluruhan.[49]

1. Ideologis-normatif: Perubahan orientasi ideologis yang diekspresikan dalam norma menuntut sistem pendidikan untuk memperluas dan memperkuat norma itu dalam membentuk wawasan peserta didik. Dalam kerangka ini, pendidikan dipandang suatu instrumen terpenting bagi pembinaan *nation building.*
2. Mobilisasi politik: Pergeseran orientasi politik juga menurut pembarauan pendidikan untuk mendidik, mempersiapkan, dan menghasilkan kepemimpinan modernitas dan innovator yang dapat memelihara dan bahkan meningkatkan kecenderungan politik itu.
3. Mobilisasi ekonomi: Kebutuhan akan tenaga kerja yang handal menuntut sistem pendidikan untuk mempersiapkan anak didik menjadi SDM yang unggul dan mampu mengisi berbagai lapangan kerja yang tercipta dalam proses pembangunan. Difersifikasi yang terjadi dalam sektor-sektor ekonomi, bahkan mengharuskan sistem pendidikan untuk melahirkan SDM yang spesialis dalam berbagai bidang profesi. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga pendidikan Islam tidak memadai lagi sekedar menjadi lembaga "transfer" dan "transmissi" ilmu-ilmu Islam, tetapi sekaligus juga harus dapat memberikan keterampilan dan keahlian.
4. Mobilisasi sosial: Peningkatan harapan bagi mobilitas sosial dalam modernisasi menuntut pendidikan untuk memberikan akses ke arah tersebut. Pendidikan tidak cukup lagi sekedar pemenuhan kewajiban menuntut ilmu belaka, tetapi harus juga memberikan modal dan kemungkinan akses bagi peningkatan sosial.

---

[48]Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*, 32 Lihat juga Harbison, F dan C. A. Myers, *Education, Manpower, and Growth Strategies of Human Resourses Development,* New York: McGraw Hill, 1964, 181.

[49]Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*, 32.

5. Mobilisasi kultural: Modernisasi yang menimbulkan perubahan-perubahan kultural menuntut sistem pendidikan untuk mampu memelihara stabilitas dan mengembangkan warisan kultural yang kondusif bagi pembaruan.[50]

Dalam rangka merespons kelima variabel di atas, ada tiga variabel pendidikan yang diperbarui:

1. Modernisasi administratif: Modernisasi menuntut diferensiasi sistem pendidikan untuk mengantisipasi dan mengakomodasi berbagai kepentingan diferensiasi sosial, teknik, dan manajerial. Antisipasi dan akomodasi tersebut haruslah dijabarkan dalam bentuk formulasi, adopsi, dan implementasi kebijaksanaan pendidikan.
2. Differensiasi struktural: Pembagian dan difersifikasi lembaga-lembaga pendidikan sesuai dengan fungsi-fungsi yang akan dimainkannya. Dengan demikian, dalam masyarakat yang tengah mengalami proses modernisasi, lembaga pendidikan yang bersifat umum saja tidak lagi memadai. Pendidikan haruslah memberikan peluang dan bahkan mengharuskan pembentukan lembaga-lembaga pendidikan khusus yang diarahkan untuk mengantisipasi diferensiasi sosial-ekonomi yang terjadi.
3. Ekspansi kapasitas: Perluasan sistem pendidikan untuk menyediakan pendidikan bagi sebanyak-banyak peserta didik sesuai kebutuhan yang dikehendaki berbagai sektor masyarakat. Ekspansi kapasitas itu harus disertai dengan memperhitungkan kebutuhan berbagai sektor masyarakat, khususnya menyangkut lapangan kerja yang tersedia.[51]

Pembaruan pendidikan yang menekankan pada ketiga variabel di atas akan menghasilkan perubahan beberapa variabel kehidupan masyarakat.

1. Perubahan sistem nilai: Dengan memperluas "peta kognitif" peserta didik, maka pendidikan menanamkan nilai-nilai yang merupakan alternatif bagi sistem nilai tradisional. Perluasan wawasan ini akan merupakan pendorong bagi tumbuh dan berkembangnya "semangat untuk berprestasi" (n-ach, *need of achievement),* dan mobilitas sosial.

---

[50]Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*, 33-34.

[51]Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*, 34-35.

2. Output politik: Kepemimpinan modernitas dan innovator yang secara langsung dihasilkan sistem pendidikan dapat diukur dengan perkembangan kuantitas dan kekuatan birokrasi sipil-militer, intelektual dan kader-kader administrasi politik lainnya, yang direkrut dari lembaga-lembaga pendidikan.
3. Output ekonomi: Ini dapat diukur dari tingkat ketersediaan SDM atau tenaga kerja yang terlatih dan siap pakai, baik *white collar* maupun *blue collar.*
4. Output sosial: Dapat dilihat dari tingkat integrasi sosial dan mobilitas peserta didik ke dalam masyarakat secara keseluruhan.
5. Output kultural: Tercermin dari upaya-upaya pengembangan kebudayaan ilmiah, rasional, dan inovatif; peningkatan peran integrarif agama, dan pengembangan bahasa pendidikan.[52]

Kelima variabel di atas yang merupakan out put dari pembaruan pendidikan pada gilirannya akan menjadi variabel yang menuntut pembaruan pendidikan pada waktu berikutnya.

Keseluruhan variabel di atas, yaitu lima variabel yang mempengaruhi pembaruan pendidikan, tiga variabel dalam pembaruan pendidikan, dan lima variabel hasil dari pembaruan pendidikan, dan beberapa variabel lain akan digunakan untuk menganalisis pembaruan pendidikan di Pesantren Lirboyo, tempat penelitian ini dilakukan.

Sedangkan fokus penelitian ini adalah mengapa sistem pendidikan tradisional di pesantren ini tetap bertahan dan berkembang ketika dihadapkan dengan lembaga yang lebih teratur dan modern. Tetap bertahannya pesantren, sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam, menurut Azra, secara implisit mengisyaratkan bahwa dunia Islam tradisi dalam segi-segi tertentu masih tetap relevan di tengah deru modernisasi. Pada awalnya, dunia pesantren terlihat "enggan" dan "rikuh" dalam menerima modernisasi. Tetapi secara gradual, pesantren kemudian melakukan akomodasi dan konsesi tertentu untuk kemudian menemukan pola yang dipandangnya cukup tepat guna menghadapi modernisasi dan perubahan yang kian cepat dan berdampak luas. Tetapi, semua akomodasi

[52]Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*, 35-36.

dan penyesuaian itu dilakukan pesantren tanpa mengorbankan esensi dan hal-hal dasariah lainnya dalam eksistensi pesantren.[53]

Ketahanan pesantren juga disebabkan oleh situasi sosial dan lingkungan kultural Jawa yang *involutif* dan menekankan harmoni. Kultur Jawa yang *involutif* menjadikannya mampu menyerap kebudayaan luar melalui suatu proses *interiosasi,* tanpa kehilangan identitasnya sebagai kebudayaan Jawa. Kultur ini membuat pesantren dengan *canggih* mampu bertahan terhadap segala perubahan dari luar yang dapat mengancam eksistensinya.[54]

Di samping itu, sebagai lembaga *indigenous,* pesantren muncul dan berkembang dari pengalaman sosiologis masyarakat lingkungannya. Dengan kata lain pesantren mempunyai keterkaitan erat yang tidak terpisahkan dengan komunitas lingkungannya. Terlepas dari perubahan-perubahan sosio-kultural dan keagamaan yang terus berlangsung dalam kaum Muslimin Indonesia sekarang ini, harapan masyarakat kepada pesantren tidak berkurang.[55]

Di samping itu, kyai pesantren dipandang kharismatik oleh masyarakatnya dan tidak boleh digugat juga menjadi variabel penentu ketahanan pesantren.[56] Kyai, sebagaimana digambarkan Ziemek, adalah sosok yang kuat kecakapan dan pancaran kepribadiannya. Kemampuan kyai menggerakan massa yang bersimpati dan menjadi pengikutnya akan memberikannya peran strategis sebagai pemimpin informal masyarakat melalui komunikasi intensif dengan penduduk yang mendukungnya.[57] Dalam kedudukan seperti itu kyai dapat disebut sebagai *agent of change* dalam masyarakat yang berperanan penting dalam suatu proses perubahan sosial. Sebagai seorang pemimpin pesantren, kepemimpinan seperti itu ikut menentukan kedudukan dan kebesaran pesantrennya.

Berangkat dari teori di atas, dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang menjadikan pesantren survive dan bertahan adalah akomodasi pesantren terhadap perubahan tanpa mengorbankan identitasnya, keterkaitan

---

[53]Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*, 107-108.

[54]Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*, 147.

[55]Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*, 108.

[56]Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*, 147.

[57]Ziemek, *Pesantren,* 136.

pesantren dengan komunitas lingkungannya, dan posisi kharismatik kyai sebagai pimpinan pesantren.

Dalam rangka menjelaskan corak pembaruan pendidikan di Pesantren Lirboyo peneliti menggunakan paradigma[58] pendidikan yang akhir-akhir ini banyak digunakan untuk membedah dan menganalisis problematika pendidikan.

Ketika memberikan kata pengantar buku *Ideologi-ideologi Pendidikan Islam* karya William F. O'neil, Mansour Fakih mengutip pendapat S. Aronowitz dan Henry A. Giroux dalam bukunya *Education Under Siege*, yang membagi paradigma pendidikan menjadi tiga aliran, yaitu konservatif, liberal, dan kritis.

Pertama, paradigma konservatif. Bagi mereka ketidakkesederajatan masyarakat merupakan suatu keharusan alami, suatu hal yang mustahil bisa dihindari serta sudah merupakan ketentuan sejarah atau bahkan takdir Tuhan. Perubahan sosial bagi mereka bukanlah suatu yang harus diperjuangkan, karena perubahan hanya akan membuat manusia lebih sengsara saja. Dalam bentuknya yang klasik atau awal, paradigma konservatif dibangun berdasarkan keyakinan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak dapat merencanakan perubahan atau mempengaruhi perubahan sosial, hanya Tuhan lah yang merencanakan keadaan masyarakat dan hanya Dia yang tahu makna di balik itu semua. Dengan pandangan seperti itu, kaum konservatif lama tidak menganggap rakyat memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk merubah kondisi mereka.[59]

---

[58]Paradigma menurut Thomas Kuhn adalah citra mendasar tentang apa yang menjadi masalah pokok ilmu di masa tertentu. Paradigma membantu menentukan apa yang mesti dikaji, pertanyaan apa yang mestinya diajukan, bagaimana cara mengajukannya, dan aturan apa yang harus diikuti dalam menafsirkan jawaban. Paradigma adalah unit konsensus terluas dalam bidang ilmu tertentu dan membantu membedakan suatu komunitas ilmiah dari komunitas ilmiah lainnya. Untuk elaborasi baca George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, hlm. A-12 – A-13.

[59]Mansour Fakih, "Ideologi dalam Pendidikan," dalam William F. O'neil, *Ideologi-ideologi Pendidikan*, Terjemahan Omi Intan Naomi dari *Educational Ideologies: Contemporary Expression of Educational Philosophies*, Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. xiii.

Keyakinan seperti ini dalam teologi Islam banyak dikembangkan oleh aliran Jabbariyah.[60]

Namun dalam perjalanan selanjutnya, paradigma konservatif cenderung lebih menyalahkan subyeknya. Bagi kaum konservatif, mereka yang menderita yaitu orang-orang miskin, buta huruf, kaum tertindas dan mereka yang dipenjara menjadi demikian karena salah mereka sendiri. Karena toh banyak orang lain yang ternyata dapat bekerja keras dan berhasil meraih sesuatu. Banyak orang ke sekolah dan belajar untuk berperilaku baik dan oleh karenanya tidak dipenjara. Kaum miskin haruslah sabar dan belajar untuk menunggu sampai giliran mereka datang, karena pada akhirnya kelak semua orang akan mencapai kebebasan dan kebahagiaan. Kaum konservatif sangat melihat pentingnya harmoni dalam masyarakat dan menghindarkan konflik dan kontradiksi.[61] Argumen kedua dari paradigma konservatif ini mendekati pandangan teologis Asy`ariyah yang mengajukan konseb *kasb,* di mana manusia dapat berikhtiar walaupun terwujudnya hasil usaha itu pada hakikatnya tergantung Tuhan.[62]

Kedua, paradigma liberal. Golongan ini berangkat dari keyakinan bahwa memang ada masalah di masyarakat tetapi bagi mereka pendidikan tidak ada kaitannya dengan persoalan politik dan ekonomi masyarakat. Dengan keyakinan seperti itu tugas pendidikan juga tidak ada sangkut-pautnya dengan persoalan politik dan ekonomi. Sungguhpun demikian, kaum liberal selalu berusaha untuk menyesuaikan pendidikan dengan keadaan ekonomi dan politik di luar dunia pendidikan. Pendidikan dimaksudkan sebagai media untuk mensosialisasikan dan mereproduksi nilai-nilai tata susila keyakinan dan nilai-nilai dasar agar masyarakat luas berfungsi secara baik. Dalam rangka menjaga stabilitas jangka panjang, maka upaya pembaruan bagi kaum liberalis harus dilakukan secara evolusioner.[63] Dengan agenda liberal seperti itu, pendidikan tidak mempunyai tempat untuk secara kritis mempertanyakan ketimpangan

---

[60]Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn Isma`īl Abū `Abdillah al-Bukhāriy al-Ju`fiy, *Khalq Af`āl al`Ibād,* Riyāḍ, Dār al-Ma`ārif al-Sa`ūdiyyah, 1978, hlm. 114.

[61]Mansour Fakih, “Ideologi dalam Pendidikan,” hlm. xiii.

[62]Abū ah-Ḥasan `Ali ibn Isma`īl al-Asy`ari, *Maqālāt al-Islamiyyin wa al-Ikhtilāf al-Muṣallīn,* Beirūt: Dār Ipyā’ al-Turāth al-`Arabiy, tt, hlm. 539.

[63]Mansour Fakih, “Ideologi dalam Pendidikan,” hlm. xiii-xiv.

struktur sosial, ekonomi, dan politik. Paradigma inilah yang kelihatannya banyak mendominasi lembaga pendidikan formal di Indonesia.

Ketiga, paradigma kritis. Pendidikan bagi mereka merupakan arena perjuangan politik. Jika bagi konservatif pendidikan bertujuan untuk menjaga status quo, sementara bagi kaum liberal untuk perubahan moderat, maka paradigma kritis menghendaki perubahan struktur secara fundamental dalam politik ekonomi masyarakat di mana pendidikan berada. Dalam perspektif kritis, urusan pendidikan adalah melakukan refleksi kritis terhadap ideologi dominan ke arah transformasi sosial. Tugas utama pendidikan adalah menciptakan ruang agar sikap kritis terhadap sistem dan struktur ketidakadilan, serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial yang lebih adil. Dengan kata lain, tugas utama pendidikan adalah memanusiakan kembali manusia yang mengalami dehumanisasi karena sistem dan struktur yang tidak adil.[64] Paradigma kritis melatih peserta didik untuk mengidentifikasi berbagai ketimpangan struktur sosial, ekonomi, dan politik dan menganalisisnya. Oleh karena itu, tugas utama pendidikan adalah memberikan ruang kepada peserta didik untuk menciptakan struktur sosial baru yang lebih baik.

D. Pesantren dan Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia

Secara yuridis, politik pendidikan di Indonesia dituangkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan. Sampai kini telah diterbitkan 3 (tiga) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Undang Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 Tahun 1950 jo Undang-undang No. 12 Tahun 1954 yang diterbitkan pada masa orde lama, UU Sisdiknas No. 2 tahun 1989 pada masa orde baru, dan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pada masa reformasi. Pesantren sebagai cikal bakal lembaga pendidikan yang asli Indonesia baru mendapat pengakuan secara yuridis pada tahun 2003 melalui UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Sementara madrasah akhirnya diakui menjadi sub sistem dari sistem pendidikan nasional setelah secara perlahan dan pasti mengurangi dan memarjinalkan pelajaran ilmu-ilmu agama. Hal ini inilah yang menjadi fokus sub bab ini.

---

[64]Mansour Fakih, “Ideologi dalam Pendidikan,” hlm. xvi.

1. Pesantren dan Madrasah dalam Politik Pendidikan pada Masa Orde Lama: Dominasi Ilmu-ilmu Umum atas Ilmu-ilmu Agama

Situasi sosial politik pascakemerdekaan yang belum stabil[65] mempengaruhi atmosfir pendidikan nasional. Masa jabatan Menteri Pengajaran yang relatif singkat,[66] banyaknya fasilitas sekolah yang hancur akibat perang atau karena dipakai sebagai barak militer, dan minimnya jumlah guru akibat keikut-sertaan mereka dalam perang kemerdekaan[67] merupakan bukti belum kondusifnya iklim pendidikan.

Tindakan pertama pemerintah dalam mengisi kemerdekaan adalah menempatkan agama sebagai fondasi dalam membangun bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga dan keempat, bahwa kemerdekaan Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah dan Pancasila yang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar negara. Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

---

[65]Ketidakstabilan kondisi sosial politik itu disebabkan oleh beberapa hal di antaranyta adanya upaya Belanda untuk menjajah kembali bangsa Indonesia sehingga timbul Agresi Belanda I pada 21 Juli 1947 dan Agresi Belanda II pada 19 Desember 1948, di beberapa daerah muncul beberapa gerakan yang menimbulkan ketegangan sosial, seperti gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada 1948, gerakan Darul Islam pada tahun 1948-1962 di Jawa Barat pimpinan Karto Suwiryo, pergolakan Darul Islam di Aceh pada tahun 1953-1959 pimpinan Daud Beureueh, pemberontakan Darul Islam Sulawesi Selatan pada tahun 1950-1959 pimpinan Kahar Muzakkar, pemberontakan PRRI di Sumatera Barat pada tahun 1958, juga gejolak di Sumatera Timur, terjadinya peralihan UUD 1945 ke UUD RIS 1949, dan munculnya multi partai dengan ideologinya masing-masing. Untuk elaborasi baca Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional,* 56-57.

[66]Selama kurun waktu antara Agustus 1945 sampai dengan September 1950 terjadi pergantian Menteri Pengajaran sebanyak 12 kali, yang berarti masing menteri menjabat sekitar 5 bulan. Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional,* 55.

[67]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman,* Jakarta: Balai Pustaka, 1986, 156-158 dan 166-168.

Terkait dengan pendidikan, UUD 1945 Bab XIII pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, dan ayat (2) menetapkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.[68]

Berangkat dari beberapa pasal dalam UUD 1945 di atas dapat diketahui bahwa bangsa Indonesia pada mulanya berketetapan untuk tidak memilih sistem pendidikan yang dualistik sebagaimana strategi kolonial tetapi menjadikan berbagai sistem pendidikan yang sudah berkembang menjadi beberapa sub sistem yang menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional tanpa menganaktirikan suatu sistem pendidikanpun. Di samping itu, bangsa Indonesia juga mengorientasikan seluruh kehidupannya, termasuk di dalamnya pendidikan baik yang mengkonsentrasikan pelajaran umum apalagi agama, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan sebagai bukti syukur terhadap rahmat yang Allah telah berikan berupa kemerdekaan.

Badan Pekerja Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), sebagai badan legislatif pada waktu itu, dalam rangka merealisasikan UUD di atas mengusulkan agar pemerintah Indonesia mengambil kebijaksanaan dan langkah-langkah untuk memajukan pendidikan dan pengajaran, baik pada lembaga informal, non-formal maupun formal. Dalam memajukan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya diusahakan agar pengajaran di langgar, surau, masjid, dan madrasah berjalan terus dan ditingkatkan. Usulan tersebut diterbitkan pada tanggal 22 Desember 1945 dalam berita RI tahun II No. 4 dan 5 halaman 20 kolom 1.[69]

Pada tanggal 27 Desember 1945 BP KNIP juga mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K) untuk mengadakan inovasi pendidikan dengan mendasarkan kepada 10 (sepuluh) pemikiran. Dua di antara sepuluh pemikiran itu menyangkut pendidikan agama dan keagamaan. Pertama, pengajaran agama hendaknya mendapat tempat yang teratur dan seksama, sehingga cukup

---

[68]C. S. T Kansil ., *Mendalami P4, UUD 1945, dan GBHN,* Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985, 428-435.

[69]Rahim, *Madrasah dalam Politik,* 16 dan Abdurrahman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah: Peraturan Perundangan,* Jakarta: Dharma Bhakti, 1984, 19.

mendapat perhatian yang semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. Tentang cara melakukan ini sebaiknya kementerian mengadakan perundingan dengan Badan Pekerja. Kedua, madrasah dan pesantren-pesantren yang pada hakikatnya adalah suatu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata, yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan yang nyata berupa tuntunan dan bantuan materiil dari pemerintah.[70]

Untuk memberikan kepastian tentang pengajaran agama, maka pada tahun 1946 dikeluarkan Penetapan Bersama antara Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan dengan Menteri Agama tertanggal 12 Desember 1946 No. 1285/K-7 (Agama) dan 2 Desember 1946 No. 1142/Bhg. A (Pengajaran) yang menetapkan bahwa pendidikan agama hanya dapat diberikan mulai kelas IV SR, sedangkan kelas I, II, III, pendidikan Agama tidak boleh diberikan.[71] Setelah diadakan negosiasi antara Kementerian Agama yang diwakili Mahmud Yunus dan Kementerian PP dan K yang diwakili Hadi ditetapkan peraturan baru dengan nomor 1432/Kab. Tanggal 20 Januari 1951 (Pendidikan) dan K.1/651 tanggal 20 Januari 1951 (Agama). Ketetapan yang berisi 10 pasal dan 1 pasal penutup ini menjelaskan pada pasal 2 ayat (1) bahwa di sekolah-sekolah rendah pendidikan agama dimulai di kelas 4, banyaknya 2 (dua) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu; ayat (2), di lingkungan yang istimewa pendidikan agama dapat dimulai di kelas I dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan, tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah lainnya di lain-lain lingkungan.[72]

Keputusan bersama ini memperlihatkan bahwa pembelajaran agama sebagai disiplin ilmu tidak perlu memakan banyak alokasi waktu

---

[70]Kesepuluh usulah BP KNIP dapat dibaca pada Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional,* 62-64.

[71]Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,* Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995, 357.

[72]Secara lengkap isi keputusan bersama dapat dilihat pada Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan¸*Jakarta: Raja Wali, 1996, 235-239.

lembaga-lembaga pendidikan yang tidak berlabelkan Islam. Kebijakan ini dirasa tidak bermasalah sepenjang pemerintah juga memperhatikan perkembangan ilmu agama dan lembaga-lembaga pendidikan yang mengembangkannya, mengingat keahlian tentang agama juga dibutuhkan dalam mengisi kemerdekaan. Sayangnya, Orde Lama dalam waktu belakangan, sebagaimana nanti dapat dilihat, juga tidak menempatkan madrasah, apalagi pesantren, sebagai sub sistem dari sistem pendidikan nasional tetapi memposisikan dalam sistem agama.

Dalam rangka menjalankan amanat BP KNIP, pada tanggal 2 Oktober 1946 dan 27 Juni 1947, Kementerian PP dan K mengadakan musyawarah yang bertujuan untuk memperbarui pendidikan dan pengajaran, di antaranya merekomendasikan, bahwa lembaga pendidikan agama, baik pesantren maupun madrasah perlu untuk dipertinggi dan dimodernisasikan serta diberikan bantuan biaya.[73] Rekomendasi tersebut didasarkan kepada keadaan madrasah pada waktu itu. Deliar Noer menemukan beberapa kelemahan madrasah seperti belum adanya buku standar sebagai kurikulum, administrasi yang lemah, para guru yang tidak profesional, di mana mereka hanya berniat untuk mengembangkan agama, sementara pihak pengelola tidak memperhatikan kesejahteraannya.[74]

Dalam rangka meningkatkan profesionalitas guru madrasah, Departemen Agama melalui jawatan pendidikannya[75] pada tahun 1950 mendirikan Sekolah Guru Agama Islam (SGAI). Pada tahun 1951 Sekolah Guru tersebut, yang akhirnya menjadi Pendidikan Guru Agama (PGA) telah didirikan di Tanjung Pinang, Kotaraja, Padang, Banjarmasin, Jakarta, Tanjung Karang, Bandung dan Pamekasan.[76]

Undang-undang tentang sistem pendidikan yang pertama kali dimiliki oleh bangsa Indonesia ternyata memberlakukan madrasah secara

---

[73]Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah,* 19.

[74] Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900~1942,* Jakarta: LP3ES, 1995. 53.

[75]Tugas Jawatan Pendidikan di lingkungan Departemen Agama pada waktu itu meliputi memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikelir; memberi pengetahuan umum di madrasah; dan mengadakan Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Baca Maksum, *Madrasah: Sejarah dan,* 123.

[76]Maksum, *Madrasah: Sejarah dan,* 125.

diskriminatif. Di dalam Undang Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 Tahun 1950 dinyatakan bahwa belajar di madrasah yang telah mendapat pengakuan Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar,[77] padahal ketentuan yang sama tidak diperlakukan untuk sekolah. Walaupun seperti itu, ketentuan tersebut dianggap sebagai pengakuan terhadap eksistensi madrasah dalam sistem pendidikan nasional.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang tersebut, Kementerian Agama menggariskan kebijakan bahwa madrasah yang diakui dan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kewajiban belajar haruslah terdaftar pada Kementerian Agama. Sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan diri itu, madrasah itu harus mengajarkan pelajaran agama sebagai pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu secara teratur di samping pelajaran umum.[78]

Dengan persyaratan tersebut, pada tahun 1954, jumah madrasah tingkat rendah yang terdaftar sudah mencapai 13.057. Dengan jumlah ini, sedikitnya 1.927.777 telah terserap untuk mengenyam pendidikan agama. Laporan yang sama juga menyebutkan jumlah madrasah tingkat pertama (tsanawiyah) mencapai 776 buah dengan jumkah murid sebanyak 87.932. Adapun jumlah madrasah tingkat atas (aliyah) diperkirakan mencapai 16 madrasah dengan jumlah murid sebanyak 1.881. Dengan demikian, berdasarkan laporan ini, jumlah madrasah secara keseluruhan sudah mencapai 13.849 dengan jumlah murid sebanyak 2.017.590.[79] Perkembangan ini menunjukkan bahwa madrasah memberikan sumbangan yang signifikan bagi proses pencerdasan dan pembinaan akhlak bangsa.

Dalam rangka memberikan motivasi kepada madrasah untuk meningkatkan kwalitas akademiknya, pemerintah juga memberikan bantuan finansial. Pada tahun 1960-an, menurut temuan van Bruinessen, Departemen Agama memberikan subsidi kepada madrasah lokal sebesar Rp.10,- permurid, tetapi untuk madrasah yang berafiliasi dengan

---

[77]Bab VI tentang Kewajiban Belajar, Pasal 10, ayat (2). Secara lengkap Undang-undang ini dapat dilihat pada Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, 223-232.

[78]I Djumhur dan Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, 223.

[79]Yunus, *Sejarah Pendidikan*, 394.

organisasi berskala nasional subsidi dinaikkan menjadi tidak kurang dari Rp.30,- setiap murid. Kebijakan ini mempunyai dampak terhadap pertambahan jumlah madrasah.[80] Pemberian bantuan ini didasarkan kepada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1960 yang berisi 8 Bab dan 17 Pasal.[81]

Untuk mendapatkan bantuan tersebut, lembaga pendidikan agama itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya, di samping mengajarkan agama Islam, lembaga itu harus mengajarkan pengetahuan umum yang tingkatannya sama dengan pelajaran umum bagi sekolah rendah,[82] mengajarkan Bahasa Indonesia, ilmu pasti, ilmu bumi, sejarah umum, ilmu hayat, dan Bahasa Inggris bagi madrasah tsanawiyah,[83] dan mengajarkan aljabar-grafik, ilmu ukur ruang, ilmu bumi ekonomi, tata negara, sejarah kebudayaan, kesusasteraan Indonesia, dan ekonomi.[84]

Selain itu, Departemen Agama dalam rangka melaksanakan UU Pokok Pendidikan dan Pengajaran di atas, pada tahun 1958/1959 mengadakan pembaruan sistem pendidikan pada madrasah dengan memperkenalkan Madrasah Wajib Belajar (MWB).[85] Lama belajarnya 8 tahun dan bertujuan menunjang kemajuan ekonomi, industri, dan transmigrasi. Disiplin ilmu yang diberikan di samping ilmu pengetahuan agama, umum, juga ketrampilan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa setelah tamat, sekitar umur 15 tahun, anak sudah dapat bekerja sesuai dengan UU Perburuan yang berlaku.[86] Sayangnya, karena keterbatasan sarana, kurangnya guru yang mumpuni, dan kurangnya respons masyarakat MWB tidak berjalan sebagaimana diharapkan.

---

[80]Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacanba Baru,* Terjemahan Farid Wajidi dari *Traditionalist Muslims in a Modernizing world: The Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Order Politics, Fictional Conflict, and the Search for a New Discourse,* Yogjakarta: LkiS, 1994, 80.

[81]Secara lengkap Peraturan Menteri Agama ini dapat dilihat pada Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,* 240-247.

[82]Bab II, pasal 4, ayat (1), point c.

[83]Bab II, pasal 4, ayat (2), point b.

[84]Bab II, pasal 4, ayat (3), point b.

[85]Muljanto Sumardi, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia 1945-1975,* Jakarta: LPIAK Balitbang Agama Depag, 1977, 46-54.

[86]Maksum, *Madrasah: Sejarah dan,* 140.

Berdasarkan peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 1963 konsep MWB sebagai sistem pendidikan agama waktu itu dintegrasikan ke dalam madrasah ibtidaiyah, yang lama belajarnya 6 atau 7 tahun. Pendidikan ketrampilan sebagaimana cita-cita MWB dijalankan melalui kelas masyarakat yang kemudian diganti dengan nama kelas pembangunan seperti yang berlaku di lingkungan Departemen P & K.[87]

Walaupun pesantren identik dengan keaslian Indonesia (*indigenous*), sebab lembaga pendidikan yang serupa dengan pesantren ini sudah ada sejak masa kekuasaan Hindu-Budha sehingga Islam tinggal meneruskan dan mengislamkannya[88] dan madrasah sebagai hasil pembaruan dalam upaya penyesuaian pesantren terhadap tradisi persekolahan yang dikembangkan oleh kolonial[89] ternyata lebih diposisikan sebagai sistem agama. Ketetapan MPRS No.II/1960 Lampiran B (3) antara lain menyebutkan, madrasah hendaknya berdiri sebagai badan otonom di bawah Departemen Agama dan bukan di bawah pengawasan Departemen P & K. Dalam ketetapan tersebut juga dijelaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah mulai dari sekolah rakyat sampai dengan universitas tetapi bukan mata pelajaran wajib dan tergantung pada persetujuan orang tua siswa atau siswa yang sudah dewasa. Dalam penjelasannya bahkan dikemukakan bahwa mata pelajaran agama bukan merupakan faktor penentu dalam kenaikan kelas.[90]

Ketetapan MPRS di atas memperlihatkan bahwa Orde Lama meneruskan kebijakan kolonial yang memposisikan pesantren dan madrasah di luar sistem pendidikan dan menempatkan ilmu-ilmu keislaman dalam posisi marginal. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Pemerintah Hindia Belanda menjadikan sekolah yang berlabelkan Islam, seperti pesantren dan madrasah, dibiarkan hidup sendiri, tanpa pengakuan apa-apa kecuali dicurigai dan dikekang. Walaupun demikian, Maksum tetap memandang bahwa rekomendasi MPRS tersebut sebagai langkah

---

[87]Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah,* 21.

[88]Madjid, *Bilik-bilik Pesantren*, 3.

[89]Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, 4.

[90] Maksum, *Madrasah: Sejarah dan,* 130-131.

pengakuan atas eksistensi madrasah dalam kerangka pendidikan nasional.[91]

Politik pendidikan pada masa orde lama yaitu terpinggirkannya mata pelajaran agama pada sekolah umum dan dipoisisikannya madrasah dan pesatren di luar sistem pendidikan diduga disebabkan oleh adanya pertarungan kekuatan politik antara kelompok nasionalis dan agama pada awal kemerdekaan dan pada masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin ditambah dengan kelompok komunis. Hasil analisis ini juga didukung data tentang perubahan tujuan pendidikan yang berkorelasi dengan perubahan sistem politik yang dikembangkan pada waktu itu.[92]

2. Pesantren dan Madrasah dalam Politik Pendidikan pada Masa Orde Baru: Menuju Integrasi Monolitik

Sejak 1966 Indonesia diperintah oleh Orde Baru. Fokus perhatian Orde Baru ditujukan kepada stabilitas politik dan perkembangan ekonomi[93] dengan mengabaikan demokrasi. Pemilu dilaksanakan tanpa multipartai, bahkan sejak tahun 1973 jumlah partai disederhanakan menjadi tiga kontestan, dan pada tahun 1984 semua partai politik harus berasas tunggal, Pancasila.[94]

Naiknya Orde Baru dimulai setelah meletusnya G-30 S/PKI pada tahun 1965 yang mengalami kegagalan. Hal ini mengakibatkan berbagai aturan yang didasarkan pada Manipol Usdek diadakan perubahan. Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang "Agama, Pendidikan dan Kebudayaan," dengan jelas memperlihatkan kecenderungan

---

[91]Maksum, *Madrasah: Sejarah dan,* 130-131.

[92]Pada masa sistem politik demokrasi liberal, tujuan pendidikannya adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta susila serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Tujuan ini tertera dalam pasal 3 UUPP No. 4 Tahun 1950. Tujuan pendidikan ini dirubah pada Masa Nasakom. Pada masa yang disebutkan terakhir ini tujuan pendidikan adalah melahirkan warga-warga sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material yang berjiwa Pancasila. Untuk elaborasi baca Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional,* 67 dan 79.

[93]Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional,* Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS, 1981, 141-142.

[94]Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional,* 90.

pergeseran itu. Pada Bab I, Pasal 1 Ketetapan tersebut menyatakan merubah diktum Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Bab II Pasal 2 ayat (3) dengan menghapuskan kata:dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta apabila wali/murid dewasa menyatakan keberatan," sehingga kalimatnya berbunyi "menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Universitas-universitas Negeri."[95] Ketetapan itu memberi status yang lebih berarti pada pendidikan agama.

Setelah program Madrasah Wajib Belajar harus gulung tikar, Kementerian Agama terus menata kurikulum pendidikan madrasah sejalan dengan tuntutan pendidikan nasional. Pada tahun 1967, Menteri Agama mengeluarkan kebijakan untuk menegerikan sejumlah madrasah dalam semua tingkatan mulai dari tingkat Ibtidaiyah sampai dengan Aliyah. Melalui usaha ini sebanyak 123 Madrasah Ibtidaiyah telah dinegerikan sehingga menambah jumlah total Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) menjadi 358. Dalam waktu yang bersamaan, juga telah berdiri sebanyak 182 Madrasah Tsanawiyah Negeri dan 42 Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN).[96]

Sebagaimana kebijakan dalam partai politik dengan melakukan pemfusian, Orde Baru juga berencana untuk menghilangan dualisme penyelenggaraan pendidikan di Indonesia seperti praktik selama ini. Sebagai aplikasi rencana itu, pada tanggal 18 April 1972 Pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 tentang "Tanggung-jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan." Isi keputusan ini pada intinya menyangkut tiga hal: pertama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan; kedua, Menteri tenaga Kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan pegawai negeri; dan ketiga, Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negen.[97] Dua

---

[95]Secara lengkap isi Ketetapan MPRS ini dapat dilihat pada Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, 248-251.

[96]Maksum, *Madrasah: Sejarah dan*, 141.

[97] Hadari Nawawi, *Perundang-Undangan Pendidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

tahun berikutnya, Keppres itu dipertegas dengan Inpres No. 15 Tahun 1974 yang mengatur realisasinya.

Dengan Keppres dan Inpres tersebut, penyelenggaraan pendidikan umum dan kejuruan, termasuk di dalamanya pendidikan Islam, menjadi sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan menjadi bagian dari Sistem Pendidikan Nasional madrasah memang akan mendapat status yang sama dengan sekolah, tetapi, dengan status ini terdapat konsekuensi bahwa madrasah itu harus dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan umum dan kejuruan.[98] Hal yang terakhir ini mendapat reaksi keras dari kalangan pemimpin dan organisasi Islam, terutama karena pertimbangan politis, yakni kekhawatiran akan adanya proses sekuralisasi dalam bidang pendidikan di Indonesia. Di samping itu, umat Islam, yang pada waktu itu termarjinalisasi secara politis, berpikir bahwa keberadaan pendidikan keagamaan bukan hanya sekadar bentuk kelembagaan, tetapi juga merupakan simbolisme politik Islam di Indonesia.[99]

Di samping itu, Kepres dan Inpres di atas dipandang oleh sebagian umat Islam sebagai suatu manuver untuk mengabaikan peran dan manfaat madrasah, padahal madrasah merupakan wadah utama pendidikan dan pembinaan umat Islam, sekaligus sebagai lembaga formal bagi umat Islam sejak zaman penjajahan yang diselenggarakan oleh umat Islam.[100]

Memperhatikan resistansi umat Islam di atas, Pemerintah Orde Baru akhirnya mengambil langkah yang lebih operasional terkait dengan pembinaan madrasah. Pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri mengenai Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah." Dalam Surat Keputusan Bersama itu, masing-masing Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan

---

[98]Zakiah Daradjat, “Pengantar, “ dalam Maksum, *Madrasah: Sejarah dan,* viii dan Rahim, *Madrasah dalam Politik,* 18.

[99]Masykuri Abdillah dan Mastuki HS, “Pendidikan Satu Atap,” dalam *http://64.203.71.11/kompas-cetak/0003/18/opini/pend04.htm,* diakses tanggal 12 Maret 2008.

[100]Maksum, *Madrasah: Sejarah dan,* 145.

Kebudayaan, dan Kementerian Dalam Negeri memikul tanggungjawab dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan madrasah.[101]

Dalam SKB 3 Menteri tersebut, sejumlah diktum yang memperkuat posisi madrasah lebih ditegaskan dengan memerinci bagian-bagian yang menunjukkan kesetaraan madrasah dengan sekolah. Dalam Bab I, pasal 1, ayat (2) misalnya dinyatakan: Madrasah itu meliputi tiga tingkatan:

a) Madrasah Ibtidaiyah, setingkat dengan Sekolah Dasar.
b) Madrasah Tsanawiyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama.
c) Madrasah Aliyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Atas.

Selanjutnya dalam bab II pasal 2 disebutkan bahwa:

a) Ijazah Madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah Sekolah Umum yang setingkat.
b) Lulusan Madrasah dapat melanjutkan ke Sekolah Umum setingkat lebih atas.
c) Siswa Madrasah dapat berpindah ke Sekolah Umum yang setingkat

Mengenai pengelolaan dan pembinaan dinyatakan dalam bab IV pasal 4 sebagai berikut:

a) Pengelolaan Madrasah dilakukan oleh Menteri Agama.
b) Pembinaan mata pelajaran Agama pada Madrasah dilakukan oleh Menteri Agama.
c) Pembinaan dan pengawasan mutu mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri.[102]

Sebagai realisasinya, komposisi kurikulum madrasah harus sama dengan sekolah, berisi mata-mata pelajaran dengan perbandingan 70% mata pelajaran umum dan 30% pelajaran agama. Efek penyamaan kurikulum ini adalah bertambahnya beban yang harus dipikul oleh madrasah. Di satu pihak ia harus memperbaiki mutu pendidikan

---

[101]SKB 3 Menteri ini berisi 7 Bab 8 Pasal. Untuk lengkapnya Baca *Sarana Pelaksanaan Kurikulum Baru Madrasah Negeri,* Jakarta: Proyek Penelitian Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 1975/1976, 115-119.

[102] *Sarana Pelaksanaan Kurikulum Baru Madrasah Negeri,* 115-119.

umumnya setaraf dengan standar yang berlaku di sekolah. Di lain pihak, madrasah harus menjaga agar mutu pendidikan agamanya tetap baik.

SKB 3 Menteri di atas ternyata banyak dipermasalahkan oleh sebagian besar umat Islam terutama ulamanya, karena SKB 3 Menteri itu dianggap membuat siswa madrasah serba tanggung, tidak mengerti dengan baik pengetahuan agama, juga umum, sehingga akan mengakibatkan kelangkaan ulama. Untuk mencari solusinya, maka Departemen Agama, pada tahun 1987, di masa Menteri Munawir Sjadzali, mendirikan Madrasah Aliyah Program Khusus. Madrasah ini diharapkan menjadi lembaga mencetak calon ulama yang mengerti agama dengan baik juga pengetahuan umum, utamanya bahasa Arab dan Inggris.[103] Komposisi kurikulum madrasah yang pada tahun 1994 berganti nama dengan Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) ini adalah 70% pelajaran agama dan 30% pelajaran umum dengan penekanan pada Bahasa Arab dan Inggris secara intensif.

Sayangnya, MAPK/MAK ini tidak mempunyai payung hukum, karena madrasah yang diakui berdasarkan SKB 3 Menteri itu adalah yang komposisi kurikulumnya 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama. Bahkan, madrasah ini juga belum jelas posisinya dalam UU Sisdiknas No. 2 tahun 1989. MAPK/MAK, termasuk di dalam pendidikan keagamaan,[104] baru mendapatkan tempat dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.

Upaya mengintergrasikan madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional menemukan momentumnya dalam UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 28[105] dan 29 Tahun 1990 tentang

---

[103]Rahim, *Madrasah dalam Politik,* 21, 176-178.

[104]Dalam UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 pendidikan keagamaan telah dijelaskan definisi pada pasal 11 ayat (6) dan pada pasal 15 ayat (2) pendidikan keagamaan ini dimasukkan menjadi bagian dari pendidikan menengah, tetapi bentuk dari pendidikan keagamaan itu ternyata tidak tercantum dalam UU tersebut dan penjelasannya.

[105]Dalam Peraturan Pemerintah tersebut Pasal 4 ayat (3) tentang Pendidikan Dasar menyatakan bahwa SD dan SLTP yang berciri khas Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Tsanawiyah (MTs). Sedangkan definisi Madrasah Aliyah dijelaskan dalam Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum (SMU) pada Bab I, pasal 1, ayat (6) yang menyatakan bahwa Madrasah Aliyah adalah Sekolah Menengah Umum (SMU) yang berciri

Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kurikulum 1994 di mana madrasah mengalami perubahan definisi dari "Sekolah Agama" menjadi "Sekolah Umum berciri khas Islam".[106]

Perkembangan tersebut, menurut Azra, membawa implikasi yang cukup mendasar bagi keberadaan madrasah. Madrasah yang semula dipandang sebagai institusi pendidikan keagamaan, sekarang ini, ia dapat mengklaim diri menjadi sekolah umum plus. Oleh karena itu, madrasah mendapatkan beban tambahan yang cukup berat, karena di samping harus memberikan kurikulum sekolah umum yang setingkat secara penuh, ia juga harus memberikan materi-materi esensial keislamannya, yang selama ini telah diajarkan. Beratnya beban yang diemban oleh madrasah tersebut masih ditambah dengan rendahnya kualitas sumber-sumber daya pembelajaran.[107] Meskipun demikian, upaya-upaya tersebut tidak serta-merta bisa memposisikan pendidikan madrasah secara substansial sejajar dengan Pendidikan Umum (Sekolah).[108]

Sebagai bukti belum sejajarnya perlakukan pemerintah terhadap madrasah bila dibandingkan dengan sekolah dapat dilihat dari indeks biaya pendidikan per siswa di madrasah jauh lebih kecil dibanding di sekolah umum, meski sejak awal tahun 1990-an telah terjadi kenaikan secara bertahap. Pada tahun anggaran 1999/2000 biaya pendidikan per siswa MIN (Ibtidaiyah) adalah Rp 19.000,- sedangkan SDN Rp 100.000,- (1:5,2), MTsN (Tsanawiyah) Rp 33.000,- sedangkan SMPN Rp 46.000,- (1:1,4), MAN (Aliyah Rp.51.500,- sedangkan SMUN Rp 67.000,- (1:1,3), dan IAIN Rp 50.000,- sedangkan UN/Institut Negeri Rp 150.000,- (1:3). Perbedaan ini akan sangat timpang jika perhitungan indeks biaya ini mengikutsertakan juga madrasah/sekolah swasta, karena sebagian besar madrasah berstatus swasta dan umumnya di bawah standar.[109]

---

khas Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.

[106]Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi,* Jakarta: Kompas, 2002, 71.

[107]Azra, *Paradigma Baru,* 71.

[108]Ahmad Gunaryo, “Dualisme Pendidikan Madrasah,” dalam Jamaluddin (Ed.), *Mendiskusikan Kembali Eksistensi Madrasah,* Jakarta: Logos, 2003, 11.

[109]Abdillah dan Mastuki HS, “Pendidikan Satu Atap,”, diakses tanggal 12 Maret 2008.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Orde Baru menggunakan pendekatan yang sentralistik dan integrasi monolitik dalam mengembangkan pendidikan dengan mengabaikan keragaman ciri khas lembaga pendidikan Islam seperti bervariasinya madrasah, pesantren, dan sekolah Islam yang mayoritas berstatus swasta.

3. Pesantren dan Madrasah dalam Politik Pendidikan pada Masa Reformasi: Inkonsistensi Posisi Madrasah dan Integrasi Pendidikan Keagamaan

Pada era reformasi ini telah terjadi perubahan dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik menuju desentralistik. Hal ini ditandai dengan UU RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang disempurnakan menjadi UU RI Nomor 32 Tahun 2004 dan UU RI No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang disempurnakan menjadi UU RI nomor 33 Tahun 2004. .

Pasal 7 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 1999 atau Pasal 10 ayat (3) UU RI Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa agama merupakan salah satu urusan yang tidak diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, pendidikan, menurut pasal 11 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 1999 atau Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 32 Tahun 2004 merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Madrasah, yang menurut UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 didefinisikan sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam, dapat diperdebatkan, apakah ia bagian dari agama ataukah pendidikan.

Perdebatan itu dapat diketemukan solusinya dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Dalam UU yang disebutkan terakhir, lembaga pendidikan yang dimasukkan sebagai bagian dari agama adalah Pesantren dan Madrasah Diniyah, sementara madrasah sebagai sekolah umum berciri khas Islam ternyata dimasukkan bagian dari pendidikan. Oleh karena itu, madrasah seharusnya diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah, sehingga berbagai kebijakan yang tidak adil antara lembaga pendidikan madrasah dan sekolah dapat diminimalisir, tidak seperti realita yang terjadi sampai kini di mana madrasah tersebut masih diselenggarakan oleh Departemen Agama. Sementara Departemen Agama dapat mengkonsentrasikan diri pengelolaan lembaga pendidikan

keagamaan di atas. Dalam posisi demikian, menurut Husni Rahim, Departemen Agama dapat menghasilkan ulama yang sanggup menghadapi persoalan yang lebih komplek ketimbang persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini.[110]

Sebagaimana dijelaskan, pada era reformasi ini pendidikan keagamaan mendapat tempat dengan telah diundangkannya UU No. 20 Tahun 2003 yang telah disahkan Presiden pada tanggal 8 Juli 2003 setelah melalui perdebatan panjang di masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam undang-undang ini diakui kehadiran pendidikan keagamaan sebagai salah satu jenis pendidikan di samping pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi dan ketrampilan khusus.[111]

Tiga tahun sebelumnya, tepatnya pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, semestinya pesantren telah mendapatkan beberapa kemudahan. Melalui SKB Dua Menteri Nomor l/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 para santri di pesantren salafiyah yang berusia 7-15 tahun yang mengikuti pendidikan Diniyah Awaliyah (tingkat dasar) dan Diniyah Wustho (tingkat lanjutan pertama), yang tidak sedang menempuh pendidikan pada SD/MI dan SLP/MTs atau bukan pula tamatan keduanya, dapat diakui memiliki kemampuan yang setara dan kesempatan yang sama untuk melanjutkan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,[112] bila pesantren tersebut menambah beberapa mata

---

[110] Rahim, *Madrasah dalam Politik,* 101.

[111] Bab VI, Pasal 15. Sedangkan bentuk pendidikan keagamaan dijelaskan Pasal 30 ayat (4). Dalam ayat dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

[112]Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pondok Pesantren Salafiah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Nomor l/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa: "Para siswa yang belajar di pesantren (santri) memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan sekolah (belajar) ke jenjang yang lebih tinggi, baik kelembagaan pendidikan yang sejenis yang berciri khas agama (vertikal), maupun kelembagaan pendidikan umum (diagonal), dengan memenuhi syarat tertentu yang diatur oleh menteri terkait". SK yang ditandatangani pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu oleh Mendiknas, Yahya A. Muhaimin dan Menag, Tolchah Hasan dan diketahui oleh Menko Kesra dan Taskin Basri Hasanuddin ini berisi 6 pasal. Untuk lengkapnya baca *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun*

pelajaran umum minimal 3 mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA.[113] STTB atau Ijazah yang dikeluarkan oleh pesantren penyelenggara program ini diakui oleh pemerintah setara dengan STTB SD/MI atau SLTP/MTs dan dapat dipergunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan syarat-syarat yang akan diatur oleh departemen terkait.[114]

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (4),[115] pasal 30 ayat (5),[116] pasal 37 ayat (3)[117] UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003,

---

pada Pondok Pesantren Salafiyah, Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pontren Dirjen Dik Is Depag RI, 2006, 34-37. SKB Dua Menteri 2000 di atas dijabarkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional dengan keputusannya Nomor E/83/2000 dan Nomor 166/c/Kep/Ds/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar. SK yang disebutkan terakhir ini berisi 6 (enam) bab dan 10 (sepuluh) pasal. Untuk jelasnya baca *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar*, 38-45.

[113] Bab III tentang Kurikulum dan Evaluasi pasal 4 ayat (1) dan (2) Keputusan Bersama Dirjen Bagais Depag RI dan Dirjen Dikdasmen Diknas Nomor E/83/2000 dan Nomor 166/c/Kep./Ds/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Peantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

[114]Keputusan Bersama Dirjen Bagais Depag RI dan Dirjen Dikdasmen Diknas Nomor E/83/2000 dan Nomor 166/c/Kep./Ds/2000 pasal 5 ayat (4). Sebagai tindak lanjut ketentuan ini telah ditetapkan oleh Dirjen Bagais Depag RI dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Nomor: Gj.II/526/2003 dan 6016/G/HK/2003 tentang Ujian Akhir Nasional Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada Pondok Pesantren salafiyah tertanggal 18 Nopember 2003. Selanjutnya, Dirjen Bagais Depag RI menetapkan SK Nomor: Dj.II/527/2003 tentang Penerbitan Ijazah pada Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) Penyelenggara Program Wajar Diknas tertanggal 19 Nopember 2003. Secara lengkap dua keputusan terakhir dapat dibaca pada *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar,* 46-74.

[115]Ayat ini berbunyi Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

[116]Ayat ini berbunyi Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), adan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

diundangkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama[118] dan Pendidikan Keagamaan[119]. Beberapa pasal dari Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya menguatkan berbagai keputusan yang telah ditetapkan oleh Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional sebelumnya. Ayat (1) Pasal 11 Bab III, menjelaskan bahwa Peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan. Ayat (2) dari pasal 11 menjelaskan bahwa hasil pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Sedangkan ayat (3)nya adalah Peserta didik pendidikan keagamaan formal, nonformal, dan informal yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal umum/kejuruan dapat melanjutkan kejenjang berikutnya pada pendidikan keagamaan atau jenis pendidikan yang lainnya.[120]

---

[117]Ayat ini berbunyi Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

[118]Yang dimaksud dengan pendidikan agama menurut ayat (1) pasal 1 Bab I Peraturan Pemerintah tersebut adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

[119]Yang dimaksud dengan pendidikan keagamaan menurut ayat (2) pasal 1 Bab I Peraturan Pemerintah tersebut adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan / atau menjadi ahli agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

[120]Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan ini berisi 6 (enam) bab dan 51 (lima puluh satu) pasal. Peraturan Pemerintah tersebut dan penjelasannya dapat dibaca pada buku *Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan*

Peraturan Pemerintah di atas dan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan tentang pendidikan keagamaan mestinya memberikan pengakuan yang lebih baik terhadap pesantren dan sistem pendidikan diniyahnya. Namun tidak semua pesantren salafiyah mengikuti ketentuan SKB Dua Menteri Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah di atas, sebagian mereka memilih tetap mempertahankan tradisinya. Sikap tidak mengikuti ini dapat disebabkan karena ketidaktahuan pihak pesantren itu sendiri, atau bisa juga karena kekhawatiran mereka akan hilangnya identitas *salaf* yang telah dipertahankan selama ini karena masuknya intervensi pemerintah terhadap kurikulum pesantren.

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pesantren dan madrasah diniyah sebagai sumber pendidikan dan pencerdasan masyarakat Indonesia, yang sudah berurat berakar sejak sebelum kemerdekaan ternyata baru mendapatkan pengakuan secara yuridis pada era reformasi ini. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Pemerintah Indonesia lebih memperhatikan lembaga pendidikan yang dapat mengisi kemerdekaan secara fisik material dari pada jiwa spiritual. Padahal, dalam lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, mengisyaratkan untuk mendahulukan pembangunan jiwa (spiritual) daripada pembangunan badan (fisik material).

Dalam situasi dan kebijakan sebagaimana dijelaskan ternyata persentase jumlah pesantren yang hanya menyelenggarakan pengajian diniyah yang sering disebut dengan pesantren salafiyah ternyata mengalami penurunan. Berdasarkan batasan tersebut, Departemen Agama melaporkan hasil pendataan pesantren tahun 2006-2007 di 33 propinsi sebanyak 17.506 pesantren dengan perincian 5.708 (32,6%) pesantren salafiyah, 4.281 (24,5%) pesantren khalafiyah, dan 7.517 (42,9%) sebagai pesantren kombinasi,[121] dengan jumlah santri sebanyak 3.289.141 dengan perincian santri yang hanya mengaji sebanyak 1.389.580 (42,2%) dan santri yang mengaji dan sekolah sebanyak 1.899.561 (57,8%). Secara lengkap tentang jumlah pesantren dapat dibaca pada lampiran 25. Padahal pada tahun 2005, berdasarkan data Husni Rahim, pesantren salafiyah diperkirakan berjumlah 5.512 (49,2%) dari 11.211 pesantren yang ada di

---

yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Dirjen Dik Is Depag RI tahun 2007.

[121]Dirjen Pendis, *Statistik Pendidikan Agama dan Keagmaan,* 121.

Indonesia. Padahal secara keseluruhan jumlah pesantren mengalami peningkatan.

Pada periode 1997-1998 jumlah pesantren di Indonesia sebanyak 9.388 dengan santri sebanyak 1.770.768.[122] Jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2000, sebagaimana data Husni Rahim di atas, dan terus meningkat sampai tahun 2006-2007. Apabila data di atas valid, maka dalam rentang waktu sekitar 10 tahun terjadi peningkatan jumlah pesantren sebanyak 8.118 (86,5%) dan peningkatan santri sebanyak 1.518.373 (85,7%). Peningkatan ini, menurut dugaan peneliti, disebabkan dua hal, pertama, semakin baik dan tertibnya administrasi di Departemen Agama, dan kedua, pesantren semakin sadar untuk melaporkan kondisinya karena adanya penghargaan dan bantuan pemerintah terhadap pesantren yang semakin meningkat akhir-akhirnya. Apabila dugaan ini benar, maka secara realita peningkatan jumlah pesantren dan santrinya tidak setinggi sebagaimana dipaparkan di atas.

---

[122]Fuad Jabali dan Jamhari (Ed.), *IAIN & Modernisasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 2002, 98-101.

BAB III
PROFIL PESANTREN LIRBOYO

Dalam bab ini diuraikan tentang sejarah berdiri, gambaran umum kepengurusan dan tata tertib Pesantren Lirboyo Kediri. Dalam rangka mengenal lebih baik profil pesantren tersebut, maka penjelasan tentang gambaran lokasi pesantren perlu diketengahkan.

A. Gambaran Umum Lokasi Pesantren Lirboyo Kediri

Secara geografis, Pesantren Lirboyo, mempunyai letak yang relatif strategis. Ia terletak di sebelah timur jalan raya yang dilalui kendaraan penumpang umum dengan route Blitar, Tulung Agung atau Trenggalek yang menuju ke Nganjuk, Surabaya, atau Malang. Ketika penelitian ini dilakukan, rata-rata setiap 5 menit route tersebut dilalui bis atau mini bis penumpang umum. Lirboyo hanya berjarak sekitar 2 km dari Terminal Baru Kediri menuju ke arah utara. Pesantren ini terletak di Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sekitar 3 km dari Kota Kediri ke arah barat. Kediri adalah kota tingkat II yang berada di Jawa Timur yang terletak sekitar 105 km arah barat daya Surabaya.

Kota Kediri mempunyai ketinggian rata-rata 67 meter di atas permukaan laut yang memungkinkan iklimnya tidak terlalu panas. Ia terletak pada 111^0,15 hingga 112^0,03 bujur timur dan 7^0,45 hingga 7^0,55 lintang selatan. Kota ini dibelah oleh Sungai Brantas yang mengalir dari selatan ke utara. Luas wilayah Kota ini hanya 63,40 km^2 terbagi menjadi tiga kecamatan, yaitu Mojoroto, Kota, dan Pesantren. Wilayah barat Sungai Brantas termasuk dalam wilayah Mojoroto dengan luas 24,6 km^2 terbagi dalam 14 kelurahan dan mempunyai penduduk 24.601 jiwa. Sebelah timur sungai termasuk dalam wilayah 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kota dengan luas wilayah 14,9 km^2, mempunyai 17 kelurahan dengan jumlah keseluruhan penduduk 14.900 jiwa dan Kecamatan Pesantren dengan luas wilayah 23,9 km^2 terbagi dalam 15 kelurahan

dengan jumlah penduduk 23.903 jiwa.[1] Jadi jumlah penduduk Kota Kediri adalah 63.404 jiwa.

Seluruh wilayah Kota Kediri berbatasan dengan wilayah kecamatan yang termasuk wilayah Pemerintahan Kabupaten Kediri. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Gampengrejo dan Banyakan, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wates dan Gurah, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kandat dan Ngadiluwih, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Banyakan dan Semen. Kondisi wilayah kota Kediri relatif datar kecuali di bagian barat berbatasan dengan Gunung Klotok dengan ketinggian 672 meter dan Gunung Maskumambang setinggi 300 meter.[2] Dalam rangka memperjelas wilayah Kota Kediri disajikan petanya berikut ini.

PETA
KOTA KEDIRI
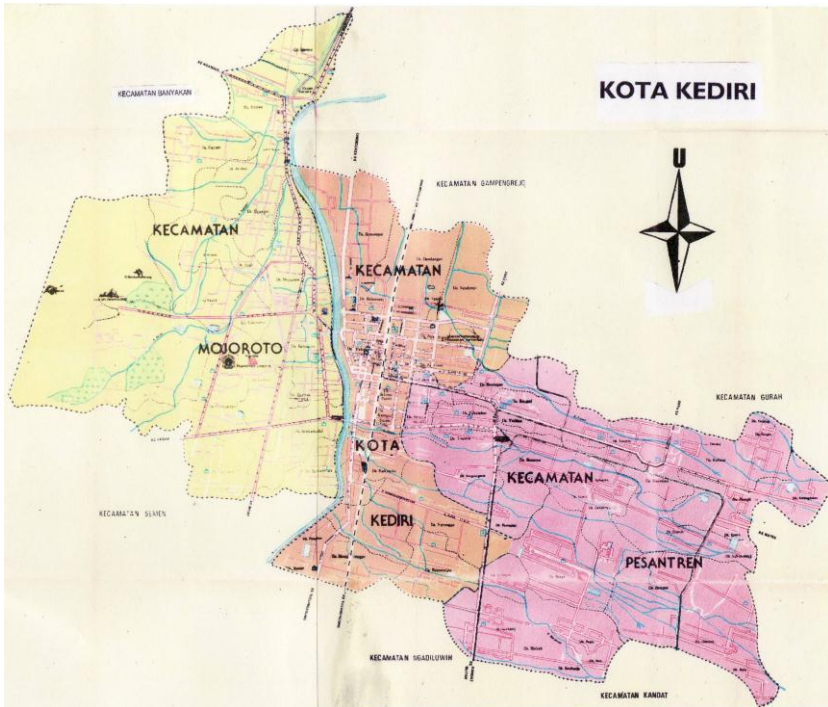
[1]Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik (Ed.), *Kota Kediri dalam Angka 2005/2006*, Kediri: BPS Kota Kediri, 2006, xx, 5-7.

[2]Seksi Neraca Wilayah (Ed.), *Kota Kediri dalam Angka*, xx dan 3.

Berdasarkan data BPS Kota Kediri tahun 2005/2006, Kota Kediri memiliki 138 SD/MI dengan 26.924 siswa, 30 SMP/MTs dengan 13.508 siswa, 21 SMA/MA dengan 11.542 siswa, 23 SMK dengan 10.415 siswa, dan 27 pesantren dengan 18.314 santri. Dari 27 pesantren tersebut, 16 pesantren di antaranya berada di wilayah Mojoroto dengan 17.012 santri, 7 pesantren di wilayah Kota dengan 1.071 santri, dan 4 pesantren di Kecamatan Pesantren dengan 231 santri.[3]

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa jumlah siswa dan santri di Kota Kediri sebanyak 80.703 jiwa terdiri dari peserta didik di sekolah sebanyak 62.389 dan santri sebanyak 18.314. Jumlah peserta didik di Kediri ini ternyata lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Kediri. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Kediri merupakan tujuan peserta didik dari berbagai daerah lain untuk belajar, baik di sekolah maupun pesantren.

Dari 18.314 santri yang sedang menuntut ilmu di berbagai pesantren di Kota Kediri pada tahun 2006, 50,26% atau tepatnya 9.204 santri di antaranya belajar di Pesantren Lirboyo Kediri. Data ini memperlihatkan bahwa Pesantren Lirboyo, baik induk maupun unit-unitnya, mempunyai daya tarik paling tinggi bila dibandingkan dengan pesantren lainnya di Kediri.

Sebagaimana dijelaskan pada Bab I, pesantren yang bernama Hidayatul Mubtadi'in ini dalam perkembangan selanjutnya berkembang menjadi 9 unit yang berdiri secara otonom. Kesembilan unit pesantren tersebut adalah Pesantren HM al-Mahrusiyah, Pesantren HM, Pesantren HY, Pesantren Putri Hidayatul Mubtadi`at, Pesantren HMQ, Pesantren Salafiy Terpadu Ar-Risalah, Pesantren HM Antara, Pesantren Putri Taḥfīẓ al-Qur'ān, dan Pesantren Dār as-Salām.

Keseluruhan lokasi Pesantren Lirboyo menempati lahan sekitar 20 ha. Separoh lebih dari areal seluas itu dimanfaatkan untuk bangunan-bangunan pesantren. 9,25 ha di antara keseluruhan areal pesantren dibeli menjelang Muktamar NU ke-30 yang dilaksanakan di Pesantren Lirboyo selama 7 hari sejak tanggal 21 sampai dengan 27 Nopember 1999. Sebagian dana untuk pembelian tanah tersebut didapatkan dari masyarakat. Data ini menunjukkan, walaupun sudah tergolong sebagai pesantren besar yang mempunyai santri sekitar 7.900 pada tahun 1999, Pesantren Lirboyo tetap mempunyai kecenderungan yang sama dengan kebanyakan pesantren lainnya dalam hal pemeliharaan eksistensinya. Karena mempunyai keterkaitan erat dengan lingkungannya, maka

[3]Seksi Neraca Wilayah (Ed.), *Kota Kediri dalam Angka*, 90 dan 115.

pemeliharaan eksistensi pesantren salah satunya disebabkan pemberian wakaf, sadaqah, hibah, dan sebagainya.[4]

Ada dua route yang sering digunakan untuk masuk ke lokasi pesantren ini, yaitu jalur timur melalui Jl. KH. Wahid Hasyim dan jalur barat melalui Jl. Dr. Saharjo. Apabila melalui jalur timur,[5] maka akan diketemukan baliho penunjuk jalan ke pesantren pada pertigaan di sebelah selatan Mapolwil Kediri sekitar 500 m. Dari pertigaan itu santri dapat menggunakan becak untuk menuju ke pesantren dengan ongkos sekitar Rp.3.000,-. Di sebelah kanan dan kiri jalan dipenuhi rumah-rumah penduduk yang sudah sedemikian padat. Sekitar 1 km dari pertigaan itu akan ditemukan perempatan penanggungan. Di sebelah kiri jalan atau sebelah barat daya dari perempatan itu akan didapati baliho pesantren kurang lebih berukuran 1,5 m x 2 m yang bercat dasar hijau dan di bagian bawah bercat dasar kuning.

Sebelah kiri dan kanan Jalan KH. Abdul Karim menuju ke lokasi pesantren yang dahulunya banyak ditanami tebu-tebu, sekarang sudah hampir habis digunakan perumahan dan gedung sekolah kejuruan SMK, dan tinggal beberapa petak di sebelah kiri jalan yang ditanami tebu. Kurang lebih 700 m dari perempatan itu terdapat Kantor Desa Lirboyo di sebelah kanan jalan. Di sebelah barat Kantor Desa itulah lokasi pesantren berada.

Lokasi Pesantren yang diketemukan pertama dari jalan masuk adalah Pesantren HM al-Mahrusiyah yang terletak di kanan dan kiri jalan. 20 m setelah HM al-Mahrusiyah dengan diselai rumah penduduk terdapat Pesantren HM Antara di kanan jalan, dan sekitar 40 m berikutnya terdapat Pesantren HM dan HMQ di sebelah kanan jalan. Setelah melewati areal pemakaman yang jaraknya sekitar 40 m terdapat Pesantren Putri Hidayatul Mubtadi'at di sebelah kanan jalan dan Pesantren HY di sebelah kiri jalan. Dengan melewati dalem (rumah) KH. A. Habibullah

---

[4]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos, 2002, 108.

[5]Melalui route inilah yang digunakan para santri pada masa A. Musthofa Bisri, biasa dipanggil Gus Mus. Kenangan Gus Mus diabadikan melalui sebuah sya`ir berjudul Lirboyo Kaifa Haal, "Lirboyo, Masihkah tebu-tebu berderet manis melambai di sepanjang jalan menyambut langkah gamang santri *anyar* menuju gerbangmu? Ataukah seperti di mana-mana pabrik-pabrik dan bangunan-bangunan bergaya sepanyolan yang angkuh dan genit telah menggantikan?...". Lihat M. Fikrie Chakim, *Lazuardi,* Kediri: Purna Siswa Kelas III Aliyah MHM Lirboyo, 2005, 362.

Zaini di sebelah kanan jalan dan dalem Alm. KH. Ma`shum Jauhari di sebelah kiri jalan terdapat Pesantren Induk.

Dari Jalan tersebut berbelok ke selatan persis di depan kantor pesantren induk sekitar 200 m ditemukan pertigaan lalu belok kanan. Sekitar 350 m dari pertigaan yang disebutkan terakhir akan ditemukan Jl. Dr. Saharjo, yaitu jalan raya yang dilalui bus jurusan Kediri-Nganjuk, Kediri-Malang dan Kediri-Surabaya. Terdapat dua gerbang untuk memasuki lokasi pesantren melalui Jl. Dr. Saharjo, yaitu gerbang selatan dan utara, sebagaimana gambar berikut ini.

Gerbang Utara di Jl. Dr. Saharjo
Dok. Peneliti

Gerbang Selatan di Jl. Dr. Saharjo
Dok. Peneliti

Dari selatan lokasi pesantren terlihat sebuah Masjid al-Hasan yang dibangun atas bantuan pengusaha dari Nganjuk pemilik beberapa Bank Perkreditan Rakyat. Melalui gerbang selatan masuk ke dalam sekitar 250 m lalu belok ke kiri terdapat Aula al-Muktamar dengan kapasitas sekitar 2.000 orang yang dibangun atas bantuan Perusahan Rokok Gudang Garam. Kedua bangunan yang disebutkan terakhir dibangun menjelang Muktamar NU ke-30. Begitu masuk gerbang utara di sebelah utara jalan terdapat Rumah Sakit Islam milik pesantren, dan di sudut halamannya terdapat tempat pengambilan uang Anjungan Tunai Mandiri BCA. Di sebelah timur Rumah Sakit terdapat Pos Keamanan. Dengan melewati Aula al-Muktamar dan tempat parkir bagi santri nduduk yang belajar di MHM terdapat Pesantren Salafiy Terpadu ar-Risalah.

Untuk memperjelas tempat masing-masing pesantren tersebut dan berbagai fasilitas lainnya dapat dilihat pada denah pada halaman berikut ini.

DENAH
PESANTREN LIRBOYO KEDIRI
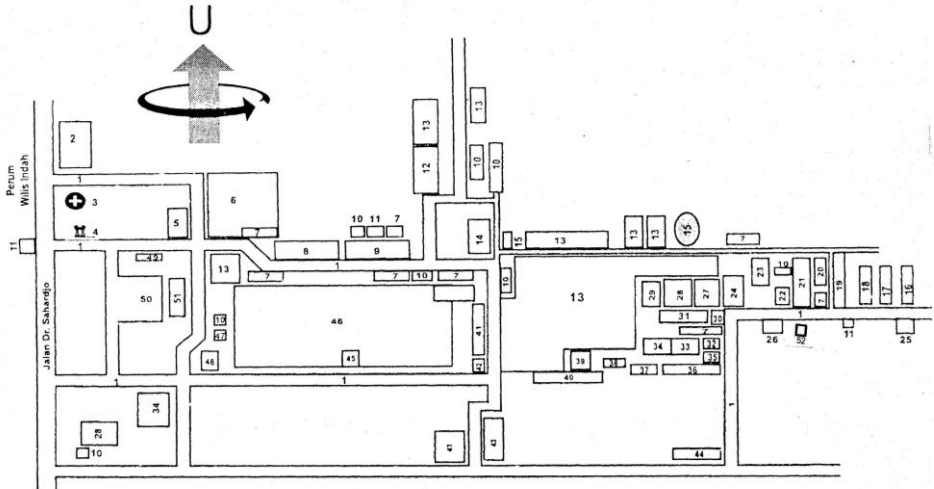
KETERANGAN DENAH:

1. Jalan-jalan utama
2. Lahan Pertanian
3. Rumah Sakit Islam Lirboyo
4. Pos Keamanan
5. Parkir Sepeda
6. Pesantren Salafiy Terpadu ar-Risalah
7. Kantin
8. Gedung al-Ittihad II MHM
9. Gedung al-Ittihad I MHM
10. MCK
11. Wartel
12. Gedung Al-Ikhlas MHM
13. Asrama Santri
14. Pancuran Seibu
15. Kolam
16. Pesantren HM. al-Mahrusiyah
17. Pesantren HM. Antara
18. Pesantren HM dan HMQ
19. Tempat Pemakaman Umum
20. Gedung al-Barokah MHM
21. Pesantren Putri Hidayatul Mubtadi'at
22. Dalem KH. Thoha
23. Dalem KH. A. Habibullah Zaini
24. Kantor al-Muktamar
25. Dalem KH. Imam Yahya Mahrus
26. Dalem KH. Makshum Jauhari
27. Serambi Masjid
28. Masjid Pesantren
29. Maqbarah Żuriyah

30 Kantor Bhakti

31. Kantor MHM
32. Dalem KH. Thohir Marzuqi
33. Dalem Kasepuhan
34. Dalem KH. Ahmad Idris Marzuqi dan Pesantren Tahfidz al-Qur'an
35. Dalem KH. Bahrul Ulum Marzuqi
36. Dalem KH. Maftuh Basthul Birri
37. Dalem KH. Abdul Aziz Manshur
38. Dalem KH. Ahmad Mahin Thoha
39. Perpustakaan/Gedung al-Ikhwan MHM
40. Gedung al-Ikhsan MHM
41. Gedung al-Muḥāfazah MHM
42. PUPL
43. Pesantren Dārus Salām
44. Dār al-Mubtadi'īn
45. Aula MMQ
46. Persawahan
47. Pengairan
48. Dalem KH. Nur Hamid Zainuri
49. Laboratorium Bahasa
50. Aula al-Muktamar
51. Gedung an-Nahḍah MHM
52. Pesantren HY

Kesan sepintas yang ditangkap dari lokasi pesantren adalah keberadaan pesantren tersebut ibarat sebuah rumah tangga tersendiri di antara rumah tangga-rumah tangga dalam satu desa Lirboyo. Kesan ini didukung oleh seperangkat aturan yang membatasi santri untuk berhubungan secara leluasa dengan masyarakat di sekitarnya.[6]

B. Sejarah Berdiri dan Perkembangan Awal Pesantren Lirboyo

Sejarah tentang Pesantren Lirboyo yang ditulis oleh sivitas pesantren dan Nama-nama buku yang diterbitkan oleh siswa yang sedang menamatkan dari Aliyah MHM menggunakan 1910 sebagai tahun berdirinya pesantren. Buku yang diterbitkan oleh tamatan 1985 dinamakannya *¾ Abad Pesantren Lirboyo Kediri*.[7] Sementara buku yang diterbitkan oleh tamatan 1988 dinamakannya *78 Pesantren Lirboyo.* Dari beberapa buku yang menjelaskan tentang sejarah Pesantren Lirboyo dan buku *Tiga Tokoh Lirboyo* yang dianggap sebagai buku biografi resmi Pendiri dan Pengasuh Pesantren[8] tidak diketemukan alasan penggunaan tahun 1910 sebagai tahun berdirinya pesantren. Bahkan, dalam buku yang disebutkan terakhir tidak diketemukan kapan Pesantren Lirboyo didirikan.

Oleh karena itu, untuk mencari kepastian alasan penetapan 1910 sebagai tahun berdirinya Pesantren, ditanyakan kepada KH. Imam Yahya Mahrus, cucu pendiri dan pengasuh pesantren. "Penetapan tahun itu didasarkan kepada mulai menetapnya KH. Abdul Karim di Lirboyo,"[9] begitu keterangan Kyai Imam. Ketika informasi ini dikonfirmasikan dengan buku *¾ Abad Pesantren Lirboyo Kediri* diperoleh data bahwa Manab, nama KH. Abdul Karim sebelum menunaikan ibadah haji, mulai bertempat tinggal di Lirboyo satu tahun setelah kelahiran putri

---

[6]Ketetapan Badan Pembina Kesejahteraan Pesantren Lirboyo Nomor: 11/BPK-P2L/III/IX/2002 tentang: Tata Tertib Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur Bab III tentang Larangan Pasal 11 ayat 1: berada di luar lingkungan pesantren, ayat 2: hubungan jual beli, tukar menukar barang atau transaksi lain dengan orang kampung; ayat 3: menjual barang-barang di dalam pesantren; ayat 4: kost makan/minum di warung atau tempat selain milik pesantren atau Dzuriyah, ayat 5: membeli makanan atau apapun di sepanjang jalan pesantren Lirboyo.

[7]3/4 abad sama dengan 75 tahun, artinya pada tahun 1985 Pesantren Lirboyo dianggap sudah berumur 75 tahun.

[8]BPK P2L, *Tiga Tokoh Lirboyo,* Kediri: BPK P2L, 2006, iii.

[9]Wawancana dengan KH. Imam Yahya Mahrus pada tanggal 11 Maret 2007 di Kantor Program Pascasarjana IAIT Kediri.

pertamanya, Hannah, yang lahir tahun 1909.[10] Ini berarti bahwa tahun 1910, Manab telah mulai bertempat tinggal di Lirboyo.

Selang waktu yang tidak terlalu lama setelah Manab mengijakkan kakinya di Lirboyo, menurut cerita masih pada tahun 1910, dia membangun langgar angkring yang tiga tahun berikutnya direhab menjadi masjid. Satu tahun setelah bertempat di Lirboyo, tepatnya tahun 1911, Manab mulai mendirikan pondok dan beberapa tahun setelah itu datanglah santri dari Madiun yang bernama Umar.[11]

Bila digunakan tipologi pertama dari tipologi pesantren menurut Manfred Ziemek yang terdiri dari masjid dan rumah kyai,[12] maka pendapat bahwa tahun 1910 sebagai tahun berdirinya Pesantren Lirboyo dapat dibenarkan karena pada tahun itu telah ada rumah kyai dan langgar yang mempunyai fungsi mendekati masjid. Bila dikaitkan dengan elemen-elemen yang harus ada dalam sebuah pesantren, yaitu pondok, masjid, kyai, santri, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik, sebagaimana dijelaskan Dhofier,[13] maka berdirinya pesantren Lirboyo adalah tahun 1911, karena waktu itu, di samping telah memiliki masjid dan rumah kyai, Manab telah membangun pondok. Walaupun tidak diketemukan data tentang santri dari daerah yang jauh dari pesantren tetapi diyakini telah ada santri dari daerah sekitar yang belajar dengan Manab, karena tradisi waktu itu kamar santri baru didirikan setelah adanya santri yang datang untuk belajar. Di samping itu, walaupun Pesantren Lirboyo belum memiliki masjid, tetapi telah memiliki langgar yang mempunyai fungsi mendekati masjid. Berdasarkan data dan argumen di atas, dapat disimpulkan bahwa cikal bakal berdirinya Pesantren Lirboyo adalah tahun 1910 dan cikal bakal pesantren ini akhirnya memenuhi seluruh elemen yang biasa dimiliki pesantren pada tahun 1911.

---

[10]Moh. Aliyah Zen, *3/4 Abad Pesantren Lirboyo,* Kediri: Siswa Kelas III Aliyah MHM Lirboyo 1984-1985, 1985, 94.

[11]Zen, *3/4 Abad Pesantren Lirboyo,* 94.

[12]Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial,* terjemahan Butche B. Soendojo dari *Pesantren Islamische Bildung in Sozialen Wandel*, Jakarta: P3M, 1983, hlm 104-107.

[13]Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1983, 44-60. Tipologi pertama pesantren menurut Ziemek yang hanya memiliki masjid dan rumah kyai belum dapat disebut sebagai pesantren karena pesantren tipe itu belum memiliki pondok. Meskipun Ziemek memasukkan tipologi ini sebagai pesantren, dia menekankan bahwa pesantren jenis pertama merupakan pesantren yang paling sederhana dan tingkat awal pembentukan pesantren. Baca Manfred Ziemek, *Pesantren*, 104-107.

Sebagaimana kebanyakan pesantren yang waktu itu didirikan di daerah yang kurang aman,[14] pendirian pesantren ini juga dilatarbelakangi oleh keadaan desa Lirboyo yang waktu itu sebagian penduduknya bermoral rendah, bahkan bromo corah. Diceritakan, pada saat Kyai Sholeh, mertua Manab, melawati desa tersebut untuk pergi ke sawahnya di Desa Semen sering diberhentikan oleh Lurah Lirboyo. Lurah tersebut rupanya sudah tidak mampu lagi menenteramkan desanya dan memohon bantuan Kyai Sholeh untuk menempatkan menantunya di Lirboyo. Lurah yang priyayi dari Solo ini berharap sekali permintaannya dikabulkan, hingga tiap kali Kyai Sholeh pergi ke sawah, dia selalu menemui Kyai Sholeh dan mengulangi permintaannya.[15]

Akhirnya Kyai Sholeh meluluskan juga permintaan Ki Lurah itu, mengingat pula menantunya, Manab, belum mempunyai tempat tinggal. Dengan bantuan Ki Lurah itu Kyai Sholeh membeli sebidang tanah di Lirboyo seluas kurang lebih 1785 m^2. Setelah itu, Kyai Sholeh mendirikan rumah kecil yang amat sederhana, hanya berdinding bambu dan beratap daun kelapa untuk menantunya.[16]

Namun kehadiran Manab rupanya tidak disukai oleh sebagian penduduk sekitar, yang waktu itu masih berjumlah 41 kepala keluarga. Tak ayal segala bentuk teror sering diterima agar Manab tidak betah tinggal di Lirboyo. Tetapi dengan tabah semua itu dihadapi Manab satu per satu, dengan terus bertabligh, amar ma'ruf dan nahi munkar. Upaya Manab untuk menyadarkan masyarakat Lirboyo rupanya membuahkan hasil.[17] Sebagaimana telah dijelaskan, Kyai Manab telah mampu membangun sebuah langgar dan pada tahun 1911 Manab mulai membangun sebuah pondok. Tiga tahun berikutnya, tepatnya tahun 1913, langgar tersebut disempurnakan menjadi masjid. Waktu itu mulai banyak masyarakat yang berguru kepada Kyai Manab. Bahkan sudah ada juga santri dari luar daerah Kediri yang datang ke Lirboyo menuntut ilmu, yakni seorang santri dari Madiun bernama Umar.

---

[14]Pesantren Tebuireng, misalnya, didirikan di daerah yang kebanyakan penduduknya tidak agamis, perampok, pemabuk, penjudi, dan prostitusi. Baca Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren,* 202; dan Imron Arifin, *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng,* Malang: Kalima Sahada Press, 1993, 66.

[15]Zen, *3/4 Abad Pesantren Lirboyo,* 58.

[16]Atho`illah Sholahuddin Anwar, *78 Tahun Pondok Lirboyo,* Kediri: Kelas III Aliyah MHM Lirboyo 1987-1988, 1987, 70.

[17]M. Romadlon, *Aura*, Kediri: Purna Siswa III Aliyah MHM Lirboyo, 2004, 109-110.

Manab, pendiri Pesantren Lirboyo, berasal dari Banar, sebuah pedukuhan di Desa Diangan, Kawedanan Mertoyudan, Magelang. Di sinilah, pada tahun 1856 M. Manab dilahirkan, sebagai anak ketiga dari empat bersaudara anak pasangan Abdur Rahim dan Salamah. Kedua orang tua Manab berprofesi sebagai petani dan pedagang kecil di Pasar Muntilan. Manab ditinggal wafat ayahnya ketika belum baligh.[18]

Latar belakang pendidikan Manab dimulai ketika Aliman, kakaknya, yang telah nyantri di Jawa Timur, pulang ke Magelang menengok keluarganya dan bermaksud mengajak Manab untuk belajar di pesantren. Pada tahun 1870 M, ketika Manab berusia 14 tahun, kedua saudara itu melakukan perjalanan ratusan kilometer menuju sebuah dusun di Gurah, Kediri, bernama Babadan, dengan berjalan kaki. Bila ditempuh dengan bis umum sekarang, maka jarak itu akan memakan waktu sekitar 7 jam. Di sinilah Manab mulai mempelajari ilmu-ilmu dasar, seperti ilmu amaliah sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Manab bersama kakaknya mengetam padi dan menjadi buruh bagi warga setempat.[19]

Setelah dirasa cukup belajar di Babadan ini, mereka pindah ke sebuah pesantren di Cepoko, 20 km sebelah selatan Nganjuk. Kurang lebih 6 tahun mereka belajar di sini, kemudian pindah lagi ke pesantren Trayang, Bangsri Kertosono. Di pesantren inilah Manab memperdalam al-Qur'an. Setelah itu, menuju ke arah timur yaitu ke daerah Sidoarjo. Dua bersaudara belajar di Sono, sebuah pesantren yang terkenal ilmu ṣarafnya. Setelah tujuh tahun belajar di sana, Manab berkeinginan untuk menjadi santri Kyai Kholil Bangkalan. Sebelumnya, untuk beberapa saat, Manab mondok di Pesantren Kedong Doro, Sepanjang.[20]

Tetapi menjadi santri Kyai Kholil ternyata tidaklah mudah. Berbagai ujian lahir maupun batin mesti dijalani. Demikian pula halnya dengan seorang Manab, ia tak luput dari berbagai ujian sang guru, Kyai Kholil. Alkisah ketika Manab bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya seperti sebelum di Madura, dia bersama seorang sahabatnya, Abdullah Faqih, dari Cemara, Banyuwangi, berangkat ke daerah sekitar Banyuwangi dan daerah Jember untuk ikut mengetam padi. Namun setelah bersusah-payah melakukan perjalanan yang cukup jauh, sesampai di Bangkalan terjadilah hal yang mengejutkan. Kyai Kholil menghendaki padi hasil kerja Manab itu untuk makanan ternaknya. Begitulah, rupanya

[18]BPK P2L, *Tiga Tokoh Lirboyo,* 3-6.

[19]Atho`illah Sholahuddin Anwar, *78 Tahun Pondok Lirboyo,* 60-61.

[20]Zen, *3/4 Abad Pesantren Lirboyo,* 54.

Kyai Kholil tidak mengizinkan Manab bekerja, sebagai gantinya Manab disuruh memetik daun pace yang tumbuh di sekitar pesantren untuk makanan sehari-hari.[21]

Setelah hampir 23 tahun Manab bermukim di Madura, Kyai Kholil merasa Manab telah menemukan jati dirinya. Kyai Kholil meminta agar Manab meninggalkan Bangkalan, untuk segera pulang menyebarkan ilmunya di masyarakat.[22] Pada waktu itu, Manab mendengar bahwa salah seorang sahabatnya kala mondok di Madura, yakni Kyai Hasyim Asy'ari telah tiga tahun mengasuh sebuah pesantren di Tebuireng, Jombang.[23] Kyai Manab yang belum lama pulang dari Bangkalan rupanya tertarik untuk singgah di pesantren yang diasuh oleh rekan sealmamater yang dikenal ahli dalam ilmu hadits tersebut. Di pesantren terakhir ini, di samping *tabarrukan* kepada Kyai Hasyim, Manab juga diminta untuk mengajar naḥwu dan ṣaraf.[24]

Setelah kurang lebih 5 tahun Manab nyantri di Tebuireng, secara diam-diam KH. Hasyim Asy`ari ingin menjodohkan Manab dengan salah seorang putri kerabatnya, yakni KH Sholeh, dari Banjarmelati, Kediri. Akhirnya, pada tanggal 8 Shafar 1328 H/1908 M, Manab yang saat itu berusia 50 tahun lebih, naik pelaminan menyunting Khodijah binti KH Sholeh, yang masih berumur 15 tahun. Setelah menikah, Manab pun masih meneruskan belajar di Tebuireng selama setengah tahun. Pada tahun 1909, Khodijah melahirkan putri pertama Manab yang diberi nama Hannah. Satu tahun setelah kelahiran putrinya itu, Manab mulai bertempat tinggal di Desa Lirboyo dan mendirikan pesantren.[25]

---

[21]BPK P2L, *Tiga Tokoh Lirboyo,*9-11. Abdurrahman Mas'ud menjelaskan tentang keunikan KH. Kholil Bangkalan dalam mendidik Manab. Mas`ud memaparkan, "Ketika Manab tinggal di pesantren Kholil, sang kyai menyita semua yang dimilikinya, sehingga tidak ada yang tersisa. Teka-teki ini kemudian terungkap setelah Manab menyelesaikan pendidikannya dan mampu mendirikan sebuah pesantren besar di Kediri." Baca Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi,* Terjemahan Slamet Untung dkk., dari *The Pesantren Architects and Their Socio-Religius Teaching,* Yogjakarta: LkiS, 2004, 174.

[22]Atho`illah Sholahuddin Anwar, *78 Tahun Pondok Lirboyo,* 66.

[23]Menurut Aboe Bakar Atjeh, Kyai Hasyim mendirikan Pesantren Tebuireng pada tahun 1899 dengan pendaftar pertama sebanyak 28 santri. Baca Aboe Bakar Atjeh, *Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar,* Jakarta: Panitia Peringatan Almarhum KH. A. Wahid Hasyim, 1957, 74 dan 77.

[24]Atho`illah Sholahuddin Anwar, *78 Tahun Pondok Lirboyo,* 66-67.

[25]Zen, *3/4 Abad Pesantren Lirboyo,* 57-58..

Pada permulaan berdirinya Pesantren Lirboyo hampir semua pengajian yang ada langsung ditangani oleh Kyai Manab selaku pengasuh Pesantren. Pada masa itu Kyai Manab sendiri sangat giat menyelenggarakan pengajian, bahkan hampir seluruh waktunya dicurahkan hanya untuk memberikan pengajian. Konon, dalam setiap harinya Kyai Manab memberikan pengajian sebanyak 12 kitab. Kitab-kitab yang menjadi kegemarannya untuk diajarkan adalah kitab-kitab Naḥwu, Ṣaraf, misalnya kitab Alfiah ibnu Mālik dan Syaraḥnya, Ibnu 'Āqil, dan kitab Fiqih, seperti Fatḥul Qorīb. Kyai Manab mengajarkan kitab-kitab itu mulai dari pagi hari hingga menjelang ẓuhur, lantas beliau istirahat sejenak, kemudian dilanjutkan lagi setelah ẓuhur sampai waktu Aṣar dan sore harinya Kyai Manab biasanya membaca kitab Tafsir al-Jalālain. Pada malam hari di bulan Ramaḍan, Kyai Manab khusus memberikan pengajian Taṣrīf dan al-Qur'an.[26]

Pada tahun 1926, santri Pesantren Lirboyo mencapai sekitar 80 orang. Tiga tahun berikutnya santrinya bertambah mencapai sekitar 200 orang dan pada pertengahan tahun 1930-an santri Lirboyo mencapai sekitar 500 orang. Pada masa kolonial Jepang keadaan santri Lirboyo tercatat sekitar 750 orang. Jumlah ini terus bertahan hingga wafatnya KH. Abdul Karim pada tahun 1954 M bertepatan dengan tanggal 21 Ramadlan 1374 H.[27]

Dengan bertambahnya jumlah santri, Kyai Manab memberikan kepercayaan santrinya yang dianggap sudah mumpuni untuk membantunya. Beberapa santri yang waktu itu dipercaya membantu Kyai Manab adalah Faqih Asy'ari dari Sumbersari, Zamroji dari Kencong Pare, Ali Shodiq dari Ngunut Tulungagung, dan Qosim dari Kerjen Blitar.[28] Kesemua santri tersebut setelah meninggalkan Lirboyo untuk kembali ke daerahnya akhirnya dapat mendirikan dan mengasuh pesantrennya masing-masing.

Ketika santri Pesantren Lirboyo semakin bertambah banyak dan sebagian dari mereka ternyata belum dapat membaca dan menulis, maka dua sistem pengajaran, bandongan dan sorogan, yang waktu itu digunakan di Pesantren Lirboyo, dianggap tidak mumpuni, karena sistem bandongan membutuhkan ketrampilan menulis dan dasar gramatika Bahasa Arab untuk dapat mengikutinya, sementara sistem sorogan mengharuskan jumlah santri yang sedikit untuk setiap gurunya. Untuk

[26]Zen, *3/4 Abad Pesantren Lirboyo,* 106-107.

[27]Zen, *3/4 Abad Pesantren Lirboyo,* 113-114.

[28]Zen, *3/4 Abad Pesantren Lirboyo,* 108.

mengatasi hal ini, maka mulai permulaan tahun 1920-an, Pesantren Lirboyo mengupayakan penggunaan sistem kasikal yang berbentuk madrasah.[29] Madrasah yang diberi nama Hidayatul Mubtadi'in ini bertahan hingga kini dan mempunyai siswa sebanyak 5.720.

Setelah KH Abdul Karim berpulang ke rahmatulaah pada tahun 1954 M, kepemimpinan Pesantren Lirboyo dibebankan kepada dua menantunya, yaitu KH. Marzuqi Dahlan dan KH. Mahrus Ali. Untuk menjaga kelestarian Pesantren Lirboyo sepeninggal KH Abdul Karim, Kyai Mahrus menghimbau pada anak cucu KH Abdul Karim agar selalu bersatu dan bersama-sama ikut bertanggung jawab dalam melangsungkan pendidikan pesantren dan mengembangkannya.[30]

Dengan cara ini, konflik intern yang biasa mewarnai suatu kepemimpinan sepeninggal pendahulunya, bisa dihindari dengan sebaik-baiknya. Prakarsa ini membuahkan kesepakatan bersama sebagai langkah baru dalam tata aturan Pesantren Lirboyo. Tepat tanggal 3 Sya'ban 1386/15 Nopember 1966 lahirlah satu lembaga tertinggi pesantren yang berfungsi menentukan langkah-langkah kebijaksanaan. Lembaga ini disebut Badan Pembina Kesejahteraan Pondok Pesantren Lirboyo (BPK P2L).[31]

Tampaknya, jalan yang ditempuh untuk mengindari konflik antar anak cucu pendiri adalah dengan membiarkan masing-masing mereka yang berkeinginan untuk mendirikan pesantren di sekitar pesantren induk, sepanjang lembaga pendidikan yang dikembangkan tidak mengganggu ciri khas pendidikan di pesantren induk. Setidaknya ada 9 unit pesantren yang bisa disebut yaitu Pesantren HM berdiri tahun 1950, Pesantren Putri Hidayatul Mubtadi`aat berdiri tahun 1985, Pesantren HMQ berdiri tahun 1986, Pesantren Taḥfīẓ al-Qur'ān berdiri tahun 1986, HM al-Mahrusiyah berdiri tahun 1988, Pesantren HY yang semula hanya perkumpulan belajar sejak tahun 1993 dijadikan pondok unit, Pesantren Salafiy Terpadu Ar-Risalah berdiri tahun 1995, Pesantren HM Antara berdiri tahun 1996, dan Pesantren Dār as-Salām berdiri tahun 2002.

Keseluruhan pesantren unit menyelenggarakan sistem pendidikan sebagaimana yang diadakan pondok induk. Hanya 2 (dua) pesantren unit yang memiliki lembaga pendidikan lain, yaitu Pesantren HM al-Mahrusiyah yang memiliki lembaga pendidikan MTs dan MA yang berkurikulum Departemen Agama dan Pesantren Salafiy Terpadu ar-

[29]Zen, *3/4 Abad Pesantren Lirboyo*, 119.
[30]BPK P2L, *Tiga Tokoh Lirboyo*,76.
[31]BPK P2L, *Tiga Tokoh Lirboyo*,77.

Risalah yang memiliki lembaga pendidikan SD, SMP, dan SMA yang berkurikulum Departemen Pendidikan Nasional. Lembaga-lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh seluruh pesantren di Lirboyo dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

TABEL 1
LEMBAGA PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PESANTREN LIRBOYO DAN UNIT-UNITNYA

NO	NAMA PESANTREN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Pesantren Induk	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	√
02	HM al-Mahrusiyyah	√	-	-	-	√	√	√	√	-	-	-	√
03	HM	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
04	HY	√	√	-	√	√	√	-	-	-	-	-	√
05	Putri Hidayatul Mubtadi`at	√	√	-	√	√	-	-	-	-	-	-	√
06	HMQ	√	√	-	√	√	-	-	-	-	-	-	√
07	Salafiy Terpadu Ar-Risalah	√	√	-	√	√	√	-	-	√	√	√	√
08	HM Antara	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
09	Taḥfīz al-Qur'ān	√	√	-	√	√	√	-	-	-	-	-	√
10	Dār as-Salām	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√

Keterangan:

1. Pengajian Al-Qur'an
2. Balagh/weton Kitab
3. Sorogan Kitab
4. MI Diniyah
5. MTs Diniyah
6. MA Diniyah
7. MTs Kurikulum Departemen Agama
8. MA Kurikulum Departemen Agama
9. SD Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional
10. SMP Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional
11. SMA Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional
12. Ekstra Kurikuler

Oleh karena itu, Pesantren HM al-Mahrusiyah dan Pesantren Salafiy Terpadu ar-Risalah dijadikan objek penelitian, di samping pondok induk.

C. Gambaran Umum Kepengurusan dan Tata Tertib Pesantren Lirboyo Kediri

Dalam hal kepengurusan, masing-masing kyai yang mengasuh masing-masing pesantren unit tidak hanya bertanggung jawab terhadap santri asuhannya sendiri, tetapi juga berperan dan bertanggung jawab terhadap kemajuan pesantren induk. Kelihatannya, hanya dalam hal-hal tertentu, seperti tata tertib santri, utamanya dalam hal keamanan, pesantren unit mengikuti kebijakan yang diputuskan kepimpinan kyai secara kolektif yang di Pesantren Lirboyo disebut Badan Pembina Kesejahteraan Pondok Pesantren Lirboyo (BPK-P2L). Sementara dalam hal lembaga pendidikan yang diselenggarakan, jumlah pembayaran yang

dibebankan kepada santri, dan manajemen lainnya menjadi kewenangan kyai pengasuh pesantren unit secara otonom.

Personalia BPK P2L, sebagai badan tertinggi di Pesantren Lirboyo, beranggotakan cucu-cucu pendiri pesantren yang saat sekarang ini masing-masing adalah pemimpin dan pengasuh satu dua pesantren unit yang mereka dirikan. Pada tahun 2006-2007, BPK-P2L dipimpin oleh KH. A. Idris Marzuqi, pengasuh pesantren induk dan Pesantren Putri Taḥfīẓ al-Qur'ān, sementara beberapa pengasuh pesantren unit menduduki posisi anggota. Beberapa pengasuh pesantren unit yang menjadi anggota BPK P2L adalah KH. M. Anwar Manshur pengasuh Pesantren Hidayatul Mubtadi'at, KH. Imam Yahya Mahrus pengasuh Pesantren HM al-Mahrusiyah, dan KH. Abdullah Kafabihi Mahrus pengasuh Pesantren HM dan Pesantren Putri HMQ, K. Rofi`i Ya`qub, pengasuh Pesantren HY, KH. Maftuh Bastul Birri, pengasuh Madrasah Murattilil Qur'an, KH. A. Mahin Thoha, pengasuh Pesantren Dār as-Salām, sementara salah satu sekretaris BPK-P2L diduduki oleh KH. A. Habibulloh Zaini, Mudier Madrasah Hidayatul Mubtadi'in. Pengasuh pesantren unit yang tidak masuk dalam kepengurusan BPK P2L adalah KH. Ma`ruf Zainuddin dan Aina Ainaul Mardliyyah, pengasuh Pesantren Salafiy Terpadu Ar-Risalah. Daftar personalia BPK P2L tertera pada lampiran 1.

BPK P2L ini menitikberatkan agenda programnya pada upaya melestarikan Pesantren Lirboyo dan mempertahankan lembaga-lembaga pendidikan diniyah yang ada di pesantren induk. Dalam rangka terlaksananya program tersebut, maka dibuatkan tata tertib bagi santri di seluruh pesantren di Lirboyo. Pelaksanaan tata tertib tersebut diamanatkan kepada suatu kepengurusan yang personalianya kebanyakan adalah santri pesantren induk. Daftar personalia pengurus pesantren Lirboyo lihat lampiran 3.

Sebagaimana yang disampaikan Rodli Sutrisno, "program kerjasama antara pesantren induk dan pesantren-pesantren unit ditekankan pada terlaksananya tata tertib pesantren, utamanya keamanan. Jalan yang ditempuh adalah dengan melibatkan pengurus dari pesantren unit untuk menduduki seksi keamanan pada kepengurusan pesantren induk."[32] Cerita Rodli tersebut sesuai dengan data dijadikannya keamanan beberapa putra kyai pengasuh pesantren unit dan keturunan pendiri pesantren seperti Agus Abd. Qodir R, Agus Subhan, Agus Ivan Muhtadi, Agus Labibus

[32]Diceritakan oleh Rodli Sutrisno, Lurah Pondok, pada tanggal 14 Agustus 2007.

Sa'id, Agus Reza Ahmad Zahid, Agus Muhammad, Agus Melvin ZA, Agus Muzani Makmun, dan Agus Dahlan Ridlwan.[33]

Berdasarkan data Personalia Pengurus Pesantren Lirboyo yang tertera dalam lampiran 3 diketahui bahwa seluruh personalia BPK P2L masuk dalam posisi pelindung atau penasehat sedangkan Ketua BPK P2L ternyata tidak masuk dalam kepengurusan pesantren-pesantren unit. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa BPK P2L tidak banyak mempunyai peran dalam menentukan orientasi dan manajemen pesantren-pesantren unit.

Kecilnya peranan BPK P2L juga dapat diketahui dari sejarah pendirian pesantren-pesantren unit yang dijelaskan pada Bab IV. Proses pendirian berbagai pesantren unit ternyata tidak ditentukan oleh BPK-P2L ini. Hanya saja, beberapa keturunan pendiri pesantren induk akan keberatan kalau lembaga pendidikan yang dikembangkan oleh pesantren unit tersebut dianggap dapat mengganggu ciri khas pesantren induk. Kebijakan ini mengakibatkan seluruh pesantren unit yang ada di Lirboyo menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang ada di pesantren induk dan hanya Pesantren HM al-Mahrusiyah dan Pesantren Salafiy Terpadu Ar-Risalah yang menambahkan penyelenggaraan lembaga pendidikan formal yang tidak sama dengan pesantren induk.

Di dalam rangka memahami hubungan antara pesantren induk dengan masing-masing pesantren unit dan antara pesantren unit satu dengan lainnya, maka ditampilkan Bagan Pengurus Pesantren Lirboyo berikut pada halaman berikutnya. Bagan tersebut merupakan pemahaman peneliti tentang relasi antar pesantren di Lirboyo dari hasil wawancara dengan lurah pondok, Rodli Sutrisno di atas, karena Bagan yang dimiliki pesantren, sebagaimana tertera dalam lampiran 2 tidak memperlihatkan relasi antar pesantren di atas. Ketiadaan bagan yang menjelaskan relasi antar pesantren memperlihatkan bahwa pembaruan administrasi dan manajemen dilakukan secara terbatas, sebagaimana kebanyakan pesantren.[34]

---

[33]*Laporan Tahunan Pengurus Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur,* 2007, 59.

[34]Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*, 34. Azra menjelaskan bahwa dalam konteks modernisasi administratif, sistem dan lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren, pada umumnya baru mampu melakukan reformasi dan modernisasi administrasi secara terbatas.

BAGAN 1
PENGURUS PESANTREN LIRBOYO KEDIRI
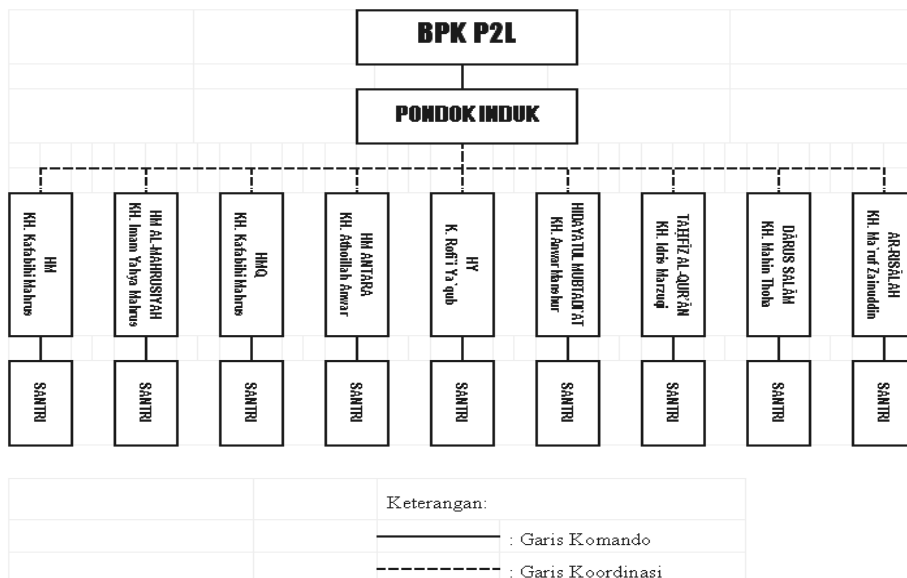
Bagan di atas memperlihatkan bahwa secara institusional kyai kolektif yang tergabung dalam BPK P2L tidak mempunyai garis komando terhadap pengasuh pesantren unit dan pengurusnya. Ini memperlihatkan bahwa masing-masing pesantren unit berdiri secara otonom. Sedangkan garis koordinasi antar pesantren tersebut dilaksanakan dalam menjaga terlaksananya tata tertib pesantren.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa tugas pengurus pesantren adalah menjalankan apa yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan lembaga tertinggi dalam pesantren atau secara personal adalah kyai yang merupakan hirarkhi kepemimpinan tertinggi. Salah satu ketetapan dan keputusan ini tertuang dalam peraturan dan tata tertib pesantren. Proses menuju diterbitkan tata tertib ini memperlihatkan sedemikian pentingnya tata tertib ini yang harus diberlakukan untuk seluruh santri, baik bagi pesantren induk maupun unit-unitnya. Di dalam pengantar buku tata tertib dijelaskan bahwa, "Tata Tertib ini disusun bersama dalam tujuh kali pertemuan oleh Pimpinan Pesantren Induk dan pesantren unit yang meliputi, HM, HM Putra, HY, HM Antara, DS, Hidayatul Mubtadi'at dan Taḥfīẓ al-Qur'ān yang telah direstui dalam Sidang BPK-P2L III tahun 2002."[35]

---

[35]BPK-P2L, *Tata Tertib Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jatim,* Kediri: BPK-P2L, 2002, i.

Data ini menunjukkan bahwa salah satu yang menjadi agenda bersama antara pengurus pesantren induk dan unit-unitnya adalah tata tertib dan pelaksanaannya. Hal ini di samping didasarkan penyusunan tata tertib itu yang melibatkan seluruh pimpinan seluruh pesantren juga diposisikannya putra pengasuh dan pengurus pesantren unit dalam kepengurusan Pesantren Lirboyo.

Sementara tujuan tata tertib itu adalah, "untuk meningkatkan kedisiplinan santri dan sebagai pedoman pelaksanaan pengurus, utamanya keamanan, dalam pengambil keputusan dan kebijaksanaan peraturan Pesantren."[36] Tata tertib Pesantren Lirboyo secara lengkap lihat lampiran 4.

Untuk memastikan terlaksananya tata tertib itu dibutuhkan suatu institusi yang konsisten. Peran seksi keamanan teramat besar dalam hal ini. Seksi keamanan bertugas untuk memantau pelaksanaan tata tertib tersebut. Untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh santri, staf kemanan pesantren mencatat pelanggaran-pelanggaran itu kemudian memanggil pelaku untuk kemudian diklarifikasikan kasus-kasusnya, kemudian diajukan kepada kyai untuk kemudian ditentukan hukumannya oleh kyai. Hukuman yang diberikan oleh kyai beragam dan bermacam-macam tergantung jenis pelanggaran dan aturan mana yang dilanggar.[37] Untuk pelanggaran yang sama, jenis hukumannyapun dapat berbeda-beda tergantung kebijaksanaan kyai di dalam memberikan hukuman kepada pelanggar. Santri yang melanggar dihadapkan secara langsung kepada kyai sehingga kyai dapat menjajagi kepribadian santri dan melihat hukuman yang mana yang pas untuk pelanggar.

---

[36]BPK-P2L, *Tata Tertib Pesantren Lirboyo,* i.

[37]Berdasarkan Tata Tertib Pesantren Lirboyo, sebagaimana tertera dalam lampiran 4 dijelaskan pada Bab IV: tentang jenis hukuman, pasal 15: berat, ayat (1): gundul, guyur dan disowankan diboyongkan/dikembalikan kepada orang tua atau walinya, ayat (2): gundul, guyur dan disita barang buktinya; pasal 16: sedang, ayat (1) guyur dan disita barang buktinya, dan ayat (2): gundul dan disita barang buktinya; pasal 17: ringan, ayat (1) diperingatkan, ayat (2) membuat surat pernyataan diri tidak mengulangi lagi, ayat (3) membaca al-qur'an, ayat (4) roan, ayat (5) disita barang buktinya, ayat (6) ganti rugi, dan ayat (7) dihukum sesuai kebijaksanaan.

BAB IV
PEMBARUAN INSTITUSI DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN DI PESANTREN LIRBOYO

Pada Bab ini dipaparkan pembaruan institusi dan pembaruan manajemen pendidikan di Pesantren Lirboyo. Menurut teori sistem, ada tiga variabel dalam pembaruan pendidikan, yaitu modernisasi administrastif, diferensiasi struktural, dan ekspansi kapasitas.[1] Di samping itu, untuk menganalisis pembaruan institusi ini juga menggunakan berbagai indikator modernitas yang diajukan oleh Inkeles, yaitu: bebas dari kekuasaan tradisional dan antidogmatis dalam berfikir; memperhatikan masalah publik; terbuka terhadap pengalaman baru; yakin terhadap sains dan nalar; berencana, tanggap, berorientasi ke masa depan, mampu menunda kepuasan, dan aspirasi tinggi, berpendidikan, berbudaya, dan professional,[2] dan pendapat Azra tentang ciri modernitas yaitu: rasionalitas, demokratis dan toleran terhadap perbedaan, berorientasi ke depan (*future oriented*) dan tidak melihat ke belakang (*backward looking*).[3]

A. Pembaruan Institusi Pendidikan di Pesantren Lirboyo

Setidaknya ada tiga corak institusi pendidikan formal yang merupakan pembaruan sistem pendidikan di Lirboyo Kediri, yaitu

---

[1]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos, 2002, 34-35.

[2]Piötr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial,* Terjemahan Alimandan dari *the Sociology of Social Change,* Jakarta: Prenada, 2005, 154.

[3] Wawancara Ulil Abshar-Abdalla dari Kajian Islam Utan Kayu (KIUK) dengan Azyumardi Azra yang disiarkan jaringan Radio 68 H pada Kamis, 25 Juli 2002, *Pendidikan Agama Harus Rasional dan Toleran,* http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id= 226, diakses pada tanggal 24 Januari 2007.

pertama, madrasah diniyah yang bernama Madrasah Hidayatul Mubtadi'in (MHM), Madrasah Diniyah al-Mahrusiyah, dan Madrasah Diniyah ar-Risalah; kedua, MTs dan MA HM Tribakti yang menggunakan kurikulum Departemen Agama;[4] dan ketiga, SD, SMP, dan SMA ar-Risalah yang menggunakan kurikulum Departemen Pendidikan Nasional. Walaupun terkesan klasik, pembaruan madrasah diniyah di atas dipaparkan di sini mengingat ia dapat bertahan ketika berhadapan dengan lembaga pendidikan yang lebih modern.

Semestinya sejak tanggal 9 Muharam 1386 H, bertepatan dengan tanggal 30 April 1965 M. Pesantren Lirboyo sering dianggap sudah memiliki lembaga pendidikan tinggi yang bernama Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri. Dalam sejarahnya, lembaga yang dipersiapkan untuk memberikan kesempatan bagi alumni MHM Lirboyo yang berkeinginan untuk studi lanjut ini didirikan setelah KH. Mahrus Aly menerima usulan dari Imam Basyari, alumnus tsanawiyah MHM Lirboyo yang menyelesaikan kuliah dari IAIN Jakarta di tahun 1965, Ali ibn Abu Bakar, dan Abdul Muchit.[5] UIT Kediri diresmikan dan dibuka oleh Menteri Agama Rl saat itu, Prof. KH. Syaifuddin Zuhri, pada tanggal 9 Rajab 1386 H bertepatan dengan tanggal 25 Oktober 1966 M dengan dua fakultas, Syariah dan Tarbiyah. Sejak tanggal 8 Shofar 1409 H. bertepatan tanggal 19 September 1988 UIT berubah nama menjadi Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri berdasarkan Surat Kopertais Wil. IV Surabaya Nomor: 123/I/ Kop.Wil.IV/88 tertanggal 19 September 1988.[6] Pada tahun 2004, perguruan tinggi ini membuka Program

---

[4]Dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Pasal 4 ayat 3 menyatakan bahwa SD dan SLTP yang berciri khas Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Tsanawiyah (MTs). Sedangkan definisi Madrasah Aliyah dijelaskan dalam Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum (SMU) pada Bab I, pasal 1, ayat 6 yang menyatakan bahwa Madrasah Aliyah adalah Sekolah Menengah Umum (SMU) yang berciri khas Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.

[5]Wawancara dengan Imam Basyari pada tanggal 1 Februari 2007 di rumah peneliti.

[6]Perubahan nama tersebut didasarkan pada keputusan Menteri Agama RI. Nomor: 42 tahun 1988 tentang Lembaga Pergurun Tinggi Agama Swasta dan surat Dirjen Binbaga Islam di Jakarta, Nomor: E.III/PP.009/AZ/3041/88, tertanggal 25 Juli 1988 perihal perubahan nama PTAIS dan penetapan jurusan.

Magister,[7] program studi Pendidikan Islam. Lembaga ini berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Tribakti (YPIT) Kediri. Yayasan yang dikelola oleh żuriyah Pesantren Lirboyo ini ternyata tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan salah satu pesantren yang ada di Lirboyo.

Oleh karena paparan tentang pembaruan institusi akan difokuskan pada madrasah diniyah di tiga pesantren tempat penelitian, MTs, dan MA HM Tribakti, SD, SMP, dan SMA ar-Risalah. Pembahasan tentang IAIT akan diberikan ketika lembaga yang disebutkan terakhir ada kaitannya dengan beberapa lembaga yang disebutkan sebelumnya.

1. Sistem Klasikal Diniyah: MHM dan madrasah diniyah lainnya

Inisiatif pendirian MHM ini sudah dimulai sekitar awal tahun 1920-an. Jamhari, santri senior asal Kendal, mempunyai inisiatif untuk membuka madrasah di pesantren Lirboyo. Pendirian madrasah ini diduga merupakan pengaruh dari berdirinya Madrasah Salafiyah di Tebuireng yang didirikan pada tahun 1916,[8] di mana KH. Abdul Karim, pendiri Pesantren Lirboyo adalah alumnus dari Pesantren Tebuireng tersebut.

Walaupun pendirian madrasah ini mendapat dukungan dari beberapa santri senior lain, tetapi usaha ini ternyata masih banyak mengalami kendala. Usaha untuk mengembangkan lembaga ini diteruskan oleh Shamsi, santri senior asal Gurah, ditindaklanjuti oleh Sanusi dari Bangil, Shairozi asal Brodot Perak Jombang, kemudian oleh Muharror, asal Tegal. Semua usaha itu ternyata belum memungkinkan madrasah berjalan sebagaimana harapan. Pada tahun 1925 Abdul Malik memperbaiki manajemen madrasah ini sehingga dapat bertahan sampai

---

[7]Izin penyelenggaraan Program Magister Pendidikan Islam di IAIT Kediri adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: Dj.II/270/2004 tertanggal 18 Agustus 2004 dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/266/2007 tertanggal 16 Juli 2007.

[8]Pencetus ide pendirian Madrasah Salafiyah ini adalah KH. Abd. Wahab Hasbullah. Pada tahun 1914, setelah kedatangannya dari belajar di Mekah, ia mendirikan Jam`iyyah Nahdlatul Wathan. Organisasi ini bertujuan untuk memperbaiki pendidikan agama, dengan suatu sistem yang tersusun lebih baik, antara lain dengan sistem klasikal. Biografi KH. Abd. Wahab Hasbullah dapat dibaca pada Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai,* Jakarta: LP3ES, 1983, 24-27; dan Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen,* Jakarta: LP3ES, 1986, 65-69.

tahun 1931.[9] Selama dua tahun, 1931-1933, madrasah ini harus gulung tikar.

Tersendatnya proses pendirian madrasah ini dan harus gulung tikarnya lembaga tersebut setidaknya disebabkan oleh dua hal, pertama, rendahnya minat santri untuk mengikuti pembelajaran dengan sistem klasikal yang waktu itu merupakan sistem baru di kalangan pesantren[10] dan dianggap mencontoh model sekolah yang dilaksanakan pemerintah Kolonial Belanda yang kafir. Kedua, adanya aturan dari Pemerintah Kolonial Belanda yang membatasi lingkaran lembaga pendidikan agama yang dikelola kyai dengan *Wilde School Ordonantie* yang dikeluarkan pada tahun 1925. Ordonansi ini berupaya memberantas serta menutup madrasah yang tidak ada izinnya atau memberi pelajaran yang tidak disukai pemerintah.[11]

Setelah itu, atas prakarsa Jauhari, menantu KH. Abdul Karim, dibantu oleh Kholil, Lurah pondok, dan Faqih Ash`ari, santri senior dari Sumbersari Pare Kediri yang sebelumnya menjadi santri di pesantren

---

[9]Atho`illah Sholahuddin Anwar, *78 Tahun Pondok Lirboyo,* Kediri: Kelas III Aliyah MHM Lirboyo 1987-1988, 1987, 117-119.

[10]Moh. Aliyah Zen, *3/4 Abad Pondok Pesantren Lirboyo,* Kediri: Siswa Kelas III Aliyah MHM Lirboyo, 1985, 119.

[11]Amir Hamzah, *Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam,* Jakarta: Mulia Offset, 1989, 47., dan Sutari Imam Barnadib, *Sejarah Pendidikan,* Yogjakarta: Andi Offset, 1983, 24. Ordonansi ini merupakan tindak lanjut strategi Pemerintah Kolonial yang telah dikeluarkan sebelum-nya. Untuk menghindari pemberontakan dari para santri, pada tahun 1882, Belanda telah membentuk priesterraden yang bertugas mengawasi perkembangan pesantren. Kurang lebih dua dasawarsa kemudian, tepatnya tahun 1905, Badan di atas menyarankan untuk dikeluarkannya ordonansi yang bertugas mengawasi pesantren dan mengatur izin bagi guru-guru agama yang akan mengajar. Sedangkan isi ordonansi guru 1925 adalah sebagai berikut: Setiap guru agama harus mampu menunjukkan bukti tanda terima pemberitahuan; ia harus mengisi daftar murid dan daftar pelajaran yang sewaktu-waktu bisa diperiksa oleh pejabat yang berwenang; pengawasan dinilai perlu demi memelihara ketertiban dan keamanan umum; bukti kelayakan bisa dicabut, bila guru yang bersangkutan aktif memperbanyak murid dengan maksud yang bisa dinilai sebagai mencari uang; guru Agama Islam bisa dihukum maksimum enam hari kurungan atau denda maksimum f.25 bila mengajar tanpa surat tanda terima laporan, tidak benar keterangannya atau lupa dalam mengisi daftar; Juga bisa dihukum maksimum sebulan kurungan atau denda f.2000 bila masih mengajar setelah dicabut haknya; dan Ordonansi Guru tahun 1925 berlaku sejak 1 Juni 1925, dan Ordonansi Guru tahun 1905 dicabut. Baca Imron Arifin, *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng,* Malang: Kalima Sahada Press, 1993, 22.

Tebuireng, mengusahakan agar madrasah hidup kembali. Ketika pertama dibuka kembali, tahun 1933, jumlah siswanya adalah 44, tahun 1934 meningkat menjadi 60, dan tahun 1935 sekitar 70 siswa.[12] Setelah itu, madrasah ini terus bertahan dan banyak mengalami kemajuan hingga kini.

Sebelum MHM didirikan, mula-mula sistem pendidikan yang digunakan di Pesantren Lirboyo adalah sistem bandongan atau wetonan dan sorogan. Sistem bandongan atau wetonan diaplikasikan dengan cara santri secara bersama-sama menulis makna dari kyai yang sedang membaca kitab kuning. Sementara sistem sorogan dilaksanakan dengan cara santri satu-persatu membaca kitab secara langsung di hadapan kyai. Sistem yang disebutkan pertama membutuhkan ketrampilan dasar dari santri, yaitu menulis dan gramatika Arab. Sementara sistem kedua membutuhkan kesabaran dan ketelatenan, baik dari kyai maupun santrinya.

Dengan semakin bertambahnya jumlah santri, maka aplikasi sistem sorogan mendapatkan hambatan, karena biasanya kyai hanya dapat membimbing sekitar belasan santri dengan sistem ini. Sementara santri yang belum mempunyai ketrampilan dasar menulis dan gramatika Arab akan mendapatkan kesulitan untuk mengikuti pengajian dengan sistem bandongan atau wetonan. Kendala inilah yang melatarbelakangi didirikan MHM di pesantren Lirboyo Kediri. Hal ini dapat dilihat dari nasehat KH. Abdul Karim, pendiri pesantren Lirboyo yang berbunyi, "*santri kang durung biso moco lan nulis kudu sekolah*."[13] Nasehat yang mendorong santri yang belum dapat membaca dan menulis untuk sekolah ini memperlihatkan bahwa KH. Abdul Karim merestui berdirinya madrasah tersebut.

Dalam rangka meningkatkan dan menjaga kwalitas lulusan, MHM semenjak kebangkitannya kembali banyak berkutat untuk membenahi masa studi untuk masing-masing tingkat dan materi pelajarannya. Hal ini sesuai dengan kecenderungan lembaga pendidikan waktu itu. Sampai dengan akhir dekade 50-an, masa studi untuk masing-masing jenjang pendidikan belum ada keseragaman. Sebagaimana dijelaskan oleh Mahmud Yunus, umumnya madrasah diniyah sampai dekade itu membutuhkan waktu 7 tahun untuk menamatkannya. Sementara di desa-

---

[12]F. Fauzi Fadloli, *Bikmada*, Kediri: Purna Siswa III Aliyah, 2002, 94.

[13]Syafi` Bilal Marzuqi, *Lentera*, Kediri, Pengurus Pusat Kelas III Aliyah MHM, 1994, 129-130.

desa yang tidak cukup gurunya hanya mempunyai kelas sampai IV atau V, sementara untuk sekolah menengah sampai kelas IV.[14] Data ini menunjukkan bahwa penambahan masa studi pada setiap jenjang dimaksudkan untuk meningkatkan kwalitas hasil pembelajaran.

Pada tahun 1933, MHM Lirboyo mengklasifikasikan kelas dalam dua tingkatan yaitu 3 tahun untuk kelas ṣifir (sekolah persiapan) dan 5 tahun untuk kelas Ibtida'iyah. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan antara pukul 19.00 sampai dengan 23.00 istiwā'.[15] Tahun 1947, MHM meningkatkan jenjang pendidikan di atas menjadi Ibtida'iyah selama 4 tahun dan Tsanawiyah selama 4 tahun. Dua tahun berikutnya, tepatnya tahun 1949, atas gagasan Ustāż Zamroji, saat itu mustaḥiq tingkat Tsanawiyah, yang mendapat restu KH. Abdul Karim, dibentuklah madrasah mu'allimin, setingkat Aliyah sekarang. Sayangnya, dengan tidak diketahui sebabnya secara pasti lembaga yang disebutkan terakhir hanya bertahan sekitar 2 tahun.[16]

Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1950, saat kepemimpinan MHM dipegang oleh Ustāż Ali bin Abu Bakar asal Bandar Kidul Kediri dan dibantu oleh Ustāż Yasin asal Ngronggot Nganjuk, masa pendidikan setiap tingkatan ditinjau kembali. Pada akhirnya, untuk tingkat ibtida'iyah menjadi 5 tahun dan Tsanawiyah 3 tahun.[17]

Pada masa di atas, diketahui bahwa Departemen Agama di bawah kementerian Fathurrahman Kafrawi[18] memberikan apresiasi terhadap madrasah dan pesantren. Kafrawi berpendapat bahwa, "madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren yang pada hakekatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan rakyat jelata yang sudah berurat akar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya mendapat perhatian dan bantuan yang nyata, berupa tuntunan dan bantuan-bantuan materiil dari pemerintah."[19] Sikap Kementerian Agama ini merupakan realiasasi

---

[14]Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,* Jakarta: Hidakarya Agung, 1985, 68 dam 137.

[15]Moh. Aliyah Zen, *3/4 Abad Pondok Pesantren Lirboyo,* 120-121.

[16]Atho`illah Sholahuddin An, *78 Tahun Pondok Lirboyo,* 207.

[17]Ch. Nur Siddiq, *Buku Pijar,* Kediri: Kelas III Aliyah MHM Lirboyo, 1996, 98.

[18]Kafrawi menjadi Menteri Agama dalam kabinet Syahrir III, yaitu mulai tanggal 2 Oktober 1946 sampai dengan 3 Juli 1947.

[19]Akh Minhaji dan M. Atho Mudzhar, "Prof. KH. Fathurrahman Kafrawi: Pengajaran Agama di Sekolah Umum," dalam Azyumardi Azra dan Saiful

dari usulan Badan Pekerja Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), sebagai badan legislatif pada waktu itu, yang telah disampaikan pada tanggal 27 Desember 1945.[20] Lima hari sebelumnya, tepatnya pada tanggal 22 Desember 1945, BP KNIP juga mengusulkan agar pemerintah Indonesia mengambil kebijaksanaan dan langkah-langkah untuk memajukan pendidikan dan pengajaran, baik pada lembaga informal, non-formal maupun formal. Dalam memajukan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya diusahakan agar pengajaran di langgar, surau, masjid, dan madrasah berjalan terus dan ditingkatkan. Usulan tersebut diterbitkan pada tanggal 22 Desember 1945 dalam berita RI tahun II No. 4 dan 5 halaman 20 kolom 1.[21]

Data ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan apresiasi yang positif terhadap pesantren. Walaupun tidak diketemukan data bahwa Pesantren Lirboyo mendapat bantuan materiil dari pemerintah, tetapi apresiasi positif terhadap pesantren secara umum ini memungkinkan pengasuh pesantren mendapatkan inspirasi untuk meningkatkan kwalitas pendidikannya secara lebih baik.

Setelah Undang Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 Tahun 1950 ditetapkan dan dinyatakan bahwa belajar di madrasah yang telah mendapat pengakuan Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar,[22] Kementerian Agama menindaklanjuti dengan menggariskan kebijakan bahwa salah satu syarat untuk mendaftarkan diri, madrasah itu harus mengajarkan pelajaran agama sebagai pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu secara teratur di samping pelajaran umum.[23] Terkait kebijakan ini ternyata MHM tidak meresponsnya untuk menambahkan pelajaran umum dalam kurikulumnya. Demikian juga, ketika Kementerian Agama, pada tahun 1960, memberikan bantuan

---

Umam, *Menteri-menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik*, Jakarta: INIS, 1998, 46-47.

[20]Kesepuluh usulah BP KNIP dapat dibaca pada Abd. Rahman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Proklamasi ke Reformasi*, Yogjakarta: Kurnia Kalam, 2005, 62-64.

[21]Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik*, 16 dan Abdurrahman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah: Peraturan Perundangan*, Jakarta: Dharma Bhakti, 1984, 19.

[22]Bab VI tentang Kewajiban Belajar, Pasal 10, ayat 2. Secara lengkap Undang-undang ini dapat dilihat pada Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, 223-232.

[23]I Djumhur dan Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, 223.

kepada lembaga pendidikan agama selama lembaga itu di samping mengajarkan pelajaran agama, juga mengajarkan pengetahuan umum yang tingkatannya sama dengan pelajaran umum bagi sekolah rendah,[24] mengajarkan Bahasa Indonesia, ilmu pasti, ilmu bumi, sejarah umum, ilmu hayat, dan Bahasa Inggris bagi madrasah tsanawiyah,[25] dan mengajarkan aljabar-grafik, ilmu ukur ruang, ilmu bumi ekonomi, tata negara, sejarah kebudayaan, kesusasteraan Indonesia, dan ekonomi.[26]

Bertahannya MHM menjadi madrasah diniyah dengan tidak memasukkan pelajaran umum ternyata tidak mengurangi minat calon santri. Apalagi, setelah terjadi tragedi kemanusiaan dalam peristiwa G 30 S, pesantren menjadi lembaga pendidikan yang banyak dituju oleh masyarakat. Pada waktu itu, jumlah santri Pesantren Lirboyo mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ketika pesantren ini ditinggal wafat oleh pendirinya, pada tahun 1954, jumlah santrinya sekitar 750 orang. Jumlah santri tersebut mengalami kenaikan setelah tahun 1965-an, yaitu sekitar 3.500 orang.[27] Pukulan terhadap eksistensi pesantren dirasakan kembali terjadi pada masa awal orde baru. Kecenderungan jumlah santri Lirboyo mengalami penurunan pada masa Departemen Agama di bawah kendali Mukti Ali.[28] Pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri mengenai Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. Dalam SKB 3 Menteri tersebut, sejumlah diktum yang memperkuat posisi madrasah lebih ditegaskan dengan memerinci bagian-bagian yang menunjukkan kesetaraan madrasah dengan sekolah. Sebagai realisasinya, komposisi kurikulum madrasah

---

[24]Bab II, pasal 4, ayat 1, point c. Pemberian bantuan ini didasarkan kepada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1960 yang berisi 8 Bab dan 17 Pasal. Secara lengkap Peraturan Menteri Agama ini dapat dilihat pada Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,* 240-247.

[25]Bab II, pasal 4, ayat 2, point b.

[26]Bab II, pasal 4, ayat 3, point b.

[27]Moh. Aliyah Zen, *3/4 Abad Pesantren Lirboyo,* 113-114.

[28]Mukti Ali diangkat menjadi Menteri Agama pada tahun 1971 berkat perjuangan Korps Karyawan (Kokar) Departemen Agama yang dimotori oleh Muljanto Sumardi. Karena merasa tidak mendapatkan posisi pada masa Menteri Agama Mohammad Dahlan yang berafiliasi dengan Partai NU, maka Kokar bekerjasama dengan pusat kekuasaan pada masa orde baru, yaitu Golkar, untuk merubah personalia di Departemen Agama yang berafiliasi kepada Partai NU. Untuk elaborasi baca Ali Munhanif, "Prof. Dr. A. Mukti Ali: Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru," dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam, *Menteri-menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik,* Jakarta: INIS, 1998, 290.

harus sama dengan sekolah, berisi mata-mata pelajaran dengan perbandingan 70% mata pelajaran umum dan 30% pelajaran agama. Pada waktu itu, dengan mendasarkan pada perbaikan struktur, maka ijazah madrasah diniyah yang semula dapat digunakan meneruskan ke IAIN tidak dapat dimanfaatkan lagi, karena disyaratkan penggunaan ijazah dari ujian negara. Kebijakan ini berimplikasi dengan tersingkirkannya alumni pesantren dalam berbagai kesempatan untuk studi lanjut.[29] Respons Pesantren Lirboyo terhadap kebijakan ini ternyata tidak merubah sistem pendidikannya untuk menggunakan kurikulum Departemen Agama dan mengikuti ujian negara, tetapi ternyata meningkatkan kwalitas lulusannya dengan menambah satu jenjang pendidikan setingkat SLTA yang tetap hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama.

Pada tahun 1977, sidang panitia kecil MHM yang dipimpin oleh KH. Ilham Nadzir, asal Ketami Pesantren Kediri, memutuskan menambah tingkat Aliyah dan mengubah masa belajar tingkat Ibtida'iyah menjadi 6 tahun.[30] Kebijakan ini, menurut KH. Ilham Nadzir, menimbulkan keresahan yang luar biasa bagi santri dan gurunya, karena untuk mengisi siswa tingkat Aliyah diambilkan dari siswa Tsanawiyah yang dianggap pandai. Dalam rangka untuk meredam itu, akhirnya diambil langkah dengan menaikkan semua siswa Tsanawiyah ke tingkat Aliyah sesuai dengan kelas masing-masing tanpa melalui penyaringan, siswa kelas IV, V, dan VI dinaikkan menjadi siswa tsanawiyah, dan kelas yang ditinggalkannya diisi dengan santri baru yang daftar pada tahun itu.[31]

Latar belakang dibukanya tingkat `Aliyah, menurut KH. Ilham Nadzir, adalah dikarenakan pesantren Lirboyo telah memiliki perguruan tinggi, Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri semenjak tahun 1965, yang mahasiswanya mayoritas lulusan Tsanawiyah MHM Lirboyo.[32]

---

[29]Wawancara dengan Imam Basyari pada tanggal 1 Februari 2007 di rumah peneliti.

[30]M. Romadlon, *Aura*, Kediri: Purna Siswa III Aliyah MHM Lirboyo, 2004, 115.

[31]Wawancara dengan KH. Ilham Nadzir pada tanggal 28 Maret 2007 di Ketami Pesantren Kediri.

[32]Wawancara dengan KH. Ilham Nadzir pada tanggal 28 Maret 2007 di Ketami Jamsaren Kediri. Contoh alumni Tsanawiyah yang diterima di perguruan tinggi lain adalah Ahsin Sakho Muhammad, alumni tahun 1973, sekarang Rektor IIQ Jakarta, yang diterima di King Abdul Aziz University di Mekah dan Imam Basyari, mantan Guru Besar Bahasa Arab STAIN Kediri, yang diterima di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tidak hanya itu, ada beberapa alumni Tsanawiyah MHM yang juga diterima di perguruan tinggi lain, baik dalam maupun luar negeri. Data ini menunjukkan bahwa kwalitas lulusan Tsanawiyah MHM Lirboyo[33] waktu itu relatif baik, karena lulusan tsanawiyahnya ternyata dapat diterima di perguruan tinggi.

Dalam rangka mempertahankan kwalitas pembelajaran, MHM juga menetapkan aturan bahwa semua siswa MHM tidak diperbolehkan mengikuti ujian persamaan (UPERS) dan sekolah di selain Madrasah Hidayatul Mubtadi'ien, kecuali Tingkat Aliyah diperbolehkan hanya kuliah di Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri.[34] Aturan ini telah diberlakukan sejak tahun 1985. Latar belakang ditetapkan aturan tidak boleh mengikuti ujian persamaan adalah rendahnya motivasi santri untuk belajar dan mendalami ilmu manakala mereka berorientasi kepada ijazah. Sementara tidak diperkenankan siswa merangkap sekolah karena beratnya beban belajar siswa MHM, sehingga kalau mereka merangkap akan banyak ketinggalan.[35] Tidak hanya itu, santri juga diatur dengan sejumlah larangan lain di antaranya membunyikan atau menyimpan alat-alat musik, radio, tape recorder, TV, hand phone dan barang elektronik lainnya.[36]

Tiga jenjang pendidikan di MHM, yaitu Ibtida'iyah, Tsanawiyah, dan Aliyah, dipertahankan hingga kini dengan materi pelajaran yang diajarkan hampir seluruhnya disiplin ilmu yang biasa dimasukkan sebagai ilmu-ilmu agama dan buku ajar yang digunakan juga hampir seluruhnya kitab kuning. Berbagai upaya ditempuh untuk mempertahankan ciri khas MHM sebagai madrasah diniyah dan salaf seperti dijelaskan berikut.

Pada tahun 1986, Yayasan Pendidikan Islam Tribakti (YPIT) Kediri yaitu yayasan yang menaungi IAIT Kediri juga membuka lembaga

---

[33]Walaupun masa studi di madrasah tsanawiyah MHM ini selama 3 tahun, tetapi dalam ijazah tertutis Tsanawiyah 6 tahun sehingga dapat digunakan untuk meneruskan studi ke perguruan tinggi. Hal ini dilakukan sampai tahun 1976, 1 (satu) tahun sebelum didirikan madrasah aliyah MHM pada tahun 1977. Wawancara dengan KH. Ilham Nadzir pada tanggal 28 Maret 2007 di Ketami Pesantren Kediri.

[34]Ayat (2) Pasal 14 Tata Tertib Madrasah Hidayatul Mubtadi'ien Pesantren Lirboyo Kediri.

[35]Wawancara dengan Rodli Sutrisno, Lurah Pondok, pada tanggal 28 Maret 2007 di Kantor MHM.

[36]Ayat (13) Pasal 11 Tata Tertib Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur

pendidikan dari Taman Kanak-kanak, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah yang berkuriulum Departemen Agama. Karena adanya kekhawatiran mengganggu sistem pembelajaran di MHM yang sering disebut salaf tersebut maka tempat seluruh lembaga pendidikan yang ada di bawah YPIT ditempatkan di luar pondok Lirboyo, sebagai pondok induk,[37] tepatnya di Jl. KH. Wahid Hasyim 62 Kediri, yang berjarak sekitar 2 km dari lokasi pesantren.

Pada tahun 1995, ketika salah satu cucu KH. Mahrus Aly yang bernama Aina Ainaul Mardliyyah mendirikan satu unit pesantren yang bernama Pondok Pesantren Salafiy Terpadu ar-Risalah yang menyelenggarakan lembaga pendidikan formal SD, SMP, dan SMA, juga mendapatkan pesan, bahkan tekanan, dari beberapa keluarga besar pesantren Lirboyo, agar ar-Risalah dapat menjaga kesalafiyahan pesantren Lirboyo.[38]

Oleh karena itu, seluruh pesantren unit yang mendirikan lembaga pendidikan yang berkurikulum Departemen Agama maupun Departemen Pendidikan Nasional diharuskan tetap menyelenggarakan madrasah diniyah ini. Bahkan, dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan diniyah ini dijadikan daya tarik oleh manajemen pesantren unit untuk menarik animo santri baru.

Upaya untuk menjaga kesalafan MHM juga dilakukan dengan menolak mu`ādalah (penyetaraan) ijazah MHM yang disosialisasikan oleh Departemen Agama pada masa Tolchah Hasan. Sebagaimana dijelaskan pada Bab II, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Mendiknas dan Menag Nomor l/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, para santri di pesantren salafiyah yang berusia 7-15 tahun yang mengikuti pendidikan Diniyah Awaliyah (tingkat dasar) dan Diniyah Wustho (tingkat lanjutan pertama), yang tidak sedang menempuh pendidikan pada SD/MI dan SLP/MTs atau bukan pula tamatan keduanya, dapat diakui memiliki kemampuan yang setara dan kesempatan yang sama untuk melanjutkan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bila pesantren tersebut menambah beberapa mata pelajaran umum minimal 3 mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. STTB atau Ijazah yang dikeluarkan oleh pesantren penyelenggara program ini diakui oleh

---

[37]Penjelasan KH. An`im Falahuddin, Putra Terakhir KH. Mahrus Aly, Ketika Memberi Sambutan dalam Lustrum STAIN Kediri pada tahun 2002.

[38]Wawancara dengan Umi Aina Ainaul Mardliyyah dan KH. Ma`ruf Zainuddin, pendiri ar-Risalah, pada tanggal 28 Maret 2007.

pemerintah setara dengan STTB SD/MI atau SLTP/MTs dan dapat dipergunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan syarat-syarat yang akan diatur oleh departemen terkait.[39]

Alasan terhadap penolakan itu yang sering didengar adalah dikhawatirkan keikhlasan dan motivasi santri mengalami penurunan, dikarenakan mereka berkeinginan untuk mendapatkan ijazah, tidak hanya menguasai ilmu dalam rangka mencari ridla Allah sebagaimana selama ini. Yang menarik adalah mu`ādalah itu akhirnya diterima MHM Lirboyo pada masanya Menteri Agama Maftuh Basyuni setelah salah satu żuriyah pesantren Lirboyo gagal mendaftarkan diri menjadi calon legislatif dikarenakan Departemen Agama Kota Kediri tidak bersedia melegalisasi ijasah dari MHM Lirboyo tersebut.[40]

2. Membuka MTs dan MA HM Tribakti, Sekolah Umum yang Berciri Khas Islam

Harapan alumni Pesantren Lirboyo terhadap Pesantren Lirboyo untuk mendirikan lembaga pendidikan yang ijazahnya mempunyai *civil effect* untuk studi lanjut dan mendapatkan kerja pada sektor formal sudah ada jauh sebelum mu`ādalah itu diterima. Menurut KH. Imam Yahya Mahrus bahwa banyak alumni ketika *sowan* senantiasa mengajukan hal itu, agar anak-anak alumni tersebut dapat nyantri di Lirboyo untuk mendapatkan barokahnya kyai dan ijazah formal.[41] Dengan alasan itulah, KH. Imam Yahya Mahrus, pada tahun 1986, mendirikan MTs dan MA

---

[39]Berbagai Surat Keputusan seperti Kesepakatan Bersama antara Mendiknas RI dan Menag RI Nomor: 1/U/KB/2000 dan MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Keputusan Bersama Dirjen Binbaga Islam Depag RI dan Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI Nomor: E/83/2000 dan 166/c/Kep/DS/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar dapat dibaca pada *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pontren Dirjen Dik Is Depag RI, 2006.

[40]Keputusan Mu`ādalah, di mana ijasah tamatan MHM Lirboyo dapat digunakan untuk meneruskan ke perguruan tinggi dan tentu juga mempunyai efek sivil untuk kerja, itu ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jahja Umar, Ph. D., dengan suratnya nomor: Dj.II/46A/06.

[41]Penjelasan ini sering disampaikan oleh KH. Imam Yahya Mahrus pada tahun 1986 ketika dibuka MI, MTs, dan MA yang berkurikulum Departemen Agama.

yang berkurikulum Departemen Agama yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah disebut sekolah umum yang berciri khas Islam.

Harapan alumni di atas disinyalir sebagai dampak dari kebijakan pemerintah yang mengembangkan pendidikan umum seluas-luasnya dan memberikan fasilitas bagi bangsa Indonesia yang terdidik pada pendidikan umum untuk menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan.[42] Bahkan, Soekarno, Presiden pertama RI, pernah mengkritik bahwa pesantren sebagai lembaga yang ketinggalan zaman dan menutup diri. Pesantren, menurutnya, harus merubah sikap itu. Sejak itu, masyarakat mulai mengaitkan sekolah dengan lapangan kerja. Oleh karenanya, jumlah generasi muda yang tertarik memasuki pesantren semakin menurun. Hal ini mengakibatkan kebanyakan pesantren kecil pada masa 1950-an mati. Mereka yang berkeinginan untuk survive biasanya memadukan lembaga pendidikan umum dalam lingkungan pesantren.[43]

Keadaan mayoritas pesantren kecil ini sesuai dengan teori yang diajukan oleh Geertz bahwa peran kyai akan tetap eksis sepanjang ia mendirikan madrasah yang memuaskan secara religius bagi penduduk desa dan sekolah yang berfungsi membantu pertumbuhan Indonesia Baru.[44] Diagnosis Geertz tentang bertahannya pesantren ditentukan oleh kemampuannya mempertahankan identitasnya sebagai sistem pendidikan yang didominasi oleh kyai dan pada saat yang sama memperjelas perannya sebagai bentuk komplementer pendidikan nasional disepakati oleh peneliti berikutnya seperti Taufik Abdullah,[45] dan Ronald A. Lukens-Bull. [46]

---

[42] Asy`ari, *Moralitas Pendidikan Pesantren,* 41.

[43] Asy`ari, *Moralitas Pendidikan Pesantren,* 41 dan Saridjo dkk., *Sejarah Pondok,* 50.

[44]Clifford Geertz, "The Javanese Kijaji: the Changing Role of Cultural Broker", *Comparative Studies in Society and History,* 2 (2), 1960, 228-249.

[45]Taufik Abdullah, "The Pesantren in Historical Perspective," dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (Ed.), *Islam and Society in Soutest Asia,* Singapura: Instiute of Soutest Asian Studies, 1987, 102.

[46]Ronald A. Lukens-Bull, "Pengajaran Moral: Pendidikan Islam Masyarakat Jawa di Era Globalisasi," Makalah, 9.

Tidak hanya itu, pendirian MTs dan MA HM Tribakti juga dipengaruhi oleh politik pendidikan di Indonesia melalui SKB 3 Menteri pada tahun 1975 di mana ijazah madrasah diakui sama dengan sekolah umum manakala komposisi kurikulumnya berisi mata-mata pelajaran dengan perbandingan 70% mata pelajaran umum dan 30% pelajaran agama.

Data di atas memperlihatkan bahwa pendirian dua madrasah di atas merupakan aplikasi sebuah visi bahwa mencari ilmu tidak hanya berkorelasi dengan kewajiban tetapi juga terkait dengan mempersiapkan suatu kemampuan dan ketrampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Oleh karena itu, perubahan visi inilah merupakan pembaruan pertama dalam pendidikan di Pesantren Lirboyo.

Pesantren yang akhirnya menaungi dan mengelola MTs dan MA HM Tribakti baru didirikan 2 (dua) tahun setelah berdirinya dua madrasah tersebut. Waktu pendirian pesantren, yang akhirnya dinamakan HM al-Mahrusiyah yang didirikan oleh KH. Imam Yahya Mahrus, ini dicatat tanggal 01 Agustus 1988 M./10 Syawal 1408H. Pesantren ini semula bernama Pesantren Ibnu Rusydi yang diambil dari nama kecil KH. Mahrus Aly, yaitu Rusydi yang merupakan ayah dari KH. Imam Yahya Mahrus. Kemudian pesantren ini diubah namanya menjadi HM Putra karena menyesuaikan dengan nama-nama pondok unit lain yang ada di lingkungan Pesantren Lirboyo.[47] Pada tahun ajaran 2001-2002, nama pesantren ini ditambah dengan al-Mahrusiyah. Penambahan ini juga berlaku untuk Pesantren HM. Putri al-Mahrusiyah yang sejarah berdirinya akan dijelaskan berikut.

Rencana pendirian pesantren putri berawal pada tahun 1985, di mana KH. Mahrus Aly selaku ketua Yayasan Pendidikan Islam Tribakti (YPIT) mengundang żuriyah Lirboyo untuk bermusyawarah membahas tentang perlunya didirikan pondok putri. Namun dalam musyawarah yang dihadiri oleh KH. Mahrus Aly, KH. Makshum Jauhari, KH. Idris Marzuqi, KH. Anwar Manshur, Gus Kholil, KH. Halimi Turmudzi tersebut tidak tercapai sebuah kesepakatan, sehingga pendirian pesantren putri belum dapat terlaksana. Menurut KH. Halimi Turmudzi bahwa gagalnya kesepakatan untuk mendirikan pesantren putri dikarenakan

---

[47]Dalam rangka mengenang pendirinya, maka sebagian pesantren unit mengabadikan singkatan nama pendiri itu sebagai nama pesantren, seperti HM adalah singkatan Haji Mahrus dan HY adalah singkatan dari Haji Ya'qub.

IAIT Kediri waktu itu belum mempunyai mahasiswi.[48] Memang, sampai beberapa bulan menjelang wafatnya KH. Mahrus Aly, pada hari Ahad malam Senin, tanggal 6 Ramadlan 1405/26 Mei 1985, Pesantren Lirboyo dan beberapa unit pendidikan yang ada di bawahnya belum memiliki santri putri. Di samping itu, alasan lain yang sering didengar tentang gagalnya pendirian pesantren putri adalah kekhawatiran turunnya kwalitas pendidikan di Pesantren Lirboyo manakala ada pesantren putri.[49]

Ketika keinginan untuk mendirikan pondok putri melalui musyawarah tidak disepakati, maka KH. Anwar Manshur, menantu KH. Mahrus Aly, pada menjelang bulan Romadlon tahun 1985 memberanikan diri untuk menerima santri putri. Ketika keputusan ini dipermasalahkan oleh Hj. Aisyah Abdul Karim, maka diberi jawaban bahwa tujuan utama kedatangan santri putri itu adalah untuk *khidmah* (membantu) sambil mengaji.[50] Ternyata penerimaan satu santri putri itu dipahami oleh masyarakat bahwa KH. Anwar Manshur membuka pondok putri. Akibatnya, pada bulan syawal mulai banyak alumni Pesantren Lirboyo yang mengamanatkan putrinya untuk diterima menjadi santri.

Keberhasilan KH. Anwar Manshur ini memberi motivasi kepada KH. Imam Yahya Mahrus untuk menerima siswi dan mahasiswi bagi lembaga pendidikan dalam naungan YPIT Kediri. Satu tahun setelah menerima kepemimpinan YPIT, tepatnya pada tahun 1986, Kyai Imam membuka beberapa lembaga pendidikan dan seluruhnya menerima putri. Satu tahun setelah itu, KH. Imam, melalui YPIT mulai mendirikan asrama putri. Seluruh lembaga pendidikan yang didirikan YPIT waktu itu bertempat di Jl. KH. Wahid Hasyim 62 Kediri, sekitar 2 km arah timur Pesantren Lirboyo. Sejak 6 Januari 2002, siswi dan mahasiswi yang menempati asrama putri dipindahkan ke lingkungan Pesantren al-Mahrusiyah dan menjadi santri Pesantren HM Putri al-Mahrusiyah.

Suatu pembaruan yang dilakukan KH. Imam Yahya Mahrus, pendiri Pesantren HM al-Mahrusiyah adalah mendirikan lembaga pendidikan

---

[48]Wawancara dengan KH. Halimi Turmudzi, Sekretaris YPIT Kediri, pada tanggal 4 Maret 2007.

[49]Wawancara dengan Anang Darunnaja, Mudier III MHM, pada tanggal 28 Maret 2007 di Kantor MHM.

[50]Wawancana dengan KH. Imam Yahya Mahrus pada tanggal 11 Maret 2007 di Kantor Program Pascasarjana IAIT Kediri.

berkurikulum Departemen Agama, tidak seperti pondok induk yang hanya menyelenggarakan madrasah diniyah.

3. Membuka SD, SMP, dan SMA ar-Risalah

Keberadaan MTs dan MA HM Tribakti yang didirikan oleh KH. Imam Yahya Mahrus tersebut ternyata belum memuaskan żuriyah lainnya. Ketika KH. Ma`ruf Zainuddin dan Hj. Aina 'Ainaul Mardliyyah berhasil mendirikan Pesantren ar-Risalah dan mendirikan pendidikan formal, yang didirikan adalah SD, SMP, dan SMA. Keputusan Pesantren ar-Risalah memilih mendirikan SD, SMP, dan SMA dan tidak MI, MTs, dan MA disebabkan ketidakjelasan lulusan lembaga-lembaga pendidikan yang disebutkan terakhir. Menurut Kyai Ma'ruf, "Lulusan madrasah akan menjadi orang yang *mogol*. Dia serba tidak siap dan kalah. Kalau meneruskan ke fakultas umum akan kalah dengan lulusan sekolahan, kalau meneruskan ke fakultas agama akan kalah dengan lulusan diniyah."[51] Sebagaimana diketahui bahwa komposisi kurikulum madrasah berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tertanggal 24 Maret 1975 adalah 70 % untuk mata pelajaran umum dan 30 % mata pelajaran agama.

Dipilihnya pendirian SD, SMP, dan SMA ini, menurut KH. Ma`ruf, juga didasarkan alasan agar masyarakat mempunyai banyak pilihan terhadap lembaga pendidikan di Pesantren Lirboyo ini.[52] Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa pesantren induk mengkhususkan mengelola madrasah diniyah, pengajian kitab kuning dengan metode bandongan maupun sorogan, dan pengajian al-Qur'an, Pesantren HM al-Mahrusiyah menyelenggarakan MTs dan MA yang berkurikulum Departemen Agama, madrasah diniyah, dan pengajian al-Qur'an, dan Pesantren Salafiy Terpadu ar-Risalah menyelenggarakan SD, SMP, dan SMA, madrasah diniyah, dan pendidikan al-Qur'an.

Data terakhir ini memperlihatkan bahwa apapun corak lembaga pendidikan yang dikembangkan oleh berbagai pesantren unit di Lirboyo, madrasah diniyah harus tetap dipertahankan, bahkan dijadikan ciri utama. Strategi pembaruan institusi seperti ini ternyata menjadikan Pesantren

---

[51] Wawancana dengan KH. Ma`ruf Zainuddin pada tanggal 7 Nopember 2006.

[52] Wawancana dengan KH. Ma`ruf Zainuddin pada tanggal 7 Nopember 2006.

Lirboyo dapat eksis sampai kini, tidak seperti pesantren Tebuireng yang dianggap terlalu longgar ketika menerima pembaruan. Sebagai perbandingan, ketika tahun 1920-an sampai 1930-an, pesantren Tebuireng mempunyai santri sekitar 6.000 orang,[53] pada tahun 1995 hanya memiliki santri kurang dari 2.522 orang,[54] sementara pesantren Lirboyo ketika tahun 1920-an sampai dengan 1930-an mempunyai santri sekitar 200, pada tahun 1996 memiliki sekitar 7.900 santri.

Sejarah awal berdirinya Pesantren Salafiy Terpadu ar-Risalah hampir sama dengan beberapa pesantren unit di Lirboyo, yaitu datangnya santri terlebih dahulu. Data ini tampaknya memperlihatkan tiada perencanaan terhadap pendirian pesantren tersebut. Berawal pada tahun 1414 H tepatnya pada bulan Syawal atau bulan Pebruari 1995, keluarga Aina 'Ainaul Mardliyyah, putri KH. Anwar Manshur, menerima seorang tamu yang bermaksud menitipkan putranya berusia 4 tahun untuk belajar di Pesantren Lirboyo.

Berangkat dari seorang santri tersebut, yang menurut Ustadz Bisri bernama Zaenal Abidin dari Kaliombo Kota Kediri,[55] ditindaklanjuti dengan pengumuman tentang berdirinya Pesantren Anak-anak Ar-Risalah dan penerimaan santri baru. Semula, pendidikan di ar-Risalah adalah al-Qur'an dan diniyah dengan sistem sorogan. Pelajaran di madrasah diniyah ditekankan pada hafalan dan praktik dengan penuh disiplin.

Satu tahun setelah berdirinya, dengan bertambahnya santri, didirikanlah lembaga pendidikan formal berbentuk Sekolah Dasar yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Ar-Risalah. Keputusan pendirian SD, yang sering disebut pendidikan umum, di lingkungan Pesantren Lirboyo, merupakan keberanian tersendiri. Terkait hal ini KH. Ma`ruf Zainuddin, suami Hj. Aina bercerita, ”Ketika akan mendirikan SD kami tidak meminta izin kepada orang tua. Jikalau kami meminta izin dan ternyata tidak diizinkan dan tetap mendirikan, berarti kami tidak taat

---

[53] J. Benda, *the Cresent and the Rising Sun*, the Hague-Bandung, 1958, 245.

[54]M. Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di tengah Arus Perubahan*, Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2005, 355.

[55]Wawancara dengan Hasan Bisri, Lurah Pesantren Salafiy Terpadu Ar-Risalah, pada tanggal 20 Agustus 2007.

kepada orang tua. Tetapi kalau sudah berdiri, bagaimanapun keadaannya insya Allah diizinkan juga."[56]

Karena adanya kekhawatiran akan menghilangkan ciri salaf pesantren Lirboyo, maka respons negatif banyak diberikan oleh żuriyah Pesantren Lirboyo kepada pesantren unit ini. Respons yang paling keras diceritakan datang dari KH. Ma`shum Jauhari. Beberapa hal yang dikritik oleh Kyai Ma'shum yang banyak didengar oleh santri pesantren induk adalah pendirian lembaga pendidikan umum, terlalu disiplin, dan biaya yang terlalu mahal untuk ukuran Pesantren Lirboyo.[57]

Kebijakan Pesantren ar-Risalah berupa disiplin tinggi, pembayaran yang mahal dalam rangka melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran, dan penerimaan siswa melalui seleksi didorong oleh keinginan Pesantren ar-Risalah untuk menumbuhkan kembali citra pesantren di tengah masyarakat, bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mulia dan berharga. Lembaga pendidikan pesantren berpotensi untuk mencetak kader anak bangsa yang siap bersaing di tengah-tengah masyarakat modern. Ar-Risalah akan menepis anggapan masyarakat bahwa pesantren sebagai tempat penyembuhan anak bermasalah dan pendidikan bagi anak lemah berfikir, dengan menunjukkan kwalitas pesantren sebagai lembaga pendidikan tempat anak-anak mampu berfikir cerdas dan maju.[58]

Dalam beberapa hal, Pesantren ar-Risalah kelihatan berbeda dengan beberapa pesantren yang berada di Lirboyo, termasuk dengan dua pesantren yang dijelaskan lebih awal. Pesantren ini menerapkan disiplin yang tinggi, melarang santri merokok, menjaga lingkungan pesantren senantiasa asri, rapi, dan bersih. Dikarenakan konsistensi Pesantren ar-Risalah untuk melaksanakan kebijakan di atas, menurut Hj. Aena, beberapa żuriyah yang semula banyak memberikan kritikan akhirnya memberikan apresiasi kepadanya dengan bukti mereka menyekolahkan

---

[56]Wawancana dengan KH. Ma`ruf Zainuddin dan Hj. Aina Aina'ul Mardliyyah pada tanggal 28 Maret 2007.

[57]Diceritakan oleh Rodli Sutrisno, Lurah Pesantren Induk, pada tanggal 1 April 2007. Pada tahun 2007, setiap santri baru ar-Risalah dikenakan uang pangkal sebesar Rp.9.000.000,- Sedangkan uang bulanan untuk seluruh kebutuhan setiap santri sekitar Rp.850.000,-

[58] Wawancana dengan Hj. Aina Aina'ul Mardliyyah pada tanggal 22 Agustus 2007.

anaknya di ar-Risalah,[59] misalnya putra KH. Ma'shum Jauhari dimasukkan ke SD ar-Risalah.

Sebagai contoh ketatnya aplikasi kedisiplinan di pesantren unit ini adalah larangan wali santri menemui santri di luar jam kunjungan.[60] Pada tanggal 22 Agustus 2007, ketika penelitian ini sedang dilakukan, ada salah satu wali santri yang datang dari Surabaya dengan satu maksud untuk mencobakan kaca mata anaknya, karena kaca mata lamanya pecah, terpaksa dilarang untuk menemui anaknya. Larangan itu, menurut Hj. Aena, mempunyai maksud agar santri tidak terpecah konsentrasi belajarnya dengan memikirkan rumah. Di samping itu, agar santri-santri lain tidak bersedih karena tidak dikunjungi orang tuanya.[61]

Pesantren yang semula bernama Pesantren Anak-anak Ar-Risalah ini, pada tahun 2004, satu tahun setelah membuka jenjang SMA, diganti namanya menjadi Pesantren Salafiy Terpadu ar-Risalah.

Sebagaimana KH. Anwar Manshur ketika menerima santri putri dan KH. Imam Yahya Mahrus ketika membuka lembaga pendidikan yang kurikulumnya berafiliasi dengan Departemen Agama yang dilakukan secara diam-diam tanpa melalui proses musyawarah żuriyah pendiri dan BPK P2L, Pesantren ar-Risalah juga melakukan strategi yang sama ketika membuka lembaga-lembaga pendidikan yang kurikulumnya berafiliasi kepada Departemen Pendidikan Nasional. Temuan ini memperkuat teori Reproduksi Kebudayaan yang diajukan oleh Pierre Bourdieu. Menurut Bourdieu, pembedaan antara strategi dan pertarungan menjadi penting. Strategi ini banyak digunakan dalam masyarakat tradisional sementara pertarungan, di samping strategi lebih digunakan dalam masyarakat modern.[62]

---

[59] Wawancana dengan Hj. Aina Aina'ul Mardliyyah pada tanggal 22 Agustus 2007.

[60] Pada tahun ajaran 2006-2007, waktu kunjungan santri oleh keluarganya adalah: 01 September 2006, 15 Desember 2006, 19 Januari 2007, 23 Februari 2007, 04 Mei 2007, dan 08 Juni 2007.

[61]Wawancana dengan Hj. Aina Aina'ul Mardliyyah dan Observasi pada tanggal 22 Agustus 2007.

[62]Scott Lash, *Sosiologi Post Modernisme,* Terjemahan A. Gunawan Admiranto dari *The Sociology of Postmodernism,* Yogjakarta: Kanisius, 2004, 262-263.

Berangkat dari paparan di atas diketahui bahwa pendirian lembaga pendidikan baru dan pesantren unit adalah tidak merupakan perencanaan yang dilakukan oleh BPK-P2L sebagai institusi tertinggi di Pesantren Lirboyo, tetapi merupakan inisiatif individu sebagian keluarga pendiri pesantren induk. Data ini memperlihatkan salah satu ciri modernitas, yaitu adanya perencanaan tidak terpenuhi. Akan tetapi, dengan dibukanya lembaga pendidikan yang beragam sesuai dengan kecenderungan diferensiasi sosial ekonomi yang terjadi ini memperlihatkan telah terjadi pembaruan institusi di Pesantren Lirboyo ini.

Dengan dibukanya lembaga-lembaga pendidikan yang mempunyai efek sivil untuk studi lanjut dan memasuki dunia kerja dalam sektor formal dan dipertahankannya lembaga pendidikan diniyah sebagai elemen pokok pesantren, yaitu mengkaji kitab-kitab kuning, maka tidak perlu ada kekhawatiran bahwa Pesantren Lirboyo akan tidak mampu memenuhi fungsi pokoknya, yakni menghasilkan manusia-manusia santri dan sekaligus melakukan reproduksi ulama, sebagaimana yang sering terjadi dalam eksperimen pembaruan di pesantren lain.[63] Sebagai bukti, santri Pesantren Salafiy Terpadu ar-Risalah yang mendalami pelajaran umum di SMA ar-Risalah berhasil memperoleh prestasi sebagai Juara I Putra kitab Bulūghul Marām, Juara I Putri kitab Tafsīr Jalālain, Juara II Putra kitab Tafsīr Jalālain, Juara III Putra kitab Bulūghul Marām, dan Juara Harapan Putra kitab Tafsīr Jalālain MQKN II (Musabaqoh Qiroatil Kutub Nasional II) tahun 2006.[64]

Dengan didirikannya MTs dan MA HM Tribakti oleh Pesantren HM al-Mahrusiyah dan SD, SMP, dan SMA al-Mahrusiyah memperlihatkan bahwa pembaruan pendidikan di Pesantren Lirboyo menggunakan paradigma liberal. Paradigma ini berusaha menyesuaikan pendidikan dengan keadaan ekonomi dan politik di luar dunia pendidikan. Pendidikan dimaksudkan sebagai media untuk mensosialisasikan dan mereproduksi nilai-nilai tata susila keyakinan dan nilai-nilai dasar agar masyarakat luas berfungsi secara baik. Dalam rangka menjaga stabilitas jangka panjang, maka upaya pembaruan bagi kaum liberalis harus dilakukan secara evolusioner. Dengan agenda liberal seperti itu, pendidikan tidak mempunyai tempat untuk secara kritis mempertanyakan ketimpangan struktur sosial, ekonomi, dan politik. Paradigma inilah yang

---

[63]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*, 51.

[64]Brosur Pesantren Salafiy Terpadu ar-Risalah.

kelihatannya banyak mendominasi lembaga pendidikan formal di Indonesia.

Sedangkan Pesantren induk terlihat masih menggunakan paradigma konservatif. Paradigma konservatif ini dibangun berdasarkan keyakinan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak dapat merencanakan perubahan atau mempengaruhi perubahan sosial, hanya Tuhan lah yang merencanakan keadaan masyarakat dan hanya Dia yang tahu makna di balik itu semua. Dengan pandangan seperti itu, kaum konservatif tidak menganggap rakyat memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk merubah kondisi mereka.[65] Keyakinan seperti ini dalam teologi Islam banyak dikembangkan oleh aliran Jabbariyah.[66]

B. Pembaruan Manajemen di Pesantren Lirboyo

Pendirian sejumlah lembaga pendidikan yang ada di Pesantren Lirboyo diperlukan manajemen[67] untuk menaungi dan menggerakan lembaga-lembaga tersebut. Ketiga pesantren yang dijadikan objek penelitian ini, walaupun dikenal sebagai pesantren induk dan unit-unitnya, ternyata dikelola oleh yayasan yang berbeda. Pesantren induk dan seluruh lembaga pendidikan yang ada di dalamnya dinaungi oleh Yayasan Hidayatul Mubtadi'in, Pesantren HM al-Mahrusiyah dikelola

---

[65]Mansour Fakih, "Ideologi dalam Pendidikan," dalam William F. O'neil, *Ideologi-ideologi Pendidikan,* Terjemahan Omi Intan Naomi dari *Educational Ideologies: Contemporary Expression of Educational Philosophies,* Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. xiii.

[66]Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn Isma`īl Abū `Abdillah al-Bukhāriy al-Ju`fiy, *Khalq Af`āl al`Ibād,* Riyāḍ, Dār al-Ma`ārif al-Sa`ūdiyyah, 1978, hlm. 114.

[67]Manajemen sering didefinisikan sebagai "seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain." Secara lebih teknis manajemen dita`rifkan dengan "proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.". Baca James A.F. Stoner, *Manajemen,* Terjemahan Alfonsus Sirait dari *Management* (Jakarta: Erlangga, 1989), hlm. 7-8. Sedangkan Stephen R. Covey membandingkan indikator manajemen dan kepemimpinan. Menurutnya, manajemen adalah mengerjakan segalanya secara benar (do the things right), sementara kepemimpinan berarti mengerjakan hal-hal yang benar (do the right things). Manajemen melakukan efisiensi dalam menaiki tangga keberhasilan; sementara kepemimpinan menentukan apakah tangganya bersandar pada dinding yang benar." Baca Stephen R. Covey, *the Seven Habits of Highly Effective People* (New York: Simon & Schuster Pte. Ltd., 1990), hlm. 101.

oleh Yayasan al-Mahrusiyah, dan Pesantren salafy Terpadu ar-Risalah oleh Yayasan ar-Risalah.

Personalia Yayasan Hidayatul Mubtadi'in sama dengan personalia BPK P2L, yaitu beberapa keluarga keturunan KH. Abdul Karim, pendiri pesantren induk. Oleh karena itu, pesantren induk ini dipimpin oleh sejumlah kyai secara kolektif. Sedangkan personalia Yayasan al-Mahrusiyah adalah KH. Imam Yahya Mahrus, istri, dan anak-anaknya, sedangkan personalia Yayasan ar-Risalah adalah KH. Ma`ruf Zainuddin, istri, anak, dan adik-adiknya. Dua pesantren yang disebutkan terakhir merupakan pesantren milik pribadi dan keluarganya.

Oleh karena itu, wajar kalau Pesantren Lirboyo tidak memiliki bagan struktur pengurus yang menjelaskan relasi antara pesantren induk dengan pesantren-pesantren unit dan antara pesantren unit satu dengan lainnya. Sebagaimana terlihat pada lampiran 2 tentang bagan pengurus Pesantren Lirboyo dan lampiran 3 tentang personalia pengurus diketahui bahwa relasi itu hanya terlihat dari diposisikannya pengasuh pesantren-pesantren unit menjadi penasehat dan żuriyah pengasuh pesantren unit menjadi seksi keamanan. Kenyataan ini sesuai dengan pernyataan Rodli Sutrisno, lurah pondok induk bahwa "program kerjasama antara pesantren induk dan pesantren-pesantren unit ditekankan pada terlaksananya tata tertib pesantren, utamanya keamanan. Jalan yang ditempuh adalah dengan melibatkan pengurus dari pesantren unit untuk menduduki seksi keamanan pada kepengurusan pesantren induk."[68]

Berangkat dari personalia pengurus yayasan di atas, dapat dipahami kalau Dhofier berpendapat bahwa kebanyakan kyai di Jawa beranggapan bahwa suatu pesantren dapat diibaratkan sebagai suatu kerajaan kecil. Kyai memiliki kekuasaan dan kewenangan mutlak dalam aktifitas dan kehidupan di pesantrennya.[69] Tidak hanya itu, walaupuan pemeliharaan eksistensi pesantren salah satunya disebabkan pemberian wakaf, sadaqah, hibah, dan sebagainya,[70] oleh komunitas lingkungan, tetapi yang sering terjadi pesantren itu dianggap oleh generasi penerusnya sebagai sesuatu yang dapat diwariskan.

---

[68]Diceritakan oleh Rodli Sutrisno, Lurah Pondok, pada tanggal 14 Agustus 2007.

[69]Dhofier, *Tradisi Pesantren,* hlm. 56.

[70]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*, 108.

Dalam operasionalnya, manajemen pesantren ditangani oleh para pengurus, baik pengurus pesantren, pengurus madrasah, maupun pengurus organisasi lainnya. Seluruh kepengurusan itu memiliki *job discription,* struktur organisasi, dan tata tertib yang jelas. Manajemen yang ditangani santri sejauh diamati selama penelitian dan dari laporan berbagai kegiatan yang dibukukan berjalan dengan tertib, baik terkait administrasi maupun keuangan. Misalnya, pengurus madrasah paling sedikit mengadakan rapat umum dengan seluruh guru sebanyak 4 kali dalam setahun. Hasil rapat itu dibukukan dan disosialisasikan. Sedangkan pengurus pesantren dapat mengadakan rapat lebih sering dari itu, karena seluruh pengurus adalah santri mukim yang dapat ketemu setiap saat.

Ketertiban manajemen yang ditangani oleh santri terwujud karena kesadaran berjam'iyah telah terjadi di pesantren ini sejak lama. Kira-kira pada 1941 telah dibentuk jam'iyyah kubro yang diberi nama Jam`iyyah Taṡmīrut Ṭalabah**.** Jam`iyyah kubro ini merupakan gagasan baru yang terus diusahakan untuk mengorganisir jam'iyyah yang sudah ada, untuk yang pertama kalinya terpilih Bapak Abbas dari Indramayu sebagai ketua umum. Pencetus jam`iyyah ini ialah KH. Thohir Wijaya, yang saat itu menjadi Ketua Pondok, KH. Zamroji asal Kencong Pare, Agus Abdurrahman Suyuti dari Ngronggo Kediri dan KH. Yasir dari Jamsaren.[71] Di antara jam'iyyah pusat yang ada di Pondok induk sekarang ini adalah Jam`iyyah Syubbāniyyah, Jam`iyyah al-Ukhuwah (REMASS BATU), Jam`iyyah Rauḍatun Nāsyi'īn, Jam`iyyah Nahḍatut Ṭālibīn, Jam`iyyah Ṡamrotul Murābaṭah, dan Jam`iyyah al-Murāfaqah al-Muḥāfaẓah.

Dari tiga pesantren yang dijadikan objek penelitian mempunyai kecenderungan yang sama dalam pelaksanaan manajemen yang ditangani oleh santri yang dilaksanakan secara modern, bedanya terkait dengan manajemen keuangan baik terkait dengan jumlah yang harus dibayarkan oleh santri dan penggunaannya, pesantren induk lebih menggunakan manajemen terbuka. Dalam menentukan jumlah pembayaran dan penggunaan di dua pesantren unit ditentukan langsung oleh pengasuhnya, bahkan tempat pembayarannyapun dilakukan secara sentralistik. Berbagai kebutuhan yang memerlukan pendanaan bagi lembaga-lembaga di bawahnya, misalnya madrasah dan sekolah, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan.

---

[71] Moh. Aliyah Zen, *3/4 Abad Pesantren Lirboyo,* 110-111.

Berangkat dari data ini, peneliti berkesimpulan, pertama, sistem kepemimpinan pesantren, apakah kolektif atau individual, mempunyai korelasi positif dengan keterbukaan manajemen. Pesantren yang dikelola oleh kyai secara kolektif lebih transparan manajemennya bila dibandingkan dengan yang dikelola secara individual. Kedua, manajemen di Pesantren Lirboyo yang ditangani oleh santri sudah berjalan secara modern karena berbagai fungsi manajemen dijalankan secara tertib, tetapi manajemen yang ditangani oleh pengasuhnya cenderung dilaksanakan secara tradisional.

BAB V
PEMBARUAN ASPEK-ASPEK PENDIDIKAN DI PESANTREN LIRBOYO

Pada bab ini dipaparkan data dan temuan penelitian tentang proses terjadinya pembaruan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, yang terkait dengan pembaruan tujuan, kurikulum, metode, pendidik, peserta didik, sarana dan prasarana, dan evaluasi. Data bab ini digunakan untuk menjawab sub masalah penelitian pertama, yaitu Bagaimana proses terjadinya pembaruan pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri.

A. Aspek Tujuan

Penelusuran proses pembaruan tujuan bagi lembaga pendidikan tradisional, seperti pesantren, tidaklah mudah. Kebanyakan lembaga tersebut, termasuk Pesantren Lirboyo, tidak mencantumkan secara tertulis tujuannya ketika didirikan. Bahkan, sering dijumpai bahwa tujuan itu juga tidak dirumuskan secara tertulis sampai kini. Hal ini, menurut KH. MA. Fuad Hasyim, alumnus MHM tahun 1958, disebabkan pesantren tidak cenderung mendiskusikan tentang sistem pendidikan, di mana tujuan menjadi komponen penting, tetapi lebih menekankan kepada keikhlasan niat yang mendatangkan barokah, pengalaman, dan penghayatan penuh terhadap ajaran Islam, do`a dan kepasarahan total terhadap Allah.[1]

Secara dramatis, KH. Fuad Hasyim mempertanyakan faktor yang menentukan keberhasilan pesantren dalam mengantarkan santrinya menjadi ulama yang mumpuni. Dalam hal ini, dia mempertanyakan, ”apakah metode kyai yang canggih? apakah sistemnya yang *jempolan*?”[2]

---

[1]Narjohn Najich Afnany, *Le Azm,* Kediri: Tamatan Madrasah Aliyah MHM, 1994, xii-xiii.

[2]Narjohn Najich Afnany, *Le Azm,* xii.

Dia memberi jawaban, ”Tidak. Malah saya cenderung yakin kyai tidak pernah mengerti apa itu sistem, metode, saya juga menduga kyai tidak pernah mempedulikan semuanya.”[3]

Oleh karena itu, tujuan pendidikan dari pesantren ini pada dekade awal akan ditelusuri melalui sejarah pendiriannya. Sebagaimana dijelaskan, bahwa pendirian pesantren ini dilatarbelakangi oleh keadaan desa Lirboyo yang waktu itu sebagian penduduknya bermoral rendah, bahkan bromo corah.[4] Berangkat dari kondisi ini, maka disimpulkan bahwa tujuan pertama dari pesantren ini adalah amar ma’ruf nahi munkar. Tujuan pertama ini terus disempurnakan sesuai dengan tuntutan keadaan. Ketika santri mulai berdatangan dan jumlahnya semakin bertambah, maka tujuan dari pesantren ini, menurut KH. Fuad Hasyim, adalah menjadikan dirinya menjadi lembaga keagamaan yang mewariskan ilmunya ulama’ as-Salaf aṣ-Ṣāliḥīn.[5]

Dewasa ini, pesantren ini merumuskan tujuannya dalam bentuk visi dan missi. Visi yang ditetapkan oleh Pondok induk adalah: ”beriman, bertaqwa, berakhlaqul karimah, dan disiplin.”[6] Visi tersebut dijabarkan menjadi missi, ”mencetak intelektual muslim yang beriman, bertaqwa, dan berakhlaqul karimah, serta menciptakan kader ulama yang mentransformasikan ilmu agama dalam berbagai kondisi.”[7]

Visi dan missi ini seharusnya dijabarkan oleh seluruh lembaga di bawahnya, baik pesantren-pesantren unit maupun madrasah dan sekolah yang ada di dalamnya. MHM Lirboyo, sebagai lembaga pendidikan formal satu-satunya di pesantren induk ini, ternyata tidak menulis secara resmi tentang visi dan misinya itu. Terkait dengan ini, KH. Ma`ruf Zainuddin, penasehat utama MHM, menjelaskan bahwa visi dan missi dari MHM dapat ditelusuri melalui fatwa *masyāyikh*, pimpinan, dan guru MHM dan interpretasi simbol MHM.[8] Dalam rangka menelusuri itu, maka fatwa KH. Idris Marzuqi, Pengasuh pesantren induk dan pelindung MHM, dan fatwa mustaḥiq akan dijadikan rujukan. Kepada alumni tahun 1994, KH. Idris Marzuqi memberikan fatwa untuk menjadi pejuang ilmu

---

[3]Narjohn Najich Afnany, *Le Azm*, xii.

[4]Moh. Aliyah Zen, *3/4 Abad Pondok Pesantren Lirboyo*, Kediri: Siswa Kelas III Aliyah MHM Lirboyo 1984-1985, 1985, 58.

[5]Narjohn Najich Afnany, *Le Azm*, xi.

[6]Brosur Pondok Pesantren Lirboyo tahun 2006.

[7]Brosur Pondok Pesantren Lirboyo tahun 2006.

[8]Wawancara dengan KH. Ma`ruf Zainuddin, pada tanggal 28 Maret 2007.

dan pejuang Ahlus Sunnah wal Jama`ah yang mempertahankan fan yang menjadi ciri khas pesantren.[9] Fatwa senada juga disampaikan Kyai Idris kepada tamatan 2005 dengan penekanan agar siswa berbudi pekerti yang luhur dan tidak keluar dari ajaran Ahlu Sunnah wa al-Jama`ah.[10]

Sementara simbol MHM Lirboyo Kediri sebagaimana di bawah ini

diinterpretasikan sebagai berikut. Segi lima berarti berasaskan Pancasila dan beraqidah Islam ahlus sunnah wal jama`ah; bola dunia berarti anggota MHM bersedia menyebarluaskan Islam ke seluruh dunia; masjid diartikan anggota MHM satu tujuan yaitu *li i`lā'i kalimatillāh* (meninggikan kalimat/agama Allah), menara tingkat tiga berarti MHM memiliki tiga tingkat pendidikan, ibtida'iyah, tsanawiyah, dan aliyah; empat buah kitab terbuka satu berarti MHM mengakui mażhad empat dan yang dianutnya yaitu mażhab Syafi`i; dan pena berarti anggota MHM adalah siswa yang kreatif.[11]

Dari nasehat dan interpretasi simbol di atas dapat diperkirakan bahwa visi MHM Lirboyo adalah sebagai pusat pemantapan aqidah ahlus sunnah wal jama`ah, akhlaqul karimah, pengembangan ilmu yang mampu menghasilkan tamatan yang kreatif dan berbudi luhur dan bersedia menyebarluaskan Islam dalam rangka *li i`lā'i kalimatillāh.*

Berangkat dari fatwa KH. Idris Marzuqi, mustaḥiq, dan interpretasi simbol MHM dapat diajukan bahwa misi MHM Lirboyo Kediri adalah mencetak sumber daya insani yang berkualifikasi:

a. Berpegang teguh pada aqidah ahlus sunnah wal jama`ah.
b. Mampu mengembangkan modal dasar ilmu yang diperoleh di pesantren.

---

[9]Narjohn Najich Afnany, *Le Azm,* 4-5.

[10]M. Fikrie Chakim, *Lazuardi,* Kediri: Purna Siswa Kelas III Aliyah MHM Lirboyo,36.

[11]M. Romadlon, *Aura,* vii.

c. Mengamalkan ilmu yang diperoleh secara kreatif dan ikhlas untuk mengabdi kepada masyarakat banyak.
d. Menjaga harga diri dengan bersikap dan bertingkah laku yang baik serta tawadlu` dan berbudi luhur.

Berdasarkan data di atas disimpulkan bahwa pesantren induk menekankan tujuan pendidikan untuk mengantarkan santri menguasai ilmu-ilmu keislaman, mengajarkan, dan mengamalkannya. Lembaga pendidikan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah MHM.

Terdapat seperangkat program dan aturan yang ditetapkan agar visi dan missi itu terlaksana. Disiplin sebagai salah satu visi pesantren ini diaplikasikan dengan menetapkan tata tertib MHM. Sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat 4 disebutkan, Guru berkewajiban datang di ruang kelas selambat-lambatnya 15 menit sebelum pelajaran berlangsung. Untuk memastikan kedisiplinan guru tersebut ada petugas yang memastikannya dengan cara mendatangi kelas setiap tatap muka dan meminta guru yang sedang mengajar tersebut untuk membubuhkan tanda tangan, nama terang, dan nama pelajaran yang diajarkan dalam buku daftar hadir pengajar. Tata tertib ini dilaksanakan secara disiplin. Misalnya, rekapitulasi kehadiran guru dan siswa senantiasa dilaporkan setiap tiga bulan sekali dalam rapat kwartal. Tata tertib pesantren secara lengkap tercantum pada lampiran 4 dan tata tertib madrasah pada lampiran 9.

Sedangkan visi MTs dan MA yang berada di Pesantren HM al-Mahrusiyah adalah mencetak generasi yang berakhlakul karimah, disiplin tinggi dan unggul dalam prestasi, dengan indikator unggul dalam beraktifitas keagamaan, unggul dalam disiplin madrasah, unggul dalam kepedulian sosial, unggul dalam berkreasi seni, dan unggul dalam pencapaian NUN (Nilai Ujian Nasional). Sedangkan missinya adalah menumbuhkan penghayatan dan pengalaman terhadap ajaran Islam dan budaya bangsa sebagai sumber kearifan dalam bertindak, melaksanakan gerakan kesadaran disiplin warga madrasah, melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan untuk menanamkan dan menumbuhkan jiwa sosial, meningkatkan mutu dan kreatifitas serta prestasi siswa dalam bidang seni dan ketrampilan, dan mengembangkan potensi akademik peserta didik secara optimal sesuai dengan bakat dan minat.[12]

---

[12]Visi dan Missi MTs dan MA HM Tribakti itu dipajang pada dinding kantor kepala madrasah, ruang guru, dan ruang tata usaha.

Visi dan missi terakhir ini relatif sejalan dengan visi missi pesantren induk. Pembaruannya hanya terletak dicantumkannya beberapa indikator dari visi tersebut. Bila dibandingkan dengan aplikasi visi dan missi pesantren induk, pesantren HM al-Mahrusiyah ini relatif lebih longgar dalam aplikasi kedisiplinannya.

Sementara Pesantren Salafiy Terpadu ar-Risalah memiliki visi membentuk pribadi luhur yang jujur berdasarkan akhlakul karimah dan nilai-nilai keagamaan. Sementara misinya adalah pertama, mengembangkan potensi intelegensi dan religi untuk membentuk intelektual muslim yang unggul dalam menciptakan, mengembangkan serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dijiwai oleh akhlakul karimah sebagai wujud pengabdian kepada Allah SWT. Kedua, mengembangkan kepribadian Rasulullah SAW dalam pendidikan sebagai proses terbentuknya cendekiawan muslim yang shidiq, amanah, fathonah dan tabligh; ketiga, memadukan filosofi Islam dan ilmu pengetahuan modern untuk daya nalar berfikir kritis, kreatif dan inovatif terhadap perkembangan zaman; keempat membangun kemakmuran umat melalui kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan; dan kelima pemandu generasi penerus untuk meraih kesempatan berkarya dan menempatkan diri dalam membangun kehidupan masyarakat dengan toleransi, peduli, dan berbudi.[13]

Dalam rangka mengaplikasikan visi dan missi tersebut, pesantren ar-Risalah menyelenggarakan pendidikan secara terpadu, yaitu pendidikan yang berorientasi kepada penguasaan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu umum secara terpadu. Pendidikan ilmu-ilmu keislaman didasarkan kepada kurikulum pesantren serta pendidikan umum mengikuti kurikulum Departemen Pendidikan Nasional. Pendidikan ilmu-ilmu keislaman meliputi pendidikan al-Qur'an dan pendidikan diniyah meliputi jenjang Ibtida'iyah, Tsanawiyah, dan Aliyah sementara pendidikan umum meliputi jenjang SD, SMP dan SMA.

Dari ketiga tujuan pesantren di atas dapat dipahami bahwa pertama, adanya konsistensi untuk mengantarkan santri menguasai ilmu-ilmu keagamaan yang diaplikasikan melalui madrasah diniyah, dan kedua, terjadinya perubahan orientasi dari yang semula hanya menekankan kepada ilmu keagamaan menuju kepada ilmu-ilmu umum dan teknologi.

---

[13]Visi dan Missi Pesantren Salafiy Terpadu ar-Risalah ini di samping dipajang pada dinding kantor kepala madrasah, ruang guru, dan ruang tata usaha, juga dicatumkan dalam brosur penerimaan santri baru.

B. Aspek Kurikulum

Pembaruan kurikulum berkorelasi dengan pembaruan institusi. Enam tahun setelah MHM berjalan relatif normal, tepatnya tahun 1931, MHM harus gulung tikar selama dua tahun, 1931-1933. Hal ini, sebagaimana dijelaskan, disebabkan rendahnya minat santri untuk mengikuti pembelajaran dengan sistem klasikal yang waktu itu merupakan sistem baru di kalangan pesantren[14] dan dianggap mencontoh model sekolah yang dilaksanakan pemerintah Kolonial Belanda yang kafir. Alasan normatif yang sering digunakan adalah ḥadīth di bawah ini:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ***[١٥] رواه أبو داود و أحمد

Ḥadīth, yang artinya barang siapa meniru apa yang dilakukan suatu kaum dia akan dimasukkan menjadi bagian kaum itu, berimplikasi kepada tidak diperkenannya memakami pakaian yang biasa dipakai oleh orang Belanda, seperti celana dan dasi. Tampaknya, pemahaman ini tidak hanya diberlakukan untuk pakaian tetapi juga untuk sistem pendidikan. Sikap antipati umat Islam terhadap Belanda di samping disebabkan berbagai kesengsaraan kehidupan yang dialami Bangsa Indonesia selama penjajahan, juga disebabkan berbagai kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda yang tidak menguntungkan perkembangan lembaga pendidikan yang dikembangkan umat Islam yang secara historis dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pendidikan dan pengajaran Islam yang mengakar di tengah masyarakat Jawa sejak zaman Mataram telah mengkhawatirkan Pemerintah Kolonial Belanda. Oleh sebab itu, sejak terjadinya Perjanjian Gianti yang membelah Mataram menjadi dua pada 1755, Pemerintah Kolonial Belanda selalu berusaha menghasut dan mengadu-domba kedua

---

[14]Zen, *3/4 Abad Pondok Pesantren Lirboyo,* 119. Jumlah santri pesantren Lirboyo menjelang MHM gulung tikar sekitar 200 santri, dan jumlah santri meningkat ketika MHM dapat stabil kembali pada pertengahan tahun 1930-an menjadi sekitar 500 santri dan pada akhir pendudukan Jepang, tahun 1944, jumlah santrinya menjadi 750 orang. Untuk elaborasi baca Atho`illah Sholahuddin An, *78 Tahun Pondok Lirboyo,* 196-197.

[15]Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Ashats al-Sijistāni al-Azdi, *Sunan Abī Dāwud,* t.tp., Dār al-Fikr, t.t., Jilid IV, 44, dan Aḥmad ibn Ḥanbal abū `Abdillah al-Shaibāni, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal,* Mesir: Muassasat al-Qurthubah, t.t., 6 Jilid, jilid II, 50 dan 92. Ḥadīth ini berdasarkan penelitian penulis berkwalitas Ḥasan li żātihi, mengingat sanadnya bersambung, tidak ada shaż dan `illat, dan hanya satu perawi yang oleh Ibn Ḥajar al`Asqalāni digolongkan ke-5, yaitu: `Abdurraḥman ibn Thābit.

kerajaan tersebut. Di dalam proses adu domba itulah Pemerintah Kolonial Belanda secara terencana berusaha melumpuhkan kekuatan Islam, di mana Pemerintah Kolonial Belanda pada gilirannya menghapuskan tanah-tanah lungguh, yang merupakan tanah ganjaran yang sejak zaman Mataram diberikan kepada penghulu, naib, kyai anom, dan kyai sepuh untuk dijadikan tanah gobernemen.[16]

Kehadiran Belanda dan keterikatan keraton dengan Pemerintah Belanda memperkecil kemungkinan keraton untuk berbuat apa yang mungkin diizinkan untuk menemukan kembali keutuhan wilayah Jawa, di mana Islam merupakan komponen utama. Pengaruh yang diberikan kekuatan asing terhadap gaya hidup keraton menyebabkan ulama dan pesantren menjauhkan diri.[17]

Di samping itu, setelah Diponegoro ditaklukkan, Belanda memperluas tekanannya terhadap Islam. Organisasi pendidikan dan pengajaran Islam yang berlaku pada masa Kerajaan Mataram dihapuskan.[18] Selain itu, Untuk menghindari pemberontakan dari para santri, pada tahun 1882, Belanda telah membentuk priesterraden yang bertugas mengawasi perkembangan pesantren.[19] Kurang lebih dua dasawarsa kemudian, tepatnya tahun 1905, Badan di atas menyarankan untuk dikeluarkannya ordonansi yang bertugas mengawasi pesantren dan mengatur izin bagi guru-guru agama yang akan mengajar. Tahun 1925 keluar aturan yang membatasi lingkaran lembaga pendidikan agama yang dikelola kyai dengan Wilde School Ordonantie. Ordonansi ini berupaya memberantas serta menutup madrasah yang tidak ada izinnya atau memberi pelajaran yang tidak disukai pemerintah.[20]

Manifestasi kebencian kalangan pesantren terhadap pemerintah Belanda dapat dilihat dari sikap umat Islam, terutama kalangan pesantren, menganggap haram memakai pakaian yang digunakan oleh Belanda. Pemahaman itu ternyata tidak hanya berimplikasi kepada pakaian tetapi juga berlaku untuk pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari respons orang

---

[16]Taufik Abdullah, Dialog dan Integrasi, 145 dan Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam,* 227.

[17]Taufik Abdullah, Dialog dan Integrasi, 145.

[18]Saridjo dkk., *Sejarah Pondok,* 41.

[19]Abdullah, “Dialog dan Integrasi”, hlm. 153.

[20]Amir Hamzah, *Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam,* Jakarta: Mulia Offset, 1989, hlm. 47., dan Sutari Imam Barnadib, *Sejarah Pendidikan*, Yogjakarta: Andi Offset, 1983, hlm. 24.

tua santri Madrasah Salafiyah Pesantren Tebuireng ketika madrasah ini mengadakan pembaruan. Pada tahun 1929, ketika kepemimpinan dipegang oleh KH. Ilyas, madrasah ini diperbaruhi kurikulumnya dengan memasukkan mata pelajaran umum seperti membaca dan menulis huruf latin, ilmu bumi, sejarah, dan bahasa Melayu. Semenjak itu surat kabar berbahasa Melayu diizinkan masuk pesantren. Di Madrasah ini, sistem pengajaran bahasa Arab juga diubah, dari sistem pengajaran dengan buku yang sulit dan berbentuk *naẓaman,* seperti `Imrīṭī dan Alfiyah Ibn Mālik, menjadi sistem pengajaran bahasa Belanda, yaitu *direct method.*[21] Pembaruan ini ternyata menimbulkan reaksi yang cukup hebat dari orang tua santri. Di antara bentuk protesnya adalah banyaknya orang tua santri yang memindahkan anaknya ke pesantren lain, karena Tebuireng dinilai sudah terlalu modern karena meniru sistem pendidikan Kolonial Belanda.[22] Resistansi masyarakat tradisional yang menjadi basis dukungan pendidikan di pesantren terhadap segala sesuatu yang dianggap berasal dari Kolonial Belanda tampaknya mempengaruhi strategi beberapa orang yang menghidupkan kembali MHM dengan cara adaptasi.

Dalam rangka adaptasi terhadap kecenderungan masyarakat ini, MHM setelah bangkit kembali, pada tahun 1933, sampai sekarang tidak memasukkan mata pelajaran umum, kecuali yang akhir-akhir ini sangat dibutuhkan, seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa, dan Berhitung, dan itupun hanya diperuntukkan bagi siswa tingkat Ibtidaiyah. Bahkan tentang bahasa pengantar yang digunakan ketika menerangkan materi pelajaran di kelas, menurut cerita KH. Imam Yahya Mahrus, pengasuh pesantren Lirboyo, pada awal tahun 1940-an juga menjadi perdebatan, apakah Bahasa Jawa, yaitu bahasa yang digunakan oleh mayoritas kyai pada waktu itu, atau Bahasa Indonesia, sesuai dengan kebutuhan. Pada waktu itu, Pesantren telah memiliki santri dari berbagai suku di luar suku Jawa. Bahkan, sebelum tahun 1936, Pesantren Lirboyo sudah memiliki santri dari Singapura dan Malaysia.[23]

---

[21]*Direct Method* adalah sistem pengajaran Bahasa Belanda di mana santri dilatih secara langsung menggunakan Bahasa Arab sebagai bahan percakapan. Baru setelah secara lisan dikuasai, selanjutnya mempelajari grammar, dan tahun terakhir menulis, baik *khaṭ, imlak,* maupun *insyā'.* Lihat Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah,* 71.

[22] Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah,* 71.

[23] Adanya santri dari kedua negara tersebut sebelum tahun 1936 didasarkan pada bukti adanya sebuah kamar Malaya, untuk santri Malaysia dan Singapura, yang didirikan tahun 1936. Untuk elaborasi baca M. Romadlon, *Aura*, 110.

Perdebatan antara dua menantu KH. Abdul Karim, yaitu K. Marzuqi, pendukung penggunaan Bahasa Jawa dan KH. Mahrus Aly, pendukung Bahasa Indonesia, akhirnya memperoleh kesepakatan, Bahasa Jawa digunakan di dalam kelas ketika proses pembelajaran berlangsung, sementara Bahasa Indonesia digunakan ketika musyawarah.[24] Peristiwa perdebatan ini dapat dipahami bahwa telah terjadi kekhawatiran di pesantren Lirboyo untuk dianggap terlalu modern dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pembelajaran.

Dalam rangka meningkatkan dan menjaga kwalitas lulusan, MHM semenjak kebangkitan kembali banyak berkutat untuk membenahi masa studi untuk masing-masing tingkat dan membenahi materi pelajarannya. Sebagaimana dijelaskan Mastuhu, bahwa kurikulum pesantren menggunakan penjenjangan kitab sebagai dasar untuk menentukan tingkatan mata pelajaran.[25] Penjenjangan kitab tersebut ditentukan oleh kompleksitas isi dan struktur bahasanya.

Secara lebih detail, upaya meningkatan kwalitas lulusannya dilakukan dengan strategi sebagai berikut. Setelah bangkit kembali, tahun 1933, MHM Lirboyo memberikan mata pelajaran pokok tata bahasa Arab (naḥwu dan ṣaraf) yang merupakan ciri khas Pondok Pesantren Lirboyo. Sedangkan palajaran sampingnya adalah tulis menulis, ilmu tajwīd, al-Qur'ān dan pendidikan dasar lain.[26]

Tahun 1949, atas gagasan Ustāż Zamroji, saat itu mustaḥiq tingkat Tsanawiyah, yang mendapat restu KH. Abdul Karim, dibentuklah madrasah mu'allimin, setingkat Aliyah sekarang, dengan 3 mata pelajaran utama yakni fatḥul wahab (fiqh), jam'ul jawāmi' (uṣūl fiqh) dan 'uqūdul jumān (balāghah).[27] Madrasah mu`alimin tersebut hanya bertahan sekitar 2 tahun.

Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1950, materi pelajaran disesuaikan dengan ditambah beberapa mata pelajaran seperti tafsīr, ḥadīth, falaq dan 'Arūḍ.[28] Penambahan mata pelajaran tersebut dalam

---

[24] Wawancara dengan KH. Imam Yahya Mahrus, sekarang pengasuh Pesantren Lirboyo, putra ke-6 KH. Mahrus Aly, pada tanggal 18 Maret 2007 di kantor Program Pascasarjana IAIT Kediri.

[25]Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren,* Jakarta: INIS, 1994, 156.

[26]Zen, *3/4 Abad Pondok Pesantren Lirboyo*, 120-121.

[27]Atho`illah Sholahuddin Anwar, *78 Tahun Pondok Lirboyo*, 207.

[28]Ch. Nur Siddiq, *Buku Pijar,* Kediri: Kelas III Aliyah MHM Lirboyo,

rangka mengikuti perubahan institusinya dari yang semula Ibtida'iyah 4 tahun dan Tsanawiyah 4 tahun menjadi Ibtida'iyah 5 tahun dan Tsanawiyah 3 tahun. Kurikulum sebagaimana tersebut di atas dipertahankan sampai tahun 1983.

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa MHM tidak memberikan respons terhadap berbagai kebijakan pemerintah, utamanya yang ditentukan oleh Kementerian Agama, yang telah memberikan berbagai pengakuan legal formal terhadap madrasah manakala mengikuti aturan yang ditetapkan.

Pada Tahun 1950 Bangsa Indonesia telah memiliki Undang Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 Tahun 1950. Di dalam UU itu dinyatakan bahwa belajar di madrasah yang telah mendapat pengakuan Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.[29] Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang tersebut, Kementerian Agama menggariskan kebijakan bahwa madrasah yang diakui dan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kewajiban belajar haruslah terdaftar pada Kementerian Agama. Sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan diri itu, madrasah itu harus mengajarkan pelajaran agama sebagai pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu secara teratur di samping pelajaran umum.[30]

Dalam rangka memberikan motivasi kepada madrasah untuk meningkatkan kwalitas akademiknya, pemerintah juga memberikan bantuan finansial. Untuk mendapatkan bantuan tersebut, lembaga pendidikan agama itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya, di samping mengajarkan agama Islam, lembaga itu harus mengajarkan pengetahuan umum yang tingkatannya sama dengan pelajaran umum bagi sekolah rendah,[31] mengajarkan Bahasa Indonesia, ilmu pasti, ilmu bumi, sejarah umum, ilmu hayat, dan Bahasa Inggris bagi madrasah tsanawiyah,[32] dan mengajarkan aljabar-grafik, ilmu ukur ruang,

---

1996, 98.

[29]Bab VI tentang Kewajiban Belajar, Pasal 10, ayat (2). Secara lengkap Undang-undang ini dapat dilihat pada Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,* 223-232.

[30]I Djumhur dan Danasuparta, *Sejarah Pendidikan,* 223.

[31]Bab II, pasal 4, ayat (1), point c.

[32]Bab II, pasal 4, ayat (2), point b.

ilmu bumi ekonomi, tata negara, sejarah kebudayaan, kesusasteraan Indonesia, dan ekonomi.[33]

Pada tanggal 24 Maret 1975 pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri mengenai Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah." Dalam Surat Keputusan Bersama itu, masing-masing Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Dalam Negeri memikul tanggungjawab dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan madrasah.[34] Dalam SKB 3 Menteri tersebut, sejumlah diktum yang memperkuat posisi madrasah lebih ditegaskan dengan memerinci bagian-bagian yang menunjukkan kesetaraan madrasah dengan sekolah. Sebagai konsenweksinya, komposisi kurikulum madrasah harus berisi mata-mata pelajaran dengan perbandingan 70% mata pelajaran umum dan 30% pelajaran agama.

Keseluruhan kebijakan di atas ternyata tidak mendapat respons dari MHM. Madrasah ini tetap pada keyakinannya untuk hanya mengajarkan ilmu-ilmu keislaman dengan menggunakan kitab kuning sebagai buku ajarnya. Hal itu juga terus berlanjut pada tahun berikutnya. Upaya untuk meningkatkan kwalitas pembelajarannya dilakukan dengan menambahkan buku ajar dari kitab kuning yang dianggap lebih lengkap penjelasannya dan lebih komplek.

Pada tahun 1983, panitia kecil MHM yang dipimpin oleh KH. Anwar Mansur mencantumkan pelajaran tingkat ‘Aliyah di antaranya: al-Maḥalli (fiqih), Jam’u al-Jawāmi’ (uṣūl fiqh), al-Jāmi’u al-Ṣoghīr (ḥadīth), dan ‘Uqūdul al-Jumān (balāghah).[35]

Berbagai mata pelajaran yang ditambahkan tersebut dianggap masyarakat pesantren sebagai kitab-kitab yang lebih kompleks dari mata pelajaran sejenis yang telah diberikan sebelumnya. Kebanyakan santri merasa bangga apabila telah mempelajari kitab-kitab yang kompleks tersebut yang biasa disebutnya sebagai kitab-kitab besar.

Secara lebih terinci dapat dijelaskan bahwa materi pelajaran yang diajarkan di MHM hampir seluruhnya disiplin ilmu yang biasa dimasukkan sebagai ilmu-ilmu agama dan buku ajar yang digunakan juga

---

[33]Bab II, pasal 4, ayat (3), point b.

[34]SKB 3 Menteri ini berisi 7 Bab 8 Pasal. Untuk lengkapnya Baca *Sarana Pelaksanaan Kurikulum Baru Madrasah Negeri*, Jakarta: Proyek Penelitian Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 1975/1976, 115-119.

[35]M. Romadlon, *Aura*, 115.

hampir seluruhnya kitab kuning. Pada tingkat I`dadiyah, materi yang dipelajari adalah: al-Qur'ān, Ilmu Tauḥīd, Fiqh, Naḥw, Ṣarf, Ilmu Tajwīd, Ilmu Akhlāq, Ilmu Khaṭ, dan Bahasa Arab. Sementara materi pelajaran tingkat Ibtidā'iyah adalah al-Qur'ān, Ḥadīth, Ilmu Tauḥīd, Fiqh, Ilmu Naḥw, Ilmu Ṣarf, Ilmu Tajwīd, Ilmu Akhlāq, Ilmu Imlā', Ilmu Khaṭ, Bahasa Arab, Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa, Sejarah Islam, Sejarah Indonesia, Ilmu Hitung, dan Administrasi. Pada tingkat Tsanawiyah, materi pelajarannya adalah Tafsīr, Ilmu Tafsīr, Ḥadīth, Ilmu Ḥadīth, Ilmu Tauḥīd, Fiqh, Uṣūl al-Fiqh, Qawā`id al-Fiqhiyyah, Fiqh Mawāris, Ilmu Manṭīq, Ilmu Balāgah, Ilmu Naḥw, Ilmu Ṣarf, Ilmu `Arūḍ, dan Ilmu Akhlāq. Sementara tingkat Aliyah, materi pelajarannya adalah Tafsīr, Ḥadīth, Ilmu Tauḥīd, Fiqh, Uṣūl al-Fiqh, Ilmu Akhlāq, Ilmu Balāgah, dan Ilmu Falāk.[36] Daftar mata pelajaran secara lengkap lihat lampiran 7.

Dari data ini dapat diketahui bahwa jumlah mata pelajaran yang diberikan di tingkat i`dadiyah MHM hanya 9 mata pelajaran, ibtidaiyah diberikan 17 mata pelajaran, tsanawiyah dijadwalkan 15 mata pelajaran, dan aliyah mempelajari 8 mata pelajaran. Jumlah mata pelajaran di MHM ini jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah mata pelajaran pada jenjang dan madrasah sejenis yang berkurikulum Departemen Agama, padahal di MHM sudah dipisahkan beberapa mata pelajaran, seperti Naḥw, Saraf, Bahasa Arab, dan Balāghah, yang biasa dianggap 1 (satu) mata pelajaran, yaitu Bahasa Arab, di lembaga lain. Data ini juga memperlihatkan bahwa MHM lebih mementingkan kedalaman ilmu yang harus dikuasai siswa daripada keluasan ilmu. Sementara materi yang paling banyak dipelajari dan akhirnya menjadi ciri khas MHM adalah Bahasa Arab dengan berbagai pirantinya yaitu Naḥw, Ṣaraf, dan Balāghah. Kemudian disusul dengan materi fiqih dengan materi pendukungnya yaitu Qawā'idul Fiqhiyah, Uṣūl Fiqh, dan Fiqih Mawārith.

Dari seluruh materi yang dipelajari dari tingkat I`dādiyah sampai dengan Aliyah, hanya materi Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa, dan Sejarah Indonesia pada tingkat Ibtidā'iyah yang tidak menggunakan buku ajar kitab kuning. Buku ajar tingkat Ibtida'iyah untuk mata pelajaran Naḥwu, sebagai misal, adalah Al-`Awāmil untuk kelas III, al-Ajurūmiyah untuk kelas IV, Al-Fuṣūl al-Fikriyah untuk kelas V, dan Al-`Amrīṭi untuk kelas VI. Sedangkan tingkat tsanawiyah menggunakan Alfiyah ibn Mālik untuk kelas I dan II, Qawā`id al-I`rāb dan Al-I`rāb juga untuk kelas I.

---

[36]MHM, *Hasil Sidang Panitia Kecil Tahun Pelajaran 2006-2007*, Kediri: MHM, 2006, 21-23.

Pada tingkat Aliyah sudah tidak ada materi pelajaran Naḥwu. Untuk mata pelajaran Ṣaraf tingkat Ibtidaiyah menggunakan Al-Amṡilah al-Taṣrīfiyyah dan ‚Qā`idah Nathar untuk kelas III, Al-Amṡilah al-Taṣrīfiyyah, Al-Qawā`id al-Ṣarfiyah, dan Al-`Ilal untuk kelas IV, Al-Amṡilah al-Taṣrīfiyyah dan Al-`Ilal untuk kelas V, dan Al-Maqṣūd untuk kelas VI. Sementara tingkat Tsanawiyah menggunakan Alfiyah ibn Mālik untuk kelas I dan II. Materi pelajaran Ṣaraf juga tidak diajarkan di tingkat Aliyah. Untuk mata pelajaran fiqh tingkat Ibtida'iyah menggunakan Faṣalātan dan Hidāyah al-Mubtadi' untuk kelas I, Safīnah al-Ṣalāh untuk kelas II, Tanwīr al-Hijā untuk kelas III, Sulam at-Taufīq untuk kelas IV, Fatḥ al-Qarīb untuk kelas V dan VI, dan `Uyun al-Masā'il li an-Nisā' untuk kelas VI. Sementara tingkat Tsanawiyah kelas I, II, dan III menggunakan Fatḥ al-Mu`īn dan `Āliyah kelas I, II, dan III menggunakan Al-Maḥalli.[37]

Buku ajar seperti ini sungguh berbeda dengan buku ajar yang digunakan untuk madrasah yang menggunakan kurikulum Departemen Agama yang didefinisikan sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam. Madrasah yang disebutkan terakhir menggunakan buku ajar berbahasa Indonesia. Buku ajar bagi santri MHM tidak hanya sulit dipahami oleh siswa yang setingkat tetapi termasuk oleh siswa pada beberapa tingkat di atasnya. Sebagai contoh, ketika IAIN Sunan Ampel Cabang Malang, sekarang UIN Malang, menguji kemampuan mahasiswa tingkat akhir memamahi literatur Islam waktu itu menggunakan kitab Fatḥ al-Qarīb yang digunakan di kelas V dan VI Ibtidā'iyah MHM Lirboyo.[38]

Materi pelajaran yang bertumpu kepada kitab kuning juga dipertahankan oleh Pesantren HM al-Mahrusiyah dan Pesantren Salafiy Terpadu ar-Risalah melalui madrasah diniyah masing-masing. Daftar mata pelajaran Madrasah Diniyah HM al-Mahrusiyah lihat lampiran 14 dan Madrasah Diniyah ar-Risalah lihat lampiran 23.

Berangkat dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum madrasah diniyah di ketiga pesantren tempat penelitian adalah kurikulum mandiri, tidak menggunakan kurikulum yang disusun oleh Departemen Agama untuk madrasah diniyah.[39] Kurikulum madrasah

---

[37]MHM, *Hasil Sidang Panitia Kecil Tahun Pelajaran 2006-2007,* 24-34.

[38]Cerita Achmad Chudhori pada tanggal 4 Agustus 2002, Pembantu Rektor III IAIT Kediri, alumnus IAIN Sunan Ampel Cabang Malang.

[39]Setidaknya diketemukan lima buku yang diterbitkan oleh Direktorat

diniyah di Pesantren Lirboyo mendasarkan pembahasan berdasarkan topik-topik yang ada di kitab kuning yang dijadikan sumber ajar, sedangkan kurikulum yang disajikan Departemen Agama mendasarkan topik-topik yang ditentukan tanpa menyertakan referensi sebagai sumber ajar.

Secara nasional, dari 38.085 madrasah diniyah, 19.190 (50,4%) menggunakan kurikulum Departemen Agama, 9.940 (26,1%) menggunakan kurikulum modifikasi antara departemen agama dan lainnya, sisanya 8.955 (23,5%) menggunakan kurikulum mandiri.[40] Salah satu yang mendiri tersebut adalah madrasah diniyah yang ada di Pesantren Lirboyo.

Apabila dibandingkan antara mata pelajaran pada Madrasah Diniyah al-Mahrusiyah dan ar-Risalah dengan MHM diketahui bahwa kitab-kitab yang dipelajari di kedua madrasah diniyah tersebut pada tingkat Aliyah sama dengan kitab-kitab yang dipelajari di MHM pada tingkat Tsanawiyah. Demikian juga, kitab-kitab yang dipelajari di tingkat Tsanawiyah di kedua madrasah diniyah itu sama dengan kitab-kitab yang dipelajari di kelas IV, V, dan VI Ibtidā'iyah MHM.

Kebijakan ini ditempuh, menurut Saiful Aminin, ketua seksi pendidikan diniyah Pesantren al-Mahrusiyah, didasarkan kepada beban santri al-Mahrusiyah yang lebih banyak dibandingkan santri Pondok induk.[41] Sebagaimana dijelaskan bahwa santri al-Mahrusiyah harus belajar di diniyah dan Madrasah Tsanawiyah atau Aliyah secara bersama-sama, sementara santri pesantren induk hanya diharuskan untuk belajar di MHM.

Dengan alasan yang sama, kebijakan ini juga dilaksanakan di ar-Risalah. Walaupun demikian, pada pelaksanaan MQKN II (Musabaqoh Qiroatil Kutub Nasional II) tahun 2006, Ar-Risalah berhasil mengirimkan 5 peserta perwakilan delegasi Jawa Timur dan memperoleh prestasi Juara I Putra kitab Bulughul Marom, Juara I Putri kitab Tafsir Jalalain, Juara II

Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2007 tentang kurikulum Diniyah Taklimiyah, yaitu untuk mata pelajaran al-Qur'an Hadits, Aqidah Akhlaq, Fiqih/Ibadah, Tarikh Islam/SKI, dan Bahasa Arab, baik untuk tingkat Awwaliyah, Wustha, maupun ulya.

[40]Dirjen Pendis, *Statistik Pendidikan Agama dan Keagmaan Tahun Pelajaran 2006-2007*, Jakarta: Dirjen Pendis Depag RI, 2007, 155.

[41]Wawancara dengan Saiful Aminin, Ketua Seksi Pendidikan Diniyah Pesantren al-Mahrusiyah, pada tanggal 14 Agustus 2007.

Putra kitab Tafsir Jalalin, Juara III Putra kitab Bulughul Marom, dan Juara Harapan Putra kitab Tafsir Jalalain.[42]

Berangkat dari kebijakan tersebut, maka siswa dari Madrasah Diniyah al-Mahrusiyah dan ar-Risalah tidak dapat pindah pada kelas yang sama atau meneruskan pada tingkat di atasnya pada MHM Lirboyo. Terlebih, karena sifat otonomi yang tinggi bagi masing-masing pesantren menjadikan madrasah dan lembaga pendidikan lainnya terlihat tidak mempunyai garis komando, bahkan koordinasi, kecuali pemanfaatan alumni MHM untuk mengajar di madrasah diniyah lainnya. Berangkat dari kondisi tersebut, maka bagan yang menggambarkan mobilisasi santri pada lembaga-lembaga tersebut dapat disajikan seperti bagan berikut ini.

BAGAN 2

MOBILISASI SANTRI DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN DI PESANTREN LIRBOYO
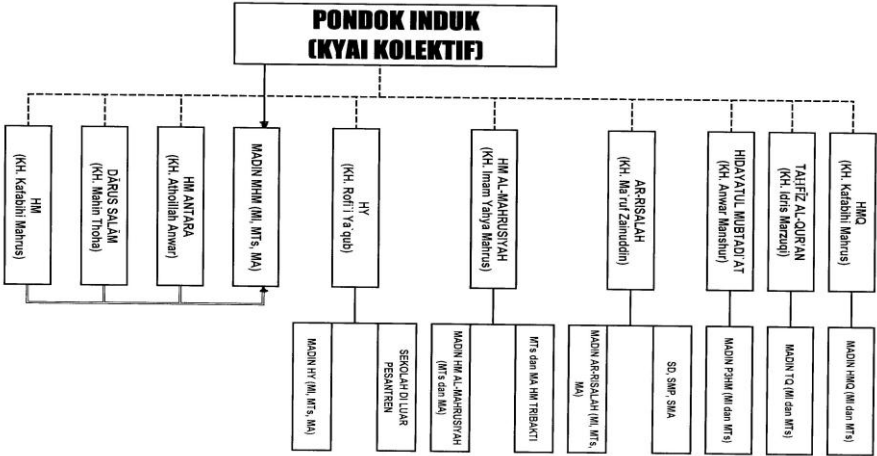
Waktu pembelajaran pada tingkat I`dadiyah dan Ibtidaiyah dibagi dalam 2 (dua) ḥiṣṣah (tatap muka). Ḥiṣṣah ulā, jam 07.00 sampai dengan 09.00 Istiwa', diisi dengan muḥāfaẓah[43] selama 30 menit, pendalaman selama 30 menit, menyampaikan pelajaran selama 60 menit. Sementara ḥiṣṣoh thāniyah dimulai jam 09.30 sampai 11.00 Istiwa' digunakan untuk pendalaman selama 30 menit dan menyampaikan pelajaran selama 60 menit.

---

[42]Brosur Pesantren Salafiy Terpadu ar-Risalah.

[43]Muḥāfaẓah adalah hafalan pelajaran yang berbentuk naẓam (syi`ir) yang dilakukan secara bersama-sama.

Waktu belajar tingkat Tsanawiyah dan Aliyah juga dibagi menjadi 2 (dua) ḥiṣṣah. Ḥiṣṣah ulā, Jam 19.00 sampai 21.00 istiwa', digunakan untuk muḥāfaẓah selama 30 menit, pendalaman selama 30 menit, dan menyampaikan pelajaran selama 60 menit. Sementara ḥiṣṣoh thāniyah, jam 21.30 sampai 23.00 Istiwa', digunakan untuk pendalaman selama 30 menit dan menyampaikan pelajaran selama 60 menit. Sedangkan Diniyah al-Mahrusiyyah dan ar-Risalah dilaksanakan pada waktu sore hari.

Mata pelajaran MTs dan MA HM Tribakti al-Mahrusiyah menggunakan kurikulum Departemen Agama dengan penambahan ke-NU-an, sementara kurikulum SD, SMP, dan SMU ar-Risalah menggunakan kurikulum Departemen Pendidikan Nasional dengan penambahan Bahasa Arab untuk tingkat SD, SMP dan SMA, Bahasa Jepang untuk tingkat SMP dan Bahasa Mandarin untuk tingkat SMA.

Dikarenakan santri di kedua pesantren diharuskan mengikuti lembaga pendidikan baik di MTs dan MA Tribakti dan madrasah diniyah al-Mahrusiyah untuk santri al-Mahrusiyah maupun SD, SMP, dan SMA dan madrasah diniyah ar-Risalah, bahkan, juga harus mengikuti seluruh kegiatan lainnya yang programkan pesantren mengakibatkan beban santri dikedua pesantren tersebut menjadi sangat berat. Sampai kini belum diketemukan data untuk memperingan beban santri dengan memadukan kurikulum di seluruh pesantren tersebut sehingga tidak perlu ada pengulangan dari satu lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan lainnya dalam satu pesantren.

Dipertahankannya pendalaman kitab kuning di madrasah diniyah pada pesantren unit yang menyelenggarakan pendidikan formal lainnya, seperti MTs dan MA untuk HM al-Mahrusiyah dan SD, SMP, dan SMA untuk ar-Risalah adalah agar ia menjadi ciri khas Pesantren Lirboyo. Tujuan dipertahankannya diniyah itu dapat diketahui dari pendapat Ning Aina, bahwa lembaga pendidikan unggulan yang menyelenggarakan SD, SMP, dan SMA di Indonesia relatif banyak, tetapi yang mempersiapkan siswanya menguasai ilmu-ilmu umum, kitab kuning, al-Qur'an, berbagai bahasa asing, dan komputer sekaligus tentu tidak banyak. Kalau mereka ingin mendapatkan berbagai kemampuan itu, mereka harus datang ke Pesantren Lirboyo.[44]

Dari tujuan dipertahankannya pendidikan diniyah di tengah berbagai pendidikan yang ditawarkan tersebut memperlihatkan ciri modernitas dari

[44]Wawancara dengan Umi Aina Ainaul Mardliyyah dan KH. Ma`ruf Zainuddin, pendiri ar-Risalah, pada tanggal 28 Maret 2007.

kurikulum ar-Risalah tersebut. Sebagai aplikasi dari visi dan missi yang ditetapkan oleh pesantren ini memperlihatkan bahwa pesantren ini memperhatikan masalah publik, terbuka terhadap pengalaman baru, yakin terhadap sains dan nalar. Hal tersebut merupakan sebagian ciri-ciri kepribadian masyarakat modern menurut Inkeles.

Walaupun beberapa strategi pembaruan pendidikan di Pesantren Lirboyo, yang mempertahankan madrasah diniyah menjadikan Pesantren Lirboyo dapat bertahan, bahkan berkembang sampai sekarang, tetapi sistem pembelajaran pada madrasah diniyah tersebut tidak luput dari kritikan. Menurut Husein Muhammad, alumnus MHM Lirboyo tahun 1973 dan pengasuh pesantren Dār al-Tauḥīd Arjawinangun Cirebon, bahwa mayoritas komunitas pesantren, termasuk di dalamnya pesantren Lirboyo, telah memandang kitab kuning sebagai khazanah intelektual dan referensi yang paling absah dan sakral. Kritikan atas kitab ini, baik dalam hal substansi maupun metodologinya, dianggap amoral.[45]

Ada beberapa kelemahan terkait dengan pengajaran kitab kuning menurut Husein Muhammad. Pertama, pengajaran kitab kuning di pesantren kebanyakan berputar dan berulang dengan memakai ukuran kitab. Kedua, pilihan kitab kuning berorientasi kepada pemikiran yang hanya dihasilkan oleh ahl al-ḥadīth dan taṣawuf dan tidak diimbangi dengan kitab yang dihasilkan oleh ahl al-ra`y dan filsafat. Dan ketiga, literatur kitab kuning di pesantren yang banyak bertumpu kepada disiplin fiqh dan gramatika Arab. Kitab kuning yang memuat tentang metodologi istinbāṭ al-ḥukm dan sejarah mendapat perhatian relatif sedikit.[46]

Bukti dari berputar dan berulangnya pengajaran dengan menggunakan ukuran kitab dapat diketahui dari jawaban santri apabila ditanyakan tentang apa yang dipelajari pada tahun ini, maka mereka kebanyakan menjawab dengan menyebutkan nama-nama kitab, tidak menyebutkan *fan* dan topiknya. Bukti lain yang bisa diajukan tentang berputar dan berulangnya pembelajaran kitab kuning di MHM adalah mata pelajaran fiqh tingkat Ibtida'iyah menggunakan Sulam at-Taufīq untuk kelas IV, Fatḥ al-Qarīb untuk kelas V dan VI, dan `Uyun al-Masā'il li an-Nisā' untuk kelas VI. Sementara tingkat Tsanawiyah kelas

---

[45]Husein Muhammad, "Kontektualisasi Kitab Kuning: Tradisi Kajian dan Metode Pengajaran," dalam Marzuki Waghid dkk. (Ed.), *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren,* Bandung: Pustaka Hidayah, 1999, 269.

[46]Husein Muhammad, "Kontektualisasi Kitab Kuning: Tradisi Kajian dan Metode Pengajaran," 269-285.

I, II, dan III menggunakan Fatḥ al-Mu`īn dan `Āliyah kelas I, II, dan III menggunakan Al-Maḥalli.[47] Padahal topik-topik yang dibahas dalam kitab-kitab tersebut hampir sama.

Kelemahan kedua dibuktikan tidak diketemukannya kitab yang dihasilkan oleh ahl al-ra`y dan filsafat yang dikaji di Pesantren Lirboyo. Melalui penggunakan kitab yang dihasilkan oleh ahl al-ra`y dan filsafat ini, menurut Husain Muhammad, ide dasar dan *illat* dari sebuah teks kitab kuning dapat diketahui dengan baik. Hal ini memungkinkan seseorang melakukan pengembangan-pengembangan atasnya. Di samping itu, untuk mendapatkan pemahaman yang tepat tentang isi sebuah kitab dibutuhkan pengetahuan secara baik tentang biografi penulis, situasi dan kondisi pada waktu ditulisnya kitab itu dan tujuan dari penulis itu sendiri.[48]

Kelemahan ketiga relatif sulit dicari jalan keluarnya mengingat adanya pandangan bahwa ilmu metodologi istinbāṭ al-ḥukm adalah otoritas mujtahid dan bukan wewenang komunitas pesantren sekarang. Bahkan, menyebut ijtihad di kalangan pesantren dianggap tabu. Walaupun mata pelajaran Uṣūl Fiqh dan Qawā`idul Fiqhiyah diajarkan di Lirboyo, tetapi perhatian santri terkait mata pelajaran itu termasuk rendah dan tidak setinggi perhatian terhadap mata pelajaran Fiqh. Bahkan, menurut KH. Utsman, alumnus MHM yang sekarang menjadi Pengasuh Pesantren Petok Semen Kediri yang relatif produktif mengarang kitab, bahwa kebanyakan santri menganggap mata pelajaran Uṣūl Fiqh dan Qawā`idul Fiqhiyah adalah sulit.[49] Anggapan terakhir dimungkinkan disebabkan oleh kurang kuatnya minat kebanyakan santri terhadap materi yang berisi tentang metodologi istinbāṭ al-ḥukm.

Konsentrasi kurikulum hanya pada kajian fiqih Syafi`iah semestinya bertolak belakang dengan tujuan pesantren ini yaitu pemantapan dan pejuang Ahlus Sunnah. Padahal secara praktis, menurut Sahal Mahfudh, bahwa aliran Ahl al-sunnah wa al-jama'ah adalah penganut Abū al-Ḥasan al-Asy'ary dan Abū al-Māturidy dalam aspek akidah; salah satu dari al-mażāhib al-arba'ab (Ḥanafi, Māliki, Syāfi'i, atau Ḥambali) dalam aspek syari'ah, dan Junaidi al-Baghday dan al-Ghazali dalam sufisme.[50] Dalam

---

[47]MHM, *Hasil Sidang Panitia Kecil Tahun Pelajaran 2006-2007,* 24-34.

[48]Husein Muhammad, "Kontektualisasi Kitab Kuning: Tradisi Kajian dan Metode Pengajaran," 269-285.

[49]Wawancara dengan KH. Utsman pada tanggal 20 Juli 2006 di rumah peneliti.

[50]MA. Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna,* Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999, 52-53.

rangka mengaplikasikan faham Aswaja, seharusnya pesantren tidak hanya mengajar fiqih dalam mażhab Syāfi'iyah dalam teologi dalam firqah Asy`ariyah, tetapi juga fiqh dari mażhab lainnya dan teologi dari firqah lainnya.

Tidak hanya itu, sebagaimana telah dijelaskan bahwa kurikulum MHM dan madrasah diniyah lainnya cenderung mengkonsentrasikan diri pada aspek fiqih, sedang aspek teologi diberikan dalam kadar kuantitas yang lebih minimal, apalagi aspek sufistiknya. Fenomena ini melihatkan bahwa Pesantren Lirboyo tidak konsisten terhadap pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamâ`ah. Terkait permasalahan ini, KH. Utsman memberikan alasan karena fiqih dapat memberikan panduan hukum terhadap berbagai permasalahan kehidupan sehari-hari.[51] Jawaban ini sejalan dengan pendapat Sahal Mahfudh bahwa tujuan pesantren melalui sistem pendidikannya adalah pembinaan pribadi Islami. Pribadi-pribadi ini pada gilirannya akan berfungsi sebagai bagian aktif masyarakatnya, dan diidealkan mampu mewarnai budaya dan perilaku masyarakat dengan ajaran Islam. Untuk mencapai tujuan itu, sarana paling efektif yang dapat diberikan kepada peserta didiknya adalah pemahaman hal-hal yang bersifat praktis, yaitu fiqih. Pesantren, dengan kebijakan itu, memang tidak bermaksud menciptakan sekelompok pemikir ajaran Islam, khususnya Ahlus sunnah wa al-jama'ah, tetapi berkeinginan membentuk masyarakat yang memadai menjadi pelaksana aktif yang cukup memahami ajaran itu. Sikap ini diambil mengingat kemampuan pemikiran dan pelaksanaan suatu ajaran, dalam skala praktis tidak selalu berjalan beriringan.[52]

Selain kegiatan yang besifat intra kurikuler, untuk mempersiapkan kemampuan santri dalam hal yang sifatnya praktis, pondok induk Lirboyo mengadakan kegiatan di luar agenda MHM. Menurut brosur 2006, kegiatan ini dimaksudkan untuk, "mengembangkan bakat dan kreatifitas santri serta menambah wawasan santri di bidang keilmuan dan ketrampilan agar lulusan pesantren tidak hanya ahli di bidang agama, tetapi juga menguasai berbagai bidang keilmuan dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat."[53]

---

[51]Wawancara dengan KH. Utsman pada tanggal 20 Juli 2006 di rumah peneliti.

[52]MA. Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencar,* 55-56.

[53]Brosur Pesantren Lirboyo Tahun 2006.

Berdasarkan laporan ketua I dan ketua IV pengurus Pondok induk, program yang dilakukan santri yang dimungkinkan dapat mencapai tujuan di atas selama periode 2006-2007 adalah:

1. Mengikuti pengajian kitab kuning dengan sistem bandongan. Pada periode ini tersedia 31 Qāri' dengan jumlah 42 kitab yang dibaca, seperti KH. Aḥmad Idrīs Marzūqi, pengasuh pesantren, membaca Tafsīr al-Jalālalin sejak jam 7.30 WIS, dan Iḥyā' Ulūm al-īn, pada waktu Ba`da Ẓuhr. Daftar lengkap pembaca, kitab, waktu, dan tempat pengajian bandongan lihat lampiran 10.
2. Pengajian al-Qur'an di serambi Masjid. Program ini khusus diperuntukkan bagi siswa tingkat Ibtida'iyah. Kegiatan yang dilakukan setelah maghrib ini diasuh oleh 19 guru, yaitu Ustāż Nur Chalim, Ustāż Abd. Rofi', Ustāż Mahmudi Syafi'i, Ustāż A. Rofiq, Ustāż Abd. Muiz, Ustāż H. Kholidul Wafa, Ustāż Habib Romdlon, Ustāż Muhlisin, Ustāż Rofi' Addaroini, Ustāż A. Khoiri, Ustāż Subhan Jazuli, Ustāż Zamakhsari, Ustāż Mukhlas Ibrahim, Ustāż Idris Abd. Rosyid, Ustāż Nur M. Mukmin, Ustāż MahrusAsmu'I, Ustāż Saifuddin Qulyubi, Ustāż Husain, dan Ustāż Shonhaji.
3. Diklat protokoler bekerja sama dengan Kabag Protokoler Pemkot Kediri.
4. Kursus Bahasa Inggris yang diikuti sebanyak 56 peserta
5. Kursus jurnalistik yang diikuti sebanyak 25 peserta. Untuk menyalurkan bakat santri dalam bidang jurnalistik serta sebagai media informasi santri dan masyarakat, pesantren menerbitkan majalah bulanan"MISYKAT".
6. Kursus Qiroah setiap jum'at jam 09.00-11.00 Istiwa' di masjid al-Hasan yang diikuti kurang lebih 250 peserta.
7. Kursus aplikasi program komputer setiap hari yang diikuti oleh 34 peserta, dan Kursus Tekhnisi Komputer setiap jum'at yang diikuti 49 peserta.
8. Kursus Manajemen TPQ Annahḍiyah yang dilaksanakan 4 kali pertemuan setiap hari jum'at jam 09.00-11.00, yang diikuti oleh 23 peserta.
9. Pendidikan Berjami'iyyah/Berorganisasi.[54]

---

[54] *Laporan Tahunan Pengurus Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur*, 2007, 9-12 dan 22-23..

Kegiatan yang disebutkan terakhir dirasakan oleh hampir keseluruhan santri yang mengikuti kegiatan itu sangat bermanfaat. Kegiatan jam'iyyah terbagi dalam tiga tingkatan. Tingkatan ini ditentukan berdasarkan jumlah peserta dan pelaksananya. Jam'iyyah terkecil dilaksanakan oleh masing-masing kamar dan ini bukanlah kegiatan prioritas tetapi tergantung kepada kesadaran santri meski demikian hampir semua kamar melaksanakannya pada hari Kamis malam Jum'at. Di atasnya terdapat jam'iyah furu' yang dilaksanakan oleh Blok-Blok, Jam'iyah wilayah oleh Himpunan Pelajar dan Jam'iyyah Pusat yang mengumpulkan beberapa Himpunan Pelajar. Untuk jam'iyyah tingkat furu' dan wilayah dilaksanakan setiap dua minggu sekali secara bergantian dan untuk jam'iyyah pusat dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun dengan jadwal ditentukan oleh Pengurus Pondok Pesantren Bidang Penerangan dan Pendidikan sebagai penanggung jawab.

Agenda yang dilakukan untuk jam'iyah kamar biasanya terkait dengan aplikasi kultur warga pesantren seperti tahlilan, barzanji, dan manaqib. Jam'iyah tingkat furu' biasanya diisi dengan latihan dan perlombaan pidato. Sementara jam'iyah wilayah dan pusat biasanya diisi dengan berbagai kajian tentang berbagai topik yang menjadi perhatian masyarakat pesantren. Seperti ketika masyarakat pesantren banyak dicurigai sebagai sarang teroris, maka Jam'iyah wilayah Jawa Barat mengkajinya. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Pebruari 2006 itu diikuti sekitar 500 santri.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pendidikan yang diselenggarakan di Pondok induk adalah pengajian al-Qur'an, Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadi'in mulai jenjang ibtidaiyyah, tsanawiyah, aliyah, i`dadiyah,[55] pengajian kitab, baik dengan sorogan maupun bandongan, dan kursus. Berbagai kegiatan pendidikan lain dimaksudkan untuk menunjang pemahaman, pendalaman, dan pengembangan materi pelajaran di MHM.

Sedangkan program lain yang harus diikuti oleh seluruh santri al-Mahrusiyah yang masih berstatus siswa MTs maupun MA HM Tribakti adalah sorogan al-Qur'an. Siswa dikelompokkan sekitar 15 sampai dengan 20 orang berdasarkan hasil test kemampuan membaca al-Qur'an. Seluruh guru yang mengajar program ini adalah alumni Madrasah

---

[55]I`dādiyah adalah pendidikan non-jenjang sebagai persiapan yang diperuntukkan bagi santri yang terlambat datang ke pesantren, ketika pendaftaran siswa sudah ditutup.

Murottilil Qur'an (MMQ) Lirboyo yang diasuh oleh KH. Maftuh Basthul Birri. Buku pegangan tentang tajwid yang digunakan dalam program ini menggunakan karya KH. Maftuh Basthul Birri. [56]

Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 jam mulai jam 06.30 sampai dengan 07.30 WIB dan ditempatkan di ruang kelas MTs dan MA Tribakti. Sebagai mana sistem sorogan di pesantren pada umumnya, sorogan al-Qur'an ini dilaksanakan dengan cara santri maju satu persatu ke hadapan guru untuk membaca beberapa ayat dan manakala terdapat kesalahan guru membetulkannya.[57]

Kegiatan lainnya adalah istighotsah. Itighotsah adalah do'a-do'a yang berisi permohonan pertolongan kepada Allah. Kegiatan ini harus diikuti oleh santri al-Mahrusiyah yang pelaksanannya dimulai dari jam 23.00 sampai dengan 24.00. Diceritakan, bahwa ketika KH. Mahrus Aly mempunyai keperluan yang berskala besar waktu itu, KH. Mahrus biasa mengajak santri Pesantren Lirboyo untuk melakukan istighotsah. Kebiasaan ini akhirnya dilestarikan oleh KH. Imam Yahya Mahrus, putranya, dengan mengajak santri pada pesantrennya.

Dikarenakan istighotsah ini dilakukan pada waktu tengah malam, maka ia sering dijadikan alasan beberapa santri ketika terlambat masuk sekolah atau tidak masuk sekolah pada jam-jam tertentu. Pengaruh faktor waktu istighotsah terhadap keterlambatan dan ketidakhadiran siswa ke sekolah semestinya kurang signifikan. Beberapa pelanggaran siswa itu, menurut Suryono, lebih banyak ditentukan oleh kekurang ketatan pelaksanaan tata tertib dan kekurangwibawaan pengurus pesantren.[58] Memang, selama penelitian ini dirasakan bahwa pelaksanaan tata tertib di Pesantren al-Mahrusiyah ini lebih longgar dibandingkan Pondok induk dan yang disebutkan terakhir juga lebih longgar dibadingkan dengan Pesantren Salafiy Terpadu ar-Risalah yang akan dijelaskan kemudian.

Adapun kegiatan lain di Pesantren al-Mahrusiyah yang dilakukan secara insidental adalah kajian ilmiyah yang tangani oleh Lembaga Pendidikan, Penelitian dan Pengkajian santri (LP3S), stadium general

---

[56]Wawancara dengan Saiful Aminin, Ketua Seksi Pendidikan Diniyah Pesantren HM al-Mahrusiyah, pada tanggal 14 Agustus 2007.

[57] Observasi pada selama penelitian di kelas-kelas MTs dan MA Tribakti.

[58]Wawancara dengan Suryono, Alumni MHM, dan guru di Madrasah Diniyah al-Mahrusiyah dan Madrasah Aliyah HM Tribakti, pada tanggal 14 Agustus 2007.

dan seminar, seni bela diri wushu, seni hadroh dan rebana, kursus komputer, kursus Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.

Jadi, ada lima kegiatan yang menyita waktu santri Pesantren HM al-Mahrusiyah, yaitu sorogan al-Qur'an, sekolah di MTs atau MA HM Tribakti, kuliah di IAIT, sekolah diniyah, Istighotsah, dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang pemahaman pelajaran di madrasah diniyah, seperti musyawarah dan baḥṡul masā'il. Pada 2006-2007 tidak diketemukan pengajian kitab kuning sebagaimana yang ada di pondok induk dikarenakan waktu santri sudah hampir habis untuk kegitan lainnya.

Di ar-Risalah, selain pendidikan formal di SD, SMP, maupun SMA, santri juga diwajibkan untuk mengikuti pendidikan al-Quran. Lembaga yang disebutkan terakhir ini menggunakan standar tajwid Rosm Utsmaniy dengan buku standar Pesantren Salafiy Terpadu Ar-Risalah. Tingkat Ibtidaiyah meliputi materi Tilawati, hafalan Juz Amma, Surat Al-Wāqiah, Surat Yāsīn, Surat Al-Mulk, Surat As-Sajdah, Surat Ad-Dukhān, Surat Al-Kahfi, Ilmu Tajwid dan masalah Ubudiyah. Tingkat Tsanawiyah adalah pendidikan Al-Quran 30 juz binnaẓar disertai pemahaman bacaan-bacaan ghorib yang ada dalam Al-Quran. Pada tingkat Aliyah adalah hafalan Al-Quran (Taḥfidzil Quran) serta pendidikan Ilmu Al-Quran. Santri baru yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dikelompokkan dalam kelas I'dadiyah (persiapan) selama satu tahun dengan materi Tilawati, Juz Amma, Ilmu Tajwid, serta surat-surat penting.[59] Daftar mata pelajaran pendidikan al-Qur'an lihat lampiran 32.

Sebagaimana di al-Mahrusiyah, seluruh guru juga alumni dari Madrasah Murottilil Qur'an (MMQ) Lirboyo Kediri. Pendidikan al-Qur'an ini dilaksanakan selama 90 menit dimulai dari jam 05.30 sampai dengan 07.00.

Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan pada hari Jum`at meliputi bimbingan kelas olimpiade, bimbingan karya ilmiah bimbingan Bahasa Arab bimbingan Bahasa Inggris, bimbingan Bahasa Mandarin, bimbingan Bahasa Jepang, ṣalāwat, rebana, nasyid, drum band, mading ar-Risalah, dan buletin ar-Risalah. Dalam beberapa tahun terakhir ini pesantren ini mendapat guru bantu dari Konjen Australia, Mark, untuk mengajar Bahasa Inggris, dan dari Republik Rakyat Tiongkok, Su Chuang, untuk mengajar Bahasa Mandarin. Kegiatan lain yang dianggap dapat

---

[59]Madrasah al-Qur'an ar-Risalah, *Hasil Sidang Panitia Kecil Madrasah al-Qur'an ar-Risalah,* Kediri: Madrasah al-Qur'an ar-Risalah, 2007, 7.

mengembangkan potensi santri adalah berjam'iyyah, baḥṡul masā'il, kajian risālat al-maḥīḍ, tartilil Qur'an, tilāwatil Qur'ān, ṣalāwat, barzanji, tahlil, istighāṡah, manāqib, pidato, dan kaligrafi.[60] Pada jum`at pagi, pesantren ini sering mengundang pembicara dari luar untuk memberikan pencerahan pemikiran kepada santrinya. Misalnya, pada tanggal 7 Maret 2008, nara sumber yang diundang adalah mantan Ketua STAIN Tulung Agung, Achmad Fatoni, untuk membahas tentang maraknya konversi keanggotaan organisasi sosial keagamaan dari NU kepada organisasi sosial keagamaan lainnya.

Semua lembaga pendidikan yang berada di pesantren ini di bawah naungan Yayasan Pendidikan Ar-Risalah. Yayasan ini menyelenggarakan pendidikan secara terpadu, yaitu pendidikan yang berorientasi kepada penguasaan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu umum secara terpadu. Pendidikan ilmu-ilmu keislaman didasarkan kepada kurikulum pesantren serta pendidikan umum mengikuti kurikulum Departemen Pendidikan Nasional. Pendidikan ilmu-ilmu keislaman meliputi pendidikan al-Qur'an dan pendidikan diniyah meliputi jenjang Ibtida'iyah, Tsanawiyah, dan Aliyah sementara pendidikan umum meliputi jenjang SD, SMP dan SMA. Menurut brosur yang disebarkan bahwa pendidikan santri difokuskan pada Al-Qur'an, diniyah selanjutnya umum. Wadah kegiatan bakat dan minat santri diselenggarakan kegiatan ekstrakurikuler.[61]

Berangkat dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum yang dikembangkan MHM memungkinkan siswa untuk menguasai literatur kitab-kitab klasik secara mendalam yang memungkinkan alumninya menjadi calon ulama, sementara kedua lembaga pendidikan lainnya, memungkinkan untuk menjadi ulama-intelek, dan menduduki berbagai posisi lainnya. Ini artinya, pesantren induk tetap dalam diferensiasi keagamaannya, sedangkan pesantren ar-Risalah dan HM al-Mahrusiyah memilih diferensiasi keagamaan dan lainnya sekaligus.

C. Aspek Metode Pembelajaran

Setidaknya ada tiga metode pembelajaran yang digunakan Pesantren Lirboyo sebelum mendirikan MHM, yaitu bandongan, sorogan, dan hafalan, yang sering disebut lalaran atau muḥāfaẓah. Dewasa ini, di antara tiga metode itu, sorogan menjadi metode yang paling jarang

---

[60]Wawancara dengan Hasan Bisri, Lurah Pesantren Salafiy Terpadu Ar-Risalah, pada tanggal 20 Agustus 2007.

[61]Brosur Pesantren Salafiy Terpadu ar-Risalah.

digunakan kecuali untuk pembelajaran al-Qur'an. Metode ini, menurut Ahmad Sonhaji, mengandung prinsip-prinsip sistem modul, belajar individual, belajar tuntas, dan maju berkelanjutan ini merupakan model pembelajaran modern.[62] Metode ini digunakan untuk pembelajaran al-Qur'an di seluruh pesantren di Lirboyo dan pembelajaran kitab kuning di pondok induk untuk santri yang mengalami keterlambatan pemahaman.

Di antara beberapa metode pembelajaran yang digunakan di pesantren, metode hafalan paling sering mendapatkan gugatan. Azyumardi Azra, misalnya, berpendapat bahwa verbalisme atau penekanan terhadap hafalan itu yang harus dihindari.[63] Walaupun begitu, hafalan ternyata menjadi metode utama dalam pembelajaran di Pesantren Lirboyo ini. Sebagaimana dilaporkan oleh alumni MHM tahun 2004, bahwa mereka harus menghafalkan semenjak kelas I Ibtida'iyah. Secara berturut-turut fan yang dihafalkan adalah naẓam alā lā tanālul 'ilma, ra'sun sirah untuk kelas I, naẓam al-Maṭlab untuk kelas II, naẓam Tanwīr al-Ḥijā untuk kelas III, Qawā`id al-Ṣarfiyah dan Taṣrīfan untuk kelas IV dan V, dan naẓam al-Imriṭī dan al-Maqsūd untuk kelas VI, alfiyah ibn Mālik dan Jauharul Maknūn untuk Tsanawiyah, dan naẓam Uqūdul Jumān untuk Aliyah.[64]

Dalam praktiknya, hafalan ini dilaksanakan oleh siswa setiap mulai pelajaran dan musyawarah selama 30 menit. Dalam lalaran umum yang dilakukan setiap minggu sekali, siswa biasanya mengiringi hafalannya dengan berbagai alat musik dari tutup botol, sajadah, dan berbagai alat seadanya. Dengan berbagai gubahan lagu yang diambilkan dari dangdut, melayu, bahkan sungai gangga, siswa melakukan lalaran dengan suka cita. Penggunaan berbagai alat musik seadanya yang menciptakan hingar bingar itu dilarang sejak tahun ajaran 2003.[65] Ketika mustaḥiq tidak mengawasi lalaran itu, peneliti sering menjumpai siswa yang

---

[62]Ahmad Sonhaji, "Kata Pengantar 1", dalam Arifin, *Kepemimpinan Kyai*, ix.

[63] Wawancara Ulil Abshar-Abdalla dari Kajian Islam Utan Kayu (KIUK) dengan Azyumardi Azra yang disiarkan jaringan Radio 68 H pada Kamis, 25 Juli 2002, *Pendidikan Agama Harus Rasional dan Toleran*, http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id= 226, diakses pada tanggal 24 Januari 2007.

[64]M. Romadlon, *Aura*, 137-147.

[65]M. Romadlon, *Aura*, 146.

menggunakan kitab dan sajadah untuk menciptakan suara musik ketika lalaran.[66]

Secara historis, hafalan adalah menjadi ciri utama pendidikan pada masa Islām klasik dan pertengahan. Ini bisa dimaklumi karena kekuatan hafalan sangat dibutuhkan untuk menjaga al-Qur`an dan keotentikan ḥadīṡ, sehingga riwayat ḥadīṡ layak untuk dipercaya kalau pembawa ḥadīṡ itu orang yang kuat hafalannya. Madarasah yang mengkonsentrasikan kajiannya pada ilmu-ilmu agama juga menggunakan kekuatan hafalan menjadi sebuah keharusan. Ibn al-Najjār (w. 643 H./1245 M) mengajukan sebuah sya`ir tentang kepentingan hafalan, "Jika kau tidak mempunyai hafalan yang kuat, maka usahamu mengumpulkan buku tiada guna. Maka beranikah kau berbicara dalam forum, sementara ilmumu kau tinggal di rumah?"[67]

Berkenaan dengan hafalan ini ada cerita tentang al-Ghazālī, bahwa dia dirampok buku-buku dan perbekalannya. Al-Ghazālī merelakan seluruh miliknya diambil perampok kecuali buku-bukunya. Perampok itu bertanya, "Bagaimana kau mengklaim bahwa ilmu yang ada di buku itu milikmu, bila buku itu dirampas kau tidak mengerti lagi isinya?" Jawaban inilah yang selalu terngiang-ngiang di telinganya, sehingga dia menganggap bahwa itu adalah peringatan dari Tuhan. Ketika sampai di tanah kelahirannya, al-Ghazālī akhirnya menghabiskan waktu tiga tahun untuk menguasai seluruh isi buku yang telah dikembalikan dari perampok itu.[68]

Cara untuk menghafal adalah selalu mengulang-ulang pelajaran. Al-Syīrāzī, syaikh pertama Nizāmiyah Bagdād, biasa mengulangi pelajarannya sampai mendekati 100 kali agar memperoleh kepastian bahwa hafalannya itu betul-betul tertancap di memori hafalannya.[69] Sementara al-Kiyā' al-Harrasi, salah satu syaikh Nizāmiyah, ketika

---

[66]Salah satunya adalah lalaran yang dilakukan oleh siswa menjelang Musyawarah pada tanggal 11 Februari 2007.

[67] إذا لم تكن واعظا واعيا # فجمعك للكتب لا ينفع # ا تنطق بالجهل في مجلس # فعلمك في البيت مستودع. Baca George Makdisi, *The Rise of Colleges: Institution of Learning in Islām and the West.* Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981, 101.

[68]Abū Nasr Abd al-Wahhāb ibn Tāj al-Dīn al-Subkī,, *Tabaqāt al-Syāfi`iyah al-Kubrā.* Kairo: al-Maṭba`ah al-Ḥusainiyyah, 1349/1931, Jilid IV, 103.

[69] Abū al-Faraj Abd al-Raḥmān ibn Alī ibn al-Jauzi, *Al-Muntaẓam fi Tārīkh al-Mulūk wa al-Umam,* Hyderabad: Dā'irah al-Ma`ārif al-Usmaniyah, Jilid IX, 1939, 7.

menjadi siswa biasa mengulangi pelajarannya di tangga Nizāmiyah sampai 70 kali.[70]

Dalam rangka untuk menunjang pemahaman, pendalaman, dan pengembangan materi pelajaran, siswa tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah diharuskan mengikuti musyawarah. Untuk tingkat Ibtida'iyah, musyawarah dimulai jam 14.00 s.d. 16.00 Istiwa', dengan ketentuan jam 14.00 s.d. 14.30 digunakan untuk muḥāfaẓah dan jam 14.30 s.d. 16.00 untuk membaca dan membahas materi pelajaran. Sementara musyawarah tingkat Tsanawiyah dan Aliyah dimulai jam 11.00 sampai dengan 13.00 Istiwa', dengan ketentuan Jam 11.00 s.d. 11.30 digunakan untuk muḥāfaẓah dan jam 11.30 s.d. 13.00 untuk membaca dan membahas materi pelajaran.

Kegiatan musyawarah ini sudah dimulai tahun 1941 yang diprakarsai oleh Ustāż Zamroji.[71] Kegiatan musyarawah ini dipertahankan sampai kini. Ketika penelitian ini dilaksanakan, pada tanggal 11 Februari 2007, peneliti menyaksikan musyawarah yang dilakukan santri tingkat ibtida'iyah. Musyawarah tersebut dimulai jam 14.00 sampai dengan 16.00 istiwa'. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, peneliti mengfokuskan pengamatan pada salah satu kelas, yaitu kelas VI yang menempati Gedung an-Nahdlah Ruang 09. Sepuluh menit sebelum 14.00, siswa datang satu persatu dan setelah sampai di lokal, mereka *lalaran* (sering disebut muḥāfaẓah atau menghafalkan) bait al-Maqṣūd. Syi'ir al-Maqṣūd yang berbaḥar rajaz itu didendangkan secara bersama dengan irama berbagai lagu, baik dari dangdut maupun sungai gangga India, dengan disertai musik dari pukulan sajadah dan buku. Ketika muḥāfaẓah selesai yang membutuhkan waktu sekita 30 menit, diteruskan dengan diskusi kelompok kecil, yang berisi sekitar 3-5 orang. Ketika jam menunjukkan jam 15.00 diteruskan dengan diskusi kelas yang dipimpin oleh seorang ra'īs. Mata pelajaran yang dikaji waktu itu adalah fiqih dengan menggunakan kitāb taqrīb. Situasi musyawarah itu dapat dilihat pada gambar berikut ini.

---

[70] ibn al-Jauzi, *Al-Muntazam fi Tārīkh al-Mulūk wa al-Umam,* , Jilid IX, 167.

[71]Ch. Nur Siddiq, *Buku Pijar,* 101.

Diskusi kelompok kecil
Kelas VI Ibtida'iah MHM Lirboyo
Dok. Peneliti

Ra'īs sedang menerangkan dalam diskusi kelas
Kelas VI Ibtida'iah MHM Lirboyo
Dok. Peneliti

Secara umum, setiap kelas memiliki ra'īs yang bertanggung jawab untuk memimpin dan menguasai setiap bidang studi yang sering disebut ra'īs fan dan ra'īs `am yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir dan menguasai seluruh bidang studi. Ra'īs am setiap kelas itu bertanggung jawab terhadap keberhasilan musyawarah di kelasnya dan melaporkannya ke ra'īs tingkat masing-masing.

Untuk periode 2006-2007, ra'īs musyawarah tingkat Ibtida'iyah dijabat oleh M. Syaikhu Fauzi dan Ibnu Asaduddin, tingkat Tsanawiyah dijabat oleh Shomhadi Syukur dan Nu'mas Thoyyib, dan tingkat aliyah dipimpin oleh Ibnu Said Khuzaini dan M. Humaidi Marfu'. Seluruh rois yang disebutkan terakhir bertanggung jawab kepada Rois Am yang dijabat oleh Masyhudi Abdul Mannan.[72]

Upaya MHM untuk mempersiapkan siswa MHM menjawab masalah aktual dan faktual diadakan lewat Lajnah Baḥṡul Masā`il. Setidaknya ada lima kegiatan lajnah ini. Pertama, musyawarah berstandar kitab al-Maḥalli, Fatḥul Mu`īn, dan Fatḥul al-Qarīb. Kedua, baḥṡul masā'il umum dan kelas tingkat tsanawiyah dan aliyah. Ketiga, baḥṡul masā'il antar pesantren. Keempat, mengirimkan delegasi ke berbagai kegiatan baḥṡul masā'il, dan kelima, mempublikasikan hasil-hasil musyawarah dan baḥṡul masā'il.

Dua forum kegiatan ini, musyawarah dan baḥṡul masā'il, telah mengantar alumni MHM dikenal pada berbagai forum tersebut pada tingkat Jawa Timur maupun nasional, sehingga ada beberapa yang

[72]MHM, *HSPK Tahun Pelajaran 1427-1428 H./2006-2007 M.*, Kediri: MHM, 2007, 56.

mengadakan studi banding ke MHM Lirboyo karena alasan keberhasilan tim baḥṡul masā'il dari pesantren Lirboyo.[73]

Kelima metode pembelajaran tersebut, yaitu bandongan, sorogan, hafalan, musyawarah, dan baḥṡul masā`il dipertahankan oleh ketiga pesantren tempat penelitian ini dilakukan. Bahkan, sejak 7 tahun yang lalu team baḥṡul masā`il sudah menggunakan media digital library untuk mencari berbagai *ta`bīr.*[74] Perkembangan ini merupakan hal yang menarik karena kebanyakan komunitas pesantren sering mencurigai segala sesuatu yang baru yang dianggap datang dari Barat.

Intensifnya program baḥṡul masā`il dan penggunaan digital library kitab kuning telah membawa perubahan di pesantren. Sebagai contoh, pada tahun 2003 dan 2004, siswa Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo Kediri menerbitkan 3 buku karyanya. Pertama, *Paradigma Fiqh Masail: Kontektulisasi Hasil Bahtsul Masail.* Buku ini membahas 15 topik. Sistematika pemecahan setiap masalah senantiasa diawali dengan perspektif al-Qur'an dan al-Hadits dalam menjawab masalah itu diteruskan pendapat para imam mazhhab menyelesaikan masalah tersebut dengan menyertakan prosedur ditetapkannya pendapat itu. Kedua, *Esensi Pemikiran Mujtahid: Dekonstruksi dan Rekonstruksi Khasanah Islam.* Buku yang kedua ini juga menjelaskan berbagai masalah dengan mendasarkan kepada al-Qur'an dan al-Hadits dengan memberikan ruang

---

[73]Salah satu pesantren yang mengadakan studi banding dengan alasan keberhasilan baḥṡul masā'il santri Lirboyo adalah pesantren Blok Agung Banyuwangi pada tanggal 14 Agustus 2007.

[74]Software yang sering digunakan adalah *Al-Qur`an al-Karim versi 6.5* yang berisi al-Qur`an sebanyak 30 juz, text, dan bacaan oleh Syaikh Ali Abdurrahman al-Hudaifi, terjemah Inggris dan Indonesia, tajwid dan makhārij al-ḥuruf, dan tāfsir: Jalālain, Ibn Katsīr, dan al-Qurthubiy; *Maktabatut Tafsīr wa `Ulūm al-Qur'ān* yang berisi 23 kitab tafsir, 28 kitab ulūm al-Qur'an, 9 risalah dalam ulūm al-Qur'an, 6 kitab biografi dan ṭabaqāt al-mufassirīn, 8 kitab ma`ājim yang berhubungan dengan studi tafsīr al-Qur'an; *Mausū`at al-Ḥadīts al-Syarīf: al-Kutub al-Tis`ah* yang memuat 9 kitab hadits terkenal lengkap dengan fasilitas pencarian dan penelitian hadits dan lain sebagainya; *al-Maktabah al-alfiyah li al-Sunnah al-Nabawiyah* yang memuat lebih dari 1300 jilid kitab-kitab hadits dan kitab-kitab penunjang untuk studi hadits yang dikelompokkan pada: al-ṣihhāh, al-sunan, al-muṣannafāt wa al-atsar, al-masānid, al-syurūkh, tarājim al-ruwāt, muṣṭalah al-Hadīts, al-sīroh wa al-tārīkh, dan al-ghorīb wa al-ma`ājim; *Maktabat al-Fiqh wa Uṣūlih* yang memuat 267 judul kitab lebih dari 900 jilid kitab fiqh dan ushul fiqh dari berbagai madzhab; dan *Maktabat al-Naḥw wa al-Ṣarf* yang Memuat kitab-kitab dalam bidang Nahw dan Sharf.

kemungkinan terjadinya *khilāfiyah* disebabkan perbedaan sudut pandang di dalam memahami al-Qur'an dan al-Hadits. Dan Ketiga, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam.* Buku yang disebutkan terakhir ini mengintrodusir *turātsul ulamā'* yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah baru yang relatif belum tertampung secara memadai oleh kitab-kitab fiqh klasik.

Dari beberapa buku di atas terlihat bahwa Pesantren Lirboyo, yang memproklamirkan diri sebagai pesantren salafiyah ternyata sudah menjadikan al-Qur'an dan al-Hadits sebagai referensi utama dalam kajian itu. Padahal, selama ini ditengarahi bahwa ajaran-ajaran agama dipahami pesantren salafiyah sebatas konsep yang diperkenalkan dan diajarkan oleh para imam mażhab sehingga secara umum para pengikutnya tidak terangsang untuk mempelajari al-Qur'ān dan al-Ḥadīts. Kitab-kitab karya ulama klasik dijadikan pedoman utama dalam pengajaran Agama Islam, sedangkan kitab-kitab yang mencoba memahami secara langsung al-Qur'ān dan al-Ḥadīts diabaikan. Lebih dari itu, bidang-bidang studi non keagamaan yang memang tidak tersedia dalam kitab kuning tidak diajarkan sama sekali. Sampai akhir awal tahun 90-an kenyataan ini masih sangat dominan mewarnai pendidikan di pesantren tradisional, sehingga dalam praktiknya pendidikan Islam itu agaknya identik dengan pengajian kitab-kitab ahli madzhab, yang kemudian dikenal dengan *al-kutub al-mu`tabarah.*[75]

Metode pembelajaran yang paling sedikit diperhatikan adalah metode penulisan karya ilmiah. Metode yang dapat membekali santri untuk jadi penulis yang memungkinkan tata nilai kepesantrenan dapat dipresentasikan kepada masyarakat melalui media cetak ini tidak dibebankan kepada santri secara individual. Potensi santri untuk menulis itu hanya dipraktikkan siswa kelas III Aliyah MHM secara kolektif ketika akan mengakhiri studinya dan dilakukan oleh tim pengelola Majalah Misykat[76] dan Majalan Dinding Hidayah.[77]

---

[75]Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya,* Jakarta: Logos, 1999, 82.

[76]Majalah ini mulai terbit berdasarkan Surat Keputusan BPK P2L No. 20/BPK-P2L/III/'86 Tentang penerbitan Bulletin/Majalah. Di antara para pioner Misykat saat itu adalah : KH. Imam Yahya Mahrus (pimpinan umum), Nur Badri (pimpinan redaksi), A. Ma'ruf Asrori, Faruq Zawawi, Imam Ghazali Aro, KH. Athoiliah S Anwar Manshur, dan Rofiq Zakaria (redaktur). Majalah ini memiliki motto "Media informasi santri dan masyarakat". Motto tersebut menggambarkan

Sebagaimana dijelaskan bahwa ciri khas madrasah diniyah di Pesantren Lirboyo adalah konsentrasinya pada ilmu alat, yaitu Naḥw, Ṣaraf, dan Balāghah. Berbagai ilmu tersebut ternyata lebih banyak digunakan untuk memahami literatur klasik yang tertulis dalam kitab kuning, tidak digunakan untuk muḥādaṡah dan menulis. Hal ini diketahui karena tidak diketemukan metode yang memungkinkan dua keahlian tersebut dapat dikuasai apalagi ditingkatkan. Metode muḥādaṡah ini, menurut KH. Anwar Manshur, semestinya pernah dikembangkan pada tahun 1970-an dan pertengahan tahun 1980-an, tetapi hasilnya ternyata tidak menggembirakan.[78]

Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Pesantren ar-Risalah dan al-Mahrusiyah. Dengan mengangkat guru alumni dari Pesantren Gontor dan Timur Tengah, pesantren ini memberi penekanan penggunaan Bahasa Arab sebagai media muḥādaṡah. Tidak hanya itu, Pesantren ar-Risalah juga memiliki guru bantu dari Konjen Australia, Mark, untuk mengajar Bahasa Inggris, dan dari Republik Rakyat Tiongkok, Su Chuang, untuk mengajar Bahasa Mandarin. Sebagai hasil dari proses pembelajaran bahasa tersebut, setiap minggu sekali digunakan Bahasa Arab, Inggris, ataupun Mandarin bagi siswa SMA ar-Risalah.

Sementara metode pembelajaran yang digunakan di MTs dan MA HM Tribakti al-Mahrusiyah dan SD, SMP, dan SMA ar-Risalah tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan di madrasah dan sekolah lain.

Berangkat dari data di atas diketahui bahwa Pesantren Lirboyo telah mengadakan pembaruan metode pembelajaran sejak tahun 1941, yaitu metode musyawarah. Metode ini merupakan salah satu ciri dari metode pembelajaran modern karena metode ini memusatkan pembelajaran pada peserta didik. Tidak hanya itu, metode baḥsul masail juga telah membawa

---

bahwa MISYKAT selain mengemban misi dakwah, juga menjembatani hubungan antara santri dan masyarakat.

[77]Majalah Dinding ini mulai terbit tahun 1985. Majalah Dinding pernah tercatat sebagai 20 besar nominator majalah dinding terbaik nasional juara favorit pada peringatan Hari Pers Nasional tanggal 09 Pebruari 1989, nominator 4 besar dalam lomba Koran Dinding nasional pada tahun 1990, juara III pada Lustrum VII Universitas Airlangga Surabaya, dan menduduki peringkat III se Jawa Timur dalam lomba karya tulis versi bahasa arab yang diadakan oleh LPBA Yayasan Sunan Ampel Surabaya.

[78]Wawancara dengan KH. Anwar Manshur, Pengasuh Pesantren Lirboyo, pada tanggal 25 Mei 2003.

Pesantren Lirboyo dikenal dan diperhitungkan dalam forum yang biasa dilaksanakan oleh komunitas pesantren itu.

D. Aspek Pendidik

Tipologi pendidik di Pesantren Lirboyo setidaknya dapat dibedakan berdasarkan lembaga tempat mangajar, yaitu pendidik di madrasah diniyah dan madrasah al-Qur'an di satu sisi dan pendidik di madrasah dan sekolah yang kurikulumnya berafiliasi dengan Departemen Agama atau Departemen Pendidikan Nasional. Pendidik di madrasah diniyah ini juga dikelompokkan menjadi dua yaitu Mustaḥiq dan Munawwib. Mustaḥiq adalah semacam wali kelas dan sekaligus guru tetap pada satu kelas tertentu. Sedangkan Munawwib adalah guru yang memegang satu materi pelajaran khusus yang biasa disebut dengan guru bidang studi. Mustaḥiq ini nantinya akan menyertai kelas yang diasuhnya sampai ke jenjang yang tertinggi sehingga ada yang disebut tamat madrasah bagi santri dan ada yang disebut tamat mengajar bagi seorang mustaḥiq.

Jumlah keseluruhan guru MHM sekarang ini adalah 140 mustaḥiq dan 116 munawwib, dengan perincian 10 orang mustaḥiq untuk tingkat i'dadiyah, 64 orang mustaḥiq dan 36 munawwib tingkat ibtidaiyyah, 43 orang mustaḥiq dan 33 munawwib tingkat tsanawiyyah dan 23 mustaḥiq dan 47 munawwib untuk tingkat Aliyyah.[79] Daftar Nama Guru MHM lihat lampiran 6, sementara jumlah siswa dan gurunya lihat tabel 2.

TABEL 2

JUMLAH SISWA DAN GURU MHM LIRBOYO

NO	TINGKAT	JML SISWA	JML MUSTAḤIQ	JML MUNAWWIB
01	I`dadiyah	59	10	-
02	Ibtidaiyah	2.224	64	36
03	Tsanawiyah	2.055	43	33
04	Aliyah	1.382	23	47
JUMLAH		5.720	140	116

Keseluruhan guru MHM adalah alumni MHM sendiri dan tidak menerima alumni dari lembaga lain. Hal ini menunjukkan bahwa rekruitmen guru di MHM dilakukan dengan menggunakan manajemen

[79]MHM, *Hasil Sidang Presedium Kwarta MHM Lirboyo Kediri Tahun Pelajaran 1427-1428 H/2006-2007.*

tertutup. Ketika tujuan kebijakan ini ditanyakan kepada KH. Imam Yahya Mahrus diperoleh jawaban, ”agar orisinalitas dari sistem pembelajaran di MHM ini senantiasa dapat dipertahankan.”[80] Pendapat lain disampaikan oleh KH. Ma`ruf Zainuddin, ”agar etos mengabdi seluruh guru terhadap ma’had senantiasa tinggi.”[81]

Walaupun rekruitmen guru dilakukan dengan manajemen tertutup tetapi aplikasinya menggunakan seleksi secara ketat. Lulusan MHM Lirboyo terbaik dari berbagai segi, baik kemampuan akademik, kecerdasan emosial, dan akhlak digunakan dasar pertama oleh guru kelas III untuk memilih. Setelah mereka diseleksi oleh guru masing-masing, selanjutnya nama-nama mereka diserahkan kepada panitia kecil[82] untuk dilakukan seleksi ulang dan memilih yang terbaik. Oleh karena itu, lulusan yang terpilih untuk menjadi guru rata-rata merasa bangga karena mendapatkan kepercayaan dari kyai.

Kebijakan tentang mustaḥiq yang mengikuti kenaikan kelas muridnya diawali pada akhir 1930-an. Menurut KH. Imam Yahya Mahrus, madrasah pada akhir 1930-an sering terganggu karena sebagian guru itu harus *boyong,* karena madrasah harus mencari guru pengganti dan muridnya harus menyesuaikan dengan guru barunya. Di samping itu, kebijakan ini juga dimaksudkan agar guru menguasai seluruh fan yang menjadi ciri khas Pesantren Lirboyo sehingga siap mengajarkan ke masyarakat ketika pulang.[83] Kebijakan ini tampaknya membuahkan hasil dengan bukti pembelajaran di madrasah diniyah menjadi kondusif dan sebagian besar mantan mustaḥiq menjadi tumpuan masyarakat ketika mereka pulang ke daerahnya masing-masing.

Seluruh guru yang mengajar di madrasah diniyah pada seluruh Pesantren Lirboyo, termasuk tiga pesantren yang diteliti adalah alumni

---

[80]Wawancana dengan KH. Imam Yahya Mahrus pada tanggal 11 Maret 2007 di Kantor Program Pascasarjana IAIT Kediri.

[81] Wawancana dengan KH. Ma`ruf Zainuddin pada tanggal 7 Nopember 2006.

[82]Panitia kecil beranggotakan tujuh orang yang dipilih dari penasehat MHM dan dewan harian pengurus pesantren. Panitia Kecil bertugas mengevaluasi pelaksanaan program MHM dan menetapkan kebijakan yang dijadikan pijakan MHM ke depan, termasuk menyeleksi ulang calon mustaḥiq dan munawwib yang diajukan oleh MHM.

[83] Wawancara dengan KH. Imam Yahya Mahrus, sekarang pengasuh Pesantren Lirboyo, pada tanggal 18 Maret 2007 di kantor Program Pascasarjana IAIT Kediri.

MHM Lirboyo. Sedangkan siswa madrasah al-Qur'an diasuh oleh alumni Madrasah Murottilil Qur'an (MMQ) Lirboyo yang diasuh oleh KH. Maftuh Basthul Birri. Prosedur yang ditempuh untuk menentukan guru sama dengan pengangkatan guru madrasah diniyah.

Rekruitmen guru dari kalangan sendiri dimaksudkan agar guru tersebut mempunyai etos kerja yang tinggi rupaya berhasil mengingat mayoritas mereka mempunyai disiplin yang tinggi walaupun gaji mereka, yang sering disebut dengan bisyarah atau uang sabun, itu sangat rendah. Sebagai contoh, seorang munawwib setiap bulan mendapatkan bisyārah sebanyak Rp.75.000,- sedangkan mustaḥiq mendapat jumlah yang sama dengan ditambah kebutuhan mandi dan mencuci.[84] Guru madrasah diniyah dan al-Qur'an pada dua pesantren lainnya juga mendapat bisyarah dengan jumlah yang sama. Tingginya disiplin guru yang mendapatkan gaji yang rendah disebabkan oleh orientasi dalam mengajar mereka tidak mencari nafkah. Tujuan mereka dalam mengajar dapat diketahui dari penjelasan H. Shofiyullah, "Rata-rata tujuan kami adalah mendapatkan barokah dengan jalan mengabdi kepada kyai dan pesantren dan berharap ilmu kami bermanfaat."[85] Daftar guru MHM Lirboyo dapat dilihat pada lampiran dan guru Madrasah Diniyah al-Mahrusiyah pada lampiran 11.

Orientasi untuk mendapatkan barokah dari kyai ketika mengajar itu setidaknya dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama, contoh yang dilakukan oleh masyāyikh yang menggunakan mayoritas waktunya untuk memimpin shalāt, mengaji, menerima tamu, dan lainnya dengan tidak mendapatkan upah langsung. Kedua, żuriyah pesantren yang menjadi pimpinan dan guru di pesantren juga mendapatkan bisyārah yang hampir sama. Ketiga, cerita lisan dan tulisan yang mengisahkan bahwa orang yang mengabdikan dirinya kepada pesantren akan mendapatkan kesuksesan. Misalnya, dikisahkan dalam buku *Tiga Tokoh Lirboyo* bahwa, ketika Manab ingin bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya seperti sebelum di Madura, dia bersama seorang sahabatnya, Abdullah Faqih, dari Cemara, Banyuwangi, berangkat ke daerah sekitar Banyuwangi dan daerah Jember untuk ikut mengetam padi. Namun setelah bersusah-payah melakukan perjalanan yang cukup jauh, sesampai di

---

[84]Wawancara dengan Qomarus Zaman, Lc., M. Pd. I., munawwib kelas III Aliyah MHM Lirboyo Kediri, pada tanggal 16 April 2008, di Rumah Qamarus Zaman, Pesantren al-Manar Prambon Nganjuk.

[85]Wawancana dengan H. Shofiyullah, Mustaḥiq kelas VI F2, pada tanggal 11 Februari 2007.

Bangkalan terjadilah hal yang mengejutkan, ternyata Kyai Kholil menghendaki padi hasil kerja Manab itu untuk makanan ternaknya. "*Peneran Nab, tak nggone pakan pitikku",* (Kebetulan Nab, nanti saya gunakan untuk makan ayamku), kata Kyai Kholil. Begitulah, rupanya Kyai Kholil tidak mengizinkan Manab bekerja, sebagai gantinya ia disuruh memetik daun pace yang tumbuh di sekitar pondok, untuk makanan sehari-hari.[86]

Di bulan suci Ramadlan, kala Manab sedang mengikuti pengajian *Tafsīr Jalālain,* dia jatuh pingsan. Ada apa dengan Manab? Semula dikira hanya kepanasan, lantaran panas matahari waktu itu memang begitu menyengat, sedang Manab tidak mendapatkan tempat yang teduh karena sedikit terlambat. Tetapi setelah diselidiki, ternyata ia terlalu lapar. Sewaktu berbuka mungkin ia tidak menyantap makanan, bahkan ketika sahur ia juga tidak menemukan sesuatu untuk mengganjal perut. Keprihatinannya membuah hasil. Oleh mertuanya, Kyai Sholeh, ia diberi sebidang tanah dan sebuah gubuk. Di tempat inilah kemudian tumbuh subur sebuah pesantren yang terkenal dengan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.[87]

Internalisasi barokah seperti ini, kalau dianalisis dengan menggunakan ciri modernitas Inkeles, maka jelas bertentangan karena ia tidak bebas dari kekuasaan tradisional dan dogmatis dalam berfikir. Tetapi modelling, yang dalam bahasa agama sering disebut dengan *uswah* dan rutinisasi telah berhasil mengantarkan mustaḥiq dan munawwib di Pesantren Lirboyo dengan ikhlas mengajar dalam rangka mendapatkan barokah.

Fenomena keikhlasan guru madrasah diniyah dan madrasah al-Qur'an sebagaimana dijelaskan ternyata mempunyai pengaruh yang kuat terhadap meningkatnya wibawa guru tersebut, bahkan dikatakan bahwa ketaatan santri kepada gurunya lebih tinggi daripada kepatuhannya kepada kyainya. Penjelasan ini disampaikan oleh KH. Ilham Nadzir,[88] mantan pimpinan MHM pada tahun 1977, dan Qomarus Zaman,[89]

---

[86]BPK P2L, *Tiga Tokoh Lirboyo,* 9-10.

[87]BPK P2L, *Tiga Tokoh Lirboyo,* Kediri: BPK P2L, 2006, cover belakang.

[88]Wawancara dengan KH. Ilham Nadzir pada tanggal 28 Maret 2007 di Ketami Pesantren Kediri.

[89]Wawancara dengan Qomarus Zaman, Lc., M. Pd. I., munawwib kelas III Aliyah MHM Lirboyo Kediri, pada tanggal 16 April 2008, di Rumah Qamarus Zaman, Pesantren al-Manar Prambon Nganjuk.

Munawwib Aliyah MHM Lirboyo. Lebih taatnya santri kepada gurunya dibandingkan dengan kyainya disebabkan hampir seluruh kyai di Pesantren Lirboyo sudah tidak menjadi sumber belajar yang utama, karena relasi pembelajaran santri kyai hanya terjadi ketika pengajian wetonan. Hanya saja, karena tujuan guru dalam mengajar itu untuk mendapatkan barokah dengan jalan mengabdi kepada kyai, maka posisi kyai menjadi kuat di hadapan guru-guru tersebut.

Persyaratan dan orientasi guru MTs dan MA HM Tribakti dan SD, SMP, dan SMA ar-Risalah adalah berbeda dengan guru diniyah dan al-Qur'an di atas. Ketika penelitian ini dilakukan MTs HM Tribakti memiliki 34 guru dengan perincian 31 sarjana S1, 2 Sarjana Muda, 1 lulusan Madrasah Aliyah yang juga alumnus dari Pesantren al-Ahqaf Yaman. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 29 ayat 2, 3, dan 4, di mana pendidikan pada SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma IV (D IV) atau sarjana S1 dengan latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, maka diketahui bahwa 26 orang di antara memenuhi kwalifikasi akademik karena berijazah minimal S1 dengan program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, 5 orang di antaranya berlatar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan 3 orang di antaranya tidak memenuhi kwalifikasi karena ijazahnya lebih rendah dibanding S1. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 3 berikut ini. Daftar guru MTs lihat lampiran 12.

TABEL 3

KOMPETENSI GURU MTs HM TRIBAKTI

NO	KETERANGAN	FREKWENSI	PERSEN TASE
01	Memenuhi Kwalifikasi Akademik	26	76,5
02	Miss Match	5	14,7
03	Tidak Memenuhi Kwalifikasi Akademik	3	8,8
Jumlah		34	100,0

Pada periode ini, MA HM Tribakti memiliki 51 guru dengan perincian 1 Sarjana S2, 46 Sarjana S1, 3 Sarjana Muda dan 1 lulusan D3. 43 orang di antara memenuhi kwalifikasi akademik karena berijazah minimal S1 dengan program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, 4 orang di antaranya berlatar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan 4 orang di

antaranya tidak memenuhi kwalifikasi karena ijazahnya lebih rendah dibanding S1. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 4 berikut ini. Daftar guru Madrasah Aliyah lihat lampiran 13.

TABEL 4

KOMPETENSI GURU MA HM TRIBAKTI

NO	KETERANGAN	FREKWENSI	PERSEN TASE
01	Memenuhi Kwalifikasi Akademik	43	84,3
02	Miss Match	4	7,8
03	Tidak Memenuhi Kwalifikasi Akademik	4	7,8
Jumlah		51	100,0

Kwalifikasi akademik yang lebih rendah dimiliki oleh guru SD, SMP, dan SMA ar-Risalah. Pada tahun akademik 2006-2007 SD ar-Risalah memiliki 22 guru, dengan kwalifikasi berijazah D2, SMP memiliki 18 guru, dengan kwalifikasi 3 sarjana S1 sementara lainnya alumni diploma II yang sekarang sedang menyelesaikan S1, SMA mempunyai 20 guru dengan kwalifikasi 14 sarjana S1 dan 6 di antaranya sedang menyelesaikan S1nya.

TABEL 5

KOMPETENSI GURU SD, SMP, DAN SMA AR-RISALAH

NO	KETERANGAN	SDS	SMP	SMA
01	Memenuhi Kwalifikasi Akademik		3	14
02	Miss Match	-	-	-
03	Tidak Memenuhi Kwalifikasi Akademik	22	15	6

Data ini menunjukkan bahwa seluruh guru SD ar-Risalah belum memenuhi kualifikasi akademik. Guru SMP yang memenuhi kwalifikasi akademik berjumlah 3 orang, dan guru SMA yang memenuhi kualifikasi akademik sebanyak 14 orang, sedangkan guru lainnya belum memenuhi kualifikasi tersebut. Daftar Nama guru SDS dapat dilihat pada lampiran 18, guru SMP dapat dilihat pada lampiran 19, dan SMA pada lampiran 20.

Terkait dengan sedikitnya guru yang memenuhi kualifikasi akademik tersebut dijelaskan oleh Hj. Aina Ainaul Mardliyyah, Pengasuh Pesantren ar-Risalah, "Sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan tentang kualifikasi akademik guru itu dilakukan secara

bertahap. Oleh karena itu, ar-Risalah akan memenuhi itu dengan target paling akhir tahun 2009."[90] Jalan yang ditempuh adalah dengan memberikan bantuan kepada guru untuk studi lanjut. Tidak hanya itu, pesantren ini juga memiliki guru dari guru bantu dari Konjen Australia, Mark, untuk mengajar Bahasa Inggris, dan dari Republik Rakyat Tiongkok, Su Chuang, untuk mengajar Bahasa Mandarin.

Pada tahun ajaran 2005/2006 SMP Ar-Risalah mencatat prestasi yang berupa status terakreditasi A dengan nilai 98,43 yang merupakan nilai tertinggi di Kota Kediri.[91] Sementara untuk jenjang SMA pada tahun ini baru mengajukan untuk diakreditasi. Di antara prestasi yang diraih lembaga pendidikan umum di Pesantren Salafiy Terpadu Ar-Risalah yaitu SMP Ar-Risalah memperoleh kelulusan 100% dengan nilai rata-rata Ujian Nasional tertinggi di Kota Kediri selama 2 tahun berturut-turut yaitu pada tahun ajaran 2004/2005 dan 2005/2006. Pada tahun ini, SMA Ar-Risalah berhasil mengirimkan seorang siswa ke Amerika Serikat dalam program pertukaran pelajar.

Penghargaan yang diberikan pesantren kepada para guru MTs dan MA HM Tribakti dan SD, SMP, dan SMA ar-Risalah dalam bentuk gaji jauh lebih baik dibandingkan dengan guru madrasah diniyah dan al-Qur'an; bahkan, juga lebih tinggi dibandingkan dengan kebanyakan guru swasta yang ada di berbagai sekolah di Kediri. Perbedaan latar belakang pendidikan dan jumlah gaji antara guru madrasah diniyah dan madrasah al-Qur'an di satu sisi dan guru MTs dan MA HM Tribakti dan SD, SMP, dan SMA ar-Risalah di sisi lain juga berpengaruh terhadap perbedaan orientasi. Mayoritas guru diniyah dan al-Qur'an mempercayai bahwa kyai adalah sumber barokah oleh karena itu harus ditaati, sementara guru MTs dan HM Tribakti, SD, SMP, dan SMA ar-Risalah lebih melihat kyai sebagai pemilik lembaga dan pemimpin yang harus ditaati.

Apabila fenomena ini dianalisis dengan pendapat Inkeles tentang ciri masyarakat modern yang bebas dari kekuasaan tradisional dan antidogmatis dalam berfikir, memperhatikan masalah publik, berorientasi ke masa depan, dan professional dapat disimpulkan bahwa Guru di Pesantren Lirboyo memiliki ciri-ciri modern bagi guru pada lembaga yang berkurikulum Depag dan Diknas, sementara guru madrasah diniyah

---

[90]Wawancara dengan Umi Aina Ainaul Mardliyyah dan KH. Ma`ruf Zainuddin, pendiri ar-Risalah, pada tanggal 28 Maret 2007.

[91]Wawancara dengan Hasan Bisri, Lurah Pesantren Salafiy Terpadu Ar-Risalah, pada tanggal 6 Agustus 2007.

lebih mempertahankan ciri profesional menurut standar pesantren sendiri. Hanya saja, karena guru diniyah dianggap lebih disiplin dan lebih ikhlas di dalam mendidik dan mengajar siswa, maka mereka mendapatkan ketaatan dan kepatuhan siswa yang lebih tinggi dibanding guru yang mengajar di MTs dan MA HM Tribakti dan SD, SMP, dan SMA ar-Risalah.

E. Aspek Peserta Didik

Ketika penelitian ini dilakukan MHM memiliki siswa sebanyak 5.720, dengan perincian 59 siswa I`dadiyah, 2.224 siswa Ibtida'iyah, 2.055 siswa Tsanawiyah, dan 1.382 siswa Aliyah. 668 di antara 5.720 itu adalah siswa nduduk (siswa yang tidak bertempat tinggal di pesantren), dengan perincian 7 siswa I`dadiyah, 251 siswa Ibtida'iyah, 217 siswa Tsanawiyah, dan 193 siswa Aliyah.[92] Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 1 berikut ini.

GRAFIK 1

SISWA MHM LIRBOYO KEDIRI

	I`dadiyah	Ibtidaiyah	Tsanawiyah	Aliyah	Jumlah
Mukim	52	1973	1838	1189	5052
Nduduk	7	251	217	193	668
Jumlah	59	2.224	2.055	1.382	5.720
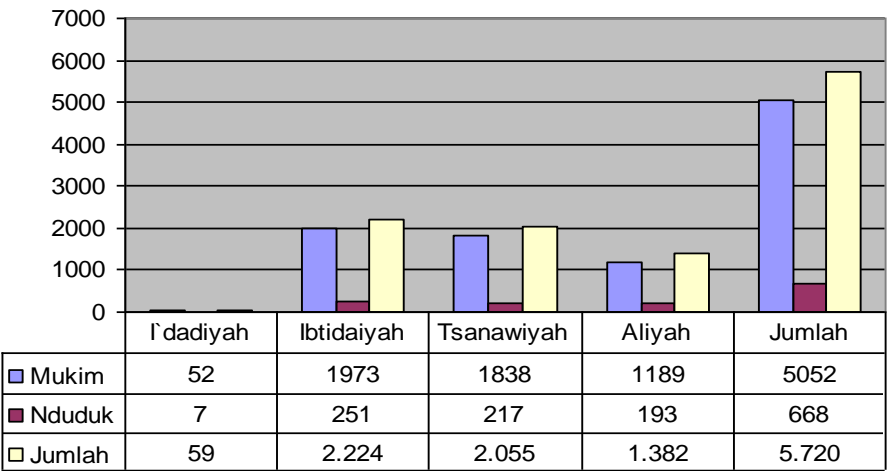
Dari grafik diketahui bahwa siswa yang mukim sebanyak 5.052 (88,32%) dan sisanya sebesar 668 (11,68%) nduduk.

Penentuan kelas yang dapat dimasuki oleh siswa baru ditentukan hasil tes yang mengutakan kompetensi akademik dengan mengabaikan

[92]MHM, *Hasil Sidang Presedium Kwarta MHM Lirboyo Kediri Tahun Pelajaran 1427-1428 H/2006-2007 M*, Kediri: MHM, 2007, 2-6.

umur dan jenjang pendidikan yang telah ditempuh sebelum mendaftar di MHM. Sebelum masuk MHM, mayoritas siswa telah menamatkan pendidikan formalnya setingkat SLTP, sebagian SLTA, dan sangat sedikit yang hanya lulus SD.

Sedangkan materi test yang diujikan untuk calon siswa sebagai berikut:

Materi Ujian Tingkat Ibtidaiyah:

Kelas I : tanpa test

Kelas II : tauḥīd (’aqāid 50) dan faṣālatan

Kelas III : fiqih (safīnafuṣ ṣalāh), tauḥīd, dan uji faṣalātan (wuḍū’, ṣalāt farḍu, ṣalāt rawātib) dan mufaṣṣalāt mulai surat an-Nās sampai dengan surat al-Quraisy

Kelas IV : Qā'idah naṡar, naḥwu (’awāmil), ṣaraf (taṣrīf) mulai bab I sampai dengan bab VI, uji faṣalātan (wuḍū’, ṣalāt farḍu, ṣalāt rawātib) dan mufaṣṣalāt mulai surat an-Nās sampai dengan surat at-Takāṡur

Materi Ujian Tingkat Tsanawiyah:

Kelas I : naḥwu (al-’Imriṭi), fiqh (membaca Fatḥul Qarīb), ṣaraf, uji bab ṣalāt dan mufaṣṣalāt mulai surat an-Nās sampai dengan surat asy-Syamsi, dan hafalan naẓam alfiyah ibnu Mālik 350 bait.

Materi Ujian Tingkat Aliyah:

Kelas I : Balāghah (al-Jauharul maknūn), fiqh (membaca Fatḥul Mu`īn), ṣaraf, uji bab ṣalāt dan mufaṣṣalāt mulai surat an-Nās sampai dengan surat al-A`lā, dan hafalan naẓam 'Uqudul Jumān 350 bait

Sedangkan untuk madrasah diniyah al-Mahrusiyah dan ar-Risalah, calon siswa juga diharuskan mengikuti ujian masuk. Untuk dapat masuk kelas I Tsanawiyah calon siswa harus lulus ujian tulis berupa kemampuan naḥwu dan ṣaraf yang diambilkan dari kitab *al-`Awāmil* dan *Taṣrīf Iṣṭilaḥi,* faṣalātan berupa do’a ṣalāt dan do`a sehari-hari, dan imlā’ pegon. Sementara untuk dapat diterima kelas I Aliyah, calon siswa harus lulus ujian tulis berupa kemampuan naḥwu dan ṣaraf yang diambilkan dari kitab *al-`Imriṭi* dan *Maqsūd,* faṣalātan berupa do’a shalat dan do`a sehari, dan hafat naẓam *alfiyah* sebanyak 200 bait.[93]

[93]Madrasah Diniyah al-Mahrusiyah, *HSPK: Hasil Sidang Panitia Khusus*

Materi test masuk di madrasah diniyah al-Mahrusiyah dan ar-Risalah kelihatan lebih mudah bila dibandingkan test masuk untuk MHM. Sebagai contoh, untuk diterima di MHM kelas I aliyah harus lulus diuji membaca kitab *Fatḥ al-Mu`īn,* sementara di Madrasah diniyah al-Mahrusiyah tidak ada persyaratan itu, persyaratan hafalan dari kitab *alfiyah* dipersyaratkan bagi calon siswa kelas I Tsanawiyah MHM, sementara persyaratan itu diperuntukkan bagi calon siswa Aliyah di Madrasah al-Mahrusiyah.

Jadi, terkait seleksi penerimaan siswa baru, MHM kelihatan paling ketat. Madrasah ini menekankan pada kemampuan akademik ketika test masuk dengan mengabaikan umur dan jenjang pendidikan yang telah ditempuh sebelumnya. Sedangkan ar-Risalah relatif mendapatkan input santri yang mempunyai kemampuan akademik baik dikarenakan pesantren ini berhasil menciptakan kesan sebagai sekolah unggulan. Dikarenakan pesantren ini menetapkan pembayaran santri yang oleh sebagian masyarakat dianggap mahal,[94] maka calon santri yang mendaftar di sini relatif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pesantren. Tontowi Jauhari yang berencana untuk memasukkan anaknya ke SMP ar-Risalah memberikan alasan karena anaknya dimungkinkan dapat mengikuti tata tertib ar-Risalah dan mempunyai kemampuan akademik sangat baik. Masalahnya, kalau anaknya ternyata tidak dapat menyesuaikan diri, maka dia akan mengeluarkan banyak uang yang sia-sia.[95] Sedangkan Pesantren HM al-Mahrusiyah tidak menggunakan seleksi masuk untuk MTs dan MA yang berkurikulum Departemen Agama. Pesantren ini hanya menyelenggarakan test penempatan kelas bagi calon santri diniyah dan madrasah al-Qur'an.

Sedangkan alasan santri memilih MHM sebagai tempat studi dapat diketahui dari jawaban beberapa santri yang berhasil peneliti wawancarai. Sebagian besar mereka mengatakan bahwa mereka memilih MHM karena mendapat dorongan dari keluarga yang pernah menjadi siswa MHM,[96]

2007, Kediri: Madrasah Diniyah al-Mahrusiyah, 2007, 43.

[94]Uang pangkal pesantren ini sekitar Rp.10.000.000,- dan untuk setiap bulan sekitar Rp.900.000,- yang dialokasikan untuk SPP di seluruh lembaga pendidikan di ar-Risalah, makan, cuci pakaian, dan berbagai kegiatan ekstra lainnya.

[95]Wawancara dengan Tontowi Jauhari, Hakim Pengadilan Agama Tulung Agung, pada tanggal 23 September 2007.

[96]Abdul Kafi Ridho, 24 tahun, kelas I Madrasah Aliyah, dan Akhmad Fahmi, 21 tahun, kelas VI Madrasah Ibtida'iyyah yang dituturkan pada tanggal

sebagian mereka mengganggap MHM senantiasa menjaga salafiyah,[97] dan keterkenalan Pesantren Lirboyo dengan Baḥṡul Masā'il dan ilmu alatnya.[98] Data ini memperlihatkan bahwa MHM dapat menciptakan kepercayaan bagi para alumninya sehingga berdampak kepada kesan masyarakat terhadapnya.

Secara umum, peserta didik yang belajar di tiga pesantren tempat penelitian ini dilakukan kelihatan sangat berbeda. Di lihat dari segi umur, mayoritas santri Pondok induk adalah dewasa. Sebelum belajar di MHM, mayoritas mereka telah lulus dari SMP, MTs, SMA, MA, bahkan perguruan tinggi. Beberapa siswa kelas VI Ibtidaiyah yang peneliti wawancarai adalah lulusan SLTA dan diterima di MHM di kelas IV pada tahun 2004, misalnya Nanang asal Kebumen dan M. Jufri Alwi dari Demak.[99] Sedangkan usia santri HM al-Mahrusiyah yang belajar di MTs dan MA adalah usia anak sekolah. Demikian juga santri di Pesantren Salafiy Terpadu ar-Risalah juga berusia anak sekolah.

Di lihat dari kegiatan yang dilakukan, santri ar-Risalah mempunyai jadwal kegiatan yang paling padat. Sebagaimana jadwal santri yang tertera dalam lampiran 21 diketahui bahwa santri ar-Risalah mempunyai agenda kegiatan dari jam 04.00 sampai dengan 22.00 atau 23.00, dengan istirahat untuk tidur siang selama 2 jam dimulai jam 12.30 sampai dengan 14.30. Sementara agenda santri pesantren induk relatif paling longgar. Di luar jam sekolah dan musyawarah, santri dapat mengatur kegiatan mereka sendiri. Di samping untuk belajar dan ngaji weton, waktu luang santri pesantren induk biasa digunakan untuk memasak atau keperluan lain. Jadwal kegiatan santri HM al-Mahrusiyah semestinya sepadat ar-Risalah. Dalam aplikasinya, santri al-Mahrusiyah mempunyai banyak waktu untuk melaksanaan kegiatan di luar agenda pesantren karena pelaksanaan tata tertibnya terkesan longgar. Ketatnya kegiatan santri di ar-Risalah terkadang mengakibatkan berbagai potensi santri di luar potensi akademik tidak dapat berkembang secara maksimal. Sebagaimana

---

11 Pebruari 2007.

[97]Penuturan Ali Imron, 21 tahun, kelas II Madrasah Tsanawiyah dan M. Shofiyulloh Zuhry, 18 tahun, kelas VI Madrasah Ibtida'iyah, pada tanggal 11 Pebruari 2007.

[98]Penuturan M. Abdul Malik, 25 tahun, kelas VI Ibtidiyah pada tanggal 11 Pebruari 2007.

[99]Hasil wawancara dengan Nanang dan M. Jufri Alwi pada tanggal 11 Februari 2007.

disampaikan oleh H. Hamzah bahwa keponakannya sering bermain permainan anak-anak TK, padahal ia alumnus SMP.[100]

Perbedaan latar belakang pendidikan, agenda kegiatan, dan orientasi guru yang mengajar menjadikan kecenderungan santri di tiga pesantren berbeda. Santri pesantren induk cenderung mengidealkan ilmu ulama salaf, menyakini tradisi pesantren yang paling benar, dan mengharapkan barokah dari kyai. Sedangkan santri HM al-Mahrusiyah lebih mempunyai fikiran yang kritis, bahkan mungkin dianggap melampaui batas untuk ukuran pesantren salaf. Dalam sebuah seminar yang diadakan oleh pesantren tersebut, peneliti diminta untuk mempresentasikan topik tentang posisi santri dalam era globalisasi. Ketika sessi tanya jawab, ada peserta yang mengajukan pertanyaan, "Masihkan kyai sekarang *barokahi*, mengingat kyai mengajarkan kesederhanaan tetapi realitanya rata-rata kyai berkehidupan mewah."[101] Sebuah gugatan dari santri terhadap kyai ini tidak pernah peneliti ketemukan di dua pesantren lainnya.

Padahal selama ini para aktor pengendali manajemen dalam sebuah pesantren, seperti para ustāż dan pengurus, semuanya tergantung pada kekuasaan mutlak seorang kyai.[102] Karena seorang kyai adalah orang yang sangat dipercaya, baik karena ilmu dan kedalaman agamanya, maupun karena keramahannya. Ia menjadi kyai bukan karena penetapan surat keputusan penguasa, akan tetapi karena masyarakat butuh bimbingannya, terutama dalam bidang keagamaan. Para santri datang sendiri, bukan karena diundang atau promosi. Mereka memang benar-benar datang dengan sepenuhnya menyerahkan diri untuk dibimbing oleh seorang kyai.[103]

Para kyai dengan kelebihan pengetahuannya dalam ilmu keislaman, juga seringkali dianggap sebagai seorang yang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam sehingga mereka dianggap memiliki kedudukan yang agung dan tak terjangkau, terutama oleh kebanyakan orang awam. Dalam beberapa hal, kyai menunjukkan kekhususan mereka dalam bentuk-bentuk pakaian yang merupakan

---

[100]Hasil wawancara dengan H. Hamzah pada tanggal 28 Oktober 2007.

[101]Pertanyaan santri dalam acara Seminar tentang Posisi Santri dalam Era Globalisasi yang diadakan oleh Pesantren HM al-Mahrusiyah pada tanggal 29 Februari 2004.

[102] Mastuhu, *Dinamika Sistem*, 66.

[103]Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1983, 56.

simbol kealiman yaitu kopiah dan surban. Mereka tidak saja merupakan pimpinan pesantren tetapi juga memiliki power di tengah-tengah masyarakat, bahkan memiliki prestise di kalangan masyarakat.

Berangkat dari pemahaman tersebut, maka kyai memiliki otoritas, wewenang yang tinggi dan mampu menentukan semua aspek kegiatan pendidikan dan kehidupan agama atas tanggung jawabnya sendiri. Bahkan pandangan tradisional tentang kyai menganggap ia memiliki otonomi dalam keputusan-keputusan serta hanya tunduk kepada hukum Allah. Menurut Dhofier kebanyakan kyai di Jawa beranggapan bahwa suatu pesantren dapat diibaratkan sebagai suatu kerajaan kecil, di mana kyai merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan *(power and authority)* dalam kehidupan dan lingkungan pesantren [104] kecuali terhadap kyai lain yang lebih besar pengaruhnya. Posisi kyai yang demikian sentral dan kuat itulah, yang menjadikan keberadaan kyai sangat kharismatik dan ditaati.

Ketika materialisasi dan estetisasi kehidupan memasuki kehidupan pesantren mengakibatkan relasi santri kyai mengalami pergeseran. Santri mulai meragukan kebarokahan kyai tersebut. Keraguan santri terhadap kyai ini disebabkan terjadinya perbedaan antara realita yang mereka lihat dengan berbagai ajaran normatif yang mereka terima. Misalnya, ajaran tentang zuhud dan kederhanaan sering mereka terima tetapi pada saat yang sama mereka melihat berbagai kemewahan. Memang, ketika berbagai pembayaraan di pesantren semakin mahal, baik untuk pendidikan, kebutuhan sehari-hari, maupun yang atas nama jariyah wajib, mengakibatkan strata sosial ekonomi kyai meningkat tajam. Padahal, kesederhanaan selama ini dianggap sebagai prinsip dari sistem pendidikan pesantren.

Tidak hanya itu, ketidakpatuhan santri secara penuh kepada kyainya juga terjadi ketika pesantren di atas membuat aturan bagi santri untuk *majek* makan di pesantren, ternyata disambut dengan protes. Isu yang diusung dalam protes itu adalah ketidaktepatan waktu dan rendahnya menu yang disediakan. Data ini menunjukkan bahwa hukum pasar juga terjadi di pesantren di mana proses transaksi dengan cara menghitung *cost* dan *benefit* dari setiap hubungan sosial termasuk relasi santri kepada kyainya. Apabila terjadi ketidakseimbangan antara *cost* dengan *benefit,* maka akan terjadi ketegangan dalam relasi itu.

---

[104]Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 56.

Berangkat dari fenomena ini dapat dimengerti mengapa Pesantren Lirboyo menetapkan kewajiban kepada santri untuk sowan (memohon do'a restu) pada masyayikh, menjaga etika, prestasi, prestise serta menjunjung tinggi nama baik pesantren, dan taat kepada Masyayikh dan kebijaksanaan Pengurus.

F. Aspek Sarana

Ruang belajar yang dimiliki oleh ketiga pesantren terlihat kuat dan megah. Bedanya, masing-masing ruang belajar MHM yang berjumlah 90 ruang itu hanya menyediakan 1 kursi dan 1 meja guru serta papan tulis. Tidak disediakan bangku siswa untuk seluruh ruangan itu. Sementara kedua pesantren lainnya, setiap ruang belajar tersedia kursi dan meja guru, kursi dan meja siswa, papan tulis dan peralatan kelas lainnya.

Ketiga pesantren tersebut juga memiliki laboratorium bahasa dan komputer. Sayangnya, jumlah hardware yang dimiliki oleh MHM dan HM Tribakti tidak sebanding dengan jumlah siswanya. Dari ketiga pesantren tersebut, hanya ar-Risalah yang memiliki laboratorium relatif lengkap dan santrinya memanfaatkan laboratorium tersebut secara terjadwal dan teratur.

Data ini memperlihatkan bahwa MHM tidak hanya kelihatan tradisional dari materi pelajaran tetapi juga sarana pembelajarannya. Sedangkan, ar-Risalah terlihat memberikan yang terbaik, tidak hanya dari segi program pendidikan yang diagendakan, tetapi juga sarana dan prasaranya.

G. Aspek Evaluasi

Untuk seluruh madrasah diniyah di Pesantren Lirboyo, evaluasi pemahaman siswa terhadap pelajaran dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ujian mingguan dan kwartal. Pada setiap minggu siswa selalu diuji pada jam pertama, malam atau hari Senin. Di samping itu, dalam satu tahun, pelaksanaan evaluasai untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa atas materi dilaksanakan sebanyak empat kali. Menjelang masing-masing ujian, diadakan pemeriksaaan buku pelajaran siswa. Dari pemeriksaan buku itu dapat diketahui seberapa tinggi tingkat kerajinan siswa mengikuti setiap pelajaran yang dibuktikan dengan adanya catatan tersebut. Bagi yang catatannya kurang akan dikenakan denda sehingga menjelang ujian siswa disibukkan untuk *menambal,* melengkapi catatannya. Ujian tulis dilaksanakan dalam kelas-kelas meliputi semua mata pelajaran. Sedangkan ujian lisan dilaksanakan untuk beberapa

pelajaran terutama yang termasuk dalam ilmu alat dan materinya berupa bait-bait naẓam.[105]

Untuk pengkoreksian dilaksanakan oleh masing-masing pengajar mata pelajaran untuk kemudian diserahkan kepada mufattisy untuk dikoreksi ulang dan ditandatangani. Sebelumnya dilaksanakan rapat untuk menentukan kenaikan siswa tertentu yang bermasalah. Mufattisy kemudian menentukan status kenaikan siswa dan kemudian diserahkan kepada Mudier untuk ditandatangani dan disahkan.

Untuk siswa tertentu akan mendapatkan fasilitas kenaikan dua tingkat dengan syarat apabila nilainya mencapai rata-rata jayyid awwal dan telah mendapatkan persetujuan dari rapat kenaikan dan mendapat restu dari penasehat, pengasuh, dan pelindung Madrasah Hidayatul Mubtadi'in. Karena ketatnya aturan itu, hampir tidak pernah ada siswa yang mendapatkan program akselerasi ini.

Dari paparan di atas memperlihatkan bahwa evaluasi di madrasah diniyah yang ada di Pesantren Lirboyo dilaksanakan secara ketat. Ini sesuai dengan strategi segenap pengasuh yang menggunakan madrasah diniyah sebagai program unggulan dan ciri khas dari pesantren ini.

Sementara evaluasi belajar siswa di MTs dan MA HM Tribakti dan SD, SMP, dan SMA adalah sama dengan madrasah dan sekolah lainnya. Evaluasi dilaksanakan setiap semester dua kali, yaitu pada pertengahan dan akhir semester dan pada akhir studinya, siswa mengikuti Ujian Akhir Nasional (UAN). Peneliti tidak mendapatkan data yang menunjukkan bahwa ada siswa yang tidak naik kelas dalam ujian di kedua sekolah tersebut.

MHM dan dua madrasah diniyah lainnya tidak mengikuti ujian akhir nasional sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Bersama antara Dirjen Bagais Depag RI dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama Pendidikan Nasional nomor Dj.II/526/2003 dan 6016/G/HK/2003. Hal ini didasarkan kepada alasan bahwa mayoritas siswa MHM telah lulus SLTP sebelum mereka masuk di MHM. Sedangkan dua madrasah diniyah lainnya, siswanya secara bersamaan juga belajar di MTs dan MA Tribakti atau siswa SD, SMP, dan SMA ar-Risalah yang secara pasti mengikuti Ujian Akhir Nasional pada lembaga-lembaga pendidikan yang disebutkan terakhir pada akhir masa studinya.

---

[105]Observasi selama penelitian.

BAB VI
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PEMBARUAN PENDIDIKAN DI PESANTREN LIRBOYO DAN IMPLIKASINYA

Pada bab ini dipaparkan data dan temuan penelitian dalam rangka menjawab masalah pokok penelitian ini, yaitu mengapa sistem pendidikan tradisional tetap bertahan dan berkembang ketika pembaruan pendidikan dilakukan di Pesantren Lirboyo. Prosedur untuk menjawab masalah di atas dilakukan dengan menjawab sub-sub masalahnya yaitu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembaruan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dan apa saja implikasi pembaruan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.

Untuk menganalisis data dan temuan di atas, peneliti menggunakan teori sistem yang digunkan oleh Don Adams. Ketika mengkaji pendidikan dan modernisasi, Don Adams menemukan lima variabel yang mempengaruhi pembaruan pendidikan. Kelima variabel ini, menurut Azra, dapat pula diterapkan dalam agenda pembaruan pendidikan Islam dalam konteks Indonesia secara keseluruhan, yaitu perubahan ideologis-normatif, pergeseran orientasi politik, mobilisasi ekonomi, peningkatan harapan bagi mobilisasi sosial, dan mobilisasi kultural.[1] Sebagai hasil dari pembaruan pendidikan juga akan menghasilkan lima variabel yang sama, yaitu perubahan sistem nilai, politik, ekonomi, sosial, dan kultural.[2]

---

[1]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos, 2002, 33-34.

[2]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*, 35-36.

A. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pembaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo

Dalam penelitian ini faktor-faktor yang diduga mempengaruhi pembaruan di Pesantren Lirboyo adalah visi kyai dan ustāż, ahlus sunnah wal jama`ah, tuntutan dunia kerja, politik pendidikan di Indonesia.

1. Visi, Kemampuan, dan Pengalaman Kyai dan Ustāż Pelaku Pembaruan

Berdasarkan paparan data pada bab terdahulu diketemukan beberapa orang yang melakukan pembaruan di Pesantren Lirboyo, seperti KH. Abdul Karim, pendiri pesantren Lirboyo, KH. Mahrus Aly, Ustāż Jamhari, Ustāż Jauhari, Ustāż Faqih Asy`ari, Ustāż Zamroji, dan Ustāż Ilham Nadzir. Selain itu, KH. Imam Yahya Mahrus dan Aina Ainaul Mardliyyah pendiri lembaga pendidikan yang berafiliasi kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional. Untuk menemukan faktor yang berpengaruh terhadap pembaru tersebut akan dijelaskan latar belakang pendidikannya.

Sebagaimana dijelaskan bahwa KH. Abdul Karim menghabiskan waktu sekitar 38 tahun untuk mengaji di berbagai pesantren. Dari data yang diperoleh, bahwa sistem pengajian yang diikuti di seluruh pesantren tersebut adalah sorogan dan bandongan, dan tidak didapatkan data bahwa Manab, nama KH. Abdul Karim sebelum haji, pernah belajar secara klasikal. Hanya saja, Manab pernah mengaji dan membantu mengajar di Pesantren Tebuireng selama lebih kurang 5 tahun. Pesantren tempat belajar Manab terakhir kali ini memperkenalkan sistem klasikal pada tahun 1916 dengan mendirikan Madrasah Salafiyah. Berangkat dari data ini dapat disimpulkan bahwa apresiasi Manab terhadap sistem klasikal dengan merestui pendirian madrasah di Pesantren Lirboyo dipengaruhi oleh Pesantren Tebuireng ini.

KH. Mahrus Aly, pendiri Institut Agama Islam Tribakti Kediri dan juga mempunyai inisiatif untuk mendirikan pesantren putri, walaupun juga belajar di pesantren-pesantren salaf, tetapi dia mempunyai pendapat yang sangat maju untuk zamannya yang tidak lazim di dunia pesantren. Salah satu contoh pemikirannya yang dianggap maju adalah cara mempelajari kitab fiqih. Menurut KH. Mahrus, ”dalam mempelajari kitab fiqh, cukup memperdalam salah satu kitab saja. Suatu bab yang ada dalam sebuah kitab, juga selalu ada dalam kitab yang lain, hanya beda redaksional saja. Asal paham salah satu kitab, insya Allah dapat

memahami kitab yang lain."[3] Hal ini bertentangan dengan kecenderungan komunitas pesantren yang menganggap kalau mempelajari salah satu kitab tanpa guru, maka gurunya syetan. Di samping itu, di dalam rangka mendapatkan kepastian keotentikan pemahaman, maka sanad menjadi sesuatu yang dipegang teguh oleh kebanyakan komunitas pesantren.

Sementara data tentang biografi tokoh lainnya yang dapat diketemukan ternyata sangat minim. Peneliti tidak berhasil menemukan latar belakang pendidikan Ustāż Jamhari, tokoh yang berinisiatif mendirikan MHM. Hanya disebutkan bahwa dia mendirikan pesantren dan madrasah Insya'iyyah di Desa Gubugsari Pegandon Kendal Jawa Tengah, beberapa tahun setelah pulang dari Lirboyo Kediri. Setelah naik haji, Jamhari berganti nama menjadi KH. Abdul Wahab.[4] Sementara Ustāż Jauhari adalah menantu KH. Abdul Karim dengan putri kelimanya Hj. A'isyah dan ayah dari KH. Maksum.[5]

Data tentang Ustāż Faqih Asy`ari diketemukan relatif lebih banyak. Sebelum menjadi santri di Lirboyo, Faqih sudah mengenyam pendidikan di Tebuireng. Diperkirakan, dia termasuk santri yang ditarik orang tuanya ketika terjadi protes terhadap pembaruan pendidikan di pesantren tersebut. Makanya wajar kalau dia tidak memasukkan pelajaran umum ketika mendapat amanat untuk mengelola MHM. Bahkan, dia termasuk orang yang sangat hati-hati bahkan konservatif. Ustāż Faqih ini pernah mempertanyakan bagaimana hukumnya debu bekas gosokan tulisan al-Qur'ān di papan tulis dan bagaimana hukum memegangnya.[6]

Data tentang Ustāż Zamroji juga tidak banyak. Setelah ayahnya wafat, pada tahun 1950, dia pulang kampung dan menggantikan posisi ayahnya menjadi pengasuh pesantren Kencong Pare.[7] Kyai yang menjadi mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini senantiasa memperhatikan mutu pendidikan di pondoknya. Hampir sekali dalam satu tahun diadakan up grading bagi guru-guru pesantren Kencong di mana nara sumbernya diambilkan dari dosen-dosen perguruan tinggi negeri di Surabaya dan Kediri.

---

[3]BPK P2L, *Tiga Tokoh Lirboyo,* 68.

[4]M. Fikrie Chakim, *Lazuardi,* 120.

[5]Moh. Aliyah Zen, *3/4 Abad Pondok Pesantren Lirboyo,* 83.

[6] Cerita KH. Imam Yahya Mahrus, sekarang pengasuh Pesantren Lirboyo, putra ke-6 KH. Mahrus Aly, pada tanggal 18 Maret 2007 di kantor Program Pascasarjana IAIT Kediri.

[7]M. Fikrie Chakim, *Lazuardi,* 121.

Sementara Ustāż Ilham Nadzir mulai menjadi santri di Lirboyo pada tahun 1954 dan setelah menamatkan studi itu, ia diangkat menjadi mustaḥiq dan menamatkannya pada tahun 1968. Setelah itu, di samping menjadi munawwib, pernah juga menjadi pengurus MHM, sehingga wajar ketika ada sidang panitia kecil pada tahun 1977 dia memimpinnya.[8]

KH. Imam Yahya Mahrus, pendiri MI, MTs, dan MA al-Mahrusiyah Tribakti, adalah putra kelima KH. Mahrus Aly. Sebelum belajar di Ummul Qura Mekah, dia telah menamatkan sarjana muda di UIT Kediri. Sementara Aina Ainul Mardliyyah, pendiri pesantren salafiy terpadu ar-Risalah yang menyelenggarakan pendidikan SD, SMP, dan SMA ini adalah cucu KH. Mahrus Aly. Sebelum kuliah di IIQ Jakarta, dia telah menamatkan diri dari PGAN 6 tahun Kediri. Ning Aina, begitu dia biasa dipanggil, akhirnya menyelesaikan pendidikan S1nya di Program Studi Ahwal as-Syahsiyah di IAIT Kediri. Karena mempunyai pengalaman pendidikan formal, maka dua tokoh terakhir, ketika mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan lembaga pendidikan akhirnya juga membuka lembaga pendidikan formal.

Berangkat dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa pengalaman dan kecerdasan merupakan faktor yang menentukan timbulnya niat untuk melakukan sesuatu, termasuk pemilihan sistem pendidikan yang akan didirikan atau dikembangkan.

2. Sistem Nilai Ahlus Sunnah wa al-Jamā`ah

Aswaja, sebagai kependekan dari Ahlus Sunnah wa al-Jamā`ah, di kalangan pesantren, termasuk di dalamnya Lirboyo Kediri, diposisikan sebagai ideologi. Sebagaimana disampaikan KH. A. Idris Marzuqi, pengasuh Pesantren Lirboyo, ketika memberikan kata sambutan bagi tamatan 1993-1994 menyarankan, "Tetaplah bersatu utuh dalam satu ikatan ideologi Aswaja sebagaimana ketika masih ada di pondok pesantren."[9] Saran senada juga disampaikan oleh Abdul Malik Abdulloh, mustaḥiq kelas III Aliyah MHM, pada kesempatan yang sama.[10] Hal ini menunjukkan bahwa Aswaja merupakan sistem nilai yang penting bagi komunitas pesantren.

---

[8]Wawancara dengan KH. Ilham Nadzir pada tanggal 28 Maret 2007 di Ketami Pesantren Kediri dan M. Fikrie Chakim, *Lazuardi,* 315.

[9]Syafi` Bilal Marzuqi, *Lentera,* 57.

[10]Syafi` Bilal Marzuqi, *Lentera,* 27.

Dalam kajian sejarah, ahl al-sunnah wa al-jamā`ah lahir sebagai reaksi atas pemahaman mu`tazilah bahwa al-Qur'ān adalah baru dan tidak diterimanya sunnah bagi mu'tazilah untuk menetapkan pemahaman aqīdah kecuali yang mutāwatir. Pemahaman yang terakhir ini membawa mu`tazilah untuk banyak menggunakan akal dalam berijtihād. Walaupun ajaran mu`tazilah dikembangkan dengan miḥnah akan tetapi tetap tidak mendapatkan pengikut yang banyak. Golongan yang menentang yang berpendapat bahwa al-Qur'ān qadīm dan banyak menggunakan sunnah dalam berpendapat ternyata mendapatkan pengikut yang mayoritas. Oleh karena itu, golongan penentang ini menamakan dirinya Ahl al-Sunnah wa al-Jamā`ah.[11]

Istilah tersebut lebih sering digunakan setelah timbulnya firqah Asy'ariyah yang didirikan oleh Abū Ḥasan al-Asy`ari dan al-Māturidiyah yang didirikan oleh Abū Manṣūr al-Māturidi. Dalam perkembangan selanjutnya, al-Māturidiyah ini terbagi menjadi dua; Māturidiyah Samarkand dan Bukhāra. Māturidiyah Samarkand dalam beberapa teologinya cenderung kepada faham Mu`tazilah sementara Māturidiyah Bukhāra kebanyakan sependapat dengan Asy'ariyah. Walaupun al-Bazdāwi, pendiri Māturidiyah Bukhāra adalah murid al-Māturidi ternyata pemikiran teologisnya tidak sepenuhnya sama. Hal ini membuat sebagian orang memberinya nama al-Bazdawiyah.[12]

Sayangnya, menurut Arifin, sebagian besar komunitas pesantren ternyata tidak mengetahui pengertian yang paling mendasar dari istilah tersebut. Bahkan, tidak jarang di antara mereka yang mengidentikkan istilah Aswaja dengan Nahdlatul 'Ulama (NU). Dalam banyak segi sering dijumpai orang-orang pesantren beranggapan bahwa mereka yang bukan warga NU adalah bukan golongan Ahlussunnah wal-Jama'ah.[13] Terjadinya pergeseran konsep Aswaja dari yang semestinya boleh jadi disebabkan oleh tidak ditekuninya sejarah pemikiran dalam Islam, termasuk di dalamnya adalah teologi Islam. Dari data tentang mata pelajaran MHM Lirboyo dapat diketahui bahwa buku ajar untuk mata pelajaran ilmu tauḥid seluruhnya adalah karangan ulama asy`ariyah..

---

[11]Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa dan Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 1986), 64.

[12]Abdul Aziz Dahlan, *Sejarah Perkembangan dan Pemikiran dalam Islam* (Jakarta: PT Beunebi Cipta, 1987), 107.

[13]Imron Arifin, *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng.* Malang: Kalimasahada Press,1993, 23

Padahal, sering dikatakan oleh kalangan pesantren bahwa sesuatu yang dipedomani dalam mempraktikkan ideologi Aswaja adalah pendapat para imam mażhab. Dalam bidang hukum, mereka memutuskan untuk memilih salah satu dari mażhab empat, dalam teologi mengikuti Asy`ariyah atau Māturidiyah, sementara dalam taṣawuf menggunakan ajaran al-Ghazali dan al-Junaidi.[14] Tidak sesuainya antara buku ajar dengan yang diidealkan dipedomani ternyata mempunyai pengaruh terhadap pemahaman keberagamaan. Orang yang mempunyai pemahaman di luar pemahaman syafi`iyah dalam fiqih dan di luar asy`ariyah dalam teologi sering dituduh tidak pengikut Aswaja.

Salah satu prinsip Aswaja yang banyak digunakan komunitas pesantren adalah: اَلْمُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيْمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيْدِ الْأَصْلَحِ. Prinsip mempertahankan nilai-nilai lama yang baik dan mentransfer nilai-nilai baru yang lebih baik ini mempunyai implikasi orientasi ke belakang atau *salaf-oriented* masih jauh lebih kuat dari pada orientasi ke depan.[15] Orientasi ke belakang ini juga berlaku di Lirboyo, misalnya terkait perdebatan tentang bahasa pengantar dalam kelas. Mempertahankan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar juga implikasi prinsip ini karena memang hampir seluruh kyai di Jawa waktu itu menggunakan bahasa Jawa untuk menerangkan isi kandungan kitab kuning. Orientasi ke depan untuk mendapatkan yang lebih baik, sebagaimana prinsip tersebut, ternyata tidak mendapatkan perhatian. Bahkan, sering dituduhkan terhadap orang yang berfikir maju ke depan untuk menawarkan hal-hal baru yang lebih baik sebagai kelompok modernis, tidak salafi, dan pada gilirannya tidak ahlus sunnah.

Orientasi ke salaf juga terlihat dari sambutan KH. M. Abdul Aziz Manshur dalam sidang panitia kecil tahun 2006. Menurutnya, ”Dalam mengambil keputusan, kita berpedoman dan meneladani lembaran-lembaran lama yang mengantar pendahulu kita ke gerbang kesuksesan atas dasar sabda Imam Mālik: لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أوائلها.[16] Di samping

---

[14]Abdurrahman Mas`ud, *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi*, Yogjakarta: LkiS, 2004, 221.

[15]Abdurrahman Mas`ud, *Menuju Paradigma Islam Humanis*, Yogjakarta: Gama Media, 2003, 261.

[16]MHM, *HSPK Tahun Pelajaran 1427-1428 H./2006-2007 M.*, Kediri: MHM, 2007, v-vi. Konteks maqālah ini adalah terkait dengan pertanyaan yang diajukan kepada Imam Mālik, ”bolehkan memulai iḥrām sebelum miqāt?”. Dengan mengutip ayat 63 QS. Al-Nūr: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Imām Mālik menjawab, ”Saya takut itu menjadikan fitnah.”. Untuk

itu, berbagai pertimbangan dalam menentukan keputusan yang maslahah dengan mengedepankan درء المفاسد."[17]

Selain prinsip di atas, salah satu nasehat yang sering disampaikan para kyai kepada santrinya adalah mengikuti ajaran ulama salaf.[18] Peneliti menangkap bahwa yang dimaksud dengan ajaran ulama salaf adalah seluruh budaya yang biasa dilakukan oleh komunitas pesantren; misalnya, pendidikan diniyah yang menggunakan sumber belajar kitab kuning, wirid setelah ṣalāt, tawāsul, ṣālat tarāwīḥ 20 rakaat, selametan, bahkan memakai kopiah. Terkait dengan ini Azyumardi Azra berpendapat bahwa dunia pesantren dikatakan sebagai dunia salafiyah (tradisional Islam) karena pesantren mewarisi dan memelihara kontinuitas tradisi Islam yang dikembangkan ulama dari masa ke masa, tidak terbatas pada periode tertentu dalam sejarah Islam. Pengertian ini berbeda dengan pengertian salaf dan konteks kaum salafi, di mana definisi kaum salafi adalah mereka yang memegang paham tentang "Islam yang murni" pada masa awal yang belum dipengaruhi bid'ah dan khurafat. Karena itulah kaum salafi di Indonesia sering menjadikan pesantren dan dunia Islam tradisional lainnya sebagai sasaran kritik keras mereka; setidaknya karena keterkaitan lingkungan pesantren atau kyai dengan tasawuf atau tarekat.[19]

Sistem nilai di atas mempunyai peran yang signifikan terhadap kecenderungan sistem pendidikan di pesantren. Penggunaan literatur yang dikarang oleh Syāfi`iah, Asy`ariyah, dan al-Ghazāli, serta penggunaan metode dan bahasa yang digunakan oleh ulama terdahulu yang dianggap salaf merupakan bukti yang tidak terbantahkan.

Jadi, Aswaja sebagai ideologi yang dianggap mempunyai jargon mempertahankan sesuatu yang sudah berjalan selama yang dianggap baik

---

elaborasi baca Abū al-`Abbās Aḥmad Abd al-Halīm ibn Taimiyah al-Ḥarani, *Kutub wa Rasā'il wa Fatāwā ibn Tamimiyyah fī al-Fiqh,* t.tp.: t.p, t.th, Jilid. XX, 375, Jilid. XIV, 358, Jilid. XVII, 118, 384, 387, dan 396.

[17]MHM, *HSPK Tahun Pelajaran 1427-1428 H./2006-2007 M.,* v-vi. Konteks maqālah ini adalah terkait preferensi terhadap suatu hal yang memungkinkan menjadi maṣlaḥaḥ dan mafsadah sekaligus. Menghindarkan diri dari terjerembab kepada mafsadah harus didahulukan dari pada upaya untuk mendapatkan maṣlaḥaḥ. Baca Abd al-Ḥamīd al-Syarwaniy, *Ḥawāsyi al-Syarwāniy,* Beirūt: Dār al-Fikr, t.th., Jilid III, 188.

[18]Misalnya nasehat salah satu pengasuh pesantren unit di Lirboyo, KH. Atho'illah Sholahuddin bagi siswa tamatan tahun 2005. Lihat M. Fikrie Chakim, *Lazuardi,* 46.

[19]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*, 107.

ternyata lebih kuat dibandingkan menggapai sesuatu yang baru yang lebih baik.

3. Politik Pendidikan

Didirikannya Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadi'in diyakini karena pengaruh pendirian lembaga pendidikan yang dilakukan oleh umat Islam sebelumnya, seperti Madrasah Salafiyah di Pesantren Tebuireng yang didirikan pada tahun 1916,[20] karena adanya persentuhan dengan persekolahan yang dikembangkan oleh Belanda maupun perkembangan pendidikan di Timur Tengah. Pesantren, menurut Sahal Mahfudh, yang selalu waspada terhadap politik etis Belanda menyadari akan perlunya perubahan atau penambahan sistem pendidikannya, setelah melihat perkembangan sistem pendidikan klasikal yang dikembangkan Belanda tersebut. Maka, pada awal abad ke-20 di pesantren mulai diperkenalkan suatu sistem pendidikan klasikal yang disebut madrasah.[21]

Setelah kemerdekaan di mana sekolah senantiasa dikaitkan dengan Ijazah-ijazah formal sebagai tanda keberhasilan pendidikan murid ternyata belum mampu mempengaruhi Pesantren Lirboyo untuk merubah pandangan dan dasar menuntut ilmu *li riḍā'illah* ke arah pandangan yang bersifat duniawi. Hal itu terus berlanjut sampai ditetapkan SKB 3 Menteri pada tanggal 24 Maret 1975. Pada waktu itu, umat Islam mengkorelasikan pendidikan dengan kebutuhan hidup murid dan status sosial mereka di masa mendatang. Ijazah formal atau ijazah negeri hasil ujian persamaan menjadi amat penting; dan berpengaruh merubah pandangan yang menggeser ke arah duniawi, yang berarti bahwa nilai belajar *li wajhillāh* itu mulai pudar atau hilang sama sekali. Walaupun agak terlambat, kecenderungan itu direspons oleh Pesantren Lirboyo dengan mendirikan MTs dan MA HM Tribakti pada tahun 1986 dan tetap

---

[20]Pencetus ide pendirian Madrasah Salafiyah ini adalah KH. Abd. Wahab Hasbullah. Pada tahun 1914, setelah kedatangannya dari belajar di Mekah, ia mendirikan Jam`iyyah Nahdlatul Wathan. Organisasi ini bertujuan untuk memperbaiki pendidikan agama, dengan suatu sistem yang tersusun lebih baik, antara lain dengan sistem klasikal. Biografi KH. Abd. Wahab Hasbullah dapat dibaca pada Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1983, 24-27; dan Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen,* Jakarta: LP3ES, 1986, 65-69.

[21]MA. Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999, 175.

mempertahankan dan tidak merubah kurikulum lembaga pendidikan diniyah yang sudah ada..

Walaupun MTs dan MA yang didirikan berdasarkan SKB 3 Menteri di atas diakui mempunyai efek sivil yang sama dengan sekolah umum bahkan menurut UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kurikulum 1994 di mana madrasah mengalami perubahan definisi dari Sekolah Agama menjadi Sekolah Umum berciri khas Islam, tetapi perlakukan pemerintah dan persepsi masyarakat masih tetap tidak sama. Hal ini dapat dilihat dari indeks biaya pendidikan per siswa di madrasah jauh lebih kecil dibanding di sekolah umum.[22] Oleh karena itu, ketika mendapat kesempatan untuk mendirikan pesantren, salah satu żuriyah Pesantren Lirboyo lebih memilih mendirikan SD, SMP, dan SMA sebagai lembaga pendidikan formalnya.

Dipertahankan lembaga diniyah juga terjadi ketika berbagai pengakuan terhadap madrasah diniyah diberikan pada era tahun 2000-an. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pesantren salafiyah telah mendapatkan beberapa kemudahan. Melalui SKB Mendiknas dan Menag Nomor l/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 para santri di pesantren salafiyah yang berusia 7-15 tahun yang mengikuti pendidikan Diniyah Awaliyah (tingkat dasar) dan Diniyah Wustho (tingkat lanjutan pertama), yang tidak sedang menempuh pendidikan pada SD/MI dan SLP/MTs atau bukan pula tamatan keduanya, dapat diakui memiliki kemampuan yang setara dan kesempatan yang sama untuk melanjutkan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,[23] bila

---

[22]Masykuri Abdillah dan Mastuki HS, “Pendidikan Satu Atap,”, diakses tanggal 12 Maret 2008.

[23]Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pondok Pesantren Salafiah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Nomor l/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa: "Para siswa yang belajar di pesantren (santri) memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan sekolah (belajar) ke jenjang yang lebih tinggi, baik kelembagaan pendidikan yang sejenis yang berciri khas agama (vertikal), maupun kelembagaan pendidikan urnum (diagonal), dengan memenuhi syarat tertentu yang diatur oleh rnenteri terkait". SK yang ditandatangani pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu oleh Mendiknas, Yahya A. Muhaimin dan Menag, Tolchah Hasan dan diketahui oleh Menko Kesra dan Taskin Basri Hasanuddin ini berisi 6 pasal. Untuk lengkapnya baca *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah,* Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan

pesantren tersebut menambah beberapa mata pelajaran umum minimal 3 mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA.[24] STTB atau Ijazah yang dikeluarkan oleh pesantren penyelenggara program ini diakui oleh pemerintah setara dengan STTB SD/MI atau SLTP/MTs dan dapat dipergunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan syarat-syarat yang akan diatur oleh departemen terkait.[25]

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (4), pasal 30 ayat (5), pasal 37 ayat (3) UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, diundangkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Beberapa pasal dari Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya menguatkan berbagai keputusan yang telah ditetapkan oleh Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional. Ayat (1) Pasal 11 Bab III, menjelaskan bahwa Peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah

---

Pontren Dirjen Dik Is Depag RI, 2006, 34-37. SKB Dua Menteri 2000 di atas dijabarkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional dengan keputusannya Nomor E/83/2000 dan Nomor 166/c/Kep/Ds/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar. SK yang disebutkan terakhir ini berisi 6 (enam) bab dan 10 (sepuluh) pasal. Untuk jelasnya baca *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar*, 38-45.

[24] Bab III tentang Kurikulum dan Evaluasi pasal 4 ayat (1) dan (2) Keputusan Bersama Dirjen Bagais Depag RI dan Dirjen Dikdasmen Diknas Nomor E/83/2000 dan Nomor 166/c/Kep./Ds/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Peantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

[25]Keputusan Bersama Dirjen Bagais Depag RI dan Dirjen Dikdasmen Diknas Nomor E/83/2000 dan Nomor 166/c/Kep./Ds/2000 pasal 5 ayat (4). Sebagai tindak lanjut ketentuan ini telah ditetapkan oleh Dirjen Bagais Depag RI dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Nomor: Gj.II/526/2003 dan 6016/G/HK/2003 tentang Ujian Akhir Nasional Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada Pondok Pesantren salafiyah tertanggal 18 Nopember 2003. Selanjutnya, Dirjen Bagais Depag RI menetapkan SK Nomor: Dj.II/527/2003 tentang Penerbitan Ijazah pada Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) Penyelenggara Program Wajar Diknas tertanggal 19 Nopember 2003. Secara lengkap dua keputusan terakhir dapat dibaca pada *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar,* 46-74.

Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan. Ayat (2) dari pasal 11 menjelaskan bahwa hasil pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Sedangkan ayat (3)nya adalah Peserta didik pendidikan keagamaan formal, nonformal, dan informal yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal umum/kejuruan dapat melanjutkan kejenjang berikutnya pada pendidikan keagamaan atau jenis pendidikan yang lainnya.[26]

Peraturan Pemerintah di atas dan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan tentang pendidikan keagamaan mestinya memberikan pengakuan yang lebih baik terhadap pesantren dan sistem pendidikan diniyahnya. Namun, Pesantren Lirboyo tidak mengikuti ketentuan SKB Dua Menteri Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah di atas dengan mempertahankan tradisi madrasah diniyahnya. Sikap tidak mengikuti ini disebabkan adanya kekhawatiran akan hilangnya identitas *salaf* yang telah dipertahankan selama ini karena masuknya intervensi pemerintah terhadap kurikulum pesantren.

Pendirian berbagai corak lembaga pendidikan yang berbeda, diniyah, madrasah sebagai sekolah umum berciri khas Islam, sekolah umum tersebut dimaksudkan agar masyarakat mempunyai banyak pilihan terhadap lembaga pendidikan di Pesantren Lirboyo ini.[27] Terdiferensiasi lembaga pendidikan di Pesantren Lirboyo ini merupakan bukti terjadinya modernisasi sebagaimana yang ditemukan oleh Don Adams.[28]

4. Tuntutan Dunia Kerja

Setelah kemedekaan, Pemerintah mempunyai kebijakan untuk mengembangkan sekolah umum seluas-luasnya dan memberikan fasilitas

---

[26]Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan ini berisi 6 (enam) bab dan 51 (lima puluh satu) pasal. Peraturan Pemerintah tersebut dan penjelasannya dapat dibaca pada buku *Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan* yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Dirjen Dik Is Depag RI tahun 2007.

[27] Wawancana dengan KH. Ma`ruf Zainuddin pada tanggal 7 Nopember 2006.

[28]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*, 34-35.

bagi bangsa Indonesia yang terdidik pada sekolah umum untuk menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan.[29] Bahkan, Soekarno, Presiden pertama RI, pernah mengkritik bahwa pesantren sebagai lembaga yang ketinggalan zaman dan menutup diri. Pesantren, menurutnya, harus merubah sikap itu. Sejak itu, masyarakat mulai mengaitkan sekolah dengan lapangan kerja. Oleh karenanya, jumlah generasi muda yang tertarik memasuki pesantren semakin menurun. Hal ini mengakibatkan kebanyakan pesantren kecil pada masa 1950-an mati. Mereka yang berkeinginan untuk survive biasanya memadukan lembaga pendidikan umum dalam lingkungan pesantren.[30]

Kebijakan tentang pencari kerja dalam sektor formal yang harus memiliki ijazah ini turut mempengaruhi corak pembaruan di Pesantren Lirboyo. Salah satu alasan yang sering disampaikan KH. Imam Yahya Mahrus tentang dibukanya MTs dan MA Tribakti adalah tuntutan dari alumni Pesantren Lirboyo. Mereka berkeinginan anak-anak mereka dapat mengaji di Lirboyo tetapi juga mendapatkan ijazah formal. Termasuk memberikan peluang untuk memasuki kerja dalam jalur formal pulalah diterimanya tawaran mu`adalah ijazah Aliyah MHM pada tahun 2006, yang pada tahun-tahun sebelumnya ditolaknya.

Di samping itu, dengan semakin terdiferensiasi kehidupan, maka banyak sektor yang tidak dapat diisi oleh alumni pesantren salaf. Oleh karena itu, Pengasuh Pesantren Salafiy Terpadu ar-Risalah menginginkan alumninya ke depan dapat mengisi dan mewarnai berbagai sektor, seperti pemerintahan, perbankan, kepolisian, dan tentu juga kemasyarakatan.[31] Berbagai sektor profesi yang disebutkan terakhir dimungkinkan dapat dicapai alumni SD, SMP, dan SMA ar-Risalah karena telah dipersiapkan mereka dalam belajar secara disiplin tentang berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk menduduki profesi tersebut.

Dari keempat faktor yang disebutkan di atas dapat dipahami bahwa kyai sebagai aktor yang dianggap memiliki kharisma berusaha untuk melanggengkan posisinya dengan mempertahankan berbagai institusi yang mendukungnya, misalnya madrasah diniyah dengan berbagai tradisi yang dikembangkan. Pada saat rutinisasi tradisi dilakukan, ternyata

---

[29] Asy`ari, *Moralitas Pendidikan Pesantren,* 41.

[30] Asy`ari, *Moralitas Pendidikan Pesantren,* 41 dan Saridjo dkk., *Sejarah Pondok,* 50.

[31] Wawancana dengan KH. Ma`ruf Zainuddin pada tanggal 7 Nopember 2006.

tuntutan masyarakat dan dunia kerja menuntut keahlian yang spesifik di luar keahlian siswa madrasah diniyah. Di samping itu, sistem nilai seperti zuhud, kesederhanaan, dan pengabdian sering bertenturan dengan realitas yang ditemukan oleh masyarakat pesantren. Berbagai hal itu, di satu sisi menjadikan lembaga tradisional dipertahankan dan pada sisi lain terjadinya tuntutan terhadap pembaruan. Hasil temuan ini mendukung teori yang dihasilkan oleh Weber. Dalam teori perubahan sosial budaya, Weber menyebut adanya tiga komponen yang menjadi sumber penyebab perubahan, yaitu ketegangan antara kharisma dan rutinisasi, diferensiasi antar bidang kehidupan, dan kesenjangan antara sistem nilai dan realitas sosial.[32]

Dipertahankannya lembaga pendidikan tradisional dikarenakan ia mempunyai fungsi menjadi faktor utama berlangsungnya fungsi dan posisi sentral kyai dan pesantren. Di samping itu, sivitas pesantren salaf berkesimpulan bahwa ilmu pengetahuan yang diajarkan dalam madrasah diniyah yang termasuk ilmunya ulama' salaf dan menjadikan santri ke dalam komunitas ahlus sunnah wal jama'ah.

B. Implikasi Pembaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo

Pembaruan pendidikan di Pesantren Lirboyo yang mempertahankan madrasah diniyah dalam rangka menguasai kitab kuning dan diselenggarakannya lembaga pendidikan yang dimungkinkan mempunyai *civil effect* untuk studi lanjut dan dunia kerja dalam sektor formal tentu mempunyai implikasi, baik terhadap lembaganya itu sendiri, alumni, lembaga pendidikan yang lebih tinggi, dan masyarakat.

1. Terhadap Pesantren Lirboyo Sendiri

Pembaruan pendidikan di pesantren Lirboyo setidaknya mempunyai implikasi terhadap perubahan fungsi pendidikan, jumlah santri, fungsi ekonomi, pergeseran tradisi dan kebiasaan santri, dan berubahnya relasi antara santri dengan guru dan antara santri dengan kyainya.

Sebelum diselenggarakan lembaga pendidikan formal yang berafiliasi kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional, animo santri yang masuk kebanyakan berasal dari masyarakat santri yang strata ekonominya menengah ke bawah. Kini, masyarakat

---

[32] Heru Nugroho, "Rasionalisasi dan Pemudaran Pesona Dunia: Pengantar untuk Max Weber," dalam Ralph Schroender, *Max Weber tentang Hegemoni Sistem kepercayaan,* diterjamahkan Ratna Noviani dari *Max weber and the Sociology of Culture,* Yogjakarta: Kanisius, 2002, x.

dengan berbagai varians dan berbagai latar belakang ekonomi dan sosial mempunyai pilihan untuk memasukkan anaknya ke Pesantren Lirboyo ini. Implikasi ini menunjukkan fungsi pendidikan Pesantren Lirboyo bagi berbagai kalangan menjadi semakin mantap.

Di samping itu, dengan bertahannya lembaga-lembaga pendidikan diniyah juga mempunyai implikasi terhadap terjaminnya pelaksanakan fungsi sistem pendidikan di pesantren, yaitu transmissi dan tranfer ilmu pengetahuan Islam, pemeliharaan tradisi Islam, dan penciptaan kader-kader ulama. Mengharapkan madrasah di luar pesantren untuk mengemban fungsi tersebut hampir dikatakan tidak mungkin. Oleh karena itu, sivitas pesantren dapat menjadi sedemikian penting karena dapat memerankan sesuatu peran yang sedemikian dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagaimana dijelaskan, ketika surau sebagai lembaga pendidikan tradisional musnah dari bumi Minang, banyak dijumpai masjid yang tidak jadi melaksanakan shalat Jum`at karena tiadanya khātib.

Tidak hanya itu, pembaruan pendidikan di pesantren ini juga berimplikasinya pada senantiasa meningkatnya jumlah santri sebagai tergambar pada Grafik berikut ini.

GRAFIK 2

JUMLAH SANTRI PESANTREN LIRBOYO

SEJAK TAHUN 1925 SAMPAI DENGAN 2007
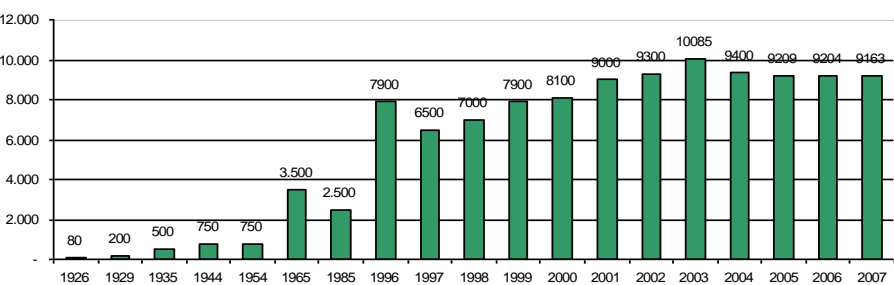
Berdasarkan grafik 2 diketahui bahwa pada tahun 1965, grafik santri Lirboyo meningkat tajam, di mana hal itu disebabkan terjadinya tragedi kemanusiaan dalam peristiwa G 30 S PKI. Dalam rangka melepaskan diri dari anggapan terlibat komunisme, maka pesantren menjadi lembaga pendidikan yang banyak dituju oleh masyarakat. Sedangkan meningkatkan jumlah santri dari tahun 1985 menuju tahun 1996 dikarenakan waktu itu żuriyah Pesantren Lirboyo satu persatu mendirikan

pondok unit. Secara berturut-turut dapat disebutkan Pesantren Putri Hidayatul Mubtadi`at didirikan tahun 1985, Pesantren HMQ berdiri tahun 1986, Pesantren Taḥfīẓ al-Qur'ān berdiri tahun 1986, HM al-Mahrusiyah berdiri tahun 1988, Pesantren HY yang semula hanya perkumpulan belajar sejak tahun 1993 dijadikan pondok unit, Pesantren Salafiy Terpadu Ar-Risalah berdiri tahun 1995, dan Pesantren HM Antara berdiri tahun 1996.

Pada tahun 1985, sebelum didirikan lembaga yang lebih modern (MTs dan MA HM Tribakti pada tahun 1986 dan SD, SMP, dan SMA ar-Risalah pada tahun 1995), jumlah santri Pesantren Lirboyo sekitar 2.500. kini, santri itu menjadi 9.163. Dalam waktu 22 tahun kenaikan santri sekitar 6.663 santri (266%), dari kenaikan sebesar 6.663, peran Lembaga Pendidikan MTs dan MA HM Tribakti dan SD, SMP, dan SMA ar-Risalah hanya 1.188 (17,82%) sedangkan sisanya sebesar 5.475 santri (82,17%) merupakan peningkatkan jumlah santri yang hanya belajar di lembaga pendidikan Islam tradisional, berupa madrasah diniyah.

Berangkat dari data ini, maka teorinya Geertz yang mengatakan bahwa pesantren akan senantiasa eksis selama menyelenggarakan pendidikan keagamaan dan sekolah sekaligus tidak senantiasa sejalan dengan fenomena Pesantren Lirboyo Kediri.

Pendirian berbagai pesantren unit merupakan strategi yang ditempuh oleh keturunan pendiri pesantren induk untuk menjaga kelestarian pesantren sepeninggal KH Abdul Karim. Dengan cara ini, konflik intern yang biasa mewarnai suatu kepemimpinan sepeninggal pendahulunya, bisa dihindari dengan sebaik-baiknya. Prakarsa ini membuahkan kesepakatan bersama sebagai langkah baru dalam tata aturan Pesantren Lirboyo.[33]

Di samping itu, peningkatan jumlah santri juga disebabkan keresahan orang tua terhadap perkembangan moral anak-anaknya. Karena semakin sibuknya orang tua dan perasaan tidak mampu untuk mengawasi langsung anak-anaknya, maka mereka menganggap bahwa pesantren adalah alternatif pendidikan terbaik.

Ketika krisis multi dimensi, utamanya krisis moneter pada tahun 1997, trend santri Lirboyo mengalami penurunan. Jumlah santri akhirnya mengalami kenaikan kembali pada 1999 dan seterusnya karena pengaruh digunakan Pesantren Lirboyo sebagai tempat Muktamar NU ke-30

---

[33]BPK P2L, *Tiga Tokoh Lirboyo,* 76-77.

selama 7 hari sejak tanggal 21 sampai dengan 27 Nopember 1999 yang membawa kemasyhuran Pesantren Lirboyo semakin meningkat.

Dengan didirikannya MTs dan MA HM Tribakti, SD, SMP, dan SMA ar-Risalah telah meningkatkan animo masyarakat, utamanya kalangan menengah ke atas untuk memasukkan anaknya ke pesantren ini menjadikan fungsi ekonomi bagi pesantren ini menjadi semakin meningkat. Hanya saja, dikarenakan adanya tata tertib yang melarang santri untuk hubungan jual beli, tukar menukar barang atau transaksi lain dengan orang kampung; menjual barang-barang di dalam pesantren; kost makan/minum di warung atau tempat selain milik pesantren atau żuriyah; dan membeli makanan atau apapun di sepanjang jalan pesantren Lirboyo,[34] mengakibatkan fungsi ekonomi tersebut hanya dapat dinikmati oleh pesantren dan żuriyah pengasuh.

Melihat fenomena di atas rupanya benar yang disampaikan oleh Irwan Abdullah bahwa hukum pasar telah menjadi norma bagi kebanyakan masyarakat modern. Ia telah mengubah kehidupan menjadi suatu proses transaksi di mana orang menghitung *cost* dan *benefit* dari setiap hudungan sosial.[35] Contoh dari kehidupan pasar adalah orang berorientasi kepada percarian kehidupan yang lebih baik dalam berbagai bentuk dan tingkat. Bagi orang tua yang berorientasi kepada pasar, cara pandang kepada pesantren mengalami pergeseran. Pemilihan pesantren dalam hal ini bukan hanya ditentukan kemampuan pesantren tersebut dalam mengantarkan putra-putrinya untuk menjadi manusia yang memahami dan mengamalkan agama semata, tetapi juga ditentukan oleh strata pesantren dalam rangka identifikasi diri orang tua tersebut.

Sekolah Unggulan dalam pesantren dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan dengan pembayaran yang dianggap mahal bagi kebanyakan masyarakat merupakan contoh yang paling jelas bahwa intervensi pasar telah masuk pesantren. Salah satu pesantren unit di Lirboyo yang menetapkan uang masuk santri baru tidak kurang dari Rp.9.000.000,00 dan biaya bulanan tidak kurang dari Rp.850.000,00 ternyata menarik minat orang tua kelas menengah ke atas untuk memasukkan anaknya ke

---

[34]Tercantum dalam Tata Tertib Pesantren Lirboyo Kediri Pasal 11 ayat 2, 3, 4, dan 5.

[35]Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan.* Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2006, 112.

pesantren tersebut. Kejadian yang sama juga terjadi di salah satu pesantren di Jombang yang di lingkungan pesantren tersebut terdapat SMP Negeri unggulan. Pesantren yang mempunyai gedung yang relatif megah, menentukan pembayaran kepada santri yang relatif mahal, dan kurang memperhatikan pembelajaran materi-materi keagamaan ini ternyata juga mendapat animo santri dari berbagai propinsi di Nusantara ini.

Padahal pada era 80-an, orang tua memasukkan anaknya ke pesantren disebabkan lebih murah dan mudahnya dibandingkan dengan masuk sekolah umum, karena memang tidak ada syarat-syarat tertentu untuk memasuki pesantren, berapa saja, dan kapan saja siswa dapat diterima. Dikarenakan murahnya pembayaran di pesantren waktu itu, maka hal itu menimbulkan krisis ekonomi bagi kyai dan keluarga. Penyelenggarakan pesantren dapat dikatakan sebagai bagian dari idealisme dan pengabdian.[36]

Berangkat dari data tentang komersialisasi pesantren dewasa ini, maka dapat dibenarkan kesimpulan Irwan Abdullah bahwa era kini ditandai dengan proses estetisasi kehidupan, yakni menguatnya kecenderungan hidup sebagai proses seni. Produk yang dikonsumsi tidak dilihat dari fungsi tetapi dari simbol yang berkaitan dengan identitas dan status.[37] Pada saat kecenderungan ini terjadi esensi kehidupan menjadi tidak penting karena sebagai sebuah seni kehidupan itu memiliki makna keindahan sehingga yang dihayati dari hidup itu adalah citra.[38] Apa yang jelas terlihat adalah pergeseran hidup dari proses etis ke estetis. Selain itu, hal ini menunjukkan tanda terjadinya pergeseran masyarakat yang cukup mendasar yang merupakan tanda dari pembentukan etos kehidupan yang berbeda di mana etos konsumtif (simbolis) menjadi jauh lebih penting dari pada etos produktif. Dengan demikian, yang dikonsumsi dalam hal ini bukan kwalitas pesantren itu sendiri tetapi citra pesantren sebagai suatu sistem simbol.

Secara historis, sebelum mengalami persentuhan dengan modernisasi, pondok pesantren sebagaimana digambarkan Hurgronje

---

[36]Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994, 23 dan 133.

[37]Irwan Abdullah, "Market, Consumption, and Lifestyle Management," makalah yang disampaikan dalam *International Seminar on Social and Cultural Dimension of Market Expansion*. Batam, 3-5 Oktober 1994, 22.

[38]Irwan Abdullah, Konstruksi dan Reproduksi, 114.

merupakan bangunan berbentuk persegi terbuat dari bambu atau kayu. Tangga pondok dihubungkan ke sumur oleh sederet batu-batu titian, sehingga santri dapat mencuci kakinya sebelum naik ke pondoknya. Pondok yang sederhana hanya terdiri dari ruangan besar yang didiami bersama. Terdapat juga pondok yang agak sempurna di mana didapati sebuah *gang* (lorong) yang dihubungkan oleh pintu-pintu kamar santri yang pintunya sempit.[39] Tempat belajar mengaji para santri juga sekedar ruangan besar yang tidak ada bangku dan kursinya, bahkan kadang tidak ada juga papan tulisnya. Karena memang sistem pendidikan di pesantren adalah mengkaji kitab kuning dengan sistem pembacaan oleh kyai dan santri mendengarkannya.

Berbeda dengan apa yang dideskripsikan oleh Hurgronje, dewasa ini keberadaan pondok pesantren sudah mengalami perkembangan sedemikian rupa hingga berbagai fasilitasnya semakin lama semakin bertambah dan dilengkapi termasuk dengan berbagai laboratorium canggih. Kelengkapan fasilitas tersebut berbeda-beda di antara pesantren yang satu dengan yang lain. Ada pesantren yang secara lengkap dan memiliki sejumlah besar fasilitas, dan ada pesantren yang hanya memiliki fasilitas dalam jumlah yang kecil dan tidak lengkap. Biasanya, kelengkapan fasilitas tersebut berkorelasi positif dengan jumlah pembayaran yang harus ditanggung oleh santri.

Di samping itu, modernisasi di dunia pesantren juga mempunyai pengaruh terhadap bergesernya tradisi dan melunturnya beberapa prinsip yang dipegangi dalam sistem pendidikan pesantren. Dengan banyaknya aktivitas yang harus diikuti, santri kehabisan waktu untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dapat melatih hidup sederhana, mandiri, dan kesetiakawanan; seperti memasak makanan, makan bersama-sama, mencuci pakaian, dan menyeterikannya sekaligus. Dewasa ini, berbagai aktivitas yang melatih kemandirian ini sudah jarang dilakukan di berbagai pesantren besar, bahkan untuk makanpun sekarang sudah banyak yang dikelola oleh pesantren. Hal terakhir ini setidaknya disebabkan oleh dua hal, pertama, semakin padatnya jadwal kegiatan yang harus dilakukan oleh santri sebagaimana dijelaskan di atas, dan yang kedua, kebanyakan pengelolaan makan santri dapat mendatangkan margin keuntungan yang relatif tinggi. Fenomena ini berbeda dengan

---

[39]Abu Bakar Atjeh, *Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar*. Jakarta: Panitia Peringatan Almarhum KH. A. Wahid Hasyim, 1957, 173.

yang terjadi di pesantren induk Lirboyo yang masih mengusung tradisi pesantren salafiyah, di mana seluruh kebutuhan santri dikerjakan sendiri-sendiri seperti memasak dan mencuci pakaian.

Di samping itu, pembaruan juga memunculkan pola hidup dan orientasi belajar yang pragmatis. Belajar atau nyantri dengan target-target praktis tertentu, seperti orientasi ekonomi, kedudukan sosial, dan lain-lain. Oleh karena itu, prinsip keikhlasan dan pengabdian dalam sistem pendidikan pesantren mulai bergeser dari posisinya yang semula demikian kukuh. Padahal, selama ini keikhlasan dianggap sebagai faktor yang menentukan keberhasilan santri. Sebagaimana dijelaskan oleh KH. MA. Fuad Hasyim, alumnus Pesantren Lirboyo tahun 1958, bahwa pesantren menekankan kepada keikhlasan niat yang mendatangkan barokah, pengalaman, dan penghayatan penuh terhadap ajaran Islam, do`a dan kepasarahan total terhadap Allah. Secara dramatis, KH. Fuad Hasyim mempertanyakan faktor yang menentukan keberhasilan pesantren dalam mengantarkan santrinya menjadi ulama yang mumpuni. Dalam hal ini, dia mempertanyakan, ”apakah metode kyai yang canggih? apakah sistemnya yang *jempolan*?” Dia memberi jawaban, ”Tidak. Malah saya cenderung yakin kyai tidak pernah mengerti apa itu sistem, metode, saya juga menduga kyai tidak pernah mempedulikan semuanya.”[40]

Di samping itu, sebagaimana dijelaskan, bahwa pembaruan pendidikan di pesantren ini berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah santri. Ketika jumlah santri semakin meningkat, berbagai proses pembelajaran dan pendidikan lebih banyak ditangani oleh guru, yang dalam istilah Pesantren Lirboyo disebut mustaḥiq dan munawwib, daripada dikelola oleh kyai. Di samping itu, etos kerja dan disiplin yang dilaksanakan oleh guru madrasah diniyah walau mereka hanya mendapatkan honor yang kecil mengakibatkan ketaatan dan ketundukan santri kepada gurunya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan kyainya. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya strata ekonomi kyai karena meningkatnya berbagai pembayaraan, baik untuk pendidikan, kebutuhan sehari-hari, maupun yang atas nama jariyah wajib mengakibatkan posisi kharismatik kyai dipermasahkan. Hal yang terakhir ini disebabkan terjadinya sesuatu yang bertolak belakang antara sistem nilai kesederhanaan yang sering diajarkan dengan realita kehidupan.

---

[40]Ahsin Sakho Muhammad, “Renungan seorang santri terhadap almamaternya,” dalam Ch. Nur Siddiq, *Buku Pijar,* 87-88.

2. Terhadap Alumni

Sebagaimana dijelaskan bahwa pesantren induk sampai sekarang bersikukuh hanya menyelenggarakan madrasah diniyah, yaitu MHM. Untuk meningkatkan kwalitas santrinya, berbagai pembaruan telah dilakukan oleh madrasah ini. Implikasi corak pembaruan ini terhadap alumninya digambarkan secara baik oleh Ahsin Sakho Muhammad, alumnus 1973. Menurutnya, walaupun MHM dianggap telah berhasil mengantarkan peserta didiknya untuk menguasai gramatika Arab, naḥwu dan ṣaraf, tetapi penggunaan ilmu secara komprehensip kurang terpikir. Ini dapat dilihat bahwa santri Lirboyo lebih banyak menggunakan ilmu naḥwu dan ṣaraf untuk memahami literatur klasik yang biasa disebut kitab kuning dan tidak memanfaatkannya untuk muḥādaṡah. Padahal, era globalisasi membutuhkan skill itu. Di samping itu, struktur kitab kuning yang khas terkadang banyak mempengaruhi santri ketika berbahasa Indonesia. Hal ini terkadang menyulitkan masyarakat untuk mengetahui apa yang semestinya dimaksud oleh santri tersebut.[41]

Gambaran Ahsin tersebut memperlihatkan dua model implikasi, yang positif dan negatif. Implikasi positif yang ditimbulkan adalah MHM dapat mengantarkan alumninya untuk menguasai naḥwu dan ṣaraf, sebagai ilmu alat dan memanfaatkannya untuk mendalami kitab kuning. Di samping itu, Ahsin juga merasakan bahwa MHM tidak mempersiapkan siswanya untuk menggunakan ilmu naḥwu, ṣaraf, dan bahasa arab itu untuk muḥādaṡah.

Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Pesantren ar-Risalah dan al-Mahrusiyah. Dengan mengangkat guru alumni dari Pesantren Gontor dan Timur Tengah, pesantren ini memberi penekanan penggunaan Bahasa Arab sebagai media muḥādaṡah. Tidak hanya, itu Pesantren ar-Risalah juga memiliki guru bantu dari Konjen Australia, Mark, untuk mengajar Bahasa Inggris, dan dari Republik Rakyat Tiongkok, Su Chuang, untuk mengajar Bahasa Mandarin.

Di samping itu, alumni dari al-Mahrusiyah dan ar-Risalah, termasuk MA MHM setelah diadakan mu`adalah dimungkinkan untuk studi lanjut dan memasuki berbagai pekerjaan dalam sektor formal. Selama ini, kebanyakan alumni pesantren salaf memasuki pekerjaan seperti petani,

---

[41]Narjohn Najich Afnany, 1994. *Le Azm.* Kediri: Tamatan Madrasah Aliyah MHM. xii-xiii.

pedagang, da'i, pengajar swasta, sekarang ini mereka dapat memasuki sektor lainnya yang membutuhkan ijazah formal.

3. Terhadap Lembaga Pendidikan yang Lebih Tinggi

Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program studi ilmu-ilmu keislaman semestinya mandapatkan implikasi positif manakala dapat menarik minat tamatan pesantren ini untuk menuntut ilmu di lembaganya. Sebagaimana diketahui bahwa pemahaman terhadap pemikiran ulama, yang kebanyakan termaktub dalam kitab kuning, sangat dibutuhkan untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman. Mengharapkan alumni madrasah yang berkurikulum Departemen Agama untuk mendalami kitab kuning hampir tidak dimungkinkan.

Sayangnya, karena alasan birokrasi, perguruan tinggi agama Islam (PTAI) dalam waktu yang relatif lama menolak mereka untuk masuk karena tiada ijazah yang dianggap setara dengan madrasah yang berafiliasi dengan kurikulum Departemen Agama. Kebijakan ini, sebagaimana telah dijelaskan, mengakibatkan PTAI dianggap gagal untuk mencetak ulama.

Pada sisi yang lain, lembaga pendidikan lainnya, seharusnya juga mendapatkan keuntungan, dikarenakan santri terbiasa untuk belajar secara disiplin selama di pesantren. Sebagai perbandingan, ketika Direktorat Pendidikan Islam memberikan fasilitas kepada alumni madrasah aliyah untuk meneruskan studi ke berbagai perguruan tinggi yang dianggap prestisius di negeri ini, ternyata prestasi akademik alumni pesantren tersebut sangat membanggakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Jahja Umar, mantan Dirjen Pendidikan Islam, dalam berbagai kesempatan.[42]

4. Terhadap Masyarakat

Masyarakat, utamanya yang mempunyai kesamaan kultur dengan pesantren, mendapatkan keuntungan dari pembaruan pesantren ini yang masih mempertahankan madrasah diniyah. Dengan berubahnya orientasi menuntut ilmu dari pesantren menjadi sekolah, mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak siap untuk melestarikan tradisinya. Sebagai contoh, masyarakat yang mempunyai tradisi tahlilan, barzanji, yasinan,

---

[42]Disampaikan ketika memberikan pelatihan dalam acara Pelatihan Metodologi Penelitian Sosial Keagamaan di CRCS-UGM Yogjakarta.

akan mendapatkan kesulitan ketika sebagian dari anggota masyarakatnya tidak ada yang belajar di pesantren.

Selain itu, bertahannya madrasah diniyah, juga menjamin tersedianya tenaga yang siap mengajar al-Qur'an, ṣalat, dan memberikan pengajian pada lapisan masyarakat yang paling bawah sekalipun, termasuk menjadi petugas yang menghidupkan dan menyemarakkan masjid, baik menjadi imam, muażin, khaṭīb, maupun makmum. Sebagaimana dijelaskan di depan, bahwa hilangnya institusi surau sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam di Minangkabau mengakibatkan terjadinya masjid tidak jadi melaksanakan ṣalat jum`at karena tiadanya orang yang siap menjadi khaṭib. Hal yang disebutkan terakhir ini dimungkinkan tidak terjadi selama madrasah diniyah dapat bertahan hidup dan berkembang.

Apabila sistem nilai keikhlasan dan pengabdian dapat dipertahankan sampai ketika santri terjun ke masyarakat, maka masyarakat akan mendapat keuntungan karena akan mendapatkan anggota masyarakat yang penuh pengabdian. Akan tetapi kalau realitas kehidupan ekonomi kyai yang dijadikan barometer, maka keberadaan komunitas santri tersebut tidak akan ada artinya. Oleh karena itu, KH. Ma`ruf Zainuddin dan Hj. Aina Ainaul Mardliyyah, pengasuh Pesantren Salafiy Terpadu ar-Risalah mempersiapkan santrinya untuk dapat menduduki posisi, utamanya pada sektor formal, seperti perbankan, akademik, politik, dan dapat mewarnai dengan kehidupan yang islami, dengan penuh pengabdian dan keikhlasan.[43] Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pesantren Salafiy Terpadu ar-Risalah, di samping menyelenggarakan lembaga pendidikan SD, SMP, dan SMA ar-Risalah, juga memberikan contoh kehidupan yang sederhana. Sejauh pengamatan dalam observasi ini, kehidupan keseharian KH. Ma`ruf Zainuddin dan Hj. Aina Ainaul Mardliyah secara pribadi terlihat sederhana, walaupun pesantrennya terlihat megah dan mewah. Hal ini dimaksudkan agar santri mendapatkan contoh langsung dari kehidupan pengasuh pesantren untuk diterapkan di masyarakat kelak.

---

[43] Wawancana dengan KH. Ma`ruf Zainuddin pada tanggal 7 Nopember 2006.

BAB VII
PENUTUP

Pada bab terakhir ini disajikan kesimpulan yang berisi jawaban terhadap masalah penelitian dan saran-saran.

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa bertahannya lembaga pendidikan tradisional di Pesantren Lirboyo yaitu Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadi'in ketika dihadapkan dengan lembaga yang lebih modern, yaitu MTs dan MA HM Tribakti al-Makhrusiyah dan SD, SMP, dan SMA ar-Risalah dikarenakan tiga hal. Pertama, lembaga pendidikan tradisional ini masih sesuai dengan kecenderungan sosio-kultural komunitas lingkungannnya, yaitu masyarakat yang menganggap berfaham Ahlus Sunnah wal Jama`ah. Kedua, lembaga pendidikan tradisional tersebut telah berhasil mengantarkan santrinya untuk menguasai kitab kuning yang dianggap sebagai ilmunya ulama salaf yang dipercayai kebenarannya. Ketiga, dikarenakan tradisi dan norma yang dikembangkan lembaga tradisional tersebut memungkinkan lestarinya kharisma kyai, maka lembaga pendidikan tradisional tersebut dipertahankan.

Berbagai fungsi lembaga pendidikan tradisional di Pesantren Lirboyo yang menjadikannya eksis ini dapat diketahui dari berbagai proses pembaruan berbagai aspek pendidikan, faktor-faktor yang mempengaruhi pembaruan, dan implikasi pembaruan tersebut yang kesimpulannya sebagai berikut.

1. Proses pembaruan pendidikan di Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien diawali dengan didirikannya MTs dan MA HM Tribakti pada tahun 1986 sebagai aplikasi dari visi bahwa menuntut ilmu tidak hanya untuk melaksanakan kewajiban tetapi juga untuk mempersiapkan kemampuan dan keahlian dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan masyarakat,

dan dunia kerja. Oleh karena itu, pembaruan pendidikan di pesantren ini menggunakan paradigma liberal, karena paradigma ini berusaha menyesuaikan pendidikan dengan keadaan ekonomi dan politik di luar dunia pendidikan. Pendidikan dimaksudkan sebagai media untuk mensosialisasikan dan mereproduksi nilai-nilai tata susila keyakinan dan nilai-nilai dasar agar masyarakat luas berfungsi secara baik. Sebelumnya, Pesantren Lirboyo melalui MHMnya hanya melakukan pembaruan dengan cara mengorientasikan pendidikannya untuk adaptasi terhadap kecenderungan masyarakat santri, meningkatkan kwalitas lulusan, dan mempertahankan ciri khas dengan mengabaikan berbagai kemudahan yang diberikan oleh berbagai kebijakan pemerintah. Sementara kedua pesantren lainnya, di samping tetap mempertahankan ciri khas Pesantren Lirboyo yang tradisional dengan menekankan pada pendidikan diniyah juga menyelenggarakan lembaga pendidikan yang memberi kesempatan alumninya untuk studi lanjut dan mendapatkan pekerjaan pada sektor formal.

2. Tetap bertahannnya lembaga pendidikan diniyah dan dibukannya lembaga pendidikan lainnya dipengaruhi oleh latar belakang kyai pendiri dan penerus yang seluruhnya alumni pendidikan diniyah, sistem nilai ahlus sunnah wal jama`ah yang menekankan mempertahankan hal-hal lama yang baik. Sementara dibukanya lembaga pendidikan lainnya disebabkan tuntutan masyarakat dan dunia kerja serta pengalaman pendidikan pendirinya.
3. Implikasi pembaruan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri adalah dapat dipertahankan fungsi utama pesantren, yaitu transmissi dan tranfer ilmu pengetahuan Islam, pemeliharaan tradisi Islam, dan penciptaan kader-kader ulama. Dengan dibukanya lembaga-lembaga pendidikan lainnya dan diterima mu`adalah memungkinkan alumni pesantren tersebut untuk berkiprah tidak hanya pada sektor informal tetapi juga pada sektor formal. Di samping itu, pembaruan pendidikan di pesantren Lirboyo juga mempunyai implikasi terhadap perubahan fungsi pendidikan menjadi semakin kuat, jumlah santri yang meningkat, meningkatkan strata ekonomi pengasuh dan żuriyahnya, pergeseran tradisi dan kebiasaan santri, dan berubahnya relasi antara santri dengan guru dan antara santri dengan kyainya.

B. Saran-saran

Dalam rangka mengoptimalkan hasil pembelajaran pada madrasah diniyah yang menjadi ciri khas Pesantren Lirboyo, maka materi pelajaran yang memungkinkan santri dapat berfikir kritis, logis, dan kontekstual

perlu diberikan. Pembelajaran Bahasa Arab yang selama ini hanya dimanfaatkan santri untuk menguasai kitab kuning perlu diperluas dengan menggunakannya untuk muhadasah.

Di samping itu, pembaruan disarankan tidak hanya dilakukan dalam ranah proses pembelajaran yang memungkinkan out put pesantren siap berkompetisi dalam persaingan lokal maupun gelobal, tetapi pembaruan dalam hal manajemen lembaga pesantren perlu dilakukan agar lebih efektif dan efisien.

Dikarenakan Pesantren Lirboyo dianggap berhasil mempertahankan pendidikan Islam tradisional di tengah berbagai lembaga pendidikan yang dimodernisir, maka pengelola pendidikan lain yang ingin mempertahankan fungsi utama lembaga pendidikan ini yaitu trasmissi ilmu pengetahuan keislaman, pemeliharaan tradisi Islam, dan penciptaan kader-kader ulama maka dapat menjadikan pembaruan pendidikan di Pesantren Lirboyo sebagai model, minimal perbandingan.

DAFTAR PUSTAKA

Abaza, Mona, *Islamic Education Perceptions and Exchanges: Indonesia Students in Cairo,* Paris: Association Archipel, 1994.

Abdillah, Masykuri, dan Mastuki HS, “Pendidikan Satu Atap,” dalam *http://64.203.71.11/kompas-cetak/0003/18/opini/pend04.htm*, diakses tanggal 12 Maret 2008.

Abdullah, Irwan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif,* Yogjakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2007.

__________, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan,* Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2006

__________, “Market, Consumption, and Lifestyle Management,” makalah yang disampaikan dalam *International Seminar on Social and Cultural Dimension of Market Expansion,* Batam, 3-5 Oktober 1994.

Abdullah, Taufik, "Pengantar: Islam, Sejarah, dan Masyarakat", dalam Taufik Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia,* Jakarta: Firdaus, 1987.

__________, “The Pesantren in Historical Perspective,” dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (Ed.), *Islam and Society in Soutest Asia,* Singapura: ISEAS, 1987.

Adams, Don, *Education and Modernization,* Reading, Mass,: Addison-Wesley Publishing Co. & Pittsburg University, 1970.

Afnany, Narjohn Najich, *Le Azm,* Kediri: Tamatan Madrasah Aliyah MHM, 1994.

Aksit, Bahattin, “Islamic Education in Turkey: Medrese Reform in Late Ottoman Times and Imam-Hatip Schools in the Republic,” dalam Richard Tapper, *Islam in Modern Turkey: Religion, Politics, and*

Literature in a Secular State, London-New York: I. B. Tauris & Co. Ltd. Publisher, 1991.

Ali, A. Mukti, "Kurikulum Pondok Pesantren", Yogjakarta: Panitia Seminar Pondok Pesantren Seluruh Indonesia Tahap I, 1965.

__________, "Pondok Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional", Makalah seminar nasional pembangunan pendidikan dalam Islam: Surabaya: Pusat Studi Interdisipliner IAIN Sunan Ampel, 16-17 Januari 1984.

Anwar, Atho`illah Sholahuddin, *78 Tahun Pondok Lirboyo,* Kediri: Kelas III Aliyah MHM Lirboyo 1987-1988, 1987.

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian,* Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Arifin, Imron, *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng,* Malang: Kalima Sahada Press, 1993.

Asrohah, Hanun, *Pelembagaan Pesantren: Asal-usul dan Perkembangan Pesantren di Jawa,* Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Informasi Penelitian dan Diklat Keagamaan, 2004.

Assegaf, Abd. Rahman, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Proklamasi ke Reformasi*, Yogjakarta: Kurnia Kalam, 2005.

al-Asy`ari, Abū ah-Ḥasan `Ali ibn Isma`īl, *Maqālāt al-Islamiyyīn wa al-Ikhtilāf al-Muṣallīn,* Beirūt: Dār Ipyā' al-Turāth al-`Arabiy, tt.

Asy`ari, Zubaidi Habibullah, *Moralitas Pendidikan Pesantren,* Yogjakarta: PT. Kurnia Alam Semesta, 1996.

Atjeh, Abu Bakar, *Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar,* Jakarta: Panitia Peringatan Almarhum KH. A. Wahid Hasyim, 1957.

al-Azdi, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Ashats al-Sijistāni, *Sunan Abī Dāwud,* t.tp., Dār al-Fikr, t.t.

Azra, Azyumardi, *Pendidikan Agama Harus Rasional dan Toleran,* http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=226, diakses pada tanggal 24 Januari 2007.

__________, "Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan, dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan,* Jakarta: Paramadina, 1997.

__________, “Surau di Tengah Krisis: Pesantren dalam Perspektif Masyarakat”, dalam M. Dawam Rahardjo (Ed.), *Pergulatan Pesantren: Membangun dari Bawah.* Jakarta: P3M, 1985.

__________, dkk., *Ensiklopedi Islam,* Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1997.

__________, *Jaringan UlamaTimur Tangah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII,* Bandung: Mizan, 1995.

__________, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos, 2002.

__________, *Surau Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi,* Jakarta: Logos, 2003.

__________, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi,* Jakarta: Kompas, 2002.

al-Baiḍāwiy, *Tafsīr al-Baiḍāwiy,* Beirūt: Dār al-Fikr, 1996

Bakhtiar, Wardi, dkk., “Perkembangan Pesantren di Jawa Barat,” Bandung: Balai Penelitian IAIN Bandung, 1990

Barnadib, Sutari Imam, *Sejarah Pendidikan,* Yogjakarta: Andi Offset, 1983.

Benda, J., *the Cresent and the Rising Sun,* the Hague-Bandung, 1958.

Berg., C.C., “Indonesia”, dalam H. A. R. Gibb (Ed.), *Wither Islam? A Survey of Modern Movement in the Moslem World,* London: 1932.

BPK-P2L, *Tata Tertib Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jatim,* Kediri: BPK-P2L, 2002.

__________, *Tiga Tokoh Lirboyo: KH. Abdul Karim, KH. Marzuqi Dahlan, KH. Mahrus Aly,* Kediri: BPK-P2L,, 2006.

Bruinessen, Martin van, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat: Tradisi Islam di Indonesia,* Bandung, Mizan, 1995.

__________, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacanba Baru,* Terjemahan Farid Wajidi dari *Traditionalist Muslims in a Modernizing world: The Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Order Politics, Fictional Conflict, and the Search for a New Discourse,* Yogjakarta: LkiS, 1994.

al-Bukhāriy al-Ju`fiy, Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn Isma`īl Abū `Abdillah, *Khalq Af`āl al`Ibād,* Riyāḍ, Dār al-Ma`ārif al-Sa`ūdiyyah, 1978.

Chakim, M. Fikrie, *Lazuardi,* Kediri: Purna Siswa Kelas III Aliyah MHM Lirboyo, 2005.

Chaturperdi, M. dan Tiwari B. N., *A Practical Hindi-English Dictionary,* Delhi: Rashtraprinters, 1970.

Cowan J. Milten, (Ed.), *Hans Wehr, a Dictionary of Modern Written Arabic,* New York: t.p.

Dahlan, Abdul Aziz, *Sejarah Perkembangan dan Pemikiran dalam Islam,* Jakarta: PT Beunebi Cipta, 1987.

Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif,* Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman,* Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Dhofier, Zamakhsari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai,* Jakarta: LP3ES, 1983.

Dirjen Pendis, *Statistik Pendidikan Agama dan Keagmaan Tahun Pelajaran 2006-2007,* Jakarta: Dirjen Pendis Depag RI, 2007

Djumhur, I. dan H. Danasuparta, *Sejarah Pendidikan,* Bandung: Bina Ilmu, 1959.

Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia,* Jakarta: Gramedia, 1989.

"Education Reform," dalam *http://en.wikipedia.org/wiki/Education_reform*, dikases tanggal 11 Mei 2008.

Fakih, Mansour, "Ideologi dalam Pendidikan," dalam William F. O'neil, *Ideologi-ideologi Pendidikan,* Terjemahan Omi Intan Naomi dari *Educational Ideologies: Contemporary Expression of Educational Philosophies,* Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa,* Terjemahan Aswab Mahasin dari *The Religion of Java,* Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.

__________, "The Javanese Kijaji: the Changing Role of Cultural Broker", *Comparative Studies in Society and History,* 2 (2), 1960

Graaf, H.J. de dan Th. G. Th. Pigeud, *Kerajinan-kerajinan Islam pertama di Jawa: Kajian Sejarah Politik Abad ke-15 dan 16,* terjemahan oleh pustaka utama Grafiti dan KITLV dari *de Eerste Moslem Vorstendommen op Java: Studien over de staatkundige*

geschidenis van de 15 de en 16 de Eeuw, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989.

Graves, Elizabeth E., *The Minangkabau Respone to Dutch Colonial Rule in the Nineteenth Century*, New York: Cornell University, 1981.

Gunaryo, Ahmad, "Dualisme Pendidikan Madrasah," dalam Jamaluddin (Ed.), *Mendiskusikan Kembali Eksistensi Madrasah,* Jakarta: Logos, 2003.

Hamid, Abu, "Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan", dalam Taufik Abdullah (Ed.), *Agama dan Perubahan Sosial,* Jakarta: Rajawali Press, 1983.

Hamzah, Amir, *Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam,* Jakarta: Mulia Offset, 1989.

Harbison, F dan C. A. Myers, *Education, Manpower, and Growth Strategies of Human Resourses Development,* New York: McGraw Hill, 1964.

Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*¸Jakarta: Raja Wali, 1996.

Holt, P.M., dkk. (Ed.), *The Cambridge History of Islam,* Cambridge University Press, 1970.

Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial,* Jakarta: P3M, 1987.

ibn al-Jauzi, Abū al-Faraj Abd al-Raḥmān ibn Alī, *Al-Muntaẓam fi Tārīkh al-Mulūk wa al-Umam,* Hyderabad: Dā'irah al-Ma`ārif al-Usmaniyah, 1939.

ibn Taimiyah al-Ḥarani, Abū al-`Abbās Aḥmad Abd al-Halīm, *Kutub wa Rasā'il wa Fatāwā ibn Tamimiyyah fī al-Fiqh,* t.tp.: t.p, t.th.

Jabali, Fuad dan Jamhari (Ed.), *IAIN & Modernisasi Islam di Indonesia,* Jakarta: Logos, 2002.

Jary, David dan Julia Jary, *Collins Dictionary of Sociology,* Great Britarin: HarperCollins Publisher, 1991.

Kafrawi, *Pembaharuan Sistem Pendidikan Pondok Pesantren sebagai Usaha Peningkatan Prestasi Kerja dan Pembinaan Kesatuan Bangsa,* Jakarta: Cemara, 1976.

Kansil, C. S. T, *Mendalami P4, UUD 1945, dan GBHN,* Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985.

Langgulung, Hasan, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke-21,* Jakarta: Pustaka al-Husna, 1988.

Laporan Tahunan Pengurus Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur, 2007.

Lukens-Bull, Ronald A. "Pengajaran Moral: Pendidikan islam Masyarakat Jawa di Era Globalisasi," Makalah, t.th.

Ma`shum, *Ajakan Suci*, Yogjakarta: LTN-NU-DIY, 1995.

Madjid, Nurcholish, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997.

Mahfudh, MA. Sahal, *Pesantren Mencari Makna*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.

Makdisi, George, *The Rise of Colleges: Institution of Learning in Islām and the West*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981.

Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos, 1999.

Marimba, Ahmad D., *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: al-Ma`arif, 1989.

Mas`ud, Abdurrahman, *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi*, Terjemahan dari *The Pesantren Architects and Their Socio-Religious Teaching*, Yogjakarta: LkiS, 2004.

_________, *Menuju Paradigma Islam Humanis*, Yogjakarta: Gama Media, 2003.

Mas'udi, Masdar Farid, *Direktori Pesantren*, Jakarta: P3M, 1986.

Mashud, Mustain, "Perubahan Sosial," dalam J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanti (Ed.), *Sosiologi: Teks Pengantar danTerapan*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994.

Mestoko, Sumarsono, dkk., *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

MHM, *Hasil Sidang Panitia Kecil Tahun Pelajaran 2006-2007*, Kediri: MHM, 2006

__________, *Hasil Sidang Presedium Kwarta MHM Lirboyo Kediri Tahun Pelajaran 1427-1428 H/2006-2007 M*, Kediri: MHM, 2007.

MHM, *HSPK Tahun Pelajaran 1427-1428 H./2006-2007 M.*, Kediri: MHM, 2007.

Moelong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Moertopo, Ali, *Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS, 1981.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Yogjakarta: Rake sarasin, 1996.

Muhammad, Husein, "Kontektualisasi Kitab Kuning: Tradisi Kajian dan Metode Pengajaran," dalam Marzuki Waghid dkk. (Ed.), *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren,* Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

Muin, Abdul, dkk, **"**Survey Tipologi Pondok Pesantren Dalam Pemenuhan Pelayanan Pendidikan Keagamaan Bagi Masyarakat" dalam *http://www.depag.web.id/research/pendidikan/403,* diakses tanggal 12 Maret 2008.

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia,* Yogjakarta: Pustaka Progressif, 1984.

Munhanif, Ali, "Prof. Dr. A. Mukti Ali: Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru," dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam, *Menteri-menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik,* Jakarta: INIS, 1998.

al-Naisāburi, Muḥammad ibn \`Abdillāh Abū Abdillāh al-Ḥākim, *al-Mustadrak \`Alā aṣ-Ṣaḥiḥain,* Beirūt: Dār al-Kutub al-\`Ilmiyah, 1990.

Nasir, M. Ridlwan, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di tengah Arus Perubahan,* Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah, Pemikiran, dan Gerakan,* Jakarta: Bulan Bintang, 2003.

_________, *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa dan Perbandingan,* Jakarta: UI Press, 1986.

Nasution, S., *Sejarah Pendidikan Indonesia,* Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Nata, Abuddin, "Konsep Pendidikan Ibn Sina, *Disertasi,* Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.

_________, *Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia,* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

_________, "Tantangan dan Peluang Mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI) di Era Globlalisasi," Makalah disampaikan pada acara orasi ilmiah pada tanggal 22 Nopember 2007 di STAIN Kediri.

Nawawi, Hadari, *Perundang-Undangan Pendidikan,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900~1942,* Jakarta: LP3ES, 1995.

Nugroho, Heru, "Rasionalisasi dan Pemudaran Pesona Dunia: Pengantar untuk Max Weber," dalam Ralph Schroender, *Max Weber tentang Hegemoni Sistem kepercayaan,* diterjamahkan Ratna Noviani dari *Max weber and the Sociology of Culture,* Yogjakarta: Kanisius, 2002.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Dirjen Dik Is Depag RI. 2007.

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah, Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pontren Dirjen Dik Is Depag RI, 2006.

Poerbakawatja, Soegarda, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka,* Jakarta: Gunung Agung, 1970.

Putra, Heddy Shri Ahimsa, "Paradigma, Epistemologi, dan Metode Ilmu Sosial Budaya: Sebuah Pemetaan," Makalah disampaikan dalam pelatihan "Metodologi Penelitian", diselenggarakan oleh CRCS-UGM, di Yogjakarta, 12 Februari – 19 Maret 2007.

al-Qardhawy, Yusuf, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna,* Terjemahan Bustami A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad dari *al-Tarbiyah al-Islāmiyah wa Madrasah Ḥasan al-Bannā,* Jakarta: Bulan Bintang.

al-Qurṭubiy, Abū Abdillah Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr ibn Farḥ, *al-Jāmi` li Aḥkām al-Qur'ān,* Kairo: Dār al-Sy`b, 1372 H..

Rahim, Husni, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005.

Prasodjo, Sudjoko, *Profil Pesantren: Laporan Hasil Penelitian Pesantren Al-Falah dan Delapan Pesantren di Bogor,* Jakarta: LP3ES, 1974.

Rahardjo M. Dawam, (Ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah.* Jakarta: P3M, 1985.

_________, "Dunia Pesantren dalam Peta Pembaharuan", dalam M. Dawam Rahardjo (Ed.), *Pesantren dan Pembaharuan.* Jakarta: LP3ES, 1995.

Ras, J.J., *Babad Tanah Jawi*, Dordrecht: zforis Publications, 1987.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Terjemahan Alimandan dari *Modern Sociological Theory*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Romadlon, M., *Aura*, Kediri: Purna Siswa III Aliyah MHM Lirboyo, 2004.

Sarana Pelaksanaan Kurikulum Baru Madrasah Negeri, Jakarta: Proyek Penelitian Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 1975/1976.

Saridjo, Marwan, dkk., *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia.* Jakarta: Darma Bhakti, 1983.

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik (Ed.), *Kota Kediri dalam Angka 2005/2006*, Kediri: BPS Kota Kediri, 2006.

al-Shaibāni, Aḥmad ibn Ḥanbal abū `Abdillah, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Mesir: Muassasat al-Qurthubah, t.t., 6 Jilid.

Shaleh, Abdurrahman, *Penyelenggaraan Madrasah: Peraturan Perundangan*, Jakarta: Dharma Bhakti, 1984.

Stake, Robert E.,"Case Studies," dalam Norman K. Denzin dan Yvovva S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publication Ltd., 2000

al-Sya`rānī, Abd al-Wahhāb, *al-Anwār al-Qudsiyah fî Ma`rifati al-Ṣūfîyah,* Jakarta: Dinamika Berkah Utama, t.th.

Siddiq, Ch. Nur, *Buku Pijar*, Kediri: Kelas III Aliyah MHM Lirboyo, 1996.

Sirozi, Muhammad, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989*, Jakarta: INIS, 2004.

Soetari, Endang AD, "Sistem Kepemimpinan Pondok Pesantren," Bandung: Balai Penelitian IAIN Bandung, 1987.

Sofia, Aya, *Pedoman Penyelenggaraan Pusat Informasi Pesantren*, Jakarta: Depag., 1986.

Sonhadji, Ahmad, "Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian Kualitatif," dalam Imron Arifin (Ed.), *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, Malang: Kalimasahada Press.

Steenbrink, Karel A., *Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*, Jakarta: LP3ES, 1986.

Stibbi, D. G., *Encyclopedia van Nederlandsh Indie,* Vol. III, Leiden: Martinus Nijhoff, 1919.

al-Subkī, Abū Nasr Abd al-Wahhāb ibn Taj al-Dīn, *Tabaqāt al-Syāfi`iyah al-Kubrā.* Kairo: al-Maṭba`ah al-Ḥusainiyyah, 1349/1931.

Sumardi, Muljanto, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia 1945-1975,* Jakarta: LPIAK Balitbang Agama Depag, 1977.

Sunyoto, Agus, "Ajaran Tasawuf dan Pembinaan Sikap Hidup Santri Pesantren Nurul Haq Surabaya: Studi Kasus, Tesis tidak dipublikasikan, Malang: FPS IKIP, 1989.

Syarif, Mustafa, *Administrasi Pesantren,* Jakarta: Daryu Barkah, 1984.

al-Syarwaniy, Abd al-Ḥamīd, *Ḥawāsyi al-Syarwāniy,* Beirūt: Dār al-Fikr, t.th.

Sztompka, Piötr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Terjemahan Alimandan dari *the Sociology of Social Change*, Jakarta: Prenada, 2005.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Wahid, Abdurrahman, "Pesantren sebagai Subkultur," dalam M. Dawam Rahardjo (Ed.), *Pesantren dan Pembaruan,* Jakarta: LP3ES, 1995.

_________, "Principles of Pesantren Education," dalam Manfred Oepen dan Wolfgang Karcher (Ed.), *The Impact of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia,* Jakarta: P3M, 1988.

Voll, John O., "Pembaharuan dan Perubahan dalam Sejarah Islam: Tajdid dan Islah," dalam John L. Esposito (Ed.), *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses, dan Tantangan,* Terjemahan Bakri Siregar dari *Voices of Resurgent Islam,* Jakarta: Rajawali, 1987.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwwah,* Bandung: Mizan, 1994.

Yin, Robert K., *Studi Kasus: Desain dan Metode,* Terjemahan M. Djauzi Mudzakir dari *Case Study Research: Design and Methods,* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,* Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995.

Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Yogjakarta: Tiara Wacana, 1992.

Zarkasyi, KH. Imam, "Perkembangan dan Peranan Pondok Pesantren," Ponorogo: Panitia Penataran Wartawan di Pesantren Gontor, 1974.

Zarnuji, *Ta`līm al-Muta`allim,* Kudus: Menara Kudus, 1963.

Zen, Moh. Aliyah, *3/4 Abad Pesantren Lirboyo*, Kediri: Siswa Kelas III Aliyah MHM Lirboyo 1984-1985, 1985.

Ziemek, Manfred, *Pesantren dalam Perubahan Sosial,* terjemahan Butche B. Soendojo dari *Pesantren Islamische Bildung in Sozialen Wandel*, Jakarta: P3M, 1983.

Zuhri, Saifuddin, *Berangkat dari Pesantren,* Jakarta: Gunung Agung, 1987.

Lampiran 1

STRUKTUR
BADAN PEMBINA KESEJAHTERAAN PESANTREN LIRBOYO
KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
PERIODE 1427-1428 H./2006-2007 M.

Ketua	: KH. A. Idris Marzuqi
Sekretaris	: KH. M. Abd. Aziz Manshur
	KH. A. Habibulloh Zaini
Anggota	: KH. M. Anwar Manshur,
	KH. Imam Yahya Mahrus,
	KH. Abdullah Kafabihi Mahrus,
	KH. Thohir Marzuqi,
	K. Rofi'i Ya'qub,
	KH. Maftuh Basthul Birri,
	KH. A. Mahin Thoha,
	KH. Bahrul Ulum Marzuqi,
	KH. Hasan Zamzami Mahrus,
	KH. An'im F. Mahrus,
	KH. Athoillah S. Anwar,
	KH. Nur Hamid Zainuri,
	K. Nurul Huda Ahmad,
	Agus Zainal Abidin,
	K. Abdul Kholiq Ridlwan,
	Agus H. Ali Ya'lu Wala Yu'la Alaih.[1]

[1] *Laporan Tahunan Pengurus Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur*, 2007, 56.

Lampiran 2

BAGAN

PENGURUS PESANTREN LIRBOYO KEDIRI

Lampiran 3
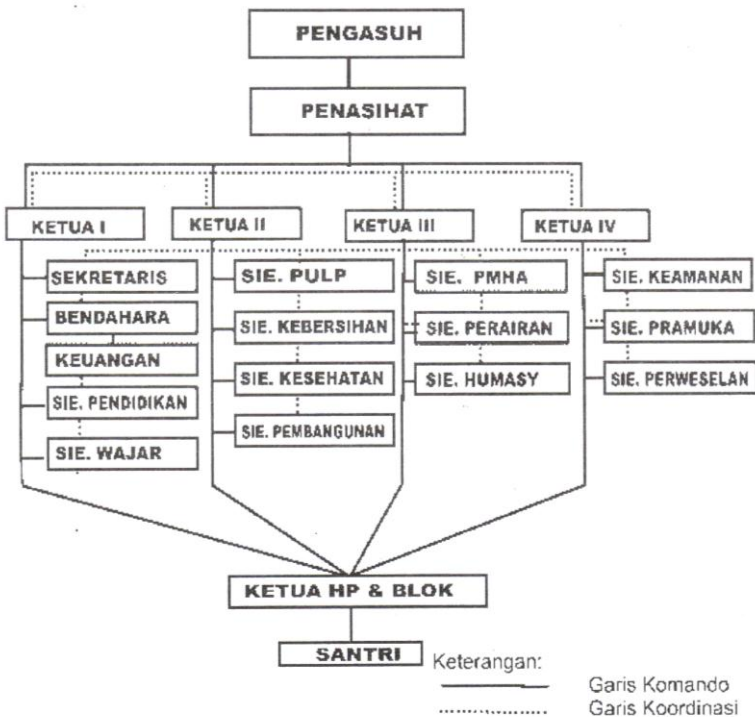
STRUKTUR
PERSONALIA PENGURUS PESANTREN LIRBOYO
KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
Periode: 1427-1428 H./2006-2007 M.

I. DEWAN PENYANTUN

a. Pengasuh : KH. A. Idris Marzuqi,
KH. M. Anwar Manshur,
KH. Abduloh Kafa Bihi Mahrus.

b. Penasehat : KH. Abd. Aziz Manshur,
KH. Imam Yahya Mahrus,
K. Rofi'i Ya'qub,
KH. Maftuh Basthul Birri,
KH. M. Thohir Marzuqi,
KH.A. Habibulloh Zaini,
KH. Bahrul Ulum Marzuqi,
KH. A. Mahin Thoha,
KH. Hasan Zamzami Mahrus,
KH. An'im F. Mahrus,
KH. Athoillah S. Anwar,
KH. Nur Hamid Zainuri,
KH. Nurul Huda Ahmad,
Agus Zainal Abidin,
K. Abdul Kholiq Ridlwan,
Agus H. Ali Ya'lu Wala Yu'la Alaih.

II. DEWAN HARIAN

Ketua 1	:	M. Rodli Sutrisno M.Pd.l (Pekalongan)	D.08
Ketua II	:	Agus M. Ibrahim Hafidz (Kediri)	A.01
Ketua III	:	M.MukhlasNur(Malang)	J. 13
Ketua IV	:	M.Jawahir (Lampung)	L 15
Sekretaris I	:	Abd. Mu'izz Manan (Indramayu)	N.05
Sekretaris II	:	Khozinul Minan (Ngawi)	1.20
Sekretaris III	:	M. Romdloni (Ponorogo)	J.02
Sekretaris IV	:	M. Badri Abdul Ghoni (Cirebon)	LOS

Keuangan I	:	Abdurrofi' Haroen (Banyuwangi)	A.10
Keuangan II	:	Rohim Pamuji (Tulungagung)	0.08
Bendahara	:	Imam S. Arifin (Kediri)	C.14

III SEKSI-SEKSI

a. Seksi Pendidikan dan Penerangan

No.	Nama	Asal	Kamar
1.	Shonhaji (kasi)	Kediri	1.12
2.	Masyhudi Alwy	Nganjuk	H. 04
3.	A. Rofiq	Salatiga	B. 02
4.	M. Maftuh	Kediri	1.08
5.	Abdul Mu'izz Muhajir	Kediri	K.07
6.	HM. Kholidul Wafa	Kendal	D.02
7.	M.Jazuli	Tegal	M.12
8.	Subhan Jazuli	Brebes	H.20
9.	Yusri Sulthon Amin	Temanggung	M.12
10.	Rofi'Addaroini	Kediri	B.04
11.	M. Hanif	Demak	S.06
12.	Muhsin Efendi	Nganjuk	F.18
13.	Khotibul Umam Maftuh	Lirboyo	Dim

b. Seksi Pramuka

No.	Nama	Asal	Kamar
1.	Chairul Anam (Kasi)	Kendal	E. 02
2.	M. Syarif Hidayatullah	Indramayu	T. 04
3.	Yasin Bahriyanto	Kediri	C. 14

c. Seksi Kebersihan

No.	Nama	Asal	Kamar
1.	Miftahun Ni'am (Kasi)	Kendal	B. 05
2.	M. Jawaji	Bantul	B. 16
3.	Lum'atul Ma'arif		

d. Seksi Perweselan

No.	Nama	Asal	Kamar
1.	Imam Hasan Asy'ari (Kasi)	Kendal	S. 11
2.	Heryudi Abd. Shomat	Bengkulu	A.11
3.	Hirzul Iman	Jambi	N
4.	H. Najman Latif Hamami	Malang	A.11

e. Seksi Pengairan

No.	Nama	Asal	Kamar
1.	Imam Busyro (Kasi)	Sumatra	N. 11
2.	Baidlowi	Jombang	Q. 11

3.	Syamsul Mu'in	Sumsel	Kantor
4.	M. Khoiron	Mojokerto	Kantor
5.	Ahmad Sugianto	Kediri	B.05

f. Seksi PMHA

1.	Darul Muntaha (Kasi)	Blitar	Aula
2.	Syamsul Adzhan	Kediri	K. 07
3.	A. Tajul Arifin	Tulungagung	Aula
4.	Ahmad Khoiri	Blitar	Aula

g. Seksi Pembangunan

1.	A. Zainuri (Kasi)	Malang	P. 01
2.	Sutrisno	Malang	P.16
3.	M. Mahmud		

h. Seksi Keamanan

1.	M. Mukhlas Ibrahim (Kasi)	Malang	J. 12
2.	Mustajib Ridlo	Cirebon	Ittihad II
3.	Aly Asyhari	Trenggalek	O. 01
4.	A. Musthofa	Malang	E. 06
5.	Agus Abd. Qodir R.	Kediri	Dalem
6.	Ibnu Malik Mahmud	Nganjuk	G. 15
7.	Ni'am Asyroqi	Tulungagung .	O. 06
8.	Agus Subhan	Dalem	Dalem
9.	Agus Ivan Muhtadi	Dalem	Dalem
10.	Agus Syamsul Mu'in	Probolinggo	A. 20
11.	Agus ShohibulH. 1.	Probolinggo	A. 03
12.	Agus Labibus Sa'id	Lirboyo	Dalem
13.	Agus Reza Ahmad Zahid	Lirboyo	Dalem
14.	Agus Muhammad	Lirboyo	Dalem
15.	Agus Melvin ZA	Lirboyo	Dalem
16.	Agus Muzani Makmun	Lirboyo	Dalem
17.	Asus Dahlan Ridlwan	Lirboyo	Dalem
18.	Saifulloh	Kediri	A.13
19.	Syamsuddin	Nganjuk	Info III
20.	M. NurMukmin	Brebes	H. 20
21.	A. Chumaidi	Cirebon	T. 06
22.	Arif Busthomi	Malang	R. 14

23.	Zainal Abidin	Blitar	H. 04
24.	Zainurulloh	Jember	G. 05
25.	Sufyan Tsauri	Malang	L. 01
26.	Nur Qomari Mukhtar	Bawean	J.15
27.	M. Fatih	Kediri	1.08
28.	Zufni Al Fata	Semarang	HY
29.	Syamsul Arifin	Bawean	DS
30.	M. Jauhari Barokah	Kediri	Info III
31.	Abdurrozaq	Kediri	A.12
32.	M. Shodiqin	Pekalongan	N.04
33.	M. Bisri	Luar Jawa	
34.	Amirul Mukminin	Kediri	C.14
35.	Mukhtar Kholis	Nganjuk	H.10
36.	Agus Riyadi	Kediri	G.06
37.	MiftahulHuda	Kediri	
38.	Asep Alamsyah	Kediri	Ndalem
39.	Eko Agus Prasetyo	Kalteng	HMP
40.	Ali Sibro Malisyi	Cirebon	HM
41.	Saifulloh Mabrur	Kendal	HMA

i. Seksi PULP

1.	M. Asy'ari SY (Kasi)	Lampung	KPULP
2.	M. Munif	Malang	P. 15
3.	Jihaduddin	Jombang	Q. 11
4.	Abi Darda	Lampung	N. 11
5.	M. Syuhada	Malang	P. 16
6.	M.Yusuf	Sidoarjo	B. 10
7.	M. Jamaluddin	Blitar	1. 07
8.	Zainal Musthofa	Blitar	G. 20

j. Seksi Wajib Belajar

1.	Saifuddin Qulyubi (Kasi)	Tulungagung	K. 09
2.	A. Syaikhu	Banyuwangi	P. 08
3.	A. Rofi'i Asmuri	Indramayu	M. 01
4.	Wafiruddin	Bojonegoro	B. 15
5.	M. Idris Abd. Rosyid	Demak	D. 03
6.	M. Ibrahim	Nganjuk	H.10
7.	A. Zamakhsari Zuhri	Grobogan	P.10

8.	NurKalim	Trenggalek	0. 06
9.	Hadi Mukhtar	Blitar	I. 07
10.	Fuad Muzakki	Nganjuk	E. 07
11.	M. Husain	Pekalongan	O. 13
12.	M. Qosirn	Jombang	Q. 11

k. Seksi Humasy dan Logistik

1.	Ahmadul llmi (Kasi)	Madiun	l. 20
2.	Arwan Masruri	Yogyakarta	WS
3.	Muhrisun	Magelang	
4.	HamimThohari	Madiun	L.10
5.	A.Rufa'i	Tegal	

l. Seksi Kesehatan

1.	H. Agus Umar Shohib	Lirboyo	Dalem
2.	A. Tahmid Abbas	Kediri	Rumah
3.	Sotihul Hadi (Kasie)	Brebes	G. 15
4.	A. Mabruri	Kediri	H. 14
5.	A. Halimi Said	Jember	G.09
6.	Imam Sya'roni	Malang	J.14
7.	HM. Yasin	Kediri	

Keterangan:

Dalem berarti rumah yang dimiliki oleh pengasuh pesantren.
Agus adalah panggilan bagi putra pengasuh pesantren.

Lampiran 4

KETETAPAN
BADAN PEMBINA KESEJAHTERAAN
PESANTREN LIRBOYO
NOMOR: 11/BPK-P2L/III/IX/2002

Tentang:

PENYEMPURNAAN TATA TERTIB PESANTREN LIRBOYO
KOTA KEDIRI JAWA TIMUR

Dengan rahmat dan hidayah Allah SWT. Badan Pembina Kesejahteraan Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri.

Menimbang	:	Bahwa sesuai dengan tujuan Pesantren Lirboyo Kota Kediri untuk mencetak manusia beriman, berilmu, beramal dan berahlakul karimah, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan tata tertib yang mengatur segala hak, kewajiban, larangan, hukuman santri Pesantren Lirboyo Kota Kediri.
Mengingat	:	Peraturan Pesantren Lirboyo Kota Kediri yang disahkan pada tanggal: 14 Dzulqo'idah 1373 / 15 Juli 1954 M dan 1404 H/ 29 April 1984 M dan direvisi kembali pada tanggal 19 Dzulqo'ah 1410 H / 13 Juni 1990 M
Memperhatikan	:	1. Hasil sidang komisi Organisasi dalam acara TA'ARUF & PEMBEKALAN PENGURUS SE-PESANTREN LIRBOYO KEDIRI JATIM tanggal 08 Februari 2002 2. Rapat Pimpinan II tanggal 20 April 2002 SE-PESANTREN LIRBOYO KEDIRI JATIM
Memutuskan	:	PENYEMPURNAAN TATA TERTIB PESANTREN LIRBOYO KOTA KEDIRI JAWA TIMUR

Lirboyo, 10 September 2002 M

BADAN PEMBINA KESEJAHTERAAN
PESANTREN LIRBOYO KEDIRI

KH.A. IDRIS MARZUQI	**KH.M. ABD. AZIZ MANSHUR**
Ketua	Sekretaris

TATA TERTIB
PESANTREN LIRBOYO
KOTA KEDIRI JAWA TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Komponen

1. Pesantren adalah Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur
2. BPK-P2L adalah badan tertinggi yang menentukan segala kebijaksanaan Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur.
3. Pengurus adalah badan pelaksana yang struktur dan personalianya telah diatur dan ditunjuk serta disyahkan oleh BPK-P2L.
4. Santri adalah siapa saja yang berdomisili dan terdaftar di kebijaksanaan Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur.

Pasal 2
Aturan

Ketentuan yang ada berlaku bagi semua santri di dalam/di luar pesantren.

BAB II
KEWAJIBAN

Pasal 3
Administrasi

1. Mendaftarkan diri selambat-lambatnya 3 x 24 jam (3 hari) setelah sampai di pesantren, dengan membawa surat keterangan dari daerah masing-masing melalui:
   - Himpunan Pelajar (HP) bagi Pesantren Induk
   - Kantor / Ketua Blok/ Ketua Jam'iyyah bagi pesantren UNIT
2. Membayar iuran yang telah ditentukan.
3. Memiliki Kartu Tanda Keluarga (KTK) dan buku Tata Tertib
4. Santri yang berhenti/pindah setelah mendapatkan restu masyayikh, harus menyelesaikan administrasi serta menyerahkan KTK.
5. Semua santri (siswa, tamatan, pengurus) wajib daftar ulang.

Pasal 4
Pendidikan

1. Mengikuti sekolah dan kegiatan yang diadakan Pesantren dan madrasah.
2. Mengikuti jam wajib belajar
3. Mengaji sesuai dengan kemampuan (tingkatannya)
4. Mengikuti Pengajian Al-Qur'an
5. Mengikuti istighosah yang telah ditentukan
6. Menjaga kerapian dan mengembalikan buku/kitab perpustakaan.

Pasal 5
Keamanan

1. Menetap di dalam pesantren Lirboyo.
2. Menjaga ketertiban dan keamanan pesantren Lirboyo.

3. Meminta izin ke kantor keamanan bila keluar lingkungan pesantren
4. Lapor ke kantor keamanan bila kembali ke pesantren.
5. Melaksanakan TUGAS JAGA
6. Lapor bila menerima tamu.
7. Lapor kepada staf Keamanan apabila kehilangan atau menemukan barang
8. Membantu Petugas Keamanan yang pelaksanaannya diatur oleh staf Keamanan.
9. Seluruh pengumuman/pamflet/brosur harus melalui rekomendasi pengurus sesuai dengan bidangnya.
10. Meminta izin kepada Keamanan bila mengunjungi mahromnya.

Pasal 6
Etika

1. Sowan (memohon do'a restu) pada masyayikh
2. Menjaga etika, prestasi, prestise serta menjunjung tinggi nama baik pesantren.
3. Taat kepada Masyayikh dan kebijaksanaan Pengurus
4. Mengikuti sholat berjama'ah dengan menggunakan baju lengan panjang.
5. Memenuhi panggilan pengurus.
6. Menghormati sesama.
7. Membudayakan pola hidup sederhana
8. Berkopyak hitam dan atau putih bagi yang sudah haji
9. Berpakaian sopan sar'an wa'adatan
10. Menghormati tamu
11. Menghadiri pengajian umum/pengarahan yang diadakan pengurus.

Pasal 7
Kebersihan, Kesehatan dan Fasilitas

1. Menjaga kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan pesantren.
2. Memelihara gedung/bangunan dan peralatan yang ada di dalam pesantren.
3. Mengikuti ro'an umum (kerja bakti) dan bakti sosial.
4. Membuang sampah pada tempatnya.
5. Menggunakan aliran listrik sesuai dengan WATT yang telah ditentukan.
6. Memasak pada tempat yang telah disediakan
7. Memarkir sepeda pada tempat yang telah ditentukan.
8. Menggunakan fasilitas MCKJ (mandi, cuci kakus, jading) sesuai dengan kegunaannya.

Pasal 8
Organisasi

1. Mengikuti organisasi (jam'iyyah) yang diakui oleh pesantren.
2. Meminta izin kepada pengurus pada setiap kegiatan yang diadakan di dalam pesantren.
3. Menghadirkan penceramah yang telah disetujui pesantren Lirboyo.
4. Penairkan iuran sesuai yang telah ditentukan.
5. Kegiatan yang dilaksanakan bersifat positif.

BAB III
LARANGAN

Pasal 9
Administrasi

1. Mendaftarkan diri tanpa melalui HP/Kantor/Ketua Blok/ ketua Jam’iyyah.
2. Merubah foto atau identitas KTK
3. Menjadikan KTK sebagai jaminan.
4. Pindah pesantren tanpa mendapatkan surat penerimaan dari pesantren yang akan ditempati dan surat izin pindah.

Pasal 10
Pendidikan

1. Tidak masuk sekolah dan mengaji al-Qur’an
2. Belajar di kebun.
3. Membuat gaduh terutama pada waktu sholat jama’ah, pengajian, jam wajib belajar, sekolah, musyawarah dan setelah jam 12 malam.
4. Membawa kitab/buku perpustakaan.

Pasal 11
Keamanan

1. Berada di luar lingkungan pesantren.
2. Hubungan jual beli, tukar menukar barang atau transaksi lain dengan orang kampung.
3. Menjual barang-barang di dalam pesantren.
4. Kost makan/minum di warung atau tempat selain milik pesantren atau Dzuriyah.
5. Membeli makanan atau apapun di sepanjang jalan pesantren Lirboyo.
6. Rekreasi atau menyaksikan pertunjukan
7. Melanggar larangan syar’i seperti zina, mencuri, taruhan, menghosob dan lain-lain.
8. Mengkonsumsi, memiliki, menyimpan atau mengedarkan MIRAS dan NARKOBA.
9. Memiliki, menyimpan, melihat dan membaca atau mengedarkan gambar PORNO menurut pandangan pesantren.
10. Memiliki, menyimpan, dan memperjual belikan SAJAM (senjata tajam)
11. Bertengkar atau berkelahi.
12. Bermain atau menyimpan, catur, remi, play station, layang-layang dan yang sejenis.
13. Membunyikan atau menyimpan alat-alat musik, radio, tape recorder, TV, hand phone dan barang elektronik lainnya.
14. Menyewa, meminjam atau membawa sepeda motor.
15. Memasang pengumuman/brosur, pamflet tanpa sepengetahuan pengurus.
16. Menyalahgunakan surat izin.
17. Menemui/menerima lawan jenis yang bukan mahromnya
18. Menerima tamu putri di dalam kamar

19. Mengganggu atau berkenalan dengan lawan jenis
20. Mengikuti, mengadakan demonstrasi, unjuk rasa dan sejenisnya.
21. Mengakses internet di (WARNET)
22. Surat-menyurat dengan lawan jenis yang bukan mahromnya.
23. Bepergian/pulang pada malam hari.

Pasal 12
Etika

1. Merokok di bawah umur 20 tahun
2. Bergurau atau duduk di tepi jalan, serta berjalan melebihi dua orang.
3. Menghina atau melawan pengurus pesantren.
4. Lewat di halaman Ndalem.
5. Tidak memakai kopyak di luar lingkungan pesantren.
6. Memakai kopyak selain hitam
7. Berambut gondrong, berkuku panjang, berkalung, bergelang, bertindik atau bertato.
8. Menyemir rambut.
9. Bersorak-sorak, mengganggu atau menghina tamu.
10. Mengumpat atau berkata jorok.

Pasal 13
Kebersihan, kesehatan dan fasilitas

1. Memasak di luar dapur dan menggunakan kompor sumbu.
2. Membuang air dari lantai atas, membuang tajin atau sampah di sembarang tempat.
3. Memelihara binatang.
4. Buang air kecil atau berak di lain tempat yang telah disediakan.
5. Corat-coret pada dinding.
6. Olah raga atau mandi hujan di luar Pesantren.
7. Menempatkan alat-alat dapur dan alas kaki tidak pada tempatnya.
8. Tidur di masjid, makbaroh atau kamar orang lain.
9. Merubah/menambah instalasi atau tegangan listrik.
10. Memindah atau merusak infentaris Pesantren dan Madrasah.
11. Menempatkan kendaraan tidak pada tempatnya.
12. Isrof atau berlebihan menggunakan air.

Pasal 14
Organisasi

1. Menjadi anggota organisasi yang tidak ada kaitan langsung dengan pesantren, kecuali mendapat izin pengasuh.
2. Menarik iuran diluar ketentuan (PUNGLI) pungutan liar.
3. Menyalahgunakan izin organisasi.

BAB IV
JENIS HUKUMAN

Pasal 15
Berat

1. Gundul, guyur dan disowankan diboyongkan/dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

2. Gundul, guyur dan disita barang buktinya.

Pasal 16
Sedang

1. Guyur dan disita barang buktinya
2. Gundul dan disita barang buktinya

Pasal 17
Ringan

1. Diperingatkan
2. Membuat surat pernyataan diri tidak mengulangi lagi
3. Membaca al-Qur'an
4. Roan
5. Disita barang buktinya
6. Ganti rugi
7. Dihukum sesuai kebijaksanaan

Pasal 18
Pelaksanaan Hukuman

1. Semua jenis hukuman diputuskan oleh pengasuh dan kebijaksanaan pengurus.
2. Hukuman yang tidak dipindahkan akan ditindak lanjuti dengan hukuman yang lebih berat.

Pasal 19

Dihukum dengan hukuman gundul, guyur dan disowankan, diboyongkan/ dikembalikan kepada orang tua atau walinya, yaitu setiap santri yang :

1. Tidak taat kepada masyayik dan kebijaksanaan pengurus.
2. Tidak mengikuti sekolah dan kegiatan wajib yang diadakan pesantren dan madrasah.
3. Tidak menjaga ketertiban pesantren Lirboyo.
4. Melanggar larangan syar'i seperti zina, mencuri dan lain-lain.
5. Mengkonsumsi, memiliki, menyimpan atau mengedarkan MIRAS dan NARKOBA.
6. Bertengkar atau berkelahi.
7. Menghina atau melawan pengurus pesantren.

Pasal 20

Dihukum dengan hukuman gundul, guyur dan disita barang buktinya, yaitu setiap santri yang:

1. Tidak menetap di pesantren Lirboyo.
2. Rekreasi atau menyaksikan pertunjukan.
3. Memiliki, menyimpan, melihat dan membaca atau mengedarkan buku/gambar PORNO menurut pandangan pesantren,
4. Memiliki, menyimpan, dan memperjual belikan SAJAM (senjata tajam)
5. Menemui lawan jenis yang bukan mahromnya.
6. Mengganggu atau berkenalan dengan lawan jenis.
7. Menerima tamu lawan jenis yang bukan mahromnya.

8. Tidak mengikuti jam wajib belajar.
9. Tidak meminta izin ke kantor keamanan bila keluar pesantren Lirboyo.

Pasal 21

Dihukum dengan hukuman gundul dan disita barang buktinya, yaitu setiap santri yang:

1. Merubah/menambah instalasi atau tegangan listrik.
2. Memindah atau merusak infentaris pesantren dan madrasah.
3. Mengumpat atau berkata jorok
4. Tidak menghormati tamu
5. Mengikuti, mengadakan demonstrasi, unjuk rasa dan sejenisnya.

Pasal 22

Dihukum dengan hukuman potong pendek dan guyur serta disita barang buktinya yaitu setiap santri yang:

1. Merubah foto atau identitas KTK.
2. Menjadi KTK sebagai jaminan.
3. Bermain atau menyimpan catur, remi, play station, layang-layang dan yang sejenis.
4. Membunyikan atau menyimpan; alat-alat musik, radio, tape recorder, TV, hand phone dan barang elektronik lainnya.
5. Menyewa, meminjam atau membawa sepeda motor.
6. Menyalahgunakan surat izin.
7. Surat menyurat dengan lawan jenis yang bukan mahromnya.
8. Olahraga atau mandi hujan di luar pesantren.

Pasal 23

Dihukum dengan hukuman guyur serta disita barang buktinya yaitu setiap santri yang:

1. Tidak melaksanakan tugas jaga.
2. Tidak melapor ketika menemukan barang.
3. Menggunakan aliran listrik tidak sesuai dengan WATT yang telah ditentukan.
4. Hubungan jual beli, tukar menukar barang atau transaksi lain dengan orang kampung.
5. Kost makan/minum di warung atau di tempat selain milik pesantren atau dzuriyah.
6. Mengakses internet.

Pasal 24

Dihukum dengan hukuman potong pendek serta disita barang buktinya yaitu setiap santri yang:

1. Tidak mengikuti jam wajib belajar.
2. Membawa kitab/buku perpustakaan.
3. Bergurau atau duduk di tepi jalan, serta berjalan melebihi dua orang.

Pasal 25

Dihukum sesuai dengan jenis hukuman ringan yaitu setiap santri yang:

1. Tidak membuang sampah pada tempatnya.
2. Menjual barang-barang di dalam pesantren
3. Membuat gaduh terutama waktu sholat jama’ah, pengajian, jam wajib belajar, sekolah, musyawarah dan setelah jam 12 malam.
4. Memasak di luar dapur dan menggunakan kompor sumbu.
5. Membuang air dari lantai atas, membuang tajin atau sampah di sembarang tempat.
6. Corat-coret pada dinding.
7. Bepergian/pulang pada malam hari.
8. Terlambat daftar pesantren.
9. Tidak memiliki Kartu Tanda Keluarga (KTK) atau buku Tata Tertib.
10. Tidak daftar ulang.
11. Pindah/berhenti mondok tanpa menyelesaikan administrasi serta menyerahkan KTK.
12. Tidak mengaji sesuai dengan kemampuan
13. Tidak mengikuti pengajian Al-Qur’an
14. Tidak mengikuti istighosah.
15. Tidak mengembalikan dan merapikan buku/kitab perpustakaan.
16. Tidak melapor ke kantor keamanan ketika kembali ke Pesantren Lirboyo.
17. Tidak melapor saat menerima tamu.
18. Tidak membantu petugas keamanan.
19. Memasang pengumuman/pamflet/brosur tidak melalui petugas.
20. Tidak sowan masyayikh.
21. Tidak menjaga etika, prestasi, prestise serta menjunjung tinggi nama baik pesantren Lirboyo.
22. Berjama’ah tidak mengenakan lengan panjang.
23. Tidak memenuhi panggilan pengurus.
24. Tidak membudayakan pola hidup sederhana.
25. Tidak menghadiri pengajian umum/pengarahan yang diadakan pengurus.
26. Tidak menjaga kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan pesantren.
27. Tidak mengikuti roan umum.
28. Memarkir sepeda motor tidak pada tempatnya.
29. Menggunakan fasilitas MCKJ tidak sesuai dengan kegunaannya.
30. Tidak mengikuti organisasi (jam’iyyah) yang diakui oleh pesantren.
31. Tidak meminta ijin kepada pengurus pada setiap kegiatan yang dilakukan di dalam pesantren.
32. Menghadirkan penceramah yang tidak disetujui pesantren Lirboyo.
33. Menarik iuran tidak sesuai yang ditentukan.
34. Melaksanakan kegiatan yang tidak bersifat positif.
35. membeli makanan atau apapun di sepanjang jalan pesantren Lirboyo.
36. Memasang pengumuman/brosur/pamflet tanpa sepengetahuan pengurus.
37. Merokok dibawah umur 20 tahun.
38. Lewat di dalam ndalem.
39. Tidak memakai kopyak di luar lingkungan pesantren.
40. Memakai kopyak selain hitam.

41. Berambut gondrong, berkuku panjang, berkalung, bergelang, bertindik atau bertato.
42. Menyemir rambut.
43. Bersorak, mengganggu atau menghina tamu.
44. Memelihara binatang.
45. Buang air kecil atau berak di selain tempat yang telah disediakan.
46. Menempatkan alat-alat dapur dan alas kaki tidak pada tempatnya.
47. Tidur di masjid, makbaroh atau kamar orang lain.
48. Menempatkan kendaraan tidak pada tempatnya.
49. Isrof atau berlebihan menggunakan air.
50. Menjadi anggota organisasi yang tidak ada kaitan langsung dengan pesantren, kecuali mendapat izin pengasuh.
51. Menarik iuran di luar ketentuan (PUNGLI) pungutan liar.
52. Menyalahgunakan izin organisasi.

BAB V
Tujuan Tata Tertib
Pasal 26

Tujuan pembentukan petunjuk keputusan hukuman tata tertib pesantren Lirboyo Kediri adalah:

1. Meningkatkan wawasan serta pandangan pengurus dan santri.
2. Menjamin tercapainya kebenaran formal dan terlindunginya kepentingan semua pihak.
3. Pedoman dalam pengambilan hukuman terhadap pihak yang benar-benar terbukti bersalah.
4. Pedoman bagi pengurus dalam menentukan dan mengambil suatu keputusan yang jujur dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 27

Hal-hal yang belum termaktub dalam tata tertib ini akan diatur lebih lanjut oleh pengurus atas persetujuan badan pembina.

Lirboyo, <u>01 Sya'bān 1423 H.</u>
08 Oktober 2002 M

BADAN PEMBINA KESEJAHTERAAN
PESANTREN LIRBOYO KEDIRI

ttd.	ttd.
<u>KH.A. IDRIS MARZUQI</u>	<u>KH.M. ABD. AZIZ MANSHUR</u>
Ketua	Sekretaris

Lampiran 5

DAFTAR SISWA
MADRASAH HIDAYATUL MUBTADI'IEN
PONDOK PESANTREN LIRBOYO KEDIRI
TAHUN AJARAN 2006-2007

A. TINGKAT I'DADIYAH

NO	KELAS	MONDOK	NDUDUK	JUMLAH	
				PER BAGIAN	PER KELAS
1	I	10	6	16	16
2	IIA	17	1	18	43
3	IIB	14	-	14	
4	IIC	11	-	11	
5	IID	-	-	-	
	Jumlah Total Siswa I'dadiyah				59

B. TINGKAT IBTIDAIYAH

No	Kelas	Mondok			Nduduk			Jumlah	
		lm	br	jml	lm	br	jml	Per bagian	per-kelas
1	I	-	24	24	-	10	10	34	34
2	IIA	6	16	22	5	2	7	29	56
3	IIB	7	11	18	6	3	9	27	
4	IIIA	8	23	31	3	2	5	36	209
5	IIIB	14	16	30	2	6	8	38	
6	IIIC	11	19	30	1	5	6	36	
7	IIID	5	19	24	4	-	4	28	
8	IIIE	12	20	32	3	1	4	36	
9	IIIF	11	20	31	1	3	4	35	
10	IV A1	5	28	33	-	2	2	35	646
11	IV A2	9	25	34	-	1	1	35	
12	IV A3	8	25	33	1	1	2	35	
13	IV B1	14	20	34	-	3	3	37	

14	IVB2	6	27	33	1	1	2	35	
15	IV B3	6	26	32	1	2	3	35	
16	IV C1	10	23	33	3	-	3	36	
17	IV C2	6	24	30	1	5	6	36	
18	IV C3	12	19	31	3	3	6	37	
19	IV D1	6	26	32	3	1	4	36	
20	IV D2	12	21	33	2	1	3	36	
21	IV D3	18	13	31	2	4	6	37	
22	IV E1	5	28	33	2	1	3	36	
23	IV E2	14	20	34	3	-	3	37	
24	IV E3	14	18	32	1	3	4	36	
25	IV F1	15	17	32	1	2	3	35	
26	IV F2	6	28	34	1	1	2	36	
27	IV F3	32	-	32	4	-	4	36	
28	V A1	35	-	35	5	-	5	40	
29	V A2	34	-	34	4	-	4	38	
30	V A3	33	-	33	6	-	6	39	
31	V B1	40	-	40	5	-	5	45	
32	V B2	40	-	40	3	-	3	43	
33	V B3	38	-	38	4	-	4	42	
34	V C1	37	-	37	4	-	4	41	
35	V C2	35	-	35	3	-	3	38	
36	V C3	37	-	37	3	-	3	40	
37	V D 1	31	-	31	3	-	3	34	702
38	V D 2	35	-	35	5	-	5	40	
39	V D 3	33	-	33	7	-	7	40	
40	V E1	34	-	34	5	-	5	39	
41	V E2	34	-	34	5	-	5	39	
42	V E3	34	-	34	3	-	3	37	
43	V F1	31	-	31	4	-	4	35	
44	V F2	30	-	30	7	-	7	37	
45	V F3	31	-	31	4	-	4	35	

46	VI A1	28	-	28	2	-	2	30	
47	VI A2	26	-	26	3	-	3	29	
48	VI A3	28	-	28	3	-	3	31	
49	VI B1	31	-	31	3	-	3	34	
50	VI B2	32	-	32	3	-	3	35	
51	VI B3	30	-	30	3	-	3	33	
52	VI C1	24	-	24	8	-	8	32	
53	VI C2	26	-	26	6	-	6	32	
54	VI C3	28	-	28	6	-	6	34	577
55	VI D1	30	-	30	1	-	1	31	
56	VI D2	28	-	28	2	-	2	30	
57	VI D3	29	-	29	1	-	1	30	
58	VI E1	31	-	31	3	-	3	34	
59	VI E2	30	-	30	2	-	2	32	
60	VI E3	32	-	32	4	-	4	36	
61	VI F1	30	-	30	1	-	1	31	
62	VI F2	28	-	28	2	-	2	30	
63	VI F3	32	-	32	1	-	1	33	
Jumlah Total Siswa Ibtidaiyah									2.224

C. TINGKAT TSANAWIYAH

No	Kelas	Mondok			Nduduk			Jumlah	
		lm	br	jml	lm	br	jml	Per bagian	per-kelas
1	I A1	44	-	44	6	-	6	50	
2	I A2	38	4	42	7	-	7	49	
3	I A3	39	2	41	7	1	8	49	
4	I B1	36	11	47	3	-	3	50	729
5	I B2	37	5	42	6	1	7	49	
6	I B3	42	5	47	3	-	3	50	
7	I C1	38	5	43	4	-	4	47	
8	I C2	39	5	44	6	-	6	50	

9	I C3	36	5	41	6	-	6	47	
10	I D1	38	6	44	3	-	3	47	
11	I D2	36	6	42	5	1	6	48	
12	I D3	38	6	44	3	-	3	47	
13	I E1	40	4	44	7	-	7	51	
14	I E2	42	5	47	2	-	2	49	
15	I E3	35	5	40	6	-	6	46	
16	II A1	44	-	44	6	-	6	50	
17	II A2	47	-	47	4	-	4	51	
18	II A3	48	-	48	5	-	5	53	
19	II B1	45	-	45	3	-	3	48	
20	II B2	43	-	43	3	-	3	46	
21	II B3	42	-	42	2	-	2	44	
22	II C1	38	-	38	3	1	4	42	
23	II C2	38	-	38	4	-	4	42	681
24	II C3	39	-	39	5	-	5	44	
25	II D1	37	-	37	3	-	3	40	
26	II D2	36	-	36	3	-	3	39	
27	II D3	42	-	42	3	-	3	45	
28	II E1	39	-	39	8	-	8	47	
29	II E2	41	-	41	6	-	6	47	
30	II E3	39	-	39	4	-	4	43	
31	III A1	50	-	50	9	-	9	59	
32	III A2	53	-	53	9	-	9	62	
33	III A3	51	-	51	7	1	8	59	
34	III B1	51	-	51	7	-	7	58	
35	III B2	54	-	54	6	-	6	60	645
36	III B3	52	-	52	6	-	6	58	
37	III C1	40	-	40	5	-	5	45	
38	III C2	44	1	45	5	1	6	51	
39	III C3	42	-	42	5	-	5	47	
40	III E1	46	-	46	2	-	2	48	

41	III E2	42	-	42	7	-	7	49	
42	III E3	42	-	42	7	-	7	49	
Jumlah Total Siswa Tsanawiyah									2.055

D. TINGKAT ALIYAH

No	Kelas	Mondok			Nduduk			Jumlah	
		lm	br	jml	lm	br	jml	Per bagian	per-kelas
1	I A1	60	-	60	16	-	16	76	535
2	I A2	67	2	69	3	-	3	72	
3	I A3	64	-	64	9	-	9	73	
4	I A4	64	1	65	8	-	8	73	
5	I B1	72	-	72	7	1	8	80	
6	I B2	71	4	75	9	-	9	84	
7	I B3	64	-	64	13		13	77	
8	II A1	62	-	62	10	-	10	72	450
9	II A2	65	-	65	8	-	8	73	
10	II A3	65	-	65	9	-	9	74	
11	II B1	50	-	50	8	-	8	58	
12	II B2	47	-	47	9	-	9	56	
13	II B3	50	-	50	8	-	8	58	
14	II B4	52	-	52	7	-	7	59	
15	III A1	37	-	37	5	-	5	42	397
16	III A2	40	-	40	5	-	5	45	
17	III A3	35	-	35	11	-	11	46	
18	III A4	39	-	39	10	-	10	49	
19	III B1	59	-	59	13	-	13	72	
20	III B2	61	-	61	9	-	9	70	
21	III B3	58	-	58	15	-	15	73	
Jumlah Total Siswa Aliyah									1.382

NO	TINGKAT	JML SISWA	JML MUSTAḤIQ	JML MUNAWWIB
01	I'dādiyah	59	10	-

02	Ibtida’iyah	2.224	64	36
03	Tsanawiyah	2.055	43	33
04	Aliyah	1.382	23	47
JUMLAH		5.720	140	116

Lampiran 6

PENGAJAR MADRASAH HIDAYATUL MUBTADI-IEN
LIRBOYO KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
TAHUN PELAJARAN: 1427 H / 2006-2007 M

I. MUSTAHIQ TINGKAT IBTIDAIYAH

KELAS	NAMA	ALAMAT	KAMAR
1	Abdulloh Hasan	Kediri	I 17
2	M. Syaikhurrijal	Nganjuk	L007
IIA	M. Qosim	Jombang	Q 1
IIB	M. Hibbatulloh Nawawi	Kediri	L 06
IIIA	Ahmad Busyairi	Kediri	C 12
IIIB	M. Ibrohim	Nganjuk	H 01
IIIC	M. Husian CH.	Pekalongan	0 13
IIID	Imam Nashihin	Kediri	C 14
IIIE	M. Fikri Hakim	Kendal	Q 05
IIIF	Shofi Ashifan	Kendal	HM 04
IVA1	M. Tomthomi Afandi	Kediri	A 03
IVA2	Badrussalam Syah	Malang	B 09
IVA3	M. Sholahuddin	Kendal	E 02
IVB1	Harisuddin	Magelang	WS
IVB2	Mas'udan	Jepara	S 08
IVB3	Muqorrobin	Semarang	E 09
IVC1	Nur Kalim	Trenggalek	O 06
IVC2	Ahmad Nuryanto	Nganjuk	F 14
IVC3	Zamakhsyari Zuhri	Grobogan	Itt. I
IVD1	Mahmudi Syafi'I	Madura	F 14
IVD2	M. Qosim Balya	Nganjuk	L 007
IVD3	Himawan Aziz	Sragen	S 19
IVE1	Basyarurrohman	Kendal	O 08
IVE2	M. Hadi Mukhtar	Blitar	I 07
IVE3	Nur Kholis	Jombang	HM 09
IVF1	M. Rikza Muqtada	Kediri	Ltt. Ii

IVF2	Irin Shobirin	Majalengka	HM
IVF3	M. Zamroji Assunan	Blitar	P 03
VA1	Syamsul Adhan	Kediri	K 07
VA2	M. Wafiruddin	Tuban	B 15
VA3	Ali Hidlir	Kebumen	N 20
VB1	Masyhudi Alwy	Magelang	F 11
VB2	Sulthon Nur Hasan	Mojokerto	HY 13
VB3	M. Fuad Muzakki	Nganjuk	E 07
VC1	Munawir Ridlwan	Nganjuk	G 04
VC2	Ghufron AT.	Kendal	E 02
VC3	M. Shofwan	Kediri	C 08
VD1	Habib Romdlon	Blitar	R 20
VD2	Khoirunniam	Kediri	A 09
VD3	Nas'ud	Cirebon	N 05
VE1	Muhlisin	Blora	J 03
VE2	Husnuddin	Kediri	P 06
VE3	Al Faqih	Grobogan	P
VF1	Nurussalam	Semarang	S 11
VF2	Yusuf Ghozali	Blitar	P 05
VF3	Zufni Alfatta	Semarang	HY
VIA1	Mukhlas Ibrohim	Malang	J 12
VIA2	A. Idris Abdurrosyid	Demak	D 03
VIA3	Ibnu Asaduddin	Grobogan	DM
VIB1	Mufid Maulana	Indramayu	Q 12
VIB2	Nu'man Ar Ridlo	Malang	I 08
VIB3	Saifuddin Qulyubi	Tulungagung	K 09
VIC1	M. Sa'id Ridlwan	Kediri	Dlm
VIC2	M. Bahrul Ulum	Kediri	L 06
VIC3	Subhan Faqih	Tulungagung	HY 15
VID1	Zumrodi	Magelang	DS
VID2	Mahrus Asmu'I	Demak	D 03
VID3	A. Rofi'I Asmuri	Indramayu	M 01

VIE1	Makmun Rosyid	Nganjuk	J 15
VIE2	Imam Rofi'i	Bojonegoro	B 15
VIE3	A. Syaikhu	Banyuwangi	P 08
VIF1	M. Ainun Na'im	Kendal	E 02
VIF2	HM. Shofiyulloh	Nganjuk	H 04
VIF3	M. Muttaqin	Salatiga	B 02

II. MUSTAḤIQ TINGKAT TSANĀWIYAH

KELAS	NAMA	ALAMAT	KAMAR
IA1	M. Yusuf Abd. Karim	Kediri	I 17
IA2	Ma'adzalloh	Kediri	A 04
IA3	Ifrosin	Indramayu	T 05
IB1	Rofiq Ajhuri	Jember	HM
IB2	M. Yusuf	Kediri	C 14
IB3	M. Syaikhu Fauzi	Blitar	H 02
IC1	M. Shohibul Hujjah Busyro	Probolinggo	A 06
IC2	M. Kholid Afandi	Lamongan	E
IC3	Musyafa' Utsman	Kediri	HY
ID1	M. Anas Mukhlishon	Kendal	E 17
ID2	Arif Afifuddin	Kediri	A 20
ID3	N. Yafi' Miftah	Tegal	HM
IE1	Ali Masyhar	Tulungagung	G 03
IE2	M. Yasin Yusa'	Madium	L 14
IE3	Syahrul Muir	Nganjuk	E 07
IIA1	Musthofa	Malang	Info II
IIA2	M. Hizbulloh Al Haq	Nganjuk	E 07
IIA3	HA. Najmuddin M.	Lirboyo	Dlm
IIA4	Darul Azka	Sleman	S 07
IIB1	A. Yazid	Malang	N 02
IIB2	A. Fathun Nuha AF	Grobogan	P 04
IIB3	A. Mahin Asmu'i	Demak	Ltt II

IIC1	Chairul Anam	Kendal	Ltt II
IIC2	M. Anawi Ridlwan	Nganjuk	K 17
IIC3	H. Muhtadi Zaini	Banten	HM 13
IID1	M. Ali Imron HZ	Magetan	Al Ikhlas
IID2	Muhammad Mukhlas Noer	Malang	J 13
IID3	Darul Muntaha	Blitar	Aula
IIE1	M. Nu'man Thoyyib	Malang	P 14
IIE2	Taqwim Aziz	Nganjuk	H
IIE3	M. Nahjuddin Sholeh	Trenggalek	H 11
IIIA1	M. Shofwan	Lumajang	G 03
IIIA2	M. Dahlan Ridlwan	Kediri	Dlm
IIIA3	Shomhadi Syukur	Demak	N 07
IIIB1	Hafidz Nashihin	Nganjuk	R 05
IIIB2	M. Ihsan Hamid	Pati	J 03
IIIB3	Abdurrosyid	Bojonegoro	P 02
IIIC1	A. Dabbas Miftah	Tegal	HM 02
IIIC2	Munawar Zuhri	Tulungagung	O 06
IIIC3	M. Labib Abu Bakar	Kediri	A 08
IIID1	Sholeh Abdul Karim	Kediri	DM
IIID2	Mudzkir Ibrohim	Malang	R 13
IIID3	Basuni Buni	Kediri	C 11

III. MUSTAHIQ TINGKAT ALIYAH

KELAS	NAMA	ALAMAT	KAMAR
IA1	M. Thohari Muslim	Nganjuk	I 17
IA2	Zainal Abidin Dasuqi	Trenggalek	A 04
IA3	Syamsul Mu'in	Probolinggo	T 05
IA4	M. Ibrohim A. Hafidz	Kediri	
IB1	Bahirul Mawahib	Semarang	HM
IB2	Humaidi Marfu'	Cirebon	C 14
IB3	A. Fauzi Sholihin	Indramayu	H 02

IB4	HM. Syamsuddin R.	Nganjuk	A 06
IIA1	Ibnu Syahid	Nganjuk	Info II
IIA2	Ibnu Sa'id Khuzini	Cirebon	E 07
IIA3	M. Munir Syafa'at	Banyuwangi	Dlm
IIA4	Imam Rofi'i	Kediri	S 07
IIB1	Imam S. Arifin	Kediri	N 02
IIB2	Abdulloh Kamal	Malang	P 04
IIB3	M. Mustajib Ridlo	Cirebon	Ltt II
IIB4	HM. Shobih Al Mu'ayyad	Jombang	Ltt II
IIIA1	Abu Hasan	Trenggalek	G 03
IIIA2	M. Luthfi Lathif	Nganjuk	Dlm
IIIA3	Masyhudi Abdul Mannan	Kediri	N 07
IIIA4	M. Ridlwan Qoyyum	Nganjuk	
IIIB1	M. Faiq Mujtaba	Nganjuk	R 05
IIIB2	Syahrowardi	Trenggalek	J 03
IIIB3	Khoiruzzinan Hamman	Tulungangung	P 02

IV. MUNAWWIB TINGKAT IBTIDAIYAH

KELAS	NAMA	ALAMAT	KAMAR
II	Agus Wahyuddin	Ponorogo	Rizquna
III A,B	A. Syarwani	Malang	HM 10
III C,D	A. Dardiri	Magelang	HM A
III E,F	Imam Mazni	Gresik	HM 01
IV A1,2	Ahmad Fawaid	Jepara	KmDlm
IV A3,B1	Nur Hakim	Tegal	HM
IV B2,3	Syaikhu Anshori	Sidoarjo	B 12
IV C1,2	Sirojuttholibin	Magelang	M 18
IV C3,D1	Luqman Hakim	Pasuruan	G 18
IV D2,3	Muallif Masykur	Tuban	B 14
IV E1,2	Imam Mustaghfirin	Kediri	I 17
IV E3,F1	A. Fauzi	Jombang	HM
IV F2,3	Rofiqul Ilmi	Lamongan	Rizquna

V A1,2	M. Salim Jundan	Lirboyo	Rumah
V A3,B1	H. Nailul Huda	Blitar	I 05
V B2,3	Imam Muslim	Lirboyo	Rumah
V C1,2	M. Hilmi Kholil	Kediri	F 16
VC3,D1	Zainal Arifin	Nganjuk	H
VD2,3	Ubaidilah	Nganjuk	HM
V E1,2	Najihul Waro	Trenggalek	R 20
V E3,F1	Mu'ti Wibowo	Magelang	Cahaya
V F2,3	Nurul Fajri	Jaksel	HMA
VI A1,2	Rohani Hasan	Nganjuk	Rumah
VI A3,B1	Reza Zakaria	Kediri	Rumah
VI B2,3	Abdul Qodir Ridlwan	Kediri	Rumah
VI C1,2	Syaikhu Anam Ihsan	Lirboyo	Rumah
VI C3,D1,2	Ahmad Rifa'i	Purwodadi	HM
VI D3,E1	Ali Murtadlo Ahmad	Kediri	Rumah
VI E2,3	M. Ahsin Ahmad	Kediri	Rumah
VI F1,2	H. Umar Shohib	Lirboyo	Rumah
VI F3	M. Fikri	Bandung	Rohmatuka
VI A1,2,3,B1	Imron Rosyadi	Brebed	DS
VIB2,3, C1,2	Syamsul Ma'arif	Tulungagung	K 10
VI C3,D1,2,3	Lubby Mubarok	Kendal	E 02
VI E1,2,3,F1	Izzul Umam	Nganjuk	E 07
VI F2,3	M. Fikri	Bandung	Rohmatuka

V. MUNAWWIB TINGKAT TSANAWIYAH

KELAS	NAMA	ALAMAT	KAMAR
I A1,2	Ibnu Zen	Cirebon	L 02
I A3,B1	M. Muhtar	Purwakarta	HM
I B2,3	Muhammad Ajib	Pati	J 03
I C1,2	M. Badri	Cirebon	L 03

I C3,D1	A. Rofiq	Salatiga	Q 06
I D2,3	Abdi Fathul Wahab	Brebes	Wartel
I E1,2	Basyaruddin	Tulungagung	K 10
I E3	Ken Edi Muammar Kadafi	Jombang	HM
II A1,2	M. Romdloni	Ponorogo	I 20
II A3,4	Shonhaji	Kediri	I 12
II B1,2	A. Hafidz	Cirebon	J 18
II B3, C1	Zainal Mufid	Subang	L 17
II C2,3	Muqimul Haq	Magelang	M 11
II D1,2	Badruttamam	Pontianak	Info III
II D3,E1	Khozinul Minan	Ngawi	I 20
II E2,3	Zainul Arifin	Malang	J 12
II A1,2,3,4	Afifuddin Ma'shum	Kediri	Rumah
II B1,2,3C1	Ahmad Burhanuddin	Indramayu	Kmr Pete
II C2,3,D1	Syukron Makmun	Kediri	K 03
II D2,3	H. Hadi Abdussalam	Lirboyo	Rumah
II E1,2,3	HM. Miftahul Huda	Kediri	Rumah
III A1,2,3	Hasan Karbala	Kediri	Rumah
III B12,3,C1	Adnan Sumantho	Trenggalek	Q 10
III C2,3,D1	H. Fuad Nurusshobah	Blitar	Rumah
III D2,3	Mahfudz Syairozi	Probolinggo	A 17
III A1,2,3	Saiful Qodim	Kediri	HY
III B1,2,3	Zainal Abidin Masduqi	Kediri	Rumah
C1,2,3,D1	Masduqi Suparman	Kendal	HM
III D2,3	Mahfudz Syairozi	Probolinggo	A 17
III A1,2,3	Sidrotul Muntaha	Nganjuk	Rumah
III B1,2,3	Hasan Bisri	Wonosobo	Amisalah
III C1,2,3	Abdul Mu'izz	Indramayu	N 05
III D1,2,3	Anang Muhsin	Tulungagung	K 10

VI. MUNAWWIB TINGKAT ALIYAH

KELAS	NAMA	ALAMAT	KAMAR
I A1,2,3	Anang Darunnaj	Kediri	F 16
I A4,B1	Umar Ali Suyuthi	Kediri	Rumah
I B2,3,4	Fatihunnada Sibawaih	Kediri	Rumah
I A1,2	Tahmid Abbas	Kediri	Rumah
I A3,4	Ivan Muhtadi	Kediri	Rumah
I B1,2	Syakhshon	Trenggalek	Q 12
I B3,4	Munhammir Ma'shum	Lirboyo	Rumah
1 A1,2	Jawahir	Lampung	L 15
I A3	Zamroni Ruba'i	Nganjuk	Rumah
I A4	Subhan Fauzi AM	Nganjuk	Rumah
I B1	Sifulloh Rohani	Kediri	Rumah
I B2	Syakhshon	Trenggalek	Q 12
I B3	M. Masykur Khoir	Kediri	Rumah
I B4	H. Bukhori Ridlwan	Kediri	Rumah
II A1,2	HM. Ali Zainal Abidin	Nganjuk	Rumah
II A3,4	Widodo Ahmad	Kediri	Rumah
II B1,2	M. Misbah Hamid	Nganjuk	Rumah
II B 3,4	Ahmadi Sulthon	Kediri	Rumah
II A1,2	Munir Akromin	Nganjuk	Rumah
II A3,4	A. Jamaluddin Nawawi	Kediri	Rumah
II B1,2	H. Saiful Islam	Kediri	Rumah
II B3,4	Hazim Fikri	Lirboyo	Rumah
II A1	Rodli Sutrisno S. Sos. I	Pekalongan	S 27
II A2	Abdul Karim Suyuthi	Kediri	Rumah
II A3,4	M. Adib Arifin S	Trenggalek	G 03
II B1,2	Ali Masyhar	Kediri	Rumah
II B3	M. Yasin MK.	Kediri	Rumah
II B4	Nur Kholis Fauzan	Tulungagung	Rumah
II A1,2	H. Atho'illah S. Anwar	Lirboyo	Ndalem
II A3,4	K. Nurul Huda Ahmad	Kediri	Rumah

II B1,2	HM. Dliya'uddin Z	Blitar	Rumah
II B3,4	Hasan Masyhudi	Kediri	Rumah
IIIA1	KH. M. Anwar Manshur	Lirboyo	Dalem
III A2,3	KH. A. Hbibulloh Zaini	Lirboyo	Dalem
III B1	KH. M. Abdul Aziz Manshur	Jombang	Dalem
III B2,3	KH. An'im Falahuddin Mahrus	Lirboyo	Dalem
III A4	HM. Abdul Mu'id Shohib	Lirboyo	Dalem
III A1,2	KH. M. Ma'ruf Zainuddin	Lirboyo	Dalem
III A3,4	KH. Hasan Zamzami Mahrus	Lirboyo	Dalem
III B1	K. Moh. Fashihuddin Ahmad	Kediri	Rumah
III B2,3	H. Azizi Hasbulloh	Blitar	Dalem
III A1,2	H. Nur Hamid Zainuri	Lirboyo	Dalem
III A3,4	H. Ya'lu Anwar	Lirboyo	Dalem
III B1,2	K. Abdul Kholiq Ridlwan	Lirboyo	Dalem
III B3	HM. Abdul Mu'id Shohib	Kediri	Dalem
III B1,2,3	KH. Ahmad MH. Thoha	Lirboyo	Dalem
III A1,2,3,4	H. Qomaruzzaman	Nganjuk	Rumah

VII. MUSTAHIQ SEKOLAH I'DADIYAH

KELAS	NAMA	ALAMAT	KAMAR
I	M. Mubarizi	Djogjakarta	B 17
	Fadlol Haq	Probolingo	WS 09
II A	Asyfiya'ul Khoiri	Blitar	P 11
	M. Sholahuddin	Pekalongan	
II B	Abdul Hannan	Kediri	C 12
	M. Rifa'i	Blitar	H 01
II C	Shobron Jamil	Pekalongan	
	Lutfi Zamroni	Bojonegoro	B 14
II D	Arif Ridlwan Akbar	Jombang	Q09
	Imron Hasani	Kudus	HM

Lampiran 7

DAFTAR MATA PELAJARAN
MADRASAH HIDAYATUL MUBTADI'IEN

A. TINGKAT I`DĀDIYAH

NO	MATA PELAJARAN	NAMA KITAB	KELAS	PENGAMPU	KETERANGAN
01	Al-Qur'ān	Al-Qur'ān	I dan II	Mustaḥiq	
02	Ilmu Tauḥīd	Aqīdah al-`Awwām	I	Mustaḥiq	
		Matan Ibrāhīm al-Bājūriy	II	Mustaḥiq	
03	Fiqh	Sullam al-Taufīq	II	Mustaḥiq	
		Safīnah aṣ-Ṣalāh	I	Mustaḥiq	
04	Naḥw	Al-Ajurūmiyah	II	Mustaḥiq	
		Al-`Awāmil	I	Mustaḥiq	
05	Ṣarf	Qā`idah Naṡr	I	Mustaḥiq	
		Al-Amṡilah al-Taṣrīfiyyah	I dan II	Mustaḥiq	
		Al-Qawā`id aṣ-Ṣarfiyyah	II	Mustaḥiq	
06	Ilmu Tajwīd	Tuḥfah al-Aṭfāl	II	Mustaḥiq	
		Hidāyah aṣ-Ṣibyān	I	Mustaḥiq	
07	Ilmu Akhlāq	Taisir al-Khallāq	II	Mustaḥiq	
		Naẓm al-Maṭlab	I	Mustaḥiq	
08	Ilmu Khaṭ	Kitābah	I	Mustaḥiq	
09	Bahasa Arab	Ta`līm al-Lugah al-`Arabiyyah I	I	Mustaḥiq	

		Ta`līm al-Lugah al-`Arabiyyah II	II	Mustaḥiq	
10	Akhlāq				
11	Muḥāfaẓah				
12	Imlā’				

B. TINGKAT IBTIDĀIYAH

NO	MATA PELAJARAN	NAMA KITAB	KELAS	PENGAMPU	KETERANGAN
01	Al-Qur’ān	Al-Qur’ān	I	Mustaḥiq	Al-Fātiḥaḥ, an-Nās s.d. al-Zalzalah
			II	Mustaḥiq	Al-Bayyinah s.d. al-Nabā’
			III	Mustaḥiq	Juz I s.d. VI
			IV	Mustaḥiq	Juz VI s.d. XI
			V	Mustaḥiq	Juz XI s.d. XVI
			VI	Mustaḥiq	Juz XVI s.d. XX
02	Ḥadīs	al-Arb`īn al-Nawāwiyah	V	Mustaḥiq	
		Bulūg al-Marām	VI	Mustaḥiq	Awal s.d. Bāb al-Bai`
03	Ilmu Tauḥīd	Zād Mubtadi’	I	Mustaḥiq	
			II	Mustaḥiq	
		Aqīdah al-Awām	III	Mustaḥiq	
		Matan Ibrāhīm al-Bājūriy	IV	Mustaḥiq	
		Al-Kharīdah al-Bāhiyah	V	Mustaḥiq	
		As-Sanūsiyah	VI	Mustaḥiq	
04	Fiqh	Faṣalātan	I	Mustaḥiq	Harus diperagakan
		Hidāyah al-	I	Mustaḥiq	

		Mubtadi’			
		Safīnah al-Ṣalāh	II	Mustaḥiq	Harus diperagakan
		Tanwīr al-Hijā	III	Mustaḥiq	
		Sullam at-Taufīq	IV	Mustaḥiq	
		Fatḥ al-Qarīb	V	Mustaḥiq	Awal s.d. Bāb Iqrār
			VI	Mustaḥiq	Bāb Iqrār s.d. Khatam
		`Uyun al-Masā’il li an-Nisā’	VI	Mustaḥiq	
05	Ilmu Naḥw	Al-`Awāmil	III	Mustaḥiq	
		Al-Ajurūmiyah	IV	Mustaḥiq	
		Al-Fuṣūl al-Fikriyah	V	Mustaḥiq	
		Al-`Amrīṭi	VI	Mustaḥiq	
06	Ilmu Ṣarf	Al-Amṡilah al-Taṣrīfiyyah	III	Mustaḥiq	Bab I s.d. Bāb al-Rabā`I Mujarrad
		Qā`idah Naṡar	III	Mustaḥiq	
		Al-Amṡilah al-Taṣrīfiyyah	IV	Mustaḥiq	
		Al-Qawā`id al-Ṣarfiyah	IV	Mustaḥiq	
		Al-`Ilal	IV	Mustaḥiq	
		Al-Amṡilah al-Taṣrīfiyyah	V	Mustaḥiq	
		Al-`Ilal	V	Mustaḥiq	
		Al-Maqṣūd	VI	Mustaḥiq	
07	Ilmu Tajwīd	Fatḥ al-Raḥman	II	Mustaḥiq	
		Hidāyah al-Ṣibyān	III	Mustaḥiq	

		Tuḥfah al-Aṭfāl	IV	Mustaḥiq	
		Al-Jazariyah	V	Mustaḥiq	
08	Ilmu Akhlāq	Naẓm al-Akhlāq	I	Mustaḥiq	
		Naẓm al-Maṭlab	II	Mustaḥiq	
		Waṣāyā	III	Munawwib	Bab I s.d. BAB X
			IV	Munawwib	Bab XI s.d. Khatam
		Taḥliyah	V	Munawwib	Bab XI s.d. Khatam
		Taisir al-Khallāq	V	Munawwib	
09	Ilmu Imlā’	Qawā’id al-Imlā’	VI	Mustaḥiq	
10	Ilmu Khaṭ	Mabādi’ Qirā’ah Aṣriyah	I	Mustaḥiq	
			II	Mustaḥiq	
11	Bahasa Arab	Ra’sun Sirah	I	Mustaḥiq	
		Mabādi’ Muḥāwarah li al-Aṭfāl	II	Mustaḥiq	Buku Karangan Ḥāmid ibn Aḥmad
		Ta’līm al-Lugah al-`Arabiyah	III	Mustaḥiq	Buku Karangan HD Hidayat Jld I
			IV	Mustaḥiq	Buku Karangan HD Hidayat Jld II
			V	Mustaḥiq	Buku Karangan HD Hidayat Jld III
			V	Mustaḥiq	Buku Karangan HD Hidayat Jld IV
12	Bahasa Indonesia	Buku Depdiknas Bacaan 2a dan 2b	I	Mustaḥiq	
13	Bahasa Jawa	Ngeluri Basa Jawa	I	Mustaḥiq	

		Tārīkh Anbiyā'/Irrā' Mi'rāj	I	Mustaḥiq	
14	Sejarah Islam	Khulaṣah Nūr al-Yaqīn	IV	Munawwib	
			V	Munawwib	
15	Sejarah Indonesia	Pendidikan NU untuk Mengenal dan Menghayati Perjuangan	II	Munawwib	
			III	Mustaḥiq	
			IV	Mustaḥiq	
16	Ilmu Hitung	A-BA-JA-DUN	I	Mustaḥiq	
			II	Mustaḥiq	
17	Administrasi	Administrasi	VI	Munawwib	
18	Akhlāq				
19	Muḥāfaẓah				
20	Imlā'				

C. TINGKAT TSANĀWIYAH

NO	MATA PELAJARAN	NAMA KITAB	KELAS	PENGAMPU	KETERANGAN
01	Tafsīr	Tafsīr al-Jalālain	I	Munawwib	Al-Baqarah s.d. Ali Imrān
			II	Munawwib	Ali Imrān s.d. al-Mā'idah
			III	Munawwib	Ali Imrān s.d. at-Taubah
02	Ilmu Tafsīr	Itmām al-Dirāyah	II	Munawwib	
03	Ḥadīs	Bulūg al-Marām	I	Mustaḥiq	Bāb al-Bai` s.d. Khatam
		Riyāḍ aṣ-Ṣāliḥīn	II	Munawwib	Awal s.d. Kitāb al-Faḍāil
			III	Munawwib	Kitāb al-Faḍāil s.d. Khatam
04	Ilmu Ḥadīs	Al-Baiqūniyah	II	Mustaḥiq	
05	Ilmu Tauḥīd	Al-Jawāhir	I	Munawwib	

		al-Kalāmiyah			
		Kifāyah al-`Awam	II	Mustaḥiq	
		Umm al-Barāhīn	III	Munawwib	
06	Fiqh	Fatḥ al-Mu`īn	I	Mustaḥiq	Awal s.d. Bāb al-Ṣaum
			II	Mustaḥiq	Bāb al-Ṣaum s.d. Faṣl fī al-Kafā'ah
			III	Mustaḥiq	Faṣl fī al-Kafā'ah s.d. Khatam
07	Uṣūl al-Fiqh	Al-Warāqāt	I	Munawwib	
		Tashīl al-Ṭuruqāt	II	Mustaḥiq	
08	Qawā`id al-Fiqhiyyah	Al-Farā'id al-Bahiyah	III	Mustaḥiq	
09	Fiqh Mawāriṡ	`Uddat al-Farīḍ	II	Mustaḥiq	
10	Ilmu Manṭīq	Sullām al-Munauraq	III	Mustaḥiq	
11	Ilmu Balāgah	Al-Jauhar al-Maknūn	III	Mustaḥiq	
12	Ilmu Naḥw	Alfiyah ibn Mālik	I	Mustaḥiq	Awal s.d. Af`āl al-Tafḍīl
			II	Mustaḥiq	Af`āl al-Tafḍīl s.d. Khatam
		Qawā`id al-I`rāb	I	Mustaḥiq	
		Al-I`rāb	I	Mustaḥiq	
13	Ilmu Ṣarf	Alfiyah ibn Mālik	I	Mustaḥiq	Awal s.d. Af`āl al-Tafḍīl
			II	Mustaḥiq	Af`āl al-Tafḍīl s.d. Khatam
14	Ilmu `Arūḍ	Manẓumāt al-`Arūḍ	III	Mustaḥiq	
15	Ilmu Akhlāq	Ta`līm al-Muta`allim	I	Mustaḥiq	
16	Akhlāq				
17	Muḥāfaẓah				

18	Imlā’				

D. TINGKAT `ĀLIYAH

NO	MATA PELAJARAN	NAMA KITAB	KELAS	PENGAMPU	KETERANGAN
01	Tafsīr	Tafsīr al-Jalālin	I	Munawwib	QS. Al-Taubah s.d. al-Isrā’
			II	Munawwib	Al-Isrā’ s.d. al-Mu’minūn
			III	Munawwib	Al-Mu’minūn s.d. al-Ankabūt
02	Ḥadīs	Al-Jāmi` aṣ-Ṣagīr	I	Munawwib	Awal s.d. Bab Jīm
			II	Munawwib	Bab Jīm s.d. Kāf
			III	Munawwib	Bab Lām s.d. Khatam
03	Ilmu Tauḥīd	Al-Ḥuṣun al-Ḥamīdiyah	I	Mustaḥiq	Awal s.d. Pasal IV
			II	Mustaḥiq	Pasal IV s.d. Khatam
		Al-Fajr aṣ-Ṣādiq	III	Mustaḥiq	-
04	Fiqh	Al-Maḥalli	I	Mustaḥiq	Awal s.d. Kitāb al-Bai`
			II	Mustaḥiq	Kitāb al-Bai’ s.d. Kitāb al-Qasam wa an-Nushūz
			III	Mustaḥiq	Kitāb al-Qasam wa an-Nushūz s.d. Khatam
05	Uṣūl al-Fiqh	Lubb al-Uṣūl	I	Mustaḥiq	-
		Jam’ al-Jawāmi’	II	Mustaḥiq	Juz I
			III	Mustaḥiq	Juz II
06	Ilmu Akhlāq	Mau`iẓah al-Mu’minīn	I	Munawwib	Awal s.d. Kitāb Adab al-Ulfah wa al-Ukhuwwah

			II	Munawwib	Kitāb Adab al-Ulfah wa al-Ukhuwwah s.d. Bayān Żamm ar-Riyā’
			III	Munawwib	Bayān Żamm ar-Riyā’ s.d. Khatam
07	Ilmu Balāgah	Uqūl al-Jumān	I	Mustaḥiq	Awal s.d. al-Qaṣr
			II	Mustaḥiq	Al-Qaṣr s.d. al-Ḥaqīqah wa al-Majāz
			III	Mustaḥiq	al-Ḥaqīqah wa al-Majāz s.d. Khatam
08	Ilmu Falāk	Al-Durūs al-Falākiyah	III	Munawwib	
09	Akhlāq				
10	Muḥāfaẓah				
11	Imlā’				

Lampiran 8

ALOKASI WAKTU
PEMBELAJARAN MADRASAH HIDAYATUL MUBTADI'IN
PONDOK PESANTREN LIRBOYO KEDIRI

A. SEKOLAH

1. Tingkat Ibtidā'iyah:
   a. Hiṣṣah Ulā : Jam 07.00 sampai 09.00 Istiwa', dengan ketentuan Jam 07.00 s.d. 07.30 digunakan untuk muḥāfaẓah, Jam 07.30 s.d. 08.00 untuk pendalaman, dan Jam 08.00 s.d. 09.00 untuk menyampaikan pelajaran.
   b. Hiṣṣoh Ṡāniyah : Jam 09.30 sampai 11.00 Istiwa', dengan ketentuan Jam 09.30 s.d. 10.00 untuk pendalaman dan jam 10.00 s.d. 11.00 untuk menyampaikan pelajaran.
2. Tingkat Ṡanawiyah dan Āliyah (bagian malam):
   a. Hiṣṣah Ulā : Jam 19.00 sampai 21.00 Istiwa', dengan ketentuan Jam 19.00 s.d. 19.30 digunakan untuk muhafadzoh, Jam 19.30 s.d. 20.00 untuk pendalaman, dan Jam 20.00 s.d. 21.00 untuk menyampaikan pelajaran.
   b. Hiṣṣoh Ṡāniyah : Jam 21.30 sampai 23.00 Istiwa', dengan ketentuan Jam 21.30 s.d. 22.00 untuk pendalaman dan jam 22.00 s.d. 23.00 untuk menyampaikan pelajaran.

B. MUSYAWARAH

1. Tingkat Ibtidā'iyah:
   Mulai jam 14.00 s.d. 16.00 Istiwa', dengan ketentuan Jam 14.00 s.d. 14.30 digunakan untuk muḥāfaẓah dan Jam 14.30 s.d. 16.00 untuk membaca dan membahas materi pelajaran.

2. Tingkat Ṡanāwiyah dan Āliyah:
   Mulai jam 11.00 s.d. 13.00 Istiwa', dengan ketentuan dengan ketentuan Jam 11.00 s.d. 11.30 digunakan untuk muḥāfaẓah dan Jam 11.30 s.d. 13.00 untuk membaca dan membahas materi pelajaran.

C. KWARTAL

1. Kwartal I mulai masuk sekolah

2. Kwartal II mulai tanggal 01 Muḥarrom
3. Kwartal III mulai tanggal 01 Robī’ul Akhīr
4. Kwartal IV mulai tanggal 01 Jumādil Akhīrah

D. PEMBAGIAN DAN PERPINDAHAN

1. Pembagian lokal dilaksanakan pada akhir tahun setelah Sidang Besar.
2. Perpindahan mustaḥiq dilaksanakan pada setiap kwartal dan realisasinya dikonsultasikan antar mustaḥiq yang bersangkutan.
3. Musthaiq yang sudah ditentukan dalam satu kelompok tidak boleh pindah ke kelompok lain.
4. Pelajaran yang diajarkan oleh lebih dari satu Munawwib, tidak diadakan perpindahan dari bagian yang telah ditentukan.
5. Perpindahan siswa dilaksanakan setiap kwartal mulai dari lokal A1 ke A2, A2 ke A3, dan seterusnya. Sedangkan kelas yang dikelompokkan dalam satu bagian (A, B, C atau D) dilakukan perubahan pengelompokan pada waktu naik tingkatan.
6. Siswa yang sudah ditentukan dalam satu kelompok tidak boleh pindah ke kelompok lain.
7. Organisasi kelas tetap menjadi satu.
8. Pembentukan Pengurus dan Ra’īs kelas dilaksanakan satu minggu setelah hari masuk sekolah.

Lampiran 9

TATA TERTIB
MADRASAH HIDAYATUL MUBTADI'IEN
PESANTREN LIRBOYO KEDIRI

BAB I
KEWAJIBAN PENGAJAR

Pasal 1
Kewajiban Umum

1. Mendidik dan mengajar siswa.
2. Mengatur ketertiban dan kedisiplinan dalam kelas masing-masing.
3. Mengawasi kebersihan dan kesopanan siswa.
4. Berusaha meningkatkan kemampuan anak didiknya terutama dengan cara musyāfahah dan murāja`ah (mengulangi) pelajaran yang telah lewat.
5. Membuat 10 (sepuluh) soal tiap *tamrīnan* (ujian).

Pasal 2
Kewajiban ketika Akan Mengajar

1. Mempersiapkan pelajaran yang akan diajarkan.
2. Musyawarah antar mustaḥiq kelasnya dalam membuat soal tamrīnan, memberi makna dan pemahaman pada pelajaran yang diajarkannya, demi keseragaman dan kesamaan.
3. Berpakaian sopan syar'an wa 'ādatan.
4. Datang di ruang kelas selambat-lambatnya 15 menit sebelum pelajaran berlangsung.

Pasal 3
Kewajiban ketika di dalam Kelas

1. Membubuhkan tanda tangan, nama terang dan nama pelajaran yang diajarkan dalam buku absen pengajar.
2. Meneliti absen siswa dan sekali tempo mengabsennya.
3. Berlaku adil terhadap semua siswa.
4. Berbicara sopan dan santun.
5. Berdiri dalam menyampaikan pelajaran yang butuh berdiri.
6. Mengelilingi dan mengawasi siswa pada saat tamrīnan.
7. Mendisiplinkan waktu sekolah.
8. Berada dalam ruang kelas selama jam pelajaran berlangsung.

Pasal 4
Kewajiban ketika di luar Kelas

1. Mengatur dan mengawasi anak didik, terutama mengenai pelajaran dan pelaksanaan musyāwarah.

2. Bila tidak mengajar/użur, sehari sebelumnya harus memberitahukan kepada Mufattisy yang bersangkutan.
3. Mendatangi rapat/sidang yang telah ditentukan.
4. Mentaati seluruh keputusan rapat/sidang.
5. Bilamana akan meletakkan jabatan, sekurang-kurangnya tujuh hari sebelumnya harus meminta pertimbangan (konsultasi) kepada Mufattisy masing-masing)
6. Menjadi contoh dan tauladan tauladan dalam segala hal kebaikan.
7. Sedapat mungkin mengaji/mengkuti pengajian dan berjamaah di masjid.

BAB II
LARANGAN PENGAJAR

Pasal 5

1. Menambah kurikulum pelajaran.
2. Merubah pelajaran sebelum mendapat izin dari Mufattisy masing-masing.
3. Memberikan keterangan yang tidak dapat dipahami oleh anak didiknya.
4. Mengumpulkan satu bagian dengan bagian yang lain.
5. Melakukan sesuatu yang dapat merendahkan kehormatan.
6. Bergurau/mbanyol terutama dengan anak didiknya.
7. Menggunakan pengeras suara.
8. Pulang sebelum waktu sekolah selesai.
9. Berada di luar ruangan kelas selama jam pelajaran berlangsung.

BAB III
SANGSI

Pasal 6

Pengajar yang tidak mematuhi tata tertib ini, wajib tunduk atas kebijakan Pimpinan Madrasah.

BAB IV
CATATAN TAMBAHAN

Pasal 7

1. Pengajar tingkat Tsanawiyah dan Aliyah bila tidak bisa mengajar/użur, harus mencari pengajar pengganti dari pengajar kelas yang bersangkutan atau Mufattisy kelasnya.
2. Pengajar yang mengalami kemusykilan dalam hal pelajaran dan pengajaran diharap konsultasi kepada Mufattisy masing-masing.
3. Para Pengajar ditekankan untuk meningkatkan kemampuan baca kitab kosongan dan menulis kepada anak didiknya.

BAB V
KEWAJIBAN SISWA

Pasal 8
Kewajiban ketika Akan Masuk Sekolah

1. Menyediakan alat-alat belajar.
2. Berpakaian sopan syar'an dan wa 'ādatan.
3. Berbaju putih tiap hari Senin dan kamis.
4. Datang di ruang kelas selambat-lambatnya 10 menit setelah bel pertama.
5. Menjaga ketertiban dan kesopanan.

Pasal 9
Kewajiban ketika di Dalam Kelas

1. Duduk dan berbaris dengan rapi.
2. Muḥafadzoh sampai jam pelajaran.
3. Setia dan sedia menerima pengajaran.
4. Menjaga ketertiban dan kebersihan.

Pasal 10
Kewajiban ketika di Luar Kelas

1. Menghormati pengajar, buku dan kitab-kitabnya.
2. Mengikuti musyawarah.
3. Berbudi baik dan sopan, haliyah dan maqoliyah
4. Sholat berjama'ah di masjid dengan berpakaian sopan syar'an wa'adatan.
5. Mengaji yang sesuai dengan martabatnya.
6. Membayar Syahriyah selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan.
7. Minta izin kepada pengajar (mustaḥiq) sewaktu tidak dapat masuk sekolah/musyawarah.
8. Memberitahu kepada pengajar (mustaḥiq) dan pimpinan madrasah sewaktu pindah/pulang.

BAB VI
LARANGAN SISWA

Pasal 11
Larangan di Dalam Kelas

1. Membuat gaduh dan tepuk tangan
2. Menyatakan hadir kawan yang tidak masuk
3. Keluar masuk kelas tanpa izin
4. Berbuat curang di waktu ujian/tamrin
5. Berambut gondron, bersemir dan berkuku panjang.

Pasal 12
Larangan di Luar Kelas

1. Beramai-ramai di waktu pulang
2. Mengganggu kelas lain
3. Memindah/merusak hak milik madrasah
4. Melewati ruang yang masih digunakan kegiatan sekolah.

BAB VI
SANGSI

Pasal 13

Siswa yang tidak mematuhi tata tertib ini wajib tunduk atas kebijakan Pimpinan Madrasah.

BAB VII
CATATAN TAMBAHAN

Pasal 14

1. Siswa lama diberi hak untuk meloncat ke kelas atasnya dengan syarat:
   a. Nilai Jayyid Awwal
   b. Sepengetahuan semua Mustaḥiq dan Mudīr yang bersangkutan
   c. Melalui tes khusus.
2. Semua siswa MHM tidak diperbolehkan mengikuti ujian persamaan (UPERS) dan sekolah di selain Madrasah Hidayatul Mubtadi'ien, kecuali Tingkat Aliyah diperbolehkan hanya kuliah di Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri.
3. Siswa nduduk yang bukan asli Kediri wajib menempati di Pondok HY, Pondok Tegal Arum, Pondok Ma’unah Sari, Banjar Melati, Salafiyah atau Pondok Pesantren lain di sekitar Lirboyo.

Lampiran 10

DAFTAR PENGAJIAN WETONAN PESANTREN LIRBOYO KEDIRI TAHUN 2006-2007

NO	NAMA QĀRI’	NAMA KITĀB	WAKTU	TEMPAT
01	KH. Aḥmad Idrīs Marzūqi	Tafsīr al-Jalālalin	7.30 WIS	Serambi Masjid
		Iḥyā’ Ulūm al-Dīn	Ba`da Ẓuhr	
02	KH. Muḥammad Anwār Manṣūr	Tafsīr al-Jalālalin	13.00 WIS	Dalem (P3HM)
		Nihāyat az-Zain	Ba`da Ṣubḥ	
03	KH. Kafā Bihi Maḥrūs `Aly	Tafsīr Munīr	Ba`da Ẓuhr	Dalem (PP. HM)
		Ṣaḥīḥ al-Muslim	Ba`da Aṣr	
		Al-Iqnā`	Ba`da Ṣubḥ	
04	KH. Muḥammad Ṭāhir Marzūqi	Tafsīr Munīr	5.30 WIS	Dalem KH. Muḥammad Ṭāhir Marzūqi
		Tajdīd aṣ-Ṣarīḥ	6.30 WIS	
05	KH. Baḥr al-`Ulūm Marzūqi	Iḥyā’ Ulūm al-Dīn	11.00 WIS	Serambi Masjid
		Sharḥ Ta`līm al-Muta`alim	11.00 WIS	Serambi Bawah Perpustakaan
06	KH. Nur Ḥamīd Zainūri	Sharḥ Sullam at-Taufīq	6.00 WIS	-
07	KH. An`im Falāḥ al-Dīn Maḥrūs	Kifāyat al-Aḥyār	Ba`da Aṣr	Dalem KH. An`im
08	KH. Māḥin Ṭahā	Ṣaḥīḥ al-Bukhāri	Ba`da Ishā’	PP Dār as-Salām
		Tafsīr al-Jalālalin	Ba`da Aṣr	
		Muṭāla` al-Masīrāt	Ba’da Jum`at	
		Sharḥ Dalāil al-Khaoirāt	Setiap Jum`at	
09	Ustāż Anang Dār an-Najāḥ	Taushīḥ al-Mustafidīn	16.00 WIS	Al-Iḥsān Lantai III
		Al-Mursidīy	13.00 WIS	Al-Iḥsān Lantai II No. 6
10	Ustāż Ṭohāri Muslim	Ghāyat al-Wuṣūl	13.00 WIS	Al-Iḥsān Lantai I No. 3
11	Ustāż Aḥmad Shaikh	Tawshikh `Alā ibn Qāsim	16.00 WIB.	Al-Muḥāfaẓah No. 4.

12	Ustāż Muḥammad Nu`mān al-Riḍā	Fatḥ Rabb al-Bariyyah Sharkh al-`Imriṭiy	16.00 WIS	Ruang an-Nahḍah
13	Ustāż Mukhliṣīn	Taswīq al-Khalān	21.00 WIS	Kamar al-Firdaus
14	Ustāż Yūsuf Ghazāliy	Tawshikh `Alā ibn Qāsim	16.00 WIS	Al-Ikhlāṣ Lantai II
15	Ustāż Munawwir Riḍwān	Kailāni	16.00 WIS	Al-Ikhlāṣ Lantai III
16	Ustāż Nūr as-Salām	Mutammimah al-Ajrumiyyah	16.00 WIS	Al-Ittiḥād I Lantai III
17	Ustāż Muḥammad Iḥsān	Al-Mawāhib as-Saniyyah (Sharkh al-Manẓūmah al-Farā'id al-Bahiyyah)	13.00 WIS	Al-Ittiḥād II Lantai II Ruang V
18	Ustāż KHālid Afandi	Daḥlān	16.00 WIS	Al-Iḥsān Ruang VI
19	Ustāż Anas Mukhliṣān	Sharkh ibn `Aqīl	16.00 WIS	Al-Iḥsān Lantai II Ruang IV
20	Ustāż Abd al-Rashīd	Fatḥ al-Jawwād	16.00 WIS	Al-Iḥsān Lantai II Ruang V
21	Ustāż Munawwir Zuhriy	Al-Asbāh wa az-Naẓā'ir	16.00 WIS	Al-Iḥsān Lantai I Ruang III
22	Ustāż Basūni Būṭī	Ḥilyat al-Lubb al-Maṣūn	16.00 WIS	Al-Ikhlāṣ No. III
		`Izzat al-Nashi'īn	16.00 WIS	Al-Ikhlāṣ No. IV
23	Ustāż Labīb Abū Bakr	`Umadat as-Sālik wa `Uddat al-Nāsik	16.00 WIS	Al-Iḥsān No. I.
24	Ustāż Agūs Ibrāhīm Ḥāfiẓ	Tanbīh al-Ghāfilīn	16.00 WIS	Perpustakaan al-Mu'tamar
25	Ustāż Ibn Sa`īd Ḥazīni	Inārat ad-Dujā	16.00 WIS	Al-Muḥāfaẓah No. III.
26	Ustāż Ma`mūn Abd ar-Rashīd	Ḥaill al-Ma`qūd Sharkh Naẓm al-Maqṣūd	16.00 WIS	Ruang al-Nahḍah
27	Ustāż Himawan Azīz Salam	Sharkh Sullam at-Taufīq	16.00 WIS	Al-Ittiḥād II No. IV.
28	Ustāż Asnawi Riḍwān	Al-Ajwibah al-Ghāliyah	09.00 WIS	Al-Ittiḥād II

29	Ustāż Agūs Dakhlān Riḍwān	Ifādat aṭ-Ṭullāb	07.00 WIS	Al-Iḥsān No. III
30	Ustāż Yāsīn Yūsa`	Kifayāt al-Aṣḥāb	13.00 WIS	Al-Ikhlāṣ No. IX
31	Ustā` Mużakkir Ibrāhīm	`Uqūd al-Lijain	13.00 WIS	Al-Ittiḥād II Ruang I

Lampiran 11

DEWAN GURU
MADRASAH DINIYAH HM AL-MAHRUSIYAH 2007/2008

PK. I

NO	NAMA	PENGAJAR	KELAS	ALAMAT
1	Ihya Ulumuddin	MQ	PK-1 A	Pasuruan
2	Imam Washoli	MB		Malang
3	Ali Kurniawan	MQ	PK - 1 B	Lampung
4	Syarifuddin	MB		Tegal
5	Abdul Jabbai	MQ	PK-1C	Brebes
6	Muchtar Shohib	MB		
7	Fauzan	MQ	PK-1D	Kebumen
8	Ali Mahyani	MB		

PKII

NO	NAMA	PENGAJAR	KELAS	ALAMAT
1	Saiful Aminin, S.Pdl	MQ	PK II	Brebes
2	Slamet Mf, S.Ag	MB		Banjar Negara
3	Masyhudi Alwi	MB		Nganjuk

MTs I

NO	NAMA	PENGAJAR	KELAS	ALAMAT
1	Abdul Mutholib	MQ	MTS - 1 A	Brebes
2	Asy'ari Rasyid	MB		Kediri
3	Jamaluddin	MQ	MTS - 1 B	Indramayu
4	Shobirin	MB		Cirebon
5	M. Subhi	MQ	MTS- 1C	Pekalongan
6	Abdul Hafidl	MB		Gresik
7	Kasduri	MQ	MTS - 1 D	Rembang
8	Hasan Bisri	M3		Sumatra
9	Saiful Shofa	MQ	MTS - 1 E	Brebes
10	Asy'ari Rasyid	MB		Kediri

MTs II

NO	NAMA	PENGAJAR	KELAS	ALAMAT
1	Budairi Utsman	MQ	MTs II A	Blitar
2	Falih Mubarok	MB		Rembang
3	Asep Awaluddin	MQ	MTs II B	Bekasi
4	Falih Mubarok	MB		Rembang

5	Choiri Shonhaji	MQ	MTs II C	Sampang
6	Ridlwan Tsabit	MB		

MTs III

NO	NAMA	PENGAJAR	KELAS	ALAMAT
1	Muhtarom	MQ	MTs III A	Banyuinas
2	Khoiruddin	MB		Bandung
3	Aziz Muslim	MQ	MTs III B	Salatiga
4	Khoiruddin	MB		Bandung

ALIYAH I

NO	NAMA	PENGAJAR	KELAS	ALAMAT
1	Ali Afifi, S.Pdl	MQ	I ALY	Tegal
2	Drs. Faruq Qusyairi	MB		Pekalongan
3	Yahya Utsman			Kediri
4	M. Muhson,. S.Pdl			Trenggalek
5	Suryono Umar,			Kebumen

ALIYAH II

NO	NAMA	PENGAJAR	KELAS	ALAMAT
1	Zainul Arifin, S.Sos.I	MQ	II ALY	Demak
2	KH. Imam Yahya Mahrus	MB		Lirbovo
3	HM. Rouf			Sarang
4	Zaenal Fatihin			Kediri
5	Abdul Muiz Mannan			Indramayu

ALIYAH III

NO	NAMA	PENGAJAR	KELAS	ALAMAT
1	Badrus Salam	MQ	IIIALY	Malang
2	KH. Imam Yahya Mahrus	MB		Lirboyo
3	K. Reza Ahmad Zahid, Lc			Lirboyo
4	HM. Rouf			Sarang
5	Yahya Utsman			Kediri

Lampiran 12

DAFTAR GURU MADRASAH TSANAWIYAH HM TRIBAKTI

NO	NAMA	IJAZAH	JURUSAN	BIDANG STUDI
1	MOH. YUSUF	Sarmud/UIT Kediri	Tarbiyah	Ke-NU-an
2	NURHADI ZUHDIN	Sarmud/UIT Kediri	Tarbiyah	Qur'an Hadits
3	LILIK NURHAYATI	S-1/IKIP PGRI Kediri	Pend. Bhs dan Sastra Indonesia	Bhs Indonesia
4	ST. FANI'MAH	S-1/IAIT Kediri	Pend. Agama Islam	SKI /Kertakes
5	JUNIARTI	S-1/IKIP Malang	Pend. Bhs Inggrjs	Bhs Inggris
6	UMMU AIMAN	S-1/IAIT Kediri	PAI	Fiqih
7	DJARIYAH	S-1/IAIT Kediri	Pend. Agama Islam	Qur'an Hadits
8	MAMBAUL ULUM	S-1/UNIBRAW Malang dan Akta IV	Matematika	Matematika
9	SITI MAHNUNAH	S-1/UNM Malang	Pend. Ek. Konsen. Akuntansi	Ekonomi
10	SITI ZAHRATUL HIDAYAH	S-1/STAIN Tulungagung	Pend. Agama Islam	Qur'an Hadits
11	ACHMAD ROFII	S-1/IKIP Malang	Pend. Olah Raga dan Kesehatan	Penjaskes
12	ANDHI KRISTIAWAN	S-1/IKIP Malang	Pend. Jasmani, Kesehatan dan rekreasi	TIK
13	DWI HARIYANI	S-1/IKIP PGRI Kediri	Pend. Bhs dan Sastra Indonesia	Bhs Indonesia
14	JAWARI MUSLIM	S-1/IKIP PGRI Kediri	Pend. Bhs Inggris	Bhs Inggris
15	MAHMUDI YUNIF PRIYANTO	S-1/UNIBRAW Malang dan Akta IV	Kimia	Kimia
16	M. All MASROFI	S-1/UNM Malang	Pend. Fisika	Fisika / Kimia
17	TIN TISNOWAT!	S-1/UMK Kudus	Pend. Bhs Inggris	Bhs Inggris
18	M. NGISOM HIDA	S-1/IPB Bogor dan Akta IV	Keteknikan Pertanian	Fisika / Kimia
19	KHIZBA DIANA	S-1/UNESASurabaya	Pend. Biologi	Biologi / Fisika
20	MASRUKAH	S-1/IAIT Kediri	Pend. Agama Islam	Kertakes
21	FATAH SA'DI	MA HM Tribakti	IPS	Bhs Arab
22	BINTI MASRURIN M	S-1/STAIN Malang	Bhs Arab	Bahasa Arab
23	MOCH. WAHYUDI	S-1/Uniska Kediri	Akuntansi	TIK
24	NURUL MAMENUN	S-1/IAIT Kediri	PAI	Bhs Arab

25	SRI HARTATIK	S-1/IAIN Sunan Ampel	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Aqidah Ahlaq
26	UMI DARWATI	S-1/UNESA Surabaya	Pend. Matematika	Matematika
27	ALI AFIFI	S-1/IAIT Kediri	PAI	FIQIH 9
28	NAFIT ANDAYANl	S-1/IKIP PGRI Kediri	Pend. Jasmani. Keseh. dan rekreas	Penjaskes
29	KHOIRUL MAUK	D-3/IKIP MALANG	Pend. Geografi	Geografi
30	ROSIANA	S-1/UNM Malang	Pend. Biologi	Biologi / Fisika
31	AHMAD ZUBAIRI	S-1/IKIPPGRI Kediri	Pend. Matematika	Matematika
32	SRI LESTARl	S-1/UNEJ Jember	Ilmu Kesejahteraan Sosial	PPKN
33	ARIF KUSUMA	S-1/UNM Malang	Pend. Sejarah	Sejarah Geografi
34	UMI HABIBAH	S-1/IAIT Kedin	Pend. Agama Islam	Bhs Daerah

Lampiran 13

DAFTAR GURU MADRASAH ALIYAH HM TRIBAKTI

NO	NAMA	IJAZAH	JURUSAN	BIDANG STUDI
1	MOH. YUSUF	Sarmud/UIT Kediri	Tarbiyah	Ke-NU-an
2	NURHADI ZUHDIN	Sarmud/UIT Kediri	Tartiyah	Quran Hadits
3	M. BUSRO	Sarmud/UIT Kediri	Tarbiyah	Ke-NU-an
4	SURYONO	S- 1/1 AIT Kediri	PAI	Aqidah Ahlaq
5	MOH. FARUQ	S-1/IAIT Kediri	PAI	Qur'an Hadits
6	TAUFIQ HIDAYAT	S- 1/1 AIT Kediri	PAI	Fiqih
7	MOHAMAD EDY BASUKI	S-1/UNMER Malang	Hukum Keperdataan	Pend. Kewarganegaraan
8	ACHMAD BAEDOWI	S-1/UNM Malang	P. Sastra & Sejarah	Sejarah
9	MUKTI RAHAYU	D3/IKIP PGRI Kediri	Pend. Bhs dan Sastra Indonesia	Bhs Indonesia
10	MUJAHID ALEX YAHYA	S-1/AI Azhar Kairo Mesir	Hukum Keperdataan	Bhs Asing (Arab)
11	MOHAMMAD ABDULBAR	S-1/UNEJ Jember	Hukum Keperdataan	Sosiologi
12	JUNIARTI	S-1/UMM Malang	Pend. Bhs Inggris	Bhs Inggris
13	MUHAMAD AQIM ADLAN	S-1/IAIN Malang	PAI	Fiqih
14	YULIANI	S-1/IKIP PGRI Kediri	Pend. Ekonomi – Akuntansi	Ekonomi Akuntansi
15	TRI WIDIASTUTI SOEJONO	S-1/UNAIR Surabaya	MIPA Matematika	Matematika
16	UMMU AIMAN	S-1/IAIT Kediri	PAI	Sejarah Kebudayaan Islam
17	DJARIYAH	S-1/IAIT Kediri	PAI	Qur'an Hadits
18	SITI MAHNUNAH	S-1/UNM Malang	Pend. Ekonomi Konsen. Akuntansi	Ekonomi Akuntansi
19	YULIATI	S-1/IKIP Surabaya	Pend. Sejarah	Sejarah
20	ACHMAD ROFII	S-1/IKIP Malang	Pend. Olah Raga dan Kesehatan	Penjaskes
21	DWI HARIYANI	S-1/IKIP PGRI Kediri	Pend. Bhs dan Sastra Indonesia	Bhs Indonesia
22	JAWARI MUSLIM	S-1/IKIP PGRI Kediri	Pend. Bhs Inggris	Bhs Inggjns
23	MOCH. ROJIDAH KHOLIQ	S-1/IKIP PGRI Kediri	Pend. Bhs Inggris	Bhs Inggris

24	MAHMUDI YUNIF PRIYANTO	S-1/UNIBRAW Malang	Kimia	Kimia
25	SLAMET	S-1/IAIT Kediri	PAI	Aqidah Ahlaq
26	UYUNUL FAUZIYAH	S-1/IKIP MALANG	Pend. Kimia	Kimia
27	YULIATI	S-1/UNM Malang	Pend. Matematika	Matematika
28	M. ALI MASROFI	S-1/UNM Malang	Pend. Fisika	Fisika
29	TIN TISNOWATI	S-1/UMK Kudus	Pend. Bhs Inggris	Bhs Inggris
30	ABDUL QODIR	S-1/UNDAR Jombang	ilmu Pend.	PPKN
31	MOCHAMMAD NGISOM HIDA	S-1/IPB Bogor	Keteknikan Pertanian	Fisika
32	KHIZBA DIANA	S-1/UNESA Surabaya	Pend. Biologi	Biologi
33	SULISTIYONO TIAS WIGUNO	S-1/IKIP PGRI Kediri	Pend. Biologi	Biologi
34	ZAENAL ARIFIN	S-1/IAIN Sunan Ampel Sui	Pend. Agama	Sejarah Kebudayaan Islam
35	MASRUKAH	S-1/IAIT Kedin	PAI	Seni Budaya
36	DIMYATHI	S-1/IKIP PGRI Kedin	Pend. Olah Raga	Penjaskes
37	BINTI MASRURIN M	S-1/STAIN Malang	Bhs Arab	Bhs Arab
38	MOCH WAHYUDI	S-1/Uniska Kediri	Akuntansi	Ekonomi
39	NURUL MAMENUN	S-1/IAIT Kediri	PAI	Fiqih
40	SUNHADJI ACHMAD BASORI	S-1/UNM Malang	Pend. Bhs Asing	Bhs Arab
41	ASEPAWALUDIN	S-1/IAIT Kediri	Ahwaf As-Syahsiyah	Pend Kewarganegaraan
42	IDA NURHAYATI	S-1/1AIT Kediri	PAI	Aqidan Ahlaq
43	LUQMAN HAKIM	S- 1/1 AIT Kediri	PAI	Fiqih
44	ERHI BAGUS PRASETYA	S-1/UNM Malang	Pend. Geografi	Geografi
45	UMI DARWATI	S-t/UNESA Surabaya	Pend. Matematika	Matematika
46	ETNA IYYANA MISYKIYAH	S-1/AL-AHQOFF UNIV Y,	SYARIAH	Bhs Arab
47	MOH. All MASDUKI	S-1/IAIT Kediri	Tarbiyah	Sejarah
48	REZA AHMAD ZAHID	S1 al-Ahqaf Yaman/S2 UGM	Syariah/Perbandingan Agama	Fiqih
49	AGUSTINA DWIMARDIANI PRIATININA	D-3/UNMER Malang	Manajemen Informatika	Teknologi Informasi Komunika

50	AHMAD ZUBAIRI	S-1/IKIP PGRI Kediri	Pend. Matematika	Matematika
51	ARIF KUSUMA	S-1/UNM Malang	Pend. Sejarah	Sejarah / Seni Budaya

Lampiran 14

DAFTAR MATA PELAJARAN DAN KITAB STANDAR MADRASAH DINIYAH AL-MAHRUSIYAH

PROGRAM KHUSUS I

NO	MATA PELAJARAN	KITAB STANDAR
1	Naḥwu	Al-Awāmil
2	Fiqih	Durorul Bāhiyah
3	Tajwīd	Tuḥfathul Aṭfāl
4	Tauḥīd	Aqīdatul Awwām/Qotrul Ghoits
5	Ilmu Akhlāq	Alālā
6	Faṣalātan	Safīnatus Ṣalāh
7	Muḥāfaẓah	Alālā
8	Kitābah	Arab Pegon
9	Imlā’	

PROGRAM KHUSUS II

NO	MATA PELAJARAN	KITAB STANDAR
1	Naḥwu	Taqrīrot Al Imriṭī
2	Ṣaraf	Amṡilatut Taṣrifiyyah
3	Fiqih	Fatḥul Qorīb
4	Tajwīd	Tuḥfathul Aṭfāl
5	Tauḥīd	Jawāhirul Kalāmiyyah
6	Ilmu Akhlak	Taisirul Khalāq
7	Kitābah	
8	Muḥāfaẓah	Naẓam Al Imriṭi
9	Imlā’	

TINGKAT TSANAWIYAH KELAS I

NO	MATA PELAJARAN	KITAB STANDAR
1	Fiqih	Safīnatun Najā
2	Ilmu Ṣaraf	Amṡilatut Taṣrifiyyah
3	Ilmu Naḥwu	Tuḥfatus Ṡāniyah
4	Ilmu Tauḥīd	Tijānud Durori
5	Ilmu Akhlāq	Waṣāya

6	Muḥāfaẓah	Taṣrīf Iṣṭilaḥi
7	Kitābah	
8	Imlā’	

TINGKAT TSANAWIYAH KELAS II

NO	MATA PELAJARAN	KITAB STANDAR
1	Fiqih	Safīnatun Najā
2	Ilmu Tauḥīd	KharīdatuI Bahiyah
3	Ilmu Naḥwu	Tuḥfatus Ṡāniyah II
4	Ilmu Ṣaraf	Taṣrīf Lughowi
5	Ilmu Akhlāq	Waṣāya II
6	Muḥāfaẓah	Qawā'iduṣ Ṣarfiyah I
7	Qawā`id Ṣarfi	Qawā'iduṣ Ṣarfiyah I
8	Kitābah dan Imlā’	

TINGKAT TSANAWIYAH KELAS III

NO	MATA PELAJARAN	KITAB STANDAR
1	Fiqih	Fatḥul Qorīb
2	I'mu Tauḥīd	Jawahirul Kalamiyah
3	Ḥadīs	Arba'in Nawāwi
4	Ilmu Naḥwu	Al Imriṭi
5	Ilmu Ṣaraf	Maqsūd
6	Ilmu Akhlāq	At Taḥliyah
7	Qoidah Ṣarfi	Qawā'iduṣ Ṣarfiyah II
8	Muḥāfaẓah	Naẓam Al Imriṭi
9	Kitābah	
10	Imlā’	

TINGKAT ALIYAH KELAS I

NO	MATA PELAJARAN	KITAB STANDAR
1	Tafsīr Al Qur an	Juz 'Amma
2	Ilmu Tauḥīd	Kifāyatul Awām
3	Ilmu Hadist	Baiqūniyah

4	Hadist	Bulūghul Marām I
5	Fiqih	Minhajut Ṭālibirt I
6	Usul Fiqh	Waraqāt
7	Qowaidul I'rob	Al Qowā`idul I'rāb
8	Ilmu Naḥwu & Ṣaraf	Alfiyah Ibnu Mālik I
9	Ilmu Akhlāq	Ta'līmul Muta'allim
10	Muḥāfaẓah	Alfiyah Ibnu Mālik I
11	Imlā’	

TINGKAT ALIYAH KELAS II

NO	MATA PELAJARAN	KITAB STANDAR
1	Tafsīr	Sab'ul Munjiat
2	Ilmu Tafsīr	Itmamut Duroyah
3	IlmuTaṣawwuf	Bidāyatul Hidāyah
4	Ḥadīs	Bulūghul Marām II
5	Fiqih	Minhajut Tholibin II
6	Qowāidul Fiqhiyah	Faraidul Bahiyah
7	Ilmu Naḥwu & Ṣaraf	Alfiyah Ibnu Mālik II
8	Muḥāfaẓah	Alfiyah Ibnu Mālik II
9	Imlā’	

TINGKAT ALIYAH KELAS III

NO	MATA PELAJARAN	KITAB STANDAR
1	Tafsīr	Sab'ul Munjiat
2	Ilmu Balāghah	Jauharul Maknūn
3	Ilmu Mantīq	Sullamul Munawroq
4	Fiqh	Minhajut Ṭālibin III
5	Tasawuf	Risālatui Mu'āwanah
6	Uṣūl Fiqh	Tashīlut Turuqāt
7	Ḥadīs	Bulūghul Marām III
8	Muḥāfaẓah	Nadlom Jauharul Maknun
9	Imlā’	

Lampiran 15

WAKTU PEMBELAJARAN
MADRASAH DINIYAH AL-MAHRUSIYAH

A. SEKOLAH

No.	Program	Hissoh	Waktu
1.	Program Khusus I	Satu Hissoh	: 15.00-17.00
2.	Program Khusus II	Dua Hissoh	: 13.30-15.30 15.30-17.00
3.	Tsanawiyah Kls I, II, dan III	Satu Hissoh	: 15.00-17.00
4.	Aliyah Kls I, II, Dan III	Dua Hissoh	: 13.30-15.30 15.30-17.00

KETERANGAN:

1. Program Khusus I dan Tsnawiyah Kelas I, II, dan III:
   Pukul 15.00-15.30 untuk Muhafadhoh
   Pukul 15.30-16.00 untuk Peningkatan Materi
   Pukul 16.00-17.00 untuk Penyampaian Materi
2. Program Khusus II dan Aliyah Kelas I, II, dan III:
   Pukul 13.30-14.00 dan 15.30-15.45 untuk Muhafadhoh
   Pukul 14.00-14.30 dan 15.45-16.00 untuk Peningkatan Materi
   Pukul 14.30-15.30 dan 16.00-17.00 untuk Penyampaian Materi

B. **MUSYAWARAH**

1. **Musyawarah Pelajaran**
   Seluruh Tingkatan wsijib mengikuti Musyawarah, dilaksanakan setiap hari mulai jam19.00 s.d. 20.00 WIB.
2. Musyawaroh Fathul Qorib
   Bagi Tingkat PK II, Aliyah I, II dan III wajib mengikuti Musyawaroh Fathul Qorib yang diiaksanakan setiap malam Minggu jam 19.00-22.00 WIB.
3. Lajnah Bahtsul Masail
   Bagi Tingkat PK II, Aliyah I, II dan III wajib mengikuti Bahtsul Masa'il yang dilaksanakan setiap malam Rabu jam 19.00 WIB sampai 22.00 WIB.

Lampiran 16

TATA TERTIB
MADRASAH DINIYAH AL-MAHRUSIYAH

A. PENGAJAR

1. KEWAJIBAN

Pasal 1: Umum

1 Mendidik dan mengajar murid.
2 Mengatur ketertiban dan kedisiplinan dalam kelas masing-masing.
3 Koordinasi dengan PKM.
4 Bekerjasama dengan guru setingkat dalam penentuan muhafadhoh umum, pembuatan dan lain sebagainya.
5 Mendorong dan memajukan kemampuan murid untuk memahami hal-hal yang abstrak (kurang jelas)
6 Menjadi suri tauladan yang baik dalam segala hal
7 Membuat laporan kegiatan belajar mengajar setiap sidang pleno dengan pencatatan yang lengkap
8 Memilih dan menentukan. siswa teladan setiap tingkatan masing-masing.
9 Bertanggung jawab kepada kepala madrasah atas tugas yang diembannya.

Pasal 2: Akan Mengajar

1 Mempersiapkan materi/pelajaran yang akan diajarkan.
2 Musyawarah antar pengajar yang lain dalam melaksanakan tugasnya.
3 Berpakaian yang sopan dan rapi sesuai dengan tuntunan Akhlaqul Karimah.
4 Datang ke ruang kelas selambat-lambatnya 15 menit sebelum pelajaran dimulai.

Pasal 3 : Di dalam Kelas

1 Membubuhkan tanda tangan dan nama terang dalam buku absen guru setiap kali pertemuan.
2 Meneliti absen murid dan sekali tempo mengabsennya.
3 Mencatat siswa yang tidakmasuk.
4 Menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan jadwal dan materi yang telah ditentukan.
5 Menyampaikan materi pelajaran dengan bahasa yang diterima dan yang baik.
6 Memberikan evaluasi mata pelajaran kepada murid sesuai dengan materi yang telah disampaikan.
7 Berlaku adil dan bijaksana terhadap semua murid.
8 Membentuk keroisan kelas 2 kali dalam 1 tahim pelajaran dar kepengurusan kelas 1 kali dalam satu tahun pelajaran bagi Mustahiq.
9 Mendisiplinkan waktu yang ditentukan madrasah.

Pasal 4 : Di Luar Kelas

1 Mengawasi anak didiknya terutama mengenai mata pelajaran dan pelaksanaan musyawaroh.
2 Bila udzur atau tidak bisa mengajar, sehari sebelumnya harus ada pemberitahuan kepada PKM.
3 Menghadiri Sidang atau rapat yang telah di tentukan
4 Menyampaikan informasi pada orang tua/wali murid tentang prestasi belajar murid.
5 Mentaati seluruh keputusan PKM yang bersangkutan
6 Apabila berkeinginan meletakkan jabatannya, maka harus memberitahukan kepada WAKA yang bersangkutan 7 hari sebelumnya.
7 Diusahakan membeiikan mata pelajaran tambahan atau membuka pengajian kitab.

II. LARANGAN

1 Menambah dan atau merubah pelajaran sebelum mendapat izin dari PKM dan kepala madrasah.
2 Berbuat sesuatu yang bisa mencemarkan nama baik madrasah.
3 Bergurau atau melucu yang tidak mendidik terutama kepada anak didiknya. .
4 Pulang sebelum wakrunya.
5 Memberikan keterangan yang tidak bisa diipahami oleh anak didiknya.
6 Merokok di dalam kelas.

III. SANKSI

Barang siapa yang tidak mengindahkan tata tertib ini wajib tunduk dan .
paruh pada keputusan Pimpinan Madrasah.

B. SISWA

I. KEWAJIBAN

Pasal 1: Akan Masuk Sekolah

1 Menyediakan alat-alat sekolah.
2 Berpakaian sopan syar'an wa'adatan (lengan panjang)
3 Berbaju putih setiap hari senin dan kamis.
4 Hadir di ruang kelas selambat-lambatnya 5 menit setelah bel pertama.
5 Menjaga kesopanan dan kebersihan.
6 Sudah menulis materi pelajaran yang akan di sampaikan dengan memakai tinta hitam (bukan Bollpoint).
7 Mempersiapkan materi yang sudah di sampaikan.

Pasal 2: Di Dalam Kelas

1 Duduk dan berbaris dengan rapi.
2 Muhafadhoh sebelum pelajaran dimulai.
3 Menjaga kesopanan, ketertiban dan kebersihan.
4 Patuh dan menghormati guru dan Kitab-kitabnya.

Pasal 3 : Di Luar Kelas

1 Berbudi baik serta sopan tingkah laku dan ucapannya.
2 Mengikuti musyawarah kelas.
3 Mengaji yang sesuai dengan tingkatan dan kemampuannya.
4 Membayar syahriyah sesuai dengan ketentuan yang ada.
5 Meminta izin kepada bidang kesiswaan dan mustahiq yang bersangkutan atau setingkatan bi!a tidak dapat masuk sekolah atau musyawarah.
6 Memberi tahu bapak mustahiq atau pengurus madrasah apabila pindah atau pulang

II. LARANGAN

Pasal 1: Di Dalam Kelas

1 Berbuat gaduh (Tabuhan) ketika jam wajib belajar sedang berlangsung.
2 Menyatakan kehadiran kawan yang tidak masuk.
3 Keluar dan masuk ruangan tanpa izin pengajar.
4 Menyontek pada waktu midl atau ujian.
5 Berkuku panjang dan berambut gondrong.
6 Pindah ke kelas lain tanpa sepengatahuan pengajar atau pengurus.
7 Mengotori atau merusak Sarana dan Prasarana Kelas.

Pasal 2 : Di Luar Kelas

1 Berbuat keramaian dan gaduh ketika pulang.
2 Mengganggu kelas lain.
3 Memindah alat-alat madrasah.
4 Melewati ruangan yang masih dalam KBM.

III. SANKSI

Barang siapa yang tidak mengindahkan tata tertib ini wajib tunduk pada keputusan Pimpinan Madrasah.

IV. ATURAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum termakiub dalam tata tertib ini akan di adakan tindak lanjut di kemudian hari.

Lampiran 17

DATA GURU
MADRASAH DINIYAH AR-RISALAH
LIRBOYO KEDIRI JAWA TIMUR

<table>
<tr><th>NO.</th><th>NAMA PENGAJAR</th><th>JABATAN</th><th>TINGKATAN KELAS</th></tr>
<tr><td>01</td><td>Hasan Bisyri</td><td>Mudīr I</td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td>Abdul Hadi</td><td>Mudīr II</td><td>III ‘Aliyah</td></tr>
<tr><td>03</td><td>Zainal Abidin</td><td>Mudīr III</td><td>I ‘Aliyah</td></tr>
<tr><td>04</td><td>Abdul Rosyid</td><td>Mufattisy I</td><td>III ‘Aliyah</td></tr>
<tr><td>05</td><td>Abdul Hamid</td><td>Mufattisy II</td><td>III Tsanawiyah</td></tr>
<tr><td>06</td><td>Muhtarom</td><td>Mufattisy III</td><td>II Tsanawiyah</td></tr>
<tr><td>07</td><td>Shonhaji</td><td>Mustaḥiq</td><td>II Ibtida’iyyah</td></tr>
<tr><td>08</td><td>M. Faiq Mubarrok</td><td>Mustaḥiq</td><td>III Ibtida’iyyah</td></tr>
<tr><td>09</td><td>A. Burhanuddin</td><td>Mustaḥiq</td><td rowspan="2">IV Ibtida’iyyah</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Misbahul Munir</td><td>Mustaḥiq</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Musthofa</td><td>Mustaḥiq</td><td>V Ibtida’iyyah</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Abu Hamid</td><td>Mustaḥiq</td><td rowspan="2">VI Ibtida’iyyah</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Yahya Zakariya</td><td>Mustaḥiq</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Ibadul Asyrof</td><td>Mustaḥiq</td><td rowspan="4">I Tsanawiyah A</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Sun An Ghozi</td><td>Mustaḥiq</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Abdul Bar Nasikhun</td><td>Mustaḥiq</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Muhammad Najib</td><td>Mustaḥiq</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Supriyadi</td><td>Mustaḥiq</td><td rowspan="2">II Tsanawiyah</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Moh. Ihsan</td><td>Mustaḥiq</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Zainal Fanan</td><td>Mustaḥiq</td><td>III Tsanawiyah</td></tr>
<tr><td>21</td><td>Ahmad Busthomi</td><td>Mustaḥiq</td><td>I ‘Aliyah</td></tr>
<tr><td>22</td><td>Yazid Basthomi</td><td>Mustaḥiq</td><td>II ‘Aliyah</td></tr>
<tr><td>23</td><td>Musthofa Chuthbi</td><td>Mustaḥiq</td><td rowspan="3">I Tsanawiyah B</td></tr>
<tr><td>24</td><td>M.Fadholi</td><td>Mustaḥiq</td></tr>
<tr><td>25</td><td>Ahmad Nuhari</td><td>Mustaḥiq</td></tr>
<tr><td>26</td><td>Nur Anas Hasan</td><td>Munawib</td><td>II ‘Aliyah</td></tr>
<tr><td>27</td><td>Luthfi Hadi</td><td>Munawib</td><td>I ‘Aliyah</td></tr>
<tr><td>28</td><td>Mujahidin</td><td>Munawib</td><td>I Tsanawiyah</td></tr>
<tr><td>29</td><td>Didi Imron R</td><td>Munawib</td><td>III ‘Aliyah</td></tr>
<tr><td>30</td><td>Ulin Nuha</td><td>Munawib</td><td>II, V dan VI Ibt</td></tr>
</table>

31	Nur Sholeh	Munawib	I, II, III dan IV Ibt
32	Syukron Jazila	Munawib	I dan II Tsn
33	Sayidah Karimah	Munawib	V, VI Ibt, dan II Tsn
34	Siti Nur Aida	Munawib	I, III Tsn dan SP

Lampiran 18

DATA GURU
SDS AR-RISALAH
LIRBOYO KEDIRI JAWA TIMUR

No	Nama Pengajar	Jabatan
01	M Ali Ma'sum, SPdI	Kepala sekolah
03	Bahrudin	Wakasek
05	Sdr Abdul Mutholib	TU
07	Sdr Abdul Qodir	TU
09	A Supriadi	Guru
11	Areif Setyawardana	Guru
13	Endro Sudarsono	Guru
15	M Sulthon	Guru
17	Rowiyatun Nadzifah	Guru
18	Sayidah Karimah	Guru
19	Siti Nur Aida	Guru
20	Untung Eko Wati	Guru
21	Izzaturrofiqoh	Guru
22	Dewi Utari	Guru
23	Siti Uswatul Jannah	Guru
24	Mufidatul Husna	Guru
25	Nikmatul Hasanah	Guru
26	Isrofatul Hidayati	Guru

Lampiran 19

DATA GURU
SMP AR-RISALAH
LIRBOYO KEDIRI JAWA TIMUR

No	Nama	Tugas Mengajar
1	Rizgianto, ST	Matematika
2	Dwi Nur Aini, S.Pd	Matematika
3	Binti Mahmudah, S.Pd	Bahasa Indonesia
4	Trilisa Sundarwati, S.Pd	Bahasa Indonesia
5	Merna Dewi Hastuti, SS	Bahasa Indonesia
6	Adam Maliki, S.Pd	Bahasa Inggris
7	Isrofatul Hidayati, S.Pd	Bahasa Inggris
8	Erwin Hari Kurniawan	Bahasa Inggris
9	Maryatul Qibtiyah, S.Pd	Biologi
10	Rita Fajar Khoirul Auliya, S.Si	Biologi
11	Azzah Ulfiana Zamrud, S.TP	Fisika
12	Faida Ahmad Anshori, S.Si	Fisika
13	Istikomah, S.Si	Fisika
14	Aprilia Dwi Handayani, S.Pd	Kimia
15	M. Wazid Khusni, SH	PKn
16	Hafidz Marfu'	PKn, PAI
17	Lina Saptaria, S.Pd	Geografi
18	Endro Sudarsono, S.Pd	Ekonomi
19	Siti Fauziyah, SE	Ekonomi
20	Desy Indah Setyawati, S.TP	Sejarah
21	Marisca Trisnaningtyas	Penjaskes
22	Fitroh Yulana	Penjaskes
23	Bahrudin Salman	PAI
24	Solakodin Wirongi	TIK
25	Slamet Ridho	Bahasa Jepang
26	Saiful M.	Bahasa Arab

Lampiran 20

DATA GURU
SMA AR-RISALAH LIRBOYO KEDIRI JAWA TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2007 / 2008

No	Nama	L/P	Strata	Jurusan	Jabatan	Bidang Studi
1	M. Nur Anas Hasan, S.Ag, M.Pd	L	S2	TEP	Kep. Sekolah	-
2	Abdul Bar Nasihun	L	S1	PPKN	Waka. Sek	-
3	Moh. Manshur S.Q	L	S1	Teknik Elektro	Wali Kls XI B	Fisika
4	Bambang Eka Purnama S.Si	L	S1	Biologi	Guru	Biologi
5	Aan Nurfahrudianto S.Pd	L	S1	Matematika	Wali Kls X B	TIK
6	Hadi Mulyono S.Pd	L	S1	Dunia Usaha	Guru	Ekonomi
7	Purwadi S.Pd	L	S1	B. Inggris	Guru	B. Inggris
8	Nanik Nurcahyani S.Pd	P	S1	Teknik Kimia	Wali Kls XI A	Kimia
9	Ratna Sari Masjidah S.Pd	P	S1	Akuntansi	Guru	Geografi
10	Hesti Puspitasari S.Pd	P	S1	B. Inggris	Guru	B. Inggris
11	Ratna Murniati, S.Pd	P	S1	Matematika	Guru	Matematika
12	Tri Sudarmono, S.T	L	S1	Teknik Mesin	Guru	Fisika
13	Subagiyo, S.Pd	L	S1	Sejarah	Guru	Sejarah
14	Moh. Kusen, S.Pd	L	S1	B. Inggris	Guru	B. Inggris
15	Nurani Effendi, S.Pd	P	S1	B.Indonesia	Wali Kls XII B	B.Indonesia
16	Jenny Tri Januari Astuti, S.T	P	S1	Matematika	Wali Kls XII A	Matematika
17	Anwariyah, S.Pd	L	S1	B. Indonesia	Wali Kls X A	B. Indonesia
18	Leimina Samuel Orvalo	L	D2	B. Mandarin	Guru	B. Mandarin
19	Ulya	L	S1	B. Arab	Guru	B. Arab
20	Fitroh Yulaga	L	S1	Penjas	Guru	Penjaskes (putra)
21	Marisca Trisna Ningsih	L	S1	Pedjas	Guru	Penjaskes (putri)
22	M. Ichsan	L	S1	PAI	Guru	PAI

Lampiran 21

JADWAL KEGIATAN
PONDOK PESANTREN SALAFIY TERPADU AR-RISALAH

I. HARIAN UMUM

NO	WAKTU	JENIS KEGIATAN
1.	04.00 – 04.30	Bangun Tidur dan mandi pagi
2.	04.30 – 04.45	Persiapan sholat shubuh
3.	05.00 – 05.30	Jama’ah sholat shubuh
4.	05.30 – 07.00	Mengaji Al Qur’anul Karim
5.	07.00 – 07.15	Persiapan sekolah umum dan sarapan pagi
6.	07.20 – 10.00	Sekolah umum
7.	10.00 – 10.15	Istirahat sekolah dan makan snack
8.	10.15 – 12.15	Masuk kembali sekolah umum
9.	12.15 – 12.50	Persiapan jama’ah sholat dzuhur dan makan siang
10.	12.50 – 14.30	Tidur Siang
11.	14.30 – 15.00	Bangun tidur siang & persiapan sekolah Diniyyah
12.	15.00 – 16.30	Sekolah Diniyyah Hishoh Awal
13.	16.30 – 16.45	Istirahat sekolah Diniyyah (diisi sholat ‘Ashar)
14.	16.45 – 17.40	Sekolah diniyyah hishoh tsani
15.	17.40 – 18.00	Makan sore dan persiapan sholat maghrib
16.	18.00 – 18.45	Sholat Maghrib
17.	18.45 – 20.00	Belajar sekolah diniyyah bersama
18.	20.00 – 20.15	Jama’ah Sholat Isya’
19.	20.15 – 21.30	Belajar sekolah umum bersama
20.	21.30 – 22.00	Makan snack dan persiapan istirahat malam bagi yang tidak ngaji tafsir
21.	22.00 – 23.00	Ngaji tafsir
22.	23.00 – 04.00	Istirahat malam

II. JADWAL KEGIATAN HARI JUM’AT

NO	ALOKASI WAKTU	JENIS KEGIATAN
1.	17.30 - 18.00	Persiapan sholat Magrib (diisi dengan makan

		sore dan persiapan sholat Maghrib)
2.	18.00 - 18.15	Jama’ah Sholat Maghrib
3.	18.30 - 21.00	Diba’an, musyawarah, baca al Qur’an dan kaligrafi
4.	21.00 - 21.30	Persiapan sholat Isya dan pelaksanaannya
5.	21.30 - 22.00	Persiapan tidur (diisi dengan makan snack) dan pelaksanaannya
6.	04.00	Bangun tidur
7.	04.30 - 05.00	Persiapan sholat Shubuh
8.	05.00 - 06.00	Jama’ah sholat shubuh dilanjutkan istighosah bersama (tahlil)
9.	06.00 - 07.30	Ekstrakurikuler I dan Persiapan ekstra kurikuler II
10.	08.00 - 10.00	Pelaksanaan ekstrakurikuler II
11.	10.00 - 11.30	Persiapan Jama’ah sholat Jum’at
12.	12.30 - 13.00	Pulang dan Persiapan istirahat siang
13.	13.00 - 15.00	Istirahat siang
14.	15.00 - 17.30	Jam’iyyah bersama/ekstrakurikuler sore
15.	17.30 - 18.00	Persiapan sholat maghrib (diisi dengan makan sore)
16.	18.00 - 18.15	Jama’ah Sholat Maghrib
17.	Selanjutnya seperti biasa	

Lampiran 22

MATA PELAJARAN
MADRASAH QUR-AN AR-RISALAH
LIRBOYO KOTA KEDIRI

1. KURIKULUM

NO	TINGKATAN	PELAJARAN
1.	Ibtidaiyah	Tilāwati Juz ‘Amma Sūrat Yāsīn Sūrat al-Wāqi`ah Sūrat al-Mulk Sūrat as-Sajadah Sūrat ad-Dukhān Sūrat al-Kahfi Ad’yah Asmā’ul Ḥusnā Tahlīl Terjemah Asmā’ul Ḥusnā Faṣalātan Ilmu Tajwīd
2.	Tsanawiyah	Alquran Bin Naẓar Faṣalātan Terjemah Sūrat Muhimmah
3.	Aliyah	Al-Qur’ān Bil Ghoib
4.	I’dadiyah	Faṣalātan Juz ‘Amma Sūrat Yāsīn Sūrat al-Wāqi`ah Sūrat al-Mulk Ilmu Tajwīd

Lampiran 23

MATA PELAJARAN
MADRASAH DINIYAH AR-RISALAH
LIRBOYO KOTA KEDIRI

Tingkat Ibtidaiyyah

Mata Pelajaran	Kitab Pelajaran
Al Qur'an	Al Qur'an
Ilmu Tauḥīd	Nūrul Imān Asmā'ul Ḥusnā Nūrul Mubtadi' Zādul Mubtadi' 'Aqīdatul Awām Tijānud Darori
Ilmu Fiqih	Ad'iyah Faṣalātan Hidāyatul Mubtadi' Mabādiul Fiqhiyyah Safīnatus Ṣalāh Tanwīrul Hijā
Ilmu Naḥwu	al-Awāmilul Jurjani
Ilmu Ṣaraf	Qā'idah Naṡar Taṣrīf Iṣṭilaḥiy
Ilmu Tajwīd	Hidāyatul Qāri' Tanwīrut Ṭullāb Tanwīrul Qāri' Fatḥur Raḥman Hidāyatuṣ Ṣibyān Tuḥfatul Aṭfāl
Ilmu Ḥadīṡ	Arba'īn Nawāwi
Ilmu Akhlāq	Adabus Ṣibyān Naẓmul Akhlāq Naẓmul Maṭlab Waṣaya
Ilmu Khaṭ	Buku Kaligrafi
Sejarah Islam	Tārīkhul Ulamā' Tārīkhul Auliyā'

	Tārīkhul A'immah Tārīkhul Anbiyā' Isrā' Mi'rāj ASWAJA
Ilmu Hitung	Hisāb A Ba Ja Dun
Ilmu Lughah	Bahasa Arab
Muḥāfaẓah	-
Imlā'	-
Akhlāq	-

Tingkat Tsanawiyyah

Mata Pelajaran	**Kitab Pelajaran**
Al Qur'an	Al Qur'an Taḥfiẓul Qur'ān
Ilmu Tauḥīd	Al Khorīdatul Bahiyyah as-Sanūsiyyah al-Jawāhirul Kalāmiyyah
Ḥadīṡ	Bulūghul Marām
Ilmu Fiqih	Sullamut Taufīq Fatḥul Qorīb Uyūnul Masāil Linnisā'
Ilmu Naḥwu	al-Jurūmiyyah al-Fushulul Fikriyyah al-'Imriṭi
Ilmu Ṣaraf	Al-Amṡilatut Taṣrīfiyyah Al-Qowā'idus Ṣarfiyyah Al-Maqṣūd Al-I'lal
Ilmu Tajwīd	Jazariyyah
Ilmu Akhlāq	Taisīrul Khalāq Tahliyyah Wat Targhīb Ta'līmul Muta'allim
Sejarah Islam	Khulaṣah Nūrul Yaqīn ASWAJA

Ilmu Imlā’	Qawā’idul Imlā’
Ilmu Lughah	Bahasa Arab
Muḥāfaẓah	-
Imlā’	-
Akhlāq	-

Tingkat Aliyah

Mata Pelajaran	**Kitab Pelajaran**
Tafsīr	Tafsīr Jalālain
Ilmu Tafsīr	Itmāmud Dirāyah
Ilmu Tauḥīd	Kifāyataul ‘Awām Ummul Barāhin
Ḥadīs	Riyāḍus Ṣāliḥīn
Ilmu Ḥadis	Baiqūniyyah
Ilmu Fiqih	Fatḥul Mu’īn
Ilmu Uṣūl Fiqih	Waraqāt Tashīlut Ṭuruqāt
Qā’idah Fiqhiyyah	Farā’idul Bahiyyah
Ilmu Balāghah	Jauharul Maknūn
Ilmu Manṭīq	Sullamul Munauroq
Ilmu Arūḍ	Arūḍ
Ilmu Wāriṡ	Uddatul Farīḍ
Ilmu Akhlāq	Mauiẓotul Mu’minīn
Insyā’	Insyā’
Muḥāfaẓah	-
Imlā’	-

Lampiran 24

TATA TERTIB
MADRASAH DINIYAH AR-RISALAH
LIRBOYO KOTA KEDIRI

A. PENGAJAR

I. Kewajiban

Pasal I : Umum

1. Mendidik dan mengajar murid
2. Mengatur ketertiban dan kedisiplinan dalam kelas masing-masing
3. Mengawasi kebersihan, kesejahteraan dan kesopanan murid
4. Berusaha memajukan anak didiknya terutama dengan jalan musyafahah dan mengulangi pelajaran yang telah lewat
5. Membuat sepuluh atau dua puluh soal tiap tamrin

Pasal II : Akan Mengajar

1. Mempersiapkan pelajaran yang akan diajarkan
2. Musyawaroh antar pengajar kelasnya dalam memberi makna, pengertian atau kefahaman murod dan membuat soal ujian/tamrin, agar seragam
3. Berpakaian seragam yang telah ditentukan dengan sopan syar'an wa adatan
4. Datang di ruang kelas tepat waktu
5. datang di ruang guru 15 menit sebelum jam pelajaran

Pasal III : Di Dalam Kelas

1. Meneliti absen murid
2. Berlaku adil terhadap semua murid
3. Berbicara dengan sopan
4. Berdiri dalam memberikan pelajaran yang membutuhkan untuk berdiri
5. Mengelilingi dan mengawasi murid diwaktu ujian dan tamrin
6. Mendisiplinkan waktu
7. Membubuhkan tandatangan saat absen di kelas

Pasal IV : Di Luar Kelas

1. Mengawasi anak didiknya, terutama mengenai pelajaran dan pelaksanaan belajar
2. Mendatangi rapat atau sidang yang telah ditentukan
3. Bila tidak mengajar/ udzur, sehari sebelumnya harus memberi tahu pada Mufattisy dan izin kepada Pengasuh
4. Mentaati seluruh keputusan rapat/sidang
5. Menjadi contoh dan tauladan dalam hal segala kebaikan

II. Larangan

1. Menambah pelajaran
2. Merubah pelajaran sebelum mendapat izin dari Mufattisy
3. Memberi keterangan yang tidak dapat diikuti oleh anak didiknya
4. Mengumpulkan satu bagian dengan bagian lain
5. Menjalankan sesuatu yang dapat merendahkan kehormatan/muru'ah
6. Berguarau/banyol, terutama dengan anak didiknya
7. Pulang sebelum waktunya habis
8. Berkuku panjang dan berambut gondrong

III. Sanksi

Barang siapa yang tidak mengindahkan tata tertib ini, harus tunduk atas keputusan kepala madrasah/mudir

B. MURID

I. Kewajiban

Pasal I : Akan Masuk Sekolah

1. Menyediakan alat-alat belajar
2. Berpakaian seragam yang telah ditentukan dengan sopan syar'an wa adatan
3. Datang di ruang kelas tepat waktu
4. Menjaga ketertiban dan kesopanan
5. Berdo'a sebelum pelajaran dimulai dan setelahnya

Pasal II : Dalam Kelas

1. Duduk dengan rapi
2. Muhafadhoh sampai jam pelajaran
3. Setia dan sedia menerima pelajaran
4. Menjaga ketertiban dan kebersihan

Pasal III : Di Luar Kelas

1. Menghormati kitab-kitabnya
2. Mengikuti belajar
3. Berbudi baik dan sopan haliyah dan maqoliyah

II. Larangan

Pasal I : Di Dalam Kelas

1. Membuat gaduh dan tepuk tangan
2. Keluar masuk tanpa izin

3. Berbuat khianat diwaktu tamrin atau ujian
4. Berambut gondrong dan kuku panjang
5. Berambut semiran

Pasal II : Di Luar Kelas

1. Beramai-ramai diwaktu pulang
2. Menggangu kelas lain
3. Masuk kelas lain yang masih sekolah

III. Sanksi

Barang siapa yang tidak mengindahkan tata tertib ini, harus tunduk atas keputusan Pimpinan Madrasah atau Mudir

Lampiran 25

JUMLAH PESANTREN TAHUN 2006-2007
BERDASARKAN TIPENYA

NO.	PROPINSI	JUMLAH	TIPE		
			SALAFIYAH	KHALAFIYAH	KOMB.
1	Nanggroe AD	1.044	317	169	558
2	Sumatera Utara	220	34	127	59
3	Sumatera Barat	210	54	92	64
4	Riau	139	16	52	71
5	Jambi	168	14	76	78
6	Sumatera Selatan	263	88	72	103
7	Bengkulu	53	20	11	22
8	Lampung	531	124	315	92
9	Bangka Belitung	28	6	9	13
10	Kepulauan Riau	26	9	11	6
11	DKI Jakarta	88	12	32	44
12	Jawa Barat	4.326	1.410	637	2,279
13	Jawa Tengah	2.578	1.665	363	550
14	Dl Yogyakarta	183	60	83	40
15	Jawa Timur	4.408	822	1.177	2,409
16	Banten	1.682	770	283	629
17	Bali	108	50	21	37
18	NTB	345	23	252	70
19	NTT	17	6	5	6
20	Kalbar	147	13	62	72
21	Kalteng	56	16	9	31
22	Kalsel	219	90	78	51
23	Kaltim	119	30	47	42
24	Sulut	16	2	12	2
25	Sulteng	74	13	5	56
26	Sulsel	244	24	161	59
27	Sultera	75	1	35	39
28	Gorontalo	21	-	15	6
29	Sulbar	40	-	36	4
30	Maluku	21	7	8	6
31	Maluku Utara	13	4	3	6
32	Papua	24	2	15	7
33	Irian Jaya Barat	20	6	8	6

Jumlah	17.506	5.708	4.281	7.517
%	100	32,6	24,5	42,9[1]

[1]Dirjen Pendis, *Statistik Pendidikan Agama dan Keagmaan Tahun Pelajaran 2006-2007,* Jakarta: Dirjen Pendis Depag RI, 2007, 127.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis buku ini, **Ali Anwar**, lahir di Demak, Jawa Tengah, pada tanggal 3 Mei 1964, adalah Direktur dan Dosen Program Pascasarjana IAIT Kediri, Lektor Kepala dalam Sejarah Pendidikan Islam di Jurusan Tarbiyah STAIN Kediri, dan Wakil Ketua Asosiasi Peneliti Sosial Keagamaan Indonesia (APSKI). Penulis sekarang bertempat tinggal di Jl. Sunan Ampel RT 01 RW 02 No. 18 Rejomulyo Kota Kediri, Kode Pos: 64129. E-mail: ali_anwar03@yahoo.co.id

Biografi akademik penulis dimulai di MI Diniyah Mazroatul Huda Sari, Gajah di sore hari dan SDN Sari I, Gajah di pagi hari. Penulis lulus dari dua lembaga itu tahun 1977. Setelah itu penulis menimba ilmu di MTs Marzoatul Huda, Wonorenggo lulus 1982 dan Madrasah Aliyah Marzoatul Huda, Wonorenggo lulus 1984. Kesemua lembaga pendidikan yang telah disebutkan berada di Kota Wali Demak. Selanjutnya penulis secara bersamaan belajar di Pendidikan ar-Robithah Pesantren Lirboyo Kediri dan di Fakultas Tarbiyah IAIT Kediri dan lulus dari lembaga yang disebutkan terakhir tahun 1990. Sejak tahun 1984 sampai dengan 1988 penulis nyantri di Pesantren Lirboyo Kediri. Atas beasiswa dari Depag RI penulis dapat mengakhiri studi Program Magister di Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1997 dan Program Doktor dari Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2008.

Penulis juga telah mengikuti beberapa kursus dan pelatihan di antaranya: Kursus Bahasa Inggris di Basic English Course (BEC) Pelem, Pare, Kediri (September 1990-Februari 1991), Kursus TOEFL Preparation di IKIP Malang (Maret-Mei 1999), Pelatihan Metodologi Penelitian Sosial Keagamaan di Sekolah Pascasarjana UGM Yogjakarta (12 Pebruari-12 Juli 2007), dan Pelatihan Metodologi Penelitian Sosial Keagamaan Tingkat Lanjut di Sekolah Pascasarjana UGM Yogjakarta (8 September-30 Nopember 2008).

Sejak 2007, mantan Pembantu Rektor I IAIT Kediri periode 2000-2004, mantan Asisten Direktur I Program Pascasarjana IAIT Kediri periode 2004-2008, dan alumnus program doktor UIN Jakarta yang mendapatkan predikat Cumlaude/Terpuji ini telah menulis 5 artikel yang diterbitkan oleh jurnal ilmiah terakreditasi nasional. Pertama, ”Strategi Survival Pendidikan Tradisional Islam: Studi Kasus Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadi’in Lirboyo,” *Nizamia: Jurnal Pendidikan Islam,* Surabaya: Fakultas Tarbiyah IAIN, Vol 10 Nomor 1, 2007. Kedua, ”Pesantren pada Masa Kolonial dan Pasca Kemerdekaan,” *Sosio-Religia: Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial,* Yogjakarta: Lingkar Studi Ilmu Agama dan Ilmu Sosial (LinkSAS), Vol. 7, No. 2, Pebruari 2008. Ketiga, ”Mencairnya *Bounded System* Kebudayaan Pesantren Tradisional.”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial,* Jember: Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Jember, Vol. IX, Maret 2008. Keempat, ”Pesantren dan Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia,” *Sosio-Religia: Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial,* Yogjakarta: Lingkar Studi Ilmu Agama dan Ilmu Sosial (LinkSAS), Vol. 7, No. 4, Agustus 2008. Dan kelima, "Pengaruh Hukum Pasar terhadap Pergeseran Tradisi Pesantren: Studi Kasus di Pesantren Lirboyo Kediri," *Sosio-Religia: Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial*, Yogjakarta: Lingkar Studi Ilmu Agama dan Ilmu Sosial (LinkSAS), Vol. 9, No. 3, Mei 2010.

Setidaknya ada 3 artikel yang ditulis untuk jurnal lainnya sejak 2007: Pertama, ”Takhrij 6 Ḥadīth tentang Pendidikan,” *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, Kediri: LP3M STAIN, Vol. 5 No. 1 Januari 2007; kedua, ”Melacak Akar Kata dan Lembaga Pesantren,” *Jurnal at-Tarbawiy: Kajian Kependidikan Islam,* Surakarta: Jurusan Tarbiyah STAIN, Vol. 5 No. 1 Mei-Oktober 2007; dan ketiga, ”Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Pembaruan Pendidikan di Pesantren,” *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam,* Kediri: STAIN, Vol. 17 No. 1 Januari 2008.

Sampai kini penulis telah menulis 5 buku ber-ISBN. Yang pertama, “Eksistensi Pendidikan Tradisional di Tengah Arus Modernisasi Pendidikan: Studi terhadap Kelangsungan Madrasah Hidayatul Mubtadi’in di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri”, dalam Irwan Abdullah dkk. (Ed.), *Agama, Pendidikan Islam, dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren,* (Yogjakarta: Sekolah Pascasarjana UGM dan Pustaka Pelajar, 2008). Kedua, buku ini yang edisi pertamanya diterbitkan oleh IAIT Press Kediri pada bulan September 2008. Ketiga, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah,* (Kediri: IAIT Press, 2009). Keempat, *Statistika untuk Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya dengan SPSS dan Excel*, (Kediri: IAIT Press, 2009). Kelima, *Takhrij al-Hadith dengan Komputer,* (Kediri: IAIT Press, 2010).
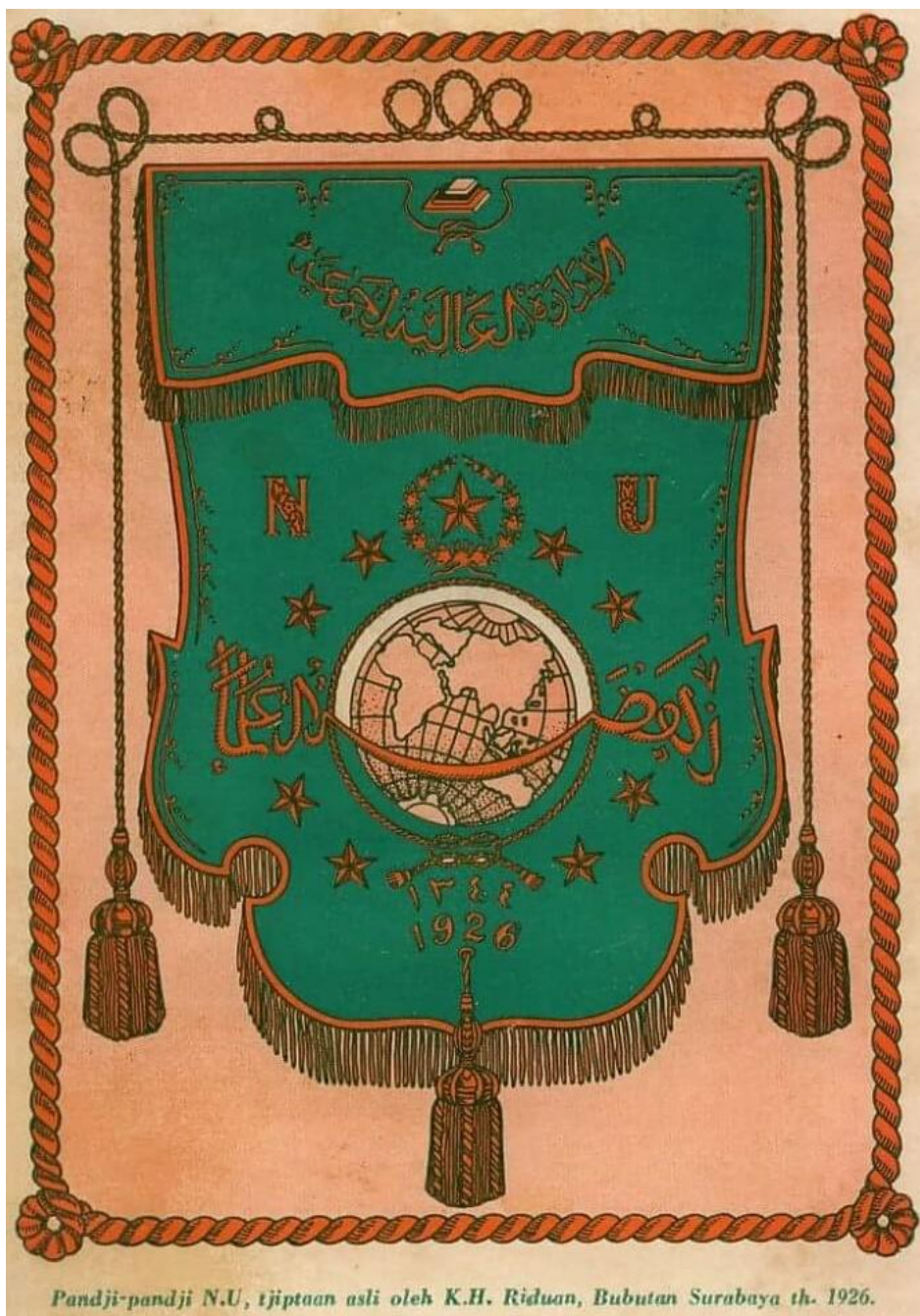
Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

PEMBARUAN PENDIDIKAN DI PESANTREN

LIRBOYO

KEDIRI

Lembaga pendidikan tradisional di Pesantren Lirboyo yaitu Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadi'in tetap survive ketika berhadapan dengan lembaga yang lebih modern, yaitu MTs dan MA HM Tribakti al-Makhrusiyah dan SD, SMP, dan SMA ar-Risalah dikarenakan tiga hal. Pertama, lembaga pendidikan tradisional ini masih sesuai dengan kecenderungan sosio-kultural komunitas lingkungannya, yaitu masyarakat yang menganggap berfaham Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Kedua, lembaga pendidikan tradisional tersebut telah berhasil mengantarkan santrinya untuk menguasai kitab kuning yang dianggap sebagai ilmunya ulama salaf yang dipercayai kebenarannya. Ketiga, dikarenakan tradisi dan norma yang dikembangkan lembaga pendidikan tradisional tersebut memungkinkan lestarinya kharisma kyai, maka lembaga pendidikan tradisional tersebut dipertahankan.

Kesimpulan penelitian ini berbeda dengan temuan Karel A. Steenbrink bahwa ketika diperkenalkan lembaga pendidikan yang lebih teratur dan modern, lembaga pendidikan tradisional ternyata tidak begitu laku dan banyak ditinggalkan siswanya. Ia juga berbeda dengan kesimpulan Clifford Geertz bahwa pesantren akan tetap eksis sepanjang ia mendirikan madrasah yang memuaskan secara religius bagi penduduk desa dan sekolah yang berfungsi membantu pertumbuhan Indonesia Baru.

Penelitian ini menemukan bahwa dari 9.163 santri Lirboyo saat ini, 5.720 (62,42%) hanya mendalami kitab kuning di Madrasah Hidayatul Mubtadi'in (MHM), 876 (9,5%) menjadi siswa MTs dan MA HM Tribakti al-Mahrusiyah, dan 312 (3,4%) menjadi siswa SD, SMP, dan SMA ar-Risalah, sementara sisanya, 2.255 (24,6%) menjadi santri di pesantren-pesantren unit lainnya yang hanya menyelenggarakan pendidikan diniyah.

IAIT PRESS

Penerbit Pustaka Pelajar
Celeban Timur UH III/548
Yogyakarta 55167
e-mail : pustakapelajar@telkom.net